

Jurnal Budget

Vol. 5, No. 1, 2020

ISSN 2541-5557

Pusat Kajian Anggaran

Badan Keahlian DPR RI

Halaman ini sengaja dikosongkan

SUSUNAN DEWAN REDAKSI

JURNAL BUDGET

Penanggung Jawab

Dr. Asep Ahmad Saefuloh, S.E., M.Si.

Pemimpin Redaksi

Rendy Alvaro, S.Sos

Redaktur

Dahiri, S.Si., M.Sc.

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M.

Editor

Marihot Nasution, SE., M.Si.

Sekretariat

Husnul Latifah, S.Sos.

Memed Sobari

Musbiyatun

Hilda Piska, SIP

Jurnal ini diterbitkan oleh Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI. Isi dan hasil penelitian dalam tulisan-tulisan di jurnal ini sepenuhnya tanggung jawab para penulis dan bukan merupakan pandangan resmi Badan Keahlian DPR RI.

Jurnal ini diterbitkan dua kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember berdasarkan hasil penelitian dan analisis mengenai isu-isu keuangan negara terkini yang dapat menjadi dukungan substansi bagi pelaksanaan fungsi anggaran dan pengawasan DPR RI.

Halaman ini sengaja dikosongkan

PENGANTAR REDAKSI

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, Jurnal Ilmiah Jabatan Fungsional Analis APBN yang bernama “*Budget*” kembali terbit dan memasuki volume kelima. Jurnal Budget Volume 5 Edisi 1 merupakan hasil dari proses penulisan dan redaksional yang dimulai dari awal tahun 2020 hingga terbit pada bulan Juni 2020.

Terbitan Jurnal Budget ini merupakan hasil kerja redaksi dan para Analis APBN dari Pusat Kajian Anggaran, sebagai penulis utama, dan tentunya pimpinan Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian DPR RI beserta jajarannya. Redaksi tetap memberikan kesempatan bagi semua pihak yang berkepentingan untuk ikut memberikan masukan dan menentukan tata kelola yang terbaik serta ikut berkontribusi dalam Jurnal Budget ini.

Jurnal Budget dalam setiap terbitan berisi materi yang membahas seputar permasalahan dalam keuangan negara yang merupakan lingkup tugas dari Jabatan Fungsional Analis APBN. Sebagai *output* yang diterbitkan di lingkungan parlemen, yaitu MPR/DPR/DPD RI maka diharapkan materi yang disajikan di dalamnya, meskipun bersifat ilmiah dan pembahasan keilmuan/akademik, namun tetap mampu menjadi sumber informasi, memberikan kontribusi data-data hingga rekomendasi bagi tugas dan kewenangan khususnya Anggota DPR RI.

Meskipun telah mencapai volume kelima, jurnal kami masih tak luput dari kekurangan. Oleh karena itu, Redaksi mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari semua pihak atau *stakeholders*, demi perbaikan dan peningkatan kualitas jurnal sebagaimana harapan kita semua.

Redaksi berharap semoga artikel-artikel ilmiah yang termuat dalam jurnal ini mampu memberikan manfaat bagi analis APBN, peneliti, anggota parlemen, maupun pihak akademisi dan profesional yang mempunyai minat dalam penelitian terkait isu-isu keuangan negara.

Dewan Redaksi

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jurnal Budget

Vol. 5, No. 1, 2020

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi	v
Daftar Isi	vii
Analisis Penguatan UMKM dan Dampaknya Bagi Perekonomian Nasional Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Covid-19	
<i>Dahiri</i>	1
Dampak Harga Komoditas Terhadap Kredit Bermasalah di Indonesia	
<i>Robby Alexander Sirait</i>	15
Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dan Indeks Ruang Fiskal (IRF) Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2020 pada 122 Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia	
<i>Slamet Widodo</i>	30
Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Langsung di ASEAN	
<i>Dwi Resti Pratiwi</i>	47
Memahami Sebaran Kinerja Pendidikan Indonesia: Studi Neraca Pendidikan Daerah	
<i>Marihot Nasution</i>	67
Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak	
<i>Martha Carolina</i>	84
Evaluasi Dana Desa Dilihat dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun	
<i>Ratna Christianingrum</i>	100
Pengaruh Masuknya Penanaman Modal Langsung Terhadap Pendapatan Pajak Indonesia Periode 1972-2018	
<i>Rastri Paramita</i>	114
Analisis Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia	
<i>Rendy Alvaro</i>	130

Analisis Penguatan UMKM dan Dampaknya Bagi Perekonomian Nasional Sebagai Upaya Mengatasi Dampak Covid-19

Dahiri

Ringkasan

Wabah virus Corona sudah banyak memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Dampaknya di Indonesia mulai dari keterpurukan sektor perhotelan, penerbangan hingga terjadi pengurangan pekerja baik di sektor formal maupun informal. Kondisi ini akan mengurangi pendapatan masyarakat sehingga konsumsi rumah tangga juga akan turun. Turunnya konsumsi rumah tangga jelas akan berdampak pada penurunan perekonomian nasional, karena selama ini perekonomian nasional didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Terpukulnya perekonomian nasional tersebut telah berdampak pada usaha makro maupun UMKM. Padahal UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pada tahun 2018, UMKM mendominasi unit usaha di Indonesia sebesar 99,99 persen dari total unit usaha sebanyak 64,20 juta. Sedangkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,67 persen dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,55 persen. Namun sebelum adanya wabah, UMKM sendiri sudah memiliki persoalan dalam pengembangan usahanya yaitu regulasi belum terintegrasi, kinerja ekspor rendah, dan sulitnya akses permodalan. Karena itu pentingnya penguatan UMKM untuk menopang perekonomian nasional.

Hasil analisis data UMKM dan perekonomian nasional diperoleh kesimpulan bahwa UMKM memiliki dampak signifikan bagi peningkatan perekonomian nasional. Sedangkan pada penyerapan tenaga kerja, hanya UMK yang memiliki dampak signifikan untuk penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan hasil tersebut, upaya yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk penguatan UMKM yaitu **pertama**, permodalan harus dipusatkan pada satu lembaga supaya lebih efisien dan efektif dalam penyalurannya, sehingga keuangan negara lebih optimal dalam memberikan stimulus permodalan usaha. Namun lembaga tersebut harus yang membidangi usaha baik UMKM maupun UB. **Kedua**, pemerintah harus memberikan insentif atau subsidi untuk ekspor bagi UMKM, sehingga UMKM di Indonesia dapat bersaing pada pasar internasional. **Ketiga**, akses permodalan dan insentif harus dimuat dalam regulasi berupa undang-undang supaya penguatan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Dampak Harga Komoditas Terhadap Kredit Bermasalah di Indonesia

Robby Alexander Sirait

Ringkasan

Perbankan memiliki peranan penting terhadap kinerja perekonomian suatu negara, yang secara khusus melalui fungsi intermediasi (*financial intermediary function*) yang dijalankan oleh perbankan. Di sisi lain, pelaksanaan fungsi intermediasi dimaksud sangat bergantung pada tingkat kesehatan suatu bank atau industri perbankan itu sendiri. Salah satu indikator kesehatan suatu bank atau industri perbankan adalah rasio antara nilai kredit bermasalah dengan total kredit yang dikucurkan oleh bank atau industri perbankan, yang lebih dikenal dengan sebutan *Non-Performing Loans* (NPL).

Dalam berbagai literatur, faktor-faktor atau determinan yang memengaruhi NPL dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yakni determinan makroekonomi (*the macroeconomic determinants*) dan determinan yang bersumber dari internal bank itu sendiri (*the bank-specific determinants*). Salah satu determinan makroekonomi yang memengaruhi NPL adalah perubahan atau pergerakan harga komoditas. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga komoditas terhadap NPL di Indonesia, dengan menggunakan data kuartalan pada periode 2003-2019 dan metode *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL).

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa harga komoditas berpengaruh signifikan terhadap NPL, dimana rasio NPL akan menurun ketika harga komoditas naik. Secara kuantitatif, setiap kenaikan 1 persen harga komoditas akan menurunkan NPL sebesar 0,862 pada jangka pendek dan 4,088 pada jangka panjang. Hasil lain dari penelitian ini adalah rasio NPL akan menurun ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, nilai tukar rupiah terdepresiasi dan inflasi yang menurun.

Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) dan Indeks Ruang Fiskal (IRF) Terhadap Dana Perimbangan Tahun 2015-2020: Studi pada 122 Kabupaten Daerah Tertinggal di Indonesia

Slamet Widodo

Ringkasan

Pelaksanaan desentralisasi fiskal di tahun 2001 bertujuan untuk menghilangkan kesenjangan antar daerah, dan memperbaiki porsi pembagian penerimaan negara antara pusat dan daerah. Penyerahan kewenangan pun diikuti dengan pengalokasian anggaran transfer ke daerah. Kebijakan ini semakin memudahkan daerah dalam menjalankan urusan-urusan yang dilimpahkan oleh pemerintah pusat. Daerah dengan sumber daya alam berlimpah akan menikmati sumber pendanaan yang lebih baik dibandingkan daerah yang tidak memiliki sumber daya alam.

Daerah tertinggal dicirikan sebagai daerah dengan sumber daya alam yang minim yang menyebabkan tingginya ketergantungan keuangan kepada pemerintah pusat dalam bentuk dana perimbangan. Hal ini menyebabkan rendahnya kemandirian daerah tertinggal karena minimnya sumber pendapatan daerah. Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) rata-rata daerah tertinggal sepanjang tahun 2015-2018 sebesar 0,75 atau berkategori sedang. Beberapa daerah tertinggal di Papua dan Papua Barat memiliki IKF tinggi karena adanya dana Otonomi Khusus. Dari sisi ruang fiskal (IRF), keleluasaan daerah tertinggal dalam menentukan sendiri prioritas belanjanya sebesar 36 persen sepanjang tahun 2016-2018. Salah satu tujuan desentralisasi fiskal adalah menghilangkan kesenjangan horizontal antar daerah yang pada akhirnya harus tercermin dalam proses penganggaran dimana daerah yang lebih membutuhkan (daerah tertinggal) akan mendapatkan alokasi lebih banyak dibanding daerah lain yang lebih beruntung.

Tujuan penelitian ini menganalisis pengaruh IKF dan IRF terhadap dana perimbangan periode tahun 2015-2018 di 122 kabupaten daerah tertinggal di Indonesia. Data yang digunakan adalah data dana perimbangan, IKF, IRF periode 2015-2018 yang bersumber dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya. Alat analisis menggunakan regresi data panel dengan *Fixed Effect Model*. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa variabel IKF secara signifikan berpengaruh positif terhadap dana perimbangan dan variabel IRF signifikan berpengaruh negatif terhadap dana perimbangan.

Dalam upaya pengentasan daerah tertinggal, pemerintah perlu memperhitungkan ruang fiskal yang kecil dan kapasitas fiskal yang rendah

sebagai indikator dalam perhitungan dana perimbangan bagi daerah tertinggal, tidak hanya indikator jumlah penduduk saja.

Analisis Faktor Determinasi Penanaman Modal Asing (PMA) Langsung di ASEAN

Dwi Resti Pratiwi

Ringkasan

Penanaman Modal Asing (PMA) langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara berkembang karena dapat memberikan sarana untuk meningkatkan modal dengan biaya yang efektif. Sejak diresmikannya ASEAN *Economics Community* (AEC) kebijakan di bidang investasi menjadi hal yang krusial. Ditambah lagi aliran masuk FDI ke ASEAN semakin meningkat di tiap tahunnya di tengah ketidakpastian global. Dengan demikian, semakin penting dilaksanakan penelitian mengenai FDI negara ASEAN, terutama faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga kawasan ASEAN semakin mampu menarik FDI, baik FDI dari antara negara ASEAN (intra ASEAN) maupun FDI dari negara *partner*. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor determinasi FDI di ASEAN, khususnya 6 negara anggota yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Thailand, Filipina dan Vietnam. Metode analisis yang digunakan ialah analisis data panel dengan *common effect model*. Adapun data *cross section* berjumlah enam negara dengan kurun waktu 12 tahun yaitu 2007 hingga 2018. Variabel independen yang digunakan yaitu *market size* (diproksikan dengan PDB), nilai kurs, *trade openness*, tingkat suku bunga, inflasi dan stabilitas politik.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan perilaku dari variabel dependen (FDI) sebesar 71,2 persen, sedangkan sisanya, sebesar 28,2 persen perilaku dari variabel dependen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan di dalam model ini. Besarnya FDI di keenam negara ASEAN yang diteliti dipengaruhi secara signifikan oleh *market size* (PDB), nilai kurs, *trade openness*, tingkat suku bunga, dan stabilitas politik. Seluruh variabel yang digunakan juga memiliki arah korelasi yang sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan, di mana tingkat *market size*, depresiasi nilai tukar, *trade openness*, dan stabilitas politik memiliki pengaruh yang positif terhadap FDI, sedangkan tingkat inflasi dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif. Namun, berdasarkan hasil signifikansi masing-masing variabel tersebut, ditemukan bahwa variabel inflasi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya FDI di ASEAN walaupun memiliki arah korelasi yang sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan.

Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa menjaga stabilitas makro ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu

determinan yang kuat dalam merangsang masuknya FDI. Terdapat beberapa sektor yang diminati di ASEAN yaitu sektor jasa keuangan, perdagangan serta *real estate*. Sehingga penguatan ketiga sektor harus tetap dipertahankan. Selain menjaga faktor ekonomi makro, pemerintah di negara ASEAN perlu menjaga kestabilan politik dan keamanan di masing-masing negaranya. Hal ini tidak dipungkiri menjadi salah satu faktor penting bagi pengusaha dalam menempatkan modalnya di suatu negara. Terutama dalam kondisi krisis ekonomi seperti ini, pemerintah perlu mengandalkan faktor non ekonomi dalam menarik investor seperti menjanjikan stabilitas politik, keamanan, kemudahan berusaha serta perizinan.

Memahami Sebaran Kinerja Pendidikan Indonesia: Studi Neraca Pendidikan Daerah

Marihot Nasution

Ringkasan

Studi ini menguji perbedaan hasil pembangunan pendidikan di Indonesia dengan membedakan hasil tersebut berdasarkan wilayah. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kelemahan dan kekurangan tiap kawasan agar pembangunan berikutnya diarahkan untuk menutupi kelemahan yang ada. Pembandingan kawasan dilakukan dengan menggunakan uji beda kawasan barat dan timur atas kinerja pembangunan pendidikan yang tercatat dalam Neraca Pendidikan Daerah tahun 2018/2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Hasil penelitian diketahui bahwa kinerja pendidikan di kawasan barat dan timur Indonesia memiliki perbedaan yang signifikan secara statistik. Terutama dalam kinerja yang diukur dari angka partisipasi murni dan hasil ujian nasional di semua jenjang pendidikan yang diuji. Kawasan timur memiliki kinerja pendidikan yang lebih lemah daripada kawasan barat Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah jika ingin mengurangi ketimpangan pembangunan di sektor pendidikan.

Analisis Pengaruh Profitabilitas dan Leverage Terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Martha Carolina

Ringkasan

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam optimalisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak untuk mendorong investasi dan daya saing. Upaya yang dilakukan pemerintah yaitu ekstensifikasi, intensifikasi, dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP). Namun, target penerimaan negara di sektor pajak belum dapat terpenuhi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) realisasi penerimaan pajak tahun 2019 sebesar Rp1.332,1 triliun. Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hanya 84,4 persen atau lebih rendah (*short fall*) sebesar Rp245,4 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun. Begitu pula, penerimaan pajak tahun 2020 juga diperkirakan akan mengalami penurunan yang signifikan akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) yaitu sebesar 8,7 persen terhadap PDB lebih kecil dibandingkan tahun 2014-2019 sebesar 10,5 persen terhadap PDB.

Praktik penghindaran pajak muncul karena ada celah dalam undang-undang perpajakan. Persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Praktik penghindaran pajak merupakan perlawanan aktif Wajib Pajak (WP) yang menyebabkan berkurangnya penerimaan negara. Faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak diantaranya profitabilitas (ROA) dan leverage (DER) perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA dan DER secara bersama-sama (simultan) terhadap praktik penghindaran pajak, pengaruh ROA terhadap praktik penghindaran pajak, dan pengaruh DER terhadap praktik penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2015-2018. Variabel dependen praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) diprososikan dengan CETR, variabel independen yang digunakan yaitu ROA dan DER.

Hasil penelitian menjelaskan pengaruh ROA dan DER perusahaan berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap praktik penghindaran pajak (CETR). ROA berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin menekan tindakan praktik penghindaran pajak. DER menunjukkan tidak berpengaruh signifikan pada praktik penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan tidak memengaruhi adanya praktik penghindaran pajak.

Evaluasi Dana Desa Dilihat Dari Hubungan Antara Pagu Dana Desa dan Indeks Desa Membangun

Ratna Christianingrum

Ringkasan

Undang-Undang Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk menganggarkan Dana Desa yang diberikan kepada desa. Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa. Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/ lingkungan. IDM yang ada dapat mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Sehingga IDM dapat digunakan sebagai proksi *output* dari pengelolaan Dana Desa.

Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan ke desa. Besaran alokasi Dana Desa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan. Besaran alokasi Dana Desa yang terus mengalami peningkatan, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan pada tingkat desa. Sehingga penelitian ini akan melakukan evaluasi kebijakan Dana Desa, dilihat bagaimana pola hubungan antara besaran alokasi Dana Desa di setiap desa terhadap *output* kebijakan Dana Desa. Dalam hal ini *output* kebijakan Dana Desa dilihat dari nilai Indeks Desa Membangun dari masing-masing desa.

Hasil analisis menunjukkan bahwa besar pagu anggaran Dana Desa dan IDM memiliki hubungan searah yang signifikan. Hal ini berarti semakin besar pagu anggaran Dana Desa maka IDM yang dimiliki akan semakin besar pula. Namun korelasi yang dimiliki sangat lemah. Hal ini dikarenakan pembangunan di desa yang dibiayai oleh Dana Desa lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan yang dipotret oleh IDM. Hal ini diperparah dengan kebijakan formulasi yang digunakan untuk menentukan besar alokasi Dana Desa per desa. Adanya faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa seperti rendahnya kualitas SDM di desa dan belum optimalnya kualitas pendamping menjadi juga menjadi penyebab rendahnya hubungan antara pagu anggaran Dana Desa dan IDM.

Kebijakan Dana Desa sudah memberikan kontribusi pada pembangunan di desa, namun masih perlu adanya perbaikan antara lain perbaikan formulasi yang digunakan untuk menentukan besaran pagu anggaran Dana Desa per desa; perlu adanya sosialisasi tentang Dana Desa kepada seluruh masyarakat desa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat; peningkatan kualitas

pendamping desa; serta perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan *output* kebijakan Dana Desa yang lebih relevan untuk memotret pembangunan di desa.

Pengaruh Masuknya Penanaman Modal Langsung Terhadap Pendapatan Pajak Indonesia Periode 1972-2018

Rastri Paramita

Ringkasan

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui interaksi jangka pendek dan jangka panjang antara arus masuk FDI serta variabel pengendali keterbukaan perdagangan terhadap pendapatan pajak di Indonesia periode 1972-2018.

Dalam penelitian ini menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui interaksi jangka pendek dan jangka panjang antara arus masuk FDI dan keterbukaan perdagangan terhadap pendapatan pajak di Indonesia periode 1972-2018. Variabel dependen adalah pendapatan pajak. Sedangkan variabel independen adalah arus masuk FDI. Penentuan pendapatan pajak sebagai variabel dependen dikarenakan di Indonesia pengurangan pajak atau pemberian insentif fiskal masih menjadi senjata utama untuk menarik arus masuk FDI. Variabel pengendali yang digunakan berupa keterbukaan perdagangan. Variabel ini digunakan karena tingkat keterbukaan perdagangan suatu negara menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi besar kecilnya arus masuk FDI. Metode yang digunakan adalah *Vector Error Correction Model* (VECM), karena data stationer pada tingkat satu namun terkointegrasi.

Hasil penelitian ini adalah interaksi jangka pendek maupun jangka panjang arus masuk FDI dan variabel pengendali berupa keterbukaan perdagangan terhadap pendapatan pajak di Indonesia periode 1972 – 2018 memiliki hubungan positif dan signifikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Bond dan Samuelson (1986) yang menyatakan bahwa pendapatan pajak pemerintah negara tuan rumah dapat menurun dalam jangka pendek karena pembebasan pajak (*tax holiday*) sebagai alat penarik FDI di periode awal dan akan mengalami peningkatan dalam jangka panjang karena investasi asing tidak akan ditarik setelah periode *tax holiday*.

Analisis Determinasi Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah di Indonesia

Rendy Alvaro

Ringkasan

Dengan adanya desentralisasi fiskal, Pemerintah Daerah harus bisa menggunakan segala potensi yang ada di daerah secara optimal seperti: Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan potensi lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah supaya ke depan mampu menjadikan daerah tersebut mandiri secara nyata dan bertanggung jawab atau dapat mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber daerah lain dan juga dari pemerintah pusat.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) di 34 provinsi di Indonesia. Metode yang digunakan dalam studi ini adalah metode kuantitatif dengan analisis data panel.

Hasil penelitian ini menunjukkan pada model 1 bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal, kemudian DAK, DBH, dan PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap derajat desentralisasi fiskal. Pada model 2 menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, DAK dan DBH tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah.

Halaman ini sengaja dikosongkan

ANALISIS PENGUATAN UMKM DAN DAMPAKNYA BAGI PEREKONOMIAN NASIONAL SEBAGAI UPAYA MENGATASI DAMPAK COVID-19

Analysis of Strengthening UMKM and Its Impact For The National Economy as An Effort to Overcome The Impact of Covid-19

Dahiri

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: dahiri@dpr.go.id

Abstract

Corona virus has had a negative impact on the world economy, including Indonesia. In Indonesia this can be seen from the reduction in workers in both the formal and informational sectors. The beating of the national economy has had an impact on macro and UMKM businesses. Eventhough UMKM has an important role in increasing national economic growth. But before the outbreak, UMKM themselves had problems in developing their businesses, namely regulations that were not integrated, export performance was low, and difficulty in accessing capital.

This research uses quantitative methods and multiple regression models with the Cobb-Douglas production function. The results of the study concluded that UMKM had a significant impact in boosting the national economy. Whereas in terms of employment, only UMK have a significant impact on employment. Based on these results, efforts must be made by the government to strengthen UMKM. First, capital must be centered on one institution. Second, the government must provide incentives or subsidies for exports. Third, access to capital and incentives must be contained in regulations in the form of laws.

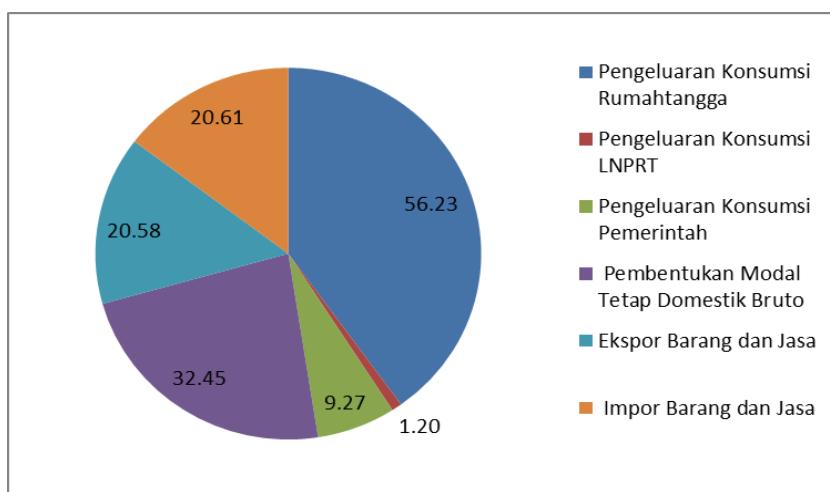
Keywords: *UMKM, the National Economy, Centered, Incentives or Subsidies*

1. Pendahuluan

Wabah Corona Virus Disease (Covid-19) memberikan dampak negatif terhadap perekonomian dunia, termasuk Indonesia. Menurut *International Monetary Fund*, perekonomian dunia diprediksi minus 3 persen di tahun 2020. Sedangkan perekonomian Indonesia diprediksi akan tumbuh 0,5 persen dari sebelumnya 5 persen di tahun 2019 (CNBC Indonesia, 2020). Lebih lanjut, dampak dari pandemi Covid-19 yang melanda tanah air terhadap ekonomi

Indonesia mulai dari keterpurukan sektor perhotelan, penerbangan hingga terjadi pengurangan pekerja baik di sektor formal maupun informal, per April jumlah pekerja yang dirumahkan mencapai 1,24 juta pekerja dari sektor formal dan sektor informal mencapai sekitar 265 ribu pekerja informal (Liputan6.com, 2020). Dengan banyaknya pekerja yang dirumahkan tersebut maka tingkat pengangguran akan bertambah, sehingga konsumsi rumah tangga juga akan menurun. Akibatnya perekonomian Indonesia juga ikut turun, karena perekonomian Indonesia didominasi oleh konsumsi rumah tangga dengan rata-rata sebesar 56,23 persen (Gambar 1).

Gambar 1. Rata-rata Distribusi PDB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran Tahun 2014-2019 (dalam persen)



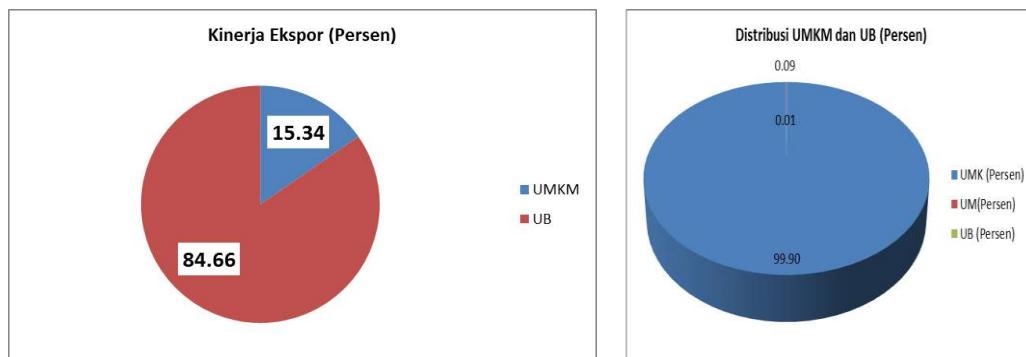
Sumber: BPS, diolah.

Kondisi banyaknya pekerja dirumahkan tersebut tidak lain karena banyak unit usaha yang tutup, karena putusnya rantai distribusi permintaan dengan penawaran dampak dari Covid-19 tersebut. Dampak virus tersebut tidak hanya memukul kondisi ekonomi makro, tetapi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) juga terkena dampaknya. Dengan pembatasan sosial yang dilakukan warga di seluruh dunia, membuat kegiatan bisnis jadi lesu sehingga UMKM pun terpukul, mulai dari penjualan dan pendapatan merosot hingga kesulitan dalam produksi (Kompas.com, 2020).

Terpukulnya perekonomian nasional dampak virus Corona telah berdampak, baik bagi usaha makro maupun UMKM. Padahal UMKM memiliki peran penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian nasional. Pada tahun 2018, UMKM mendominasi unit usaha di Indonesia sebesar 99,99 persen dari total unit usaha sebanyak 64,20 juta. Sedangkan kontribusi UMKM terhadap penyerapan tenaga kerja sebesar 96,67 persen dan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 57,55 persen. Namun sebelum adanya wabah, UMKM sendiri sudah memiliki persoalan dalam pengembangan usahanya. Persoalan **pertama** adalah regulasi, walaupun adanya regulasi mengatur kewirausahaan (UMKM), tapi regulasi tersebut belum terintegrasi. Hal tersebut dapat dilihat dari besarnya anggaran negara untuk pengembangan ini juga tersebar dalam anggaran

berbagai kementerian/lembaga (K/L) terkait. Berdasarkan data terkini dari Tempo.co. (2020) anggaran pembiayaan UMKM dan kewirausahaan tersebar di 18 K/L. **Kedua**, kinerja ekspor, kinerja ekspor UMKM masih rendah dibandingkan dengan usaha besar, padahal jumlah UMKM paling banyak dari pada usaha besar (Gambar 2). Rendahnya kontribusi UMKM terhadap ekspor masih menunjukkan bahwa ada persoalan dalam kinerja ekspornya.

Gambar 2. Perbandingan Jumlah dan Ekspor UMKM



Sumber : Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah.

Ketiga, akses permodalan, merujuk data Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), sebanyak 70 persen dari total hampir 60 juta unit UMKM di Indonesia belum mendapatkan akses pembiayaan dari perbankan (Detik, 2019). Ketiga persoalan tersebut merupakan sinyalemen negatif di dunia UMKM.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, maka perlunya suatu analisis penguatan UMKM dan dampaknya bagi perekonomian nasional khususnya tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Selain itu, penguatan UMKM juga merupakan upaya mengatasi dampak Covid-19 yang telah merusak perekonomian nasional.

Virus Corona telah memberikan dampak negatif bagi sektor UMKM, yaitu banyak usaha yang tutup hingga pekerjanya dirumahkan. Namun sebelum terjadi pandemi, UMKM juga telah memiliki beberapa permasalahan yaitu regulasi, kinerja ekspor, dan permodalan. Karena itu, urgensinya penguatan UMKM dan dampaknya bagi perekonomian nasional khususnya tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. Penguatan ini juga sebagai upaya mengatasi dampak pandemi Covid-19.

Tujuan penelitian urgensi penguatan UMKM ini yaitu sebagai berikut:

- Mengetahui dampak UMKM bagi tenaga kerja.
- Mengetahui dampak UMKM bagi pertumbuhan ekonomi.
- Mengetahui permasalahan regulasi, kinerja, dan akses permodalan serta solusinya.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Pengertian UMKM

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah:

- a. Usaha Mikro, merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria yaitu:
 - 1) memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil, yaitu usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah, adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan yang memenuhi kriteria yakni:
 - 1) memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
 - 2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah)

2.2. Produk Domestik Bruto (PDB)

PDB merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu negara dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit

usaha di suatu negara tertentu dalam periode tertentu. Jumlah nilai barang dan jasa akhir yang disediakan dari produksi harus sama dengan nilai barang yang digunakan. PDB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun. Sedangkan PDB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar.

PDB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui pergeseran, dan struktur ekonomi suatu negara. Sementara itu, PDB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga (BI, 2016).

2.3. Penelitian Terdahulu

Hamzah dan Agustien (2019) meneliti pengaruh perkembangan usaha mikro, kecil, dan menengah terhadap pendapatan nasional pada sektor UMKM di Indonesia. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa jumlah unit UMKM merupakan salah satu faktor yang mampu meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Dengan adanya penambahan jumlah usaha baru maka akan membutuhkan sejumlah tenaga kerja untuk melaksanakan usahanya tersebut, sehingga penambahan jumlah usaha baru akan menyerap tenaga kerja, dan meningkatkan *output* yang dihasilkan. Sedangkan tenaga kerja berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap pendapatan nasional pada sektor UMKM di Indonesia. Tenaga kerja merupakan faktor penting dalam proses produksi. Pengaruh tenaga kerja yang positif terhadap pendapatan nasional sektor UMKM menunjukkan bahwa setiap peningkatan tenaga kerja sektor UMKM akan menyebabkan pendapatan nasional mengalami peningkatan. Sebagian besar UMKM masih bersifat padat karya, karena tenaga kerja dipandang sebagai faktor produksi yang dapat digunakan untuk meningkatkan daya guna faktor produksi lainnya seperti dalam pengelolaan usaha dan pemanfaatan modal. Peningkatan tenaga kerja berarti akan meningkatkan produksi usaha, sehingga akan menaikkan PDB.

Hasil penelitian Hasri, et al. (2014) menyatakan bahwa UMKM di Kabupaten Ngawi dapat meningkatkan pertumbuhan perekonomian daerah. Hal ini dapat dilihat dari *omzet*/pendapatan per bulan seluruh UMKM Kabupaten Ngawi yaitu Rp808.000.000,00 atau setara dengan Rp9.696.000.000,00 per tahun. Dengan munculnya UMKM-UMKM di Kabupaten Ngawi memberikan dampak positif bagi upaya pengentasan kemiskinan melalui penyerapan tenaga kerja. Hal ini dibuktikan dengan adanya penyerapan tenaga kerja oleh seluruh UMKM Kabupaten Ngawi sebanyak 471 orang. Dengan adanya penyerapan tenaga kerja berarti terjadi pengurangan terhadap tingkat pengangguran di Kabupaten Ngawi.

Setiawan (2010) meneliti penyerapan tenaga kerja pada sektor Usaha Kecil dan Menengah (UKM) di Kota Semarang. Hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa jumlah unit usaha, nilai investasi, nilai *output* dan upah

minimum secara simultan berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Jumlah unit usaha, nilai investasi, dan upah minimum kota secara parsial berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja, sedangkan nilai *output* tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah tenaga kerja. Variabel yang paling berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada sektor UKM di Kota Semarang adalah jumlah unit usaha, sedangkan variabel nilai *output* memiliki pengaruh yang paling kecil di antara variabel yang lain.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Jenis penelitian ini kuantitatif deskriptif untuk menjelaskan hubungan antara variabel. Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder yang berbentuk runtun waktu (*time series*) selama periode tahun 2010-2018 yang diperoleh dari Kementerian Koperasi dan UMKM. Variabel dependen dalam penelitian adalah PDB dan tenaga kerja. Sedangkan variabel independen adalah Usaha Mikro, Kecil (UMK), Usaha Menengah (UM), Usaha Besar (UB), dan Usaha Mikro, Kecil, & Menengah (UMKM).

3.2. Persamaan Penelitian

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi berganda dengan fungsi produksi Cobb-Douglas yang persamaannya dinotasikan sebagai berikut (Gujarati, 2004):

$$Y = \beta_1 X_1^{\beta_2} X_2^{\beta_3} \dots X_n^{\beta_n} e^{\mu_n}$$

Kemudian persamaan di atas ditransformasi menggunakan logaritma natural, sehingga persamaan menjadi:

$$\ln Y = \beta_0 + \beta_2 \ln X_1 + \beta_3 \ln X_2 + \dots + \beta_n \ln X_n + \mu_n ; \beta_0 = \ln \beta_1$$

Dengan :

- Y adalah variabel dependen
- (X_1, X_2, \dots, X_n) adalah variabel independen
- $(\beta_2, \beta_3, \dots, \beta_n)$ adalah elastisitas output variabel independen terhadap variabel dependen.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Analisis Data

Berdasarkan data dan metode analisis data diperoleh hasil sebagai berikut:

- Analisis hubungan UMK dan UM dengan tenaga kerja diperoleh persamaan yaitu:

$$\ln(\text{Tenaga Kerja}) = 1,37 \ln(\text{UMK}) + 0,23 \ln(\text{UM}) - 0,98 \ln(\text{UB}) ; R^2 = 0,88$$

(0,0009) (0,1224) (0,0947)

2. Analisis hubungan UMKM dengan PDB diperoleh persamaan yaitu :

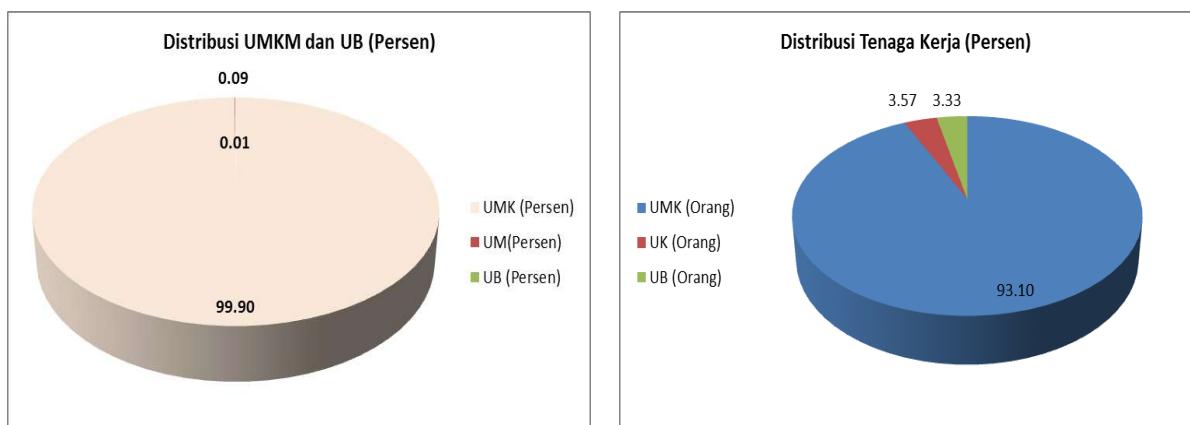
$$\ln(\text{PDB}) = 5,89 \ln(\text{UMKM}) + 4,72 \ln(\text{UB}) ; R^2 = 0,87$$

(0,0474) (0,1633)

4.2. Pembahasan

Berdasarkan data UMKM tahun 2010-2018, jumlah UMK mendominasi unit usaha rata-rata sebesar 99,90 persen dengan menyerap tenaga kerja rata-rata sebesar 93,10 persen (Gambar 3).

Gambar 3. Perbandingan Jumlah dan Tenaga Kerja UMK, UM, dan UB Tahun 2010-2018 (Persen)



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah.

Dari Gambar 3 juga diperoleh bahwa jumlah UM sebesar 0,09 persen dengan menyerap tenaga kerja sebesar 3,57 persen dan jumlah UB hanya sebesar 0,01 persen dengan menyerap tenaga kerja sebesar 3,33 persen. Dengan data yang telah diberikan di atas dapat terlihat bahwa UMK menyerap tenaga kerja yang paling besar. Sedangkan parameter hubungan peningkatan UMKM dengan lapangan kerja diperoleh persamaan yaitu:

$$\ln(\text{Tenaga Kerja}) = 1,37 \ln(\text{UMK}) + 0,23 \ln(\text{UM}) - 0,98 \ln(\text{UB}) ; R^2 = 0,88$$

(0,0009) (0,1224) (0,0947)

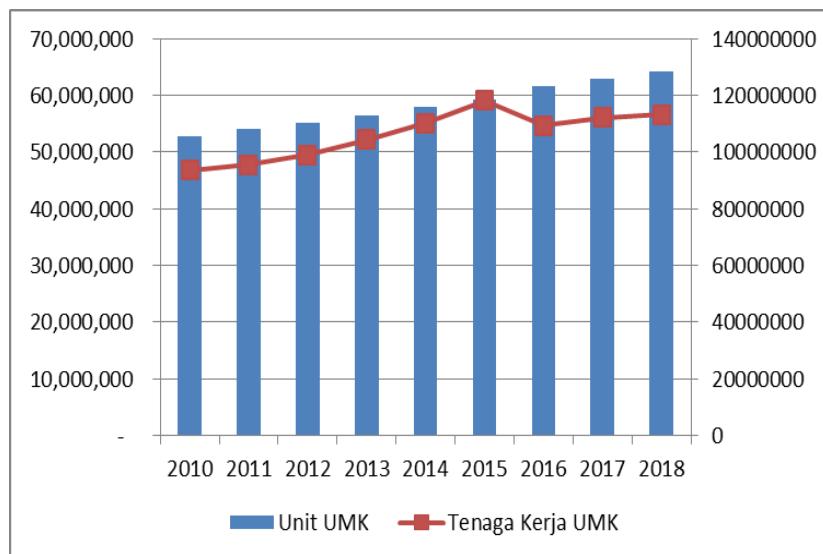
Berdasarkan persamaan di atas diperoleh hubungan sebagai berikut:

1. Hubungan UMK terhadap tenaga kerja

Setiap ada peningkatan sebesar 1 persen unit UMK, maka tenaga kerja dapat meningkat sebesar 1,37 persen. Hubungan tersebut signifikan, karena nilai probabilitas UMK sebesar 0,0009 lebih kecil dari 0,05. Dari persamaan hubungan di atas juga diperoleh bahwa hanya UMK yang signifikan, sedangkan yang lainnya tidak signifikan. Dengan demikian peningkatan UMK berdampak signifikan terhadap tenaga kerja. Signifikansi juga dapat dilihat dari tren perkembangan UMK tahun 2010-

2018, dengan jumlah UMK terus meningkat setiap tahunnya. Begitu juga tenaga kerja di UMK meningkat setiap tahunnya, kecuali pada tahun 2016 mengalami penurunan (Gambar 4). Penurunan tersebut tidak lain dampak pelemahan ekonomi global, sehingga negara-negara berkembang termasuk Indonesia mengalami perlambatan ekonomi (Republika, 2016).

Gambar 4. Perkembangan UMK dan Tenaga Kerja di UMK



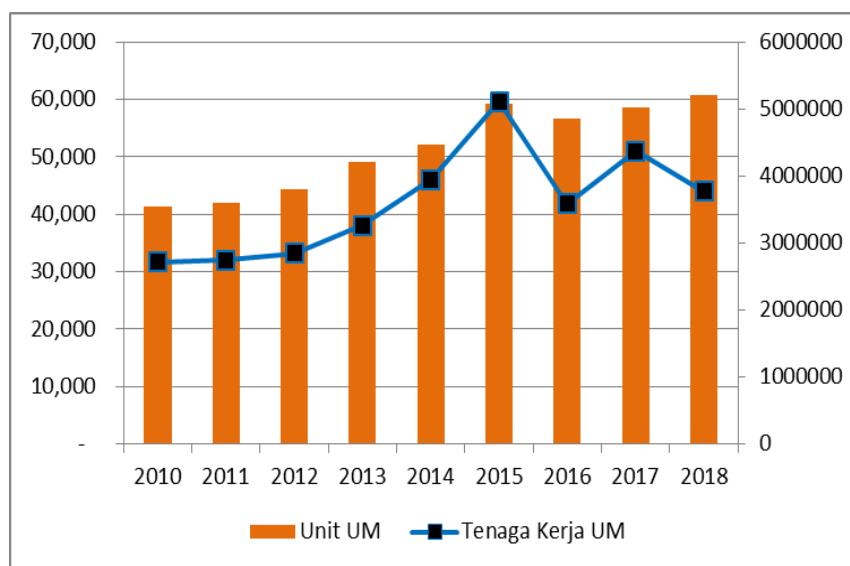
Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah.

Dengan demikian peran UMK sangat berkontribusi terhadap penyerapan tenaga kerja di Indonesia. Besarnya penyerapan tenaga kerja tersebut bukan hanya karena jumlah UMK yang mendominasi unit usaha, tapi UMK cenderung lebih padat karya.

2. Hubungan UM terhadap tenaga kerja.

Setiap ada peningkatan sebesar 1 persen unit UM, maka tenaga kerja dapat meningkat sebesar 0,23 persen. Namun hubungan tersebut tidak signifikan, karena nilai probabilitas UM sebesar 0,1224 lebih besar dari 0,05. Artinya, peningkatan UM tidak berdampak signifikan terhadap tenaga kerja. Kondisi tidak signifikan tersebut dapat dilihat pada perkembangan pada tahun 2018 (Gambar 5).

Perkembangan UM dengan tenaga kerja tidak jauh berbeda pada UMK, terjadi penurunan tenaga kerja pada tahun 2016. Namun pada tahun 2018, jumlah unit UM meningkat, sedangkan tenaga kerja menurun. Di lain sisi, UMK dan tenaga kerjanya sama-sama meningkat. Kondisi tersebut merupakan salah satu faktor dampak UM terhadap tenaga kerja tidak signifikan dibandingkan UMK.

Gambar 5. Perkembangan UM dan Tenaga Kerja di UM

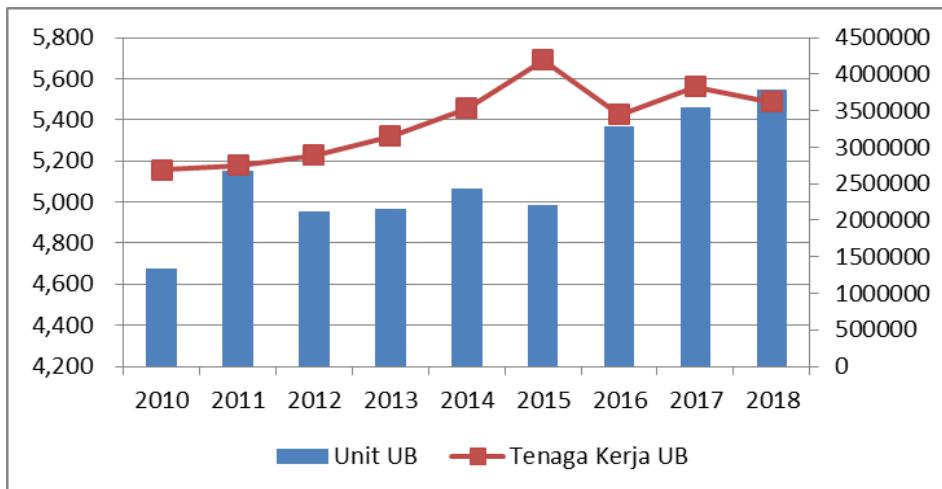
Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah.

3. Hubungan UB terhadap tenaga kerja.

Setiap ada peningkatan sebesar 1 persen unit UB, maka tenaga kerja dapat menurun sebesar -0,98 persen. Hubungan tersebut tidak signifikan, karena nilai probabilitas UMK sebesar 0,0947 lebih besar dari 0,05. Hal ini menjelaskan bahwa adanya peningkatan UB belum tentu dapat meningkatkan serapan tenaga kerja, karena pada sektor UB cenderung lebih dominan menggunakan tenaga mesin daripada manusia dalam melakukan kegiatan operasionalnya yang tidak lain untuk upaya efisiensi biaya operasional. Fenomena ini terjadi seiring berkembangnya otomasi dalam sektor industrinya, sehingga tidak semua sektor menyerap banyak tenaga kerja (Bisnis.com, 2019). Fenomena tersebut dapat dilihat dari fluktuasi perkembangan hubungan jumlah UB dengan serapan tenaga kerjanya (Gambar 6).

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas diperoleh bahwa hanya UMK yang memiliki hubungan searah positif terhadap tenaga kerja dan signifikan. UMK ini juga merupakan parameter untuk melihat kondisi kewirausahaan di Indonesia. Dengan kata lain kewirausahaan memiliki dampak positif bagi masyarakat Indonesia, karena meningkatnya wirausaha baru maka terciptanya juga lapangan kerja baru buat masyarakat, sehingga adanya peningkatan pendapatan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

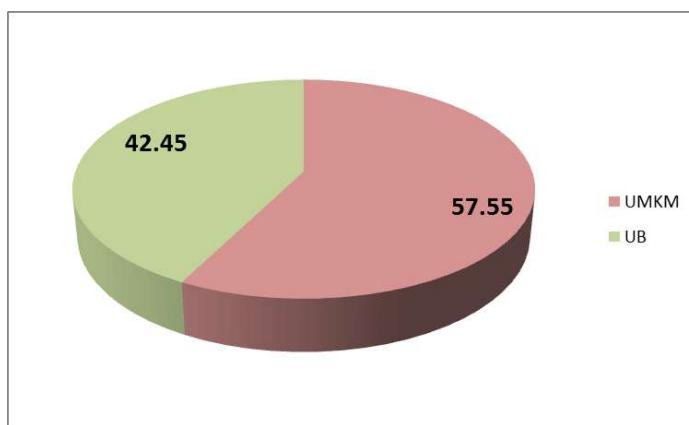
Gambar 6. Perkembangan UB dan Tenaga Kerja di UB



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah.

Selain dampak peningkatan UMKM bagi masyarakat, peningkatan tersebut diharapkan juga berdampak bagi perekonomian nasional. Parameter yang dapat digunakan untuk melihat dampaknya yaitu kontribusi UMKM terhadap PDB. Sama halnya dengan dominasi UMKM pada penyerapan tenaga kerja, kontribusi UMKM terhadap PDB lebih dominan dari pada UB dengan UMKM sebesar 57,55 persen dan UB sebesar 42,45 persen (Gambar 7).

Gambar 7. Rata-rata Distribusi PDB Tahun 2010-2018 (dalam persen)



Sumber: Kementerian Koperasi dan UMKM, diolah.

Kemudian parameter hubungan UMKM dengan PDB diperoleh persamaan yaitu:

Dari persamaan di atas diperoleh bahwa setiap ada peningkatan sebesar 1 persen unit UMKM, maka PDB dapat meningkat sebesar 5,89 persen. Hubungan tersebut signifikan, karena nilai probabilitas UMKM sebesar 0,0474 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan UB tidak berdampak signifikan terhadap PDB

dibandingkan dengan UMKM. Hal ini karena struktur perekonomian nasional lebih didominasi oleh konsumsi rumah tangga. Untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga, maka perlu meningkatkan lapangan kerja sehingga adanya peningkatan pendapatan masyarakat. Dalam kasus tersebut, UMKM yang memiliki dampak signifikan meningkatkan lapangan kerja dari pada UB. Karena itu, peningkatan wirausaha baru akan berdampak pada perekonomian nasional.

Namun dampak bagi perekonomian nasional tidak serta merta berdampak langsung, melainkan pemerintah harus memberikan stimulus terlebih dahulu untuk UMKM dan stimulus ini akan membutuhkan dukungan anggaran dari pemerintah. Stimulus yang diperlukan yaitu:

1. Akses Permodalan

Modal merupakan elemen penting dari kegiatan berwirausaha, tapi tidak semua wirausaha mampu mengakses permodalan dari lembaga keuangan. Padahal modal tersebut jelas akan membantu menstimulus peningkatan kapasitas usaha. Bantuan pemerintah untuk akses permodalan bagi UMKM saat ini ada 2 jenis yaitu Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB).

KUR yang diberikan pemerintah saat ini sudah rendah hanya sebesar 6 persen dibanding tahun-tahun sebelumnya sebesar 7 persen. Selain itu total pembiayaan KUR pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari Rp140 triliun menjadi Rp190 triliun (CNN, 2019). Meskipun demikian dalam artikel tersebut disampaikan oleh Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) bahwa kebijakan KUR masih menyulitkan pelaku UMKM untuk mendapatkan KUR. Terdapat bank yang menerapkan syarat khusus untuk debitur KUR, seperti, wajib melampirkan dokumen jaminan untuk kredit di atas Rp25 juta dan melampirkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) untuk kredit di atas Rp50 juta.

Selain KUR, pemerintah juga memberikan pinjaman melalui LPDB. Namun menurut Dinas Koperasi dan UKM Kab. Gunungkidul persyaratan LPDB yang sedikit rumit untuk dipenuhi, salah satunya adalah adanya agunan. Selain itu, untuk bunga pinjaman juga terbilang cukup tinggi yaitu sekitar 7 persen per tahun, dimana bunga ini lebih tinggi dibandingkan KUR yaitu sebesar 6 persen per tahun. Untuk keterlambatan pembayaran cicilan pada LPDB juga dikenakan denda sebesar 2 persen per 30 hari.

Berdasarkan penjelasan di atas, pemerintah telah memberikan stimulus permodalan, tetapi regulasi untuk mengakses masih menjadi persoalan yang belum selesai. Karena itu, permodalan ini harus dipusatkan pada satu lembaga supaya lebih efisien dan efektif dalam penyalurannya, sehingga keuangan negara lebih optimal untuk memberikan stimulus permodalan usaha. Lembaga tersebut harus yang membidangi usaha baik UMKM maupun UB.

2. Insentif atau subsidi untuk ekspor

Kondisi ekspor sepanjang tahun 2010-2018 sangat didominasi oleh UB, padahal unit usaha UB jauh lebih sedikit dari pada UMKM (Gambar 2). Hal ini menunjukkan bahwa UMKM masih stagnan di dalam negeri, padahal salah satu parameter daya saing suatu negara adalah volume ekspor. Dengan banyaknya unit UMKM setidaknya menyeimbangi kinerja kegiatan ekspor UB.

Menurut Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo), kendala yang terus dihadapi pelaku usaha dalam penetrasi pasar ekspor masih berputar pada besarnya biaya yang harus dikeluarkan, seperti pengiriman ke Malaysia saja sudah Rp100.000,00 per kilogram dan biaya pergudangan juga besar (Bisnis.com, 2020). Karena itu, pemerintah harus memberikan insentif atau subsidi untuk ekspor bagi UMKM, sehingga UMKM di Indonesia dapat bersaing pada pasar internasional dan dapat mendongkrak daya saing Indonesia. Namun lembaga yang menaungi hal ini, harus lembaga yang membidangi usaha baik UMKM maupun UB.

3. Regulasi yang mengatur pengembangan UMKM selama ini belum terintegrasi.

Hal tersebut dapat dilihat dari KUR dan LPDB. Dana KUR melalui perbankan dan LPDB melalui Kementerian Koperasi dan UMKM. KUR memiliki bunga sebesar 6 persen per tahun yang lebih rendah dari LPDB sebesar 7 persen per tahun, padahal keduanya merupakan upaya pemerintah untuk mengembangkan UMKM. Selain itu, besarnya anggaran negara untuk pengembangan ini juga tersebar dalam anggaran berbagai K/L terkait. Berdasarkan data terkini anggaran pembiayaan UMKM dan kewirausahaan tersebar di 18 K/L (Tempo.co, 2020). Karena itu, pentingnya regulasi untuk pengembangan UMKM dibentuk dalam satu wadah regulasi berupa undang-undang. Undang-undang tersebut juga harus memuat insentif atau subsidi untuk ekspor, sehingga penguatan UMKM dapat efektif dan efisien.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan-pembahasan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa:

- a. dampak UMKM bagi tenaga kerja yaitu setiap ada peningkatan sebesar 1 persen unit UMK, maka tenaga kerja dapat meningkat sebesar 1,37 persen. Hubungan tersebut signifikan, karena nilai probabilitas UMK sebesar 0,0009 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan peningkatan UM dan UB tidak berdampak signifikan terhadap tenaga kerja;
- b. dampak UMKM bagi pertumbuhan ekonomi yaitu setiap ada peningkatan sebesar 1 persen unit UMKM, maka PDB dapat meningkat sebesar 5,89

persen. Hubungan tersebut signifikan, karena nilai probabilitas UMKM sebesar 0,0474 lebih kecil dari 0,05. Sedangkan peningkatan UB tidak berdampak signifikan terhadap tenaga kerja;

- c. regulasi yang mengatur UMKM belum fokus karena terlihat dari persoalan permodalan dan kinerja ekspor. Karena itu, permodalan ini harus dipusatkan pada satu lembaga supaya lebih efisien dan efektif dalam penyalurannya, sehingga keuangan negara lebih optimal dalam memberikan stimulus permodalan usaha. Lembaga tersebut harus yang membidangi usaha baik UMKM maupun UB. Kemudian pemerintah harus memberikan insentif atau subsidi untuk ekspor bagi UMKM, sehingga UMKM di Indonesia dapat bersaing pada pasar internasional dan dapat mendongkrak daya saing Indonesia. Akses permodalan dan insentif tersebut harus dimuat dalam regulasi berupa undang-undang supaya penguatan UMKM dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

5.2. Saran

Penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saran untuk penelitian berikutnya dapat mengembangkan penelitian ini dengan menganalisis efektivitas undang-undang baru untuk penguatan UMKM. Dalam hal ini perlu dikupas undang-undang terkait UMKM apakah masih ada iriannya ataukah perlu diubah seperti definisi UMKM. Selain itu, perlu dikaji dampak undang-undang baru bagi masyarakat dan perekonomian nasional ke depannya.

Daftar Pustaka

- Hamzah, Lies Maria dan Agustien, Devi. 2019. Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan Universitas Lampung*: Volume 8 No. 2 Juli 2019.
- BI. 2016. Produk Domestik Bruto (PDB). Jakarta: Departemen Statistik Bank Indonesia.
- Bisnis.com. 2019. Kenapa Investasi di Indonesia Naik, tetapi Serapan Tenaga Kerja Turun. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190114/257/878542/kenapa-investasi-di-indonesia-naik-tetapi-serapan-tenaga-kerja-turun>, pada tanggal 15 April 2020.
- Bisnis.com. 2020. Pemerintah Godok Kebijakan untuk Mempermudah Ekspor untuk MKM. Diakses dari <https://ekonomi.bisnis.com/read/20200220/12/1204096/pemerintah-godok-kebijakan-untuk-permudah-ekspor-untuk-umkm>, pada tanggal 15 April 2020.
- CNBC Indonesia. 2020. Jangan Kaget, Ini Prediksi Sri Mulyani Soal Ekonomi RI. Diakses dari <https://www.cnbcindonesia.com/market/20200419092613->

- 17-152924/jangan-kaget-ini-prediksi-sri-mulyani-soal-ekonomi-ri, pada tanggal 20 April 2020.
- CNN. 2019. Percuma Bunga Turun Kalau KUR Sulit Ditembus Pelaku UMKM. Diakses dari <https://m.cnnindonesia.com/ekonomi/20191113095915-78-447891/percuma-bunga-turun-kalau-kur-sulit-ditembus-pelaku-umkm>, pada tanggal 15 April 2020.
- Detik. 2019. Akses Modal dan Bahan Baku Masih Jadi Tantangan UMKM RI. Diakses dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4636059/akses-modal-dan-bahan-baku-masih-jadi-tantangan-umkm-ri>, pada tanggal 22 April 2020.
- Gujarati. 2004. Basic Econometrics, Fourth Edition. The McGraw-Hill Companies, New York.
- Kompas. 2020. Cerita UMKM di Tengah Covid-19, Usaha Berhenti Total hingga Dapat keringanan Kredit. Diakses dari <https://money.kompas.com/read/2020/04/17/053800226/cerita-umkm-di-tengah-covid-19-usaha-berhenti-total-hingga-dapat-keringanan?page=all>, pada tanggal 22 April 2020.
- Liputan6.com. 2020. Sri Mulyani Gambarkan Kondisi Ekonomi Indonesia yang Terimbas Virus Corona. Diakses dari <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4230078/sri-mulyani-gambarkan-kondisi-ekonomi-indonesia-yang-terimbas-virus-corona>, pada tanggal 20 April 2020.
- Republika.co.id. 2016. Pelemahan Ekonomi Global Masih Terjadi. Diakses dari <https://republika.co.id/berita/oayrk53/sri-mulyani-pelemahan-ekonomi-global-masih-terjadi>, pada tanggal 14 April 2020.
- Hasri, Bin, Santoso, Sigit, dan Santoso Djoko. 2014. Analisis Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan Dan Pengangguran Daerah Di Kabupaten Ngawi. Jurnal FKIP UNS, Vol 1, No 2 tahun 2014.
- Setiawan, Achma Hendra. 2010. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (UKM) Di Kota Semarang. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan UNNES, Vol. 3, No.1 Tahun 2010.
- Tempo.co. 2020. Menkop Akan Konsolidasikan Anggaran UMKM yang Tersebar di 18 K/L, diakses dari [https://bisnis\(tempo.co/read/1271103/menkop-akan-konsolidasikan-anggaran-umkm-yang-tersebar-di-18-kl](https://bisnis(tempo.co/read/1271103/menkop-akan-konsolidasikan-anggaran-umkm-yang-tersebar-di-18-kl), pada tanggal 29 April 2020

DAMPAK HARGA KOMODITAS TERHADAP KREDIT BERMASALAH DI INDONESIA

The Impact of Commodity Prices on Non-Performing Loans in Indonesia

Robby Alexander Sirait

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

e-mail: roddy.sirait@dpr.go.id

Abstract

This paper investigates the impact of commodities price on Non-Performing Loans (NPLs) in Indonesia. This study performed an analysis for the period from 2003 to 2019 by an autoregressive distributed lag (ARDL) model. The outcomes of this research suggest that commodities price influence NPLs significantly. It confirm that the level of NPLs tends to decrease when commodities price rises. Quantitatively, an increase of 1 percent in commodity prices results in a decline of NPLs by 0,862 percentage points in the short run and 4,088 in the long run. The others confirm that the level of NPLs tends to decrease when economic growth rises, exchange rate depreciates, and declining of inflation.

Keywords: *Non-Performing Loan, Commodities Price, ARDL*

1. Pendahuluan

Salah satu faktor penting yang memengaruhi perkembangan perekonomian di suatu negara adalah kondisi dan kinerja industri perbankan negara tersebut. Ketika industri perbankan berkinerja baik dan mampu berakselerasi, maka sudah pasti berdampak positif terhadap perkembangan atau pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Demikian sebaliknya. Ketika industri perbankan bermasalah, maka kinerja atau perkembangan pertumbuhan ekonomi juga akan berdampak, yang dampaknya bergantung pada sejauh mana masalah perbankan yang dihadapi. Dampak yang paling parah akibat industri perbankan mengalami masalah adalah terjadinya krisis atau bahkan resesi ekonomi suatu negara. Peranan perbankan terhadap kinerja perekonomian ini sesuai dengan idiom yang menyatakan bahwa “perbankan adalah urat nadi perekonomian sebuah bangsa”. Artinya, ketika urat nadi bermasalah atau bahkan putus, maka akan berdampak pada terganggunya mekanisme roda perekonomian suatu negara atau bahkan perekonomian sebuah negara dapat “collapse”. Krisis 1997/1998 yang dihadapi Indonesia, kasus *Northen Rock Bank* di Inggris hingga kasus *subprime mortgage* yang meluluhlantakkan perekonomian Amerika

Serikat, merupakan fakta yang menunjukkan bahwa perbankan memiliki peranan penting terhadap perkembangan perekonomian dan merupakan urat nadi perekonomian sebuah negara.

Oleh karena itu, tingkat kesehatan perbankan merupakan salah satu hal yang perlu menjadi perhatian otoritas moneter di sebuah negara, yang salah satunya diukur dengan *Non Performing Loans* (NPL). Menurut Bank Indonesia, NPL adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Kenaikan NPL dalam kurun waktu tertentu mengindikasikan bahwa munculnya gangguan atau masalah dalam kesehatan suatu bank pada kurun waktu dimaksud. Gangguan atau masalah tersebut akan berimbas pada memburuknya kinerja fungsi intermediasi atau kredit perbankan. Dengan semakin meningkatnya NPL, maka keinginan bank memberikan kredit akan menurun (Utari, et al.; 2012). Oleh karena itu, kinerja NPL menjadi penting untuk diperhatikan oleh otoritas moneter maupun fiskal di sebuah negara.

Dalam berbagai literatur, faktor-faktor atau determinan yang memengaruhi NPL dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua). Pertama, determinan makroekonomi (*the macroeconomic determinants*), yang akan memengaruhi neraca bank dan kemampuan debitur. Determinan makroekonomi tersebut antara lain siklus bisnis, tekanan nilai tukar, tingkat pengangguran, dan suku bunga pinjaman. Kedua, berbagai literatur fokus pada determinan yang bersumber dari internal bank itu sendiri (*the bank-specific determinants*), yang bervariasi di setiap bank. Determinan dimaksud antara lain perbedaan dalam manajemen resiko, biaya produksi dan ukuran bank (Alodaynic, 2016). Penelitian ini akan lebih berfokus pada determinan makroekonomi, khususnya harga komoditas.

Penelitian De Bock dan Demyanets (2002), Babihuga (2007), Klein (2013), Ahmad dan Bashir (2013), Ha et al. (2014), Aviliani et al. (2015) Dimitrios et al. (2016), Ginting (2016), Waqas et al. (2017), Zheng et al. (2020), Nathan (2020), dan Ciukaj dan Kil (2020) merupakan beberapa literatur yang menunjukkan bahwa beberapa determinan makroekonomi merupakan faktor yang memengaruhi NPL. Determinan makroekonomi dalam berbagai penelitian tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, pengangguran, hutang, ekspor, arus modal, investasi, dan hutang luar negeri.

Selain variabel-variabel tersebut, faktor determinan lain yang memengaruhi NPL adalah perkembangan harga komoditas, yang salah satunya harga minyak mentah dunia (*crude oil price*). Penelitian Kinda, et al. (2016), Khandelwal (2016), serta Alodaynic (2016) merupakan beberapa penelitian yang menunjukkan bahwa harga komoditas (termasuk minyak mentah) berpengaruh terhadap NPL. Untuk Indonesia sendiri, masih jarang ada penelitian yang menghubungkan pengaruh harga komoditas terhadap NPL. Salah satu penelitian yang menunjukkan pengaruh harga minyak mentah terhadap NPL adalah Aviliani, et al. (2015). Penelitian tersebut menunjukkan bahwa harga minyak mentah dunia memiliki pengaruh negatif terhadap NPL, dimana kenaikan harga minyak mentah dunia akan menurunkan rasio NPL di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai pengaruh harga komoditas terhadap NPL di Indonesia. Dari beberapa penelitian terdahulu, diketahui bahwa harga komoditas (termasuk harga minyak mentah dunia) memiliki pengaruh terhadap NPL. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh harga komoditas terhadap NPL di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Definisi Kredit dan NPL

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, mendefinisikan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Definisi lain dari kredit adalah pinjaman yang diberikan oleh bank atau penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan penerima pinjaman (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pembayaran bunganya (Riyadi, et al.; 2015). Sedangkan menurut Kuncoro (2011) dalam Ginting (2016), definisi kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pihak lain, yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan baik bersifat langsung maupun tidak langsung. Dengan demikian, kredit dapat didefinisikan sebagai sebuah kesepakatan pinjam-meminjam antara bank (kreditur) kepada pihak lain (debitur), dimana debitur harus melakukan pelunasan atas hutangnya kepada kreditur (termasuk bunga atau imbalan yang disepakati) pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum, kualitas kredit dikelompokkan menjadi 5 (lima), yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan dan macet. Pengelompokan tersebut ditetapkan melalui proses penilaian atas prospek usaha, kinerja debitur dan kemampuan membayar. Menurut Bank Indonesia, kredit bermasalah atau NPL adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. Dengan demikian NPL adalah penjumlahan dari kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan dan macet. NPL dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kredit yang diberikan dengan kolektibilitas kurang lancar, diragukan, dan macet dibandingkan dengan total kredit (Riyadi, 2015).

2.2. Studi Empiris Tentang Pengaruh Harga Komoditas Terhadap NPL

Pergerakan harga komoditas di pasar dunia akan memberikan dampak terhadap kesehatan bank sebuah negara, yang diukur dari kondisi NPL pada waktu tertentu. Harga komoditas yang mengalami penurunan, akan berdampak pada penurunan pendapatan dan aktivitas ekonomi (khususnya produsen dan eksportir) di sektor-sektor yang langsung berkaitan dengan produksi komoditas dimaksud. Lebih jauh, penurunan aktivitas tersebut dapat berdampak terciptanya pemutusan hubungan kerja atau pengangguran. Kondisi ini akan berdampak pada menurunnya kemampuan debitur untuk menjalankan kewajibannya kepada kreditur, yang ditandai dengan kenaikan kredit bermasalah atau NPL.

Agarwal, et al. (2017) menyatakan bahwa harga komoditas yang menurun akan menyebabkan perusahaan ekspor mengalami kerugian dan tidak dapat menjalankan kewajibannya untuk melakukan pembayaran pinjamannya. Kondisi ini merupakan cerminan sebuah guncangan likuiditas dan penurunan kualitas kredit perbankan, yang dapat berpotensi menurunkan kesehatan bank atau memperburuk NPL perbankan. Hal yang senada juga dinyatakan Kinda, et al. (2016), yang mengatakan bahwa guncangan negatif pada harga komoditas akan mengurangi aktivitas ekonomi dan menciptakan pengangguran, yang pada gilirannya akan memperburuk kemampuan peminjam untuk melunasi utangnya, sehingga meningkatkan NPL.

Beberapa penelitian menemukan hubungan yang sama, dimana setiap kenaikan harga komoditas akan berdampak pada penurunan NPL. Demikian sebaliknya. Penelitian Kinda, et al. (2016) pada 71 (tujuh puluh satu) negara eksportir komoditas yang berada di wilayah *emerging and developing economies/countries*, dengan rentang data penelitian tahun 1997-2013 menemukan hubungan yang sama. Dengan menggunakan *panel fixed effects model*, penelitian Kinda, et al. (2016) tersebut menunjukkan bahwa kenaikan harga komoditas mengakibatkan penurunan kredit bermasalah atau NPL. Secara kuantitatif, setiap kenaikan 50 (lima puluh) persen pada harga komoditas, maka akan menyebabkan penurunan NPL sebesar 3 (tiga) persen.

Hasil penelitian yang relatif sama juga ditemukan pada penelitian Khandelwal, et al. (2016) yang meneliti tentang hubungan antara harga minyak mentah terhadap NPL pada 42 (empat puluh dua) bank yang berada di 6 (enam) negara anggota Dewan Kerjasama untuk Negara Arab di Teluk (*The Gulf Cooperation Council/GCC*), dengan rentang waktu data penelitian tahun 1999 hingga 2014. Dengan menggunakan pendekatan *Generalized Method of Moments* (GMM), hasil penelitian Khandelwal, et al. (2016) ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan harga minyak riil memiliki hubungan yang negatif terhadap NPL.

Senada dengan penelitian Khandelwal, et al. (2016), penelitian Alodaynic (2016) juga menemukan hal yang sama. Dengan menggunakan data dari 38 (tiga puluh delapan) bank yang berada di negara-negara anggota GCC, dengan rentang waktu data penelitian dari tahun 1999 hingga 2014, serta GMM

dan *Fixed Effect Model* sebagai metode estimasi, penelitian Alodaynic (2016) menemukan bahwa bahwa harga minyak, Produk Domestik Bruto (PDB) non-minyak, suku bunga, harga saham, dan harga perumahan merupakan faktor utama NPL. Secara kuantitatif, penelitian ini menunjukkan bahwa setiap 1 (satu) persen penurunan harga minyak, maka akan meningkatkan NPL sebesar 0,458 persen dan hubungannya signifikan secara statistik.

2.3. Studi Empiris Tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Nilai Tukar dan Inflasi Terhadap NPL

Selain harga komoditas, faktor atau determinan lain yang memengaruhi NPL adalah kondisi makroekonomi sebuah negara. Menurut Festic & Beko (2008) dalam Ginting (2016), setiap tekanan dari faktor makroekonomi merupakan sumber risiko sistemik yang memengaruhi kinerja sektor perbankan yang dinyatakan sebagai risiko NPL terhadap total kredit.

Penelitian De Bock dan Demyanets (2002), Babihuga (2007), Klein (2013), Ahmad dan Bashir (2013), Ha, et al. (2014), Aviliani, et al. (2015) Dimitrios, et al. (2016), Ginting (2016), Waqas, et al. (2017), Zheng, et al. (2020), Nathan (2020), dan Ciukaj dan Kil (2020) merupakan beberapa literatur yang menunjukkan bahwa beberapa determinan makroekonomi merupakan faktor yang memengaruhi NPL. Salah satu determinan makroekonomi dalam penelitian-penelitian tersebut adalah pertumbuhan ekonomi, inflasi dan nilai tukar.

Salah satu determinan makroekonomi yang memengaruhi NPL adalah pertumbuhan ekonomi. Ekonomi yang bertumbuh dapat dimaknai sebagai kenaikan nilai pasar dari total seluruh barang dan jasa yang diproduksi oleh suatu negara dalam satu waktu tertentu. Dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan nilai seluruh aktivitas produksi secara agregat pada sebuah negara dan dalam satu waktu tertentu. Kenaikan nilai tersebut akan berimplikasi pada kenaikan pendapatan bagi seluruh pelaku ekonomi di suatu negara, yang akhirnya berimplikasi pada peningkatan kemampuan membayar para debitur. Kenaikan kemampuan tersebut akan berkorelasi pada penurunan kredit bermasalah atau NPL. Penelitian De Bock and Demyanets (2012) yang menggunakan data dari 25 negara *emerging markets* pada periode 1996-2010, menemukan bahwa penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada peningkatan NPL. Penelitian yang sama juga di temukan oleh Babihuga (2007), Klein (2013), Ahmad dan Bashir (2013), Dimitrios, et al. (2016), Ginting (2016), dan Zheng, et al. (2020).

Selain pertumbuhan ekonomi, determinan makroekonomi yang memengaruhi NPL adalah inflasi dan nilai tukar. Secara sederhana, Mankiw (2013) mendefinisikan inflasi sebagai sebuah proses kenaikan harga barang-barang secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga atau inflasi akan berdampak terhadap penurunan daya beli masyarakat yang diakibatkan oleh penurunan pendapatan riil, dengan asumsi tingkat pendapatan masyarakat (nominal) konstan. Penurunan pendapatan riil tersebut, pada akhirnya akan menurunkan kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban atas pembayaran utangnya

kepada kreditur. Penurunan kemampuan debitur, akhirnya akan meningkatkan kredit bermasalah atau NPL. Dengan demikian, inflasi memiliki hubungan yang positif terhadap NPL.

Dengan menggunakan data dari 10 (sepuluh) bank terbesar pada setiap negara di 16 negara yang berada di wilayah *Central, Eastern and South-Eastern Europe* (CESEE) dalam rentang waktu tahun 1998-2011, penelitian Klein (2013) menunjukkan bahwa inflasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap NPL. Penelitiannya menemukan bahwa tingkat NPL mengalami peningkatan ketika pengangguran meningkat, nilai tukar terdepresiasi dan inflasi tinggi. Penelitian Koju, et al. (2020) terhadap 46 (empat puluh enam) negara yang masuk kategori *developed countries*, dengan periode data tahun 2000-2015, juga menemukan hubungan yang sama. Penelitian Koju, et al. (2020) menemukan bahwa inflasi memiliki hubungan positif terhadap NPL. Penelitian tersebut juga menyatakan bahwa inflasi akan menurunkan daya beli dalam perekonomian, akibatnya pendapatan dan laba yang diperoleh oleh debitur (baik individu maupun investor) hanya cukup untuk membayar pokok dan bunga utangnya saja. Alhasil, kondisi ini akan menurunkan kemampuan membayar debitur. Namun, temuan ini tidak signifikan secara statistik. Hasil penelitian yang relatif sama dengan hasil temuan Klein (2013) dan Koju, et al. (2020) juga ditemukan dalam penelitian Babihuga (2007), Abid, et al. (2014), Ginting (2016), Ciukaj dan Kil (2020), Ha, et al. (2014), Makri, et al. (2014), dan Dimitrios, et al. (2016).

Hubungan antara inflasi dengan NPL tidak saja positif, namun juga dapat memiliki hubungan yang negatif. Penelitian Endut, et al. (2013), Mazreku (2018), Zheng, et al. (2020), Ahmad dan Bashir (2013), Fajar dan Umanto (2017), dan Haniifah (2015) menunjukkan bahwa inflasi memiliki hubungan yang negatif terhadap NPL. Artinya, kenaikan harga-harga barang secara umum dan terus menerus akan berdampak pada penurunan NPL. Ada beberapa argumentasi yang mencoba menjelaskan hubungan negatif tersebut, antara lain:

- a) kenaikan inflasi akan menyebabkan pengurangan nilai riil utang yang pada akhirnya akan menciptakan pembayaran utang yang lebih murah (Haniifah, 2015; Mazreku, 2018),
- b) hubungan tersebut dikaitkan dengan hubungan inflasi dengan tingkat pengangguran menurut *Philips Curve*, dimana inflasi yang lebih tinggi berkaitan dengan tingkat pengangguran yang lebih rendah. Sehingga, pengangguran yang lebih rendah akan mengurangi NPL (Fajar dan Umanto, 2017), serta
- c) pada awalnya, inflasi akan menyebabkan ekuitas bank mengalami penurunan yang akhirnya meningkatkan resiko bank. Oleh karena itu, bank-bank akan berupaya meningkatkan kembali ekuitasnya dengan mulai memperluas pinjaman untuk mengejar keuntungan jangka pendek, yang akhirnya akan mengurangi rasio pinjaman bermasalah terhadap total pinjaman.

Perbedaan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa arah pengaruh inflasi terhadap NPL bersifat ambigu, dapat positif atau negatif. Hal yang sama juga terjadi pada arah pengaruh nilai tukar dengan NPL, yang juga bersifat ambigu. Nilai tukar mata uang suatu negara yang terdepresiasi akan berimbas pada mahalnya barang impor yang masuk ke negara tersebut. Alhasil, mahalnya barang impor tersebut (baik bahan baku/penolong, barang modal, maupun barang konsumsi) akan berdampak pada penurunan pendapatan riil, baik produsen maupun individu, yang pada akhirnya akan meningkatkan resiko gagal bayar atau kredit bermasalah (NPL). Penelitian De Bock and Demyanets (2012), Zheng, et al. (2020), dan Nathan, et al. (2020) menunjukkan bahwa terdepresiasinya mata uang domestik sebuah negara akan berdampak pada peningkatan NPL. Secara umum, dasar argumentasi hubungan tersebut didasarkan pada pandangan bahwa terdepresiasinya nilai tukar akan berdampak pada penurunan pendapatan riil dan daya saing produk lokal yang diekspor, yang akhirnya mengurangi kemampuan membayar para debitur.

Sedangkan penelitian Babihuga (2007), Zeman dan Jurca (2008), Ahmad dan Bashir (2013) dan Haniifah (2015) menunjukkan hubungan yang sebaliknya. Penelitian-penelitian tersebut menemukan bahwa pelemahan nilai tukar akan menurunkan NPL. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut berargumentasi bahwa pelemahan nilai tukar mata uang domestik (depresiasi) akan memberikan dampak positif pada pendapatan melalui peningkatan nilai ekspor neto, yang pada akhirnya meningkatkan kapasitas atau kemampuan membayar para debitur. Peningkatan kemampuan tersebut akan berdampak pada penurunan kredit bermasalah atau NPL.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini adalah penelitian kuantitatif. Sedangkan sumber data penelitian ini adalah data sekunder berupa data *time series* kuartalan periode tahun 2003-2019. Data-data tersebut bersumber dari Otoritas Jasa Keuangan, Badan Pusat Statistika dan *St. Louis Fed Research*. Setelah melakukan pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan analisis data menggunakan metode analisis statistik inferensial dengan metode estimasi *Autoregressive Distributed Lag* (ARDL).

3.2. Spesifikasi Model

Dalam menganalisis pengaruh harga komoditas terhadap NPL, penelitian ini menggunakan metode estimasi ARDL. Spesifikasi model yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan referensi penelitian Kinda, et al. (2016), Alodaynic (2016) dan Zheng, et al. (2020).

Kesamaan penelitian ini dengan penelitian Kinda, et al. dan Alodaynic (2016) adalah sama-sama meneliti pengaruh harga komoditas (termasuk minyak mentah dunia) terhadap NPL. Sedangkan perbedaannya terletak pada data dan metode estimasi yang digunakan. Kedua penelitian tersebut menggunakan

data panel serta metode estimasinya adalah *Generalized Method of Moments* (GMM) dan *Fixed Effect Model* (FEM). Sedangkan penelitian ini menggunakan data runtun waktu dan pendekatan ARDL sebagai metode estimasi.

Dengan penelitian Zheng, et al. (2020), kesamaan penelitian ini ada pada data runtun waktu (*time series*) yang digunakan dalam penelitian dan metode estimasi yang menggunakan ARDL. Sedangkan perbedaannya ada pada variabel bebas (*independent*) yang hendak diuji. Dalam penelitian Zheng, et al. (2020), pengaruh variabel yang hendak diuji terhadap NPL adalah faktor-faktor determinan yang bersumber dari internal bank/industri perbankan (*industry-specific determinant*) dan kondisi makroekonomi (*macroeconomic determinants*). Dalam determinan makroekonomi, penelitian Zheng, et al. (2020) tidak memasukkan variabel harga komoditas. Ini yang membedakan penelitian ini dengan penelitian Zheng et al. (2020). Selain itu, perbedaan lainnya adalah data runtun waktu yang digunakan oleh Zheng et al. (2020) adalah data tahunan di Bangladesh. Sedangkan penelitian ini menggunakan data kuartalan di Indonesia.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka spesifikasi model penelitian ini secara umum adalah sebagai berikut:

Dimana :

NPL : *Non Performing Loans* atau Kredit Bermasalah.

LGPI : Logaritma natural *Global Price Index of Commodities*, sebagai proksi harga komoditas.

INF : Tingkat Inflasi.

LKURS : Logaritma natural Nilai Tukar Rupiah terhadap Dolar Amerika Serikat.

PE : Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan persamaan (2), NPL dipengaruhi oleh harga komoditas (GPI), indeks harga konsumen (IHK), dan nilai tukar (Kurs), baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hasil Uji Stasioneritas (*Unit Root Test*)

Dengan menggunakan *Augmented Dickey-Fuller* (ADF) *Unit Root Tests*, ditemukan variabel LGPI dan PE stasioner pada tingkat level I (0) dengan

tingkat signifikansi 5 persen. Sedangkan variabel NPL, INF dan LKURS stasioner pada level *first difference* 1 (1). Semua variabel menjadi stasioner pada level *first difference* 1 (1), dengan tingkat signifikansi 1 persen (Tabel 1).

Tabel 1. Augmented Dickey-Fuller (ADF) Unit Root Tests

	At the level		First Differentiation	
	T-Statistic	Prob	T-Statistic	Prob
NPL	-1.309	0.620	-3.626	0.008
LGPI	-2.935	0.047	-5.694	0.000
INF	-2.455	0.131	-5.840	0.000
LKURS	-0.565	0.871	-6.324	0.000
PE	-3.124	0.030	-8.789	0.000

Sumber: Hasil penelitian, * , ** , *** adalah tingkat signifikansi 10 persen, 5 persen dan 1 persen
diolah

Dengan demikian, maka pendekatan estimasi yang tepat digunakan pada penelitian ini adalah metode ARDL.

4.2. Model ARDL

Dengan menggunakan metode uji kointegrasi *Bounds Testing Cointegration*, diperoleh hasil bahwa semua variabel memiliki kointegrasi jangka panjang. Hal ini disimpulkan dari nilai F-statistik *bounds testing* model penelitian berada di atas nilai kritis atau *upper limit critical value bounds*, baik pada tingkat signifikansi 1 persen, 2,5 persen, 5 persen, maupun 10 persen (Tabel 2)

Tabel 2. ARDL (Autoregressive Distributed Lag) Bounds Test

F-Statistic	at 10%		at 5%		at 2,5%		at 1%	
	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper	Lower	Upper
5.38	2.2	3.09	2.56	3.49	2.88	3.87	3.29	4.37

Sumber: Hasil Penelitian, diolah

Kemudian, untuk pemilihan model ARDL terbaik dengan kombinasi lag yang optimal, peneliti menggunakan kriteria lag menurut *Akaike Info Criterion* (AIC). Alasan penggunaan kriteria AIC untuk menentukan kombinasi lag yang optimal karena menurut (Pesaran & Pesraran, 1997) dalam Zheng, et al. (2020) AIC memberikan standar deviasi yang lebih kecil dibandingkan dengan *Schwarz information criterion* (SIC) ketika model diestimasi. Berdasarkan kriteria AIC, model ARDL terbaik bagi model penelitian ini adalah ARDL (3, 0, 1, 3, 4).

Tabel 3. VAR (Vector Autoregression) Lag Order Selection Criteria

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-263.1464	NA	0.002998	8.379574	8.548237	8.446019
1	15.86626	505.7104	1.07e-06	0.441679	1.453656*	0.840348
2	53.00764	61.51541	7.45e-07	0.062261	1.917551	0.793154*
3	86.69260	50.52743*	5.89e-07*	-0.2020	2.489460	0.853973
4	111.4652	33.28820	6.38e-07	-0.209144*	3.339880	1.193302

Sumber: Hasil penelitian, diolah

*menunjukkan jumlah lag

4.2.1. Hasil Model ARDL Jangka Pendek

Berdasarkan uji estimasi model ARDL (3, 0, 1, 3, 4), hasil penelitian menunjukkan bahwa harga komoditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit bermasalah atau NPL, dalam jangka pendek dengan tingkat signifikansi 5 persen (Tabel 4). Setiap kenaikan harga komoditas 1 persen, akan berimplikasi pada penurunan NPL sebesar 0,862.

Tabel 4. Hasil Estimasi Jangka Pendek

Determinan	Koefisien	Standar Error	t-Statistik	Prob
LGPI	-0,862**	0,352	-2,450	0,018
INF	0,038	0,024	1,554	0,127
LKURS	-1,933*	1,001	-1,931	0,059
PE	-0,033	0,089	-0,370	0,713
C	6,825	3,614	1,889	0,065

Sumber: Hasil penelitian, diolah * , ** , *** adalah tingkat signifikansi 10 persen, 5 persen, dan 1 persen

Untuk variabel inflasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan barang secara umum dan terus menerus akan berdampak pada peningkatan NPL. Namun, hasilnya tidak signifikan secara statistik. Sedangkan untuk variabel nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah yang terdepresiasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan NPL. Namun, hanya nilai tukar yang signifikan secara statistik pada tingkat signifikansi 10 persen. Sedangkan, pertumbuhan ekonomi tidak signifikan secara statistik.

4.2.2. Hasil Model ARDL Jangka Panjang

Berdasarkan uji estimasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa harga komoditas memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kredit bermasalah atau NPL, dalam jangka panjang dengan tingkat signifikansi 1 persen (Tabel 5). Setiap kenaikan harga komoditas 1 persen, akan berimplikasi pada penurunan NPL sebesar 4,088, dalam jangka panjang.

Tabel 5. Hasil Estimasi Jangka Panjang

Determinan	Koefisien	Standar Error	t-Statistik	Prob
LGPI	-4,088***	1,187	-3,445	0,001
INF	0,439***	0,082	5,355	0,000
LKURS	-1,179	1,388	-0,849	0,400
PE	-0,098	0,688	-0,142	0,888
C	32,375	14,102	2,296	0,026

Sumber: Hasil penelitian, diolah * , ** , *** adalah tingkat signifikansi 10 persen, 5 persen, dan 1 persen

Hasil estimasi penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Kinda, et al. (2016) yang menemukan bahwa kenaikan harga komoditas mengakibatkan penurunan kredit bermasalah atau NPL pada 71 (tujuh puluh satu) negara eksportir komoditas yang berada di wilayah *emerging and developing economies/countries*, pada kurun waktu 1997-2013. Hasil penelitian ini juga relatif sama dengan penelitian Khandelwal, et al. (2016) dan Alodaynic (2016) yang menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan harga minyak riil, sebagai salah satu komoditas, memiliki hubungan yang negatif terhadap NPL.

Untuk variabel inflasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan barang secara umum dan terus menerus akan berdampak pada peningkatan NPL, dan signifikan secara statistik. Dalam jangka panjang, setiap kenaikan inflasi 1 persen akan berdampak pada peningkatan NPL sebesar 0,439. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Klein (2013), Koju, et al. (2020), Babihuga (2007), Abid, et al. (2014), Ginting (2016), Ciukaj dan Kil (2020), Ha, et al. (2014), Makri, et al. (2014), dan Dimitrios, et al. (2016).

Untuk variabel nilai tukar dan pertumbuhan ekonomi, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai tukar rupiah yang terdepresiasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang akan berdampak pada penurunan NPL. Namun, kedua variabel tidak signifikan secara statistik. Temuan terhadap variabel nilai tukar tersebut sejalan dengan hasil penelitian Babihuga (2007), Zeman dan Jurca (2008), Ahmad dan Bashir (2013) dan Haniifah (2015). Sedangkan temuan terhadap pertumbuhan ekonomi, sejalan dengan penelitian De Bock dan Demyanets (2002), Babihuga (2007), Klein (2013), Ahmad dan Bashir (2013), Dimitrios, et al. (2016), Ginting (2016), dan Zheng, et al. (2020), yang menemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang negatif dengan NPL. Dengan kata lain, kenaikan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada penurunan NPL.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Ada beberapa temuan dalam penelitian ini. Pertama, hasil estimasi menunjukkan bahwa harga komoditas memiliki pengaruh yang negatif terhadap kredit bermasalah atau NPL dan signifikan secara statistik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Artinya, setiap kenaikan harga komoditas akan menyebabkan penurunan NPL, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Demikian juga sebaliknya, setiap penurunan harga komoditas akan menyebabkan peningkatan kredit bermasalah atau NPL.

Kedua, variabel inflasi memiliki pengaruh positif terhadap NPL. Dengan kata lain, setiap terjadi kenaikan harga-harga secara umum dan terus menerus, maka akan berdampak pada peningkatan NPL. Namun, hasil estimasi menunjukkan hubungan tersebut hanya signifikan dalam jangka panjang. Ketiga, variabel nilai tukar rupiah memiliki pengaruh negatif terhadap NPL.

Dengan kata lain, terdepresiasinya nilai tukar rupiah akan berdampak pada penurunan NPL. Artinya, setiap nilai tukar rupiah melemah terhadap dolar Amerika Serikat, maka akan berdampak pada penurunan kredit bermasalah. Hubungan tersebut hanya signifikan secara statistik dalam jangka pendek. Terakhir, hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh negatif terhadap NPL. Setiap peningkatan pertumbuhan ekonomi, akan berdampak pada penurunan NPL. Namun, hubungan tersebut tidak signifikan secara statistik, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang.

5.2. Saran

Perbankan memiliki peranan penting terhadap kinerja perekonomian suatu negara, yang secara khusus melalui fungsi intermediasi (*financial intermediary function*) yang dijalankan oleh perbankan. Di sisi lain, pelaksanaan fungsi intermediasi dimaksud sangat bergantung pada tingkat kesehatan suatu bank atau industri perbankan itu sendiri. Salah satu indikator kesehatan suatu bank atau industri perbankan adalah rasio antara nilai kredit bermasalah dengan total kredit yang dikucurkan oleh bank atau industri perbankan, yang lebih dikenal dengan sebutan NPL. Dengan demikian, salah satu faktor yang memengaruhi berjalannya peranan perbankan terhadap perekonomian suatu negara adalah kondisi atau capaian NPL di industri perbankan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa harga komoditas memiliki pengaruh negatif terhadap NPL, dimana setiap kenaikan harga komoditas akan berdampak pada penurunan NPL. Saat ini, ketergantungan perekonomian Indonesia terhadap komoditas masih relatif sangat tinggi, khususnya minyak dan gas bumi, mineral dan batubara. Di sisi lain, terbentuknya harga komoditas sangat bergantung pada keseimbangan permintaan dan penawaran di pasar komoditas global. Oleh karena itu, potensi memburuknya kesehatan perbankan nasional sangat rentan terhadap perubahan harga di pasar komoditas global. Dengan demikian, arah kebijakan moneter yang dijalankan oleh otoritas moneter harus tetap memperhatikan dan mempertimbangkan perkembangan harga komoditas di pasar global. Sedangkan pemerintah, selaku otoritas fiskal, perlu berupaya mengurangi ketergantungan perekonomian nasional terhadap komoditas dengan mendorong pertumbuhan kinerja sektor ekonomi bernilai tambah, khususnya manufaktur. Hal ini diperlukan agar mampu mengurangi kerentanan pemburukan kesehatan perbankan (peningkatan NPL) yang dapat bersumber dari pemburukan harga komoditas, dan dampaknya terhadap kinerja perekonomian keseluruhan. Hal ini diperlukan karena terbentuknya harga komoditas sangat bergantung pada keseimbangan di pasar global atau bukan dikontrol penuh oleh kekuatan nasional/domestik.

Daftar Pustaka

- Abid, L., Ouertani, M.N. & Zouari-Ghorbel, S. 2014. Macroeconomic and Bank-Specific Determinants of Household's Non-Performing Loans in Tunisia: A Dynamic Panel Data, Procedia Economics and Finance, Vol. 13, 58-68.

- Agarwal, I., Duttagupta, R., & Presbitero, A.F. 2017. International Commodity Prices and Domestic Bank Lending in Developing Countries. IMF Working Paper 17/279. Washington DC: International Monetary Fund.
- Ahmad, Fawad., & Bashir, Taqadus. 2013. Explanatory Power of Macroeconomic Variable as Determinants of NPL: Evidence from Pakistan. World Applied Sciences Journal, 22(1), 243-255.
- Alodaynic, Saleh. 2016. Oil Prices, Credit Risks in Banking Systems, and Macro-Financial Linkages across GCC Oil Exporters. International Journal of Financial Studies, 2016, 4, 23, 1-14.
- Aviliani., Siregar, H., Maulana, T.N.A., & Hasanah, H. 201). The Impact Of Macroeconomic Condition On The Bank's Performance In Indonesia. Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan, Volume 17, Nomor 4, April 2015, 379-402.
- Babihuga, R. 2007. Macroeconomic and Financial Soundness Indicators: An Empirical Investigation. IMF Working Paper 07/115. Washington DC: International Monetary Fund.
- Ciukaj, Radosław & Kil, Krzysztof. 2020. Determinants of The Non-Performing Loan Ratio in The European Union Banking Sectors with A High Level of Impaired Loans. Economics and Business Review, Vol. 6 (20), No. 1, 2020, 22-45.
- De Bock, Reinout., & Demyanets, Alexander. 2012. Bank Asset Quality in Emerging Markets: Determinants and Spillovers. IMF Working Papers 12/71. Washington DC: International Monetary Fund.
- Dimitrios, A., Helen, L. & Mike, T. 2016. Determinants of Non-Performing Loans: Evidence from Euro-area countries. Finance Research Letters 18, (2016), 116–119.
- Endut, R., Syuhada, N., Ismail, F., & Mahmood, W.M.W. 2013 in Asian Pacific Region. World Applied Sciences Journal, 23, 2013, 57-60.
- Fajar, Hanifan., & Umanto. 2017. The Impact of Macroeconomic and Bank-Specific Factors Toward Non-Performing Loan: Evidence from Indonesian Public Banks. Banks and Bank Systems, Volume 12, Issue 1, 2017, 67-74.
- Fofack, Hippolyte. 2005. Non-performing loans in sub-Saharan Africa: Causal Analysis and Macroeconomic Implications. World Bank Policy Research Working Paper No. 3769.
- Ginting, Ari Mulianta. 2016. Pengaruh Makroekonomi Terhadap Non Performing Loan (NPL) Perbankan. Jurnal Ekonomi & Kebijakan Publik, Vol. 7, No. 2, Desember 2016, 159 – 170.
- Gujarati. D. 1995. Basic Econometrics (3rd ed.). New York : Mc. Graw Hill

- Ha, V.T.V., Trien, L.V., & Diop, H. 2014. Macro Determinants on Non-performing Loans and Stress Testing of Vietnamese Commercial Banks' Credit Risk. *Journal of Science: Economics and Business*, Vol. 30, No. 5E (2014) 1-16.
- Haniifah, Nanteza. 2015. Economic Determinants of Non-performing Loans (NPLs) in Ugandan Commercial Banks. *Taylor's Business Review*, Vol. 5 Issue 2, August 2015, 137-153.
- Khandelwal, Padamja., Miyajima, Ken., & Santos, Andre. 2016. The Impact of Oil Prices on the Banking System in the GCC. *IMF Working Papers* 16/161. Washington DC: International Monetary Fund.
- Kinda, T., Mlachila, M. & Ouedraogo, R. 2016. Commodity Price Shocks and Financial Sector Fragility. *IMF Working Paper* 16/12. Washington DC: International Monetary Fund.
- Klein, N. 2013. Non-Performing Loans in CESEE: Determinants and Impact on Macroeconomic Performance. *IMF Working Papers* 13/72. Washington DC: International Monetary Fund.
- Koju, L., Koju, R., & Wang, S. 2020. Macroeconomic Determinants of Credit Risks: Evidence from High-Income Countries. *European Journal of Management and Business Economics* Vol. 29 No. 1, 2020, 41-53.
- Mankiw, N. Gregory. 2013. Pengantar Ekonomi Makro. Jakarta: Salemba Empat.
- Makri, V., Tsagkanos, A. and Bellas, A. 2014. Determinants of Non-Performing Loans: The Case of Eurozone. *Panoeconomicus*, Vol. 61 No. 2, 193-206.
- Mazreku, I., Morina, F., Misiri, V., Spiteri, J. V., & Grima, S. 2018. Determinants of the Level of Non-Performing Loans in Commercial Banks of Transition Countries. *European Research Studies Journal* Volume XXI, Issue 3, 2018, 3-13.
- Mlachila, Montfort & Ouedraogo, Rasmane. 2017. Commodity Price Shocks and Financial Development. *IMF Working Paper* 17/XX. Washington DC: International Monetary Fund.
- Nachrowi, D Nachrowi & Usman, Hardius. 2006. Pendekatan Populer dan Praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan. Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI.
- Nathan, Sunday., Ibrahim, Mukisa., & Tom, Mwebaze. 2020. Determinants of Non-Performing Loans in Uganda's Commercial Banking Sector. *African Journal of Economic Review*, Volume VIII, Issue I, January 2020, 26-47.
- Nkoro, Emeka & Uko, Aham Kelvin. 2016. Autoregressive Distributed Lag (ARDL) cointegration technique: application and interpretation. *Journal of Statistical and Econometric Methods*, vol.5, no.4, 2016, 63-91.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /POJK.03/2019 Tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum.

- Riyadi, S., Iqbal, M., & Lauren, N. 2015. Strategi Pengelolaan Non Performing Loan Bank Umum Yang Go Public. *Jurnal Dinamika Manajemen*, Vol. 6, No. 1, 2014, 84-96.
- Shrestha, Min B., & Bhatta, Guna R. 2018. Selecting Appropriate Methodological Framework for Time Series Data Analysis. *The Journal of Finance and Data Science*, Volume 4, Issue 2, June 2018, 71-89.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Utari, G.A Diah., Arimurti, Trinil., & Kurniati, Ina. 2012. Pertumbuhan Kredit Optimal. *Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan*, Oktober 2012, 3-36.
- Waqas, M., Fatima, N., Khan, A., & Arif, M. 2017. Determinants of Non-performing Loans: A Comparative Study of Pakistan, India, and Bangladesh. *Journal of Finance & Banking Studies* 6(1), 2017, 51-68.
- Zeman, J. & Jurca, P. 2008. Macro Stress Testing of The Slovak Banking Sector. *National Bank of Slovac Working Paper*, 1, 3–26.
- Zheng, Changjun., Bhowmik, P.K., & Sarker, Niluthpaul. 2020. Industry-Specific and Macroeconomic Determinants of Non-Performing Loans: A Comparative Analysis of ARDL and VECM. *Sustainability* 2020, 12, 325, 21-17.

PENGARUH INDEKS KAPASITAS FISKAL (IKF) DAN INDEKS RUANG FISKAL (IRF) TERHADAP DANA PERIMBANGAN TAHUN 2015-2020 PADA 122 KABUPATEN DAERAH TERTINGGAL DI INDONESIA

The Impact of Fiscal Capacity Index and Fiscal Space Index to Transfer of Balance Fund during 2015-2018 in 122 Underdeveloped Regions in Indonesia

Slamet Widodo

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: slamet.widodo@dpr.go.id

Abstract

Underdeveloped regions are characterized as regions with unavailability of natural resources which causes high financial dependence to the central government in the form of balance funds transfer. This causes the low level of autonomy of underdeveloped regions because of the lack of local revenue sources. The average Fiscal Capacity Index (IKF) of underdeveloped regions during 2015-2018 was 0,75 or in the moderate category. Some underdeveloped regions in Papua and West Papua have high IKF because of the Special Autonomy fund. In terms of fiscal space (IRF), the freedom of underdeveloped regions in determining their own spending priorities by 36% throughout 2016-2018. One of the main goals of fiscal decentralization is to eliminate horizontal gaps between regions, which in turn must be reflected in the budgeting process where regions that are more in need (underdeveloped regions) will get more allocations than other better-off regions.

The purpose of this study is to analyze the influence of IKF and IRF on the balance of funds for the 2015-2018 period in 122 underdeveloped regions in Indonesia. The data used are data on balancing funds, IKF, IRF for the period 2015-2018 sourced from BPS, the Ministry of Finance, and other relevant agencies. The analysis tool uses Panel Data regression with the Fixed Effect Model. The results of the analysis show that the IKF variable has a significant positive effect on the balance fund and the IRF variable has a significant negative effect on the balance fund.

Keywords: *Capacity Fiscal Index, Fiscal Space Index*

1. Pendahuluan

Desentralisasi fiskal yang dilakukan pemerintah di tahun 2000-an berdampak pada kemandirian daerah dalam menangani urusan pemerintahannya, terkecuali kewenangan yang terkait dengan bidang politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal serta keagamaan, tetap dilaksanakan oleh pemerintah pusat. Pelimpahan kewenangan kepada pemerintah daerah tentu saja diikuti dengan penyerahan sumber-sumber pendanaan berupa penyerahan basis-basis perpajakan maupun bantuan pendanaan melalui mekanisme Transfer ke Daerah sesuai asas *money follows function*. Masih adanya mekanisme Transfer ke Daerah didasarkan kepada pertimbangan mengurangi ketimpangan yang mungkin terjadi baik antar daerah (*horizontal imbalances*) maupun antara pemerintah pusat dan daerah (*vertical imbalances*) (Haryanto, 2015).

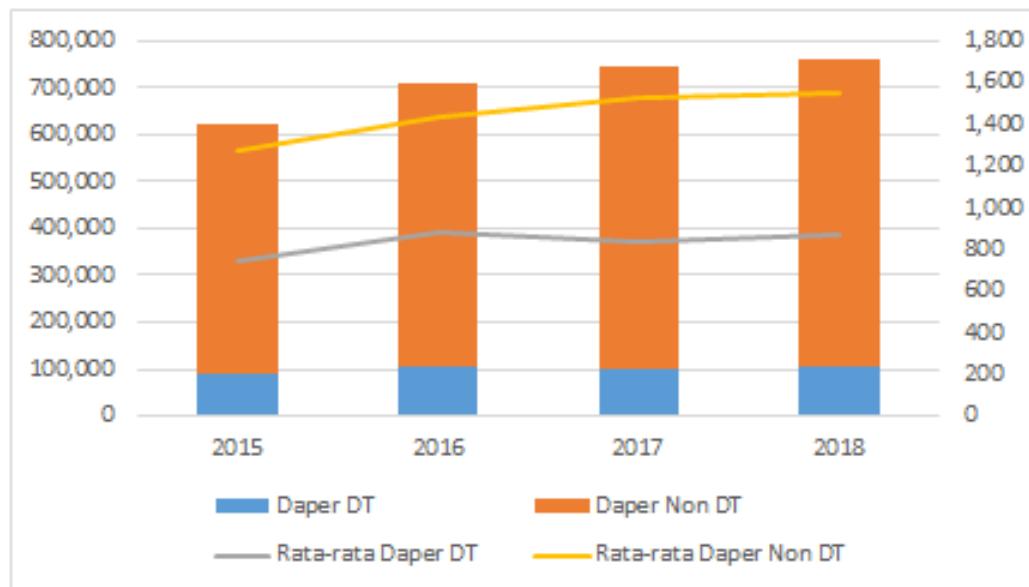
Meskipun belum memberikan hasil yang memuaskan, namun kebijakan desentralisasi fiskal yang diikuti dengan konsekuensi pendanaan dari pemerintah pusat ini mampu memastikan peran aktif pemerintah daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangannya. Hal ini pula yang mendorong lahirnya sejumlah daerah otonomi baru (DOB) diharapkan mampu menyinergikan langkah-langkah bersama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah. Terlepas dari keberhasilan DOB ini, secara ideal pemerintahan yang menangani wilayah yang terlalu luas dengan penduduk yang sangat padat tentunya tidak akan efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya. Hampir satu dekade pelaksanaan desentralisasi fiskal masih menyisakan sejumlah permasalahan seputar esensi utama dari kebijakan ini yaitu ketimpangan antar wilayah yang melahirkan sejumlah daerah yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Sebarannya sebagian besar terkonsentrasi di kawasan timur khususnya di wilayah Pulau Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua.

Program prioritas percepatan pembangunan daerah tertinggal sudah dilakukan sejak tahun 2005 hingga saat ini. Komitmen untuk mempercepat pengentasanannya dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Daerah tertinggal, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, adalah suatu daerah dengan kabupaten yang masyarakat dan wilayahnya relatif kurang berkembang dibandingkan daerah lain dalam skala nasional. Kriteria ketertinggalannya dapat diukur berdasarkan enam kriteria utama yaitu ekonomi, sumber daya manusia, infrastruktur, kapasitas keuangan daerah, aksesibilitas, dan karakteristik daerah.

Meskipun terjadi peningkatan alokasi dana perimbangan dalam periode tahun 2015-2018 bagi daerah tertinggal, jumlah peningkatan tersebut masih di bawah persentase peningkatan dana perimbangan yang diterima oleh daerah non tertinggal. Pertumbuhan dana perimbangan bagi daerah non Daerah Tertinggal (non DT) sebesar 6,8 persen dalam periode tersebut, sementara untuk Daerah Tertinggal (DT) sebesar 5,6 persen. Dari rata-rata dana perimbangan yang diterima untuk masing daerah tersebut, terlihat jumlah dana perimbangan

yang diterima oleh per daerah non DT rata-rata sebesar Rp1.445,2 miliar dan per daerah DT rata-rata sebesar Rp830,4 miliar dalam periode tahun 2015-2018.

Gambar 1. Dana Perimbangan bagi Daerah Tertinggal (DT) dan Non Daerah Tertinggal (Non DT). 2015-2018 (miliar Rp)



Sumber: BPS, (diolah)

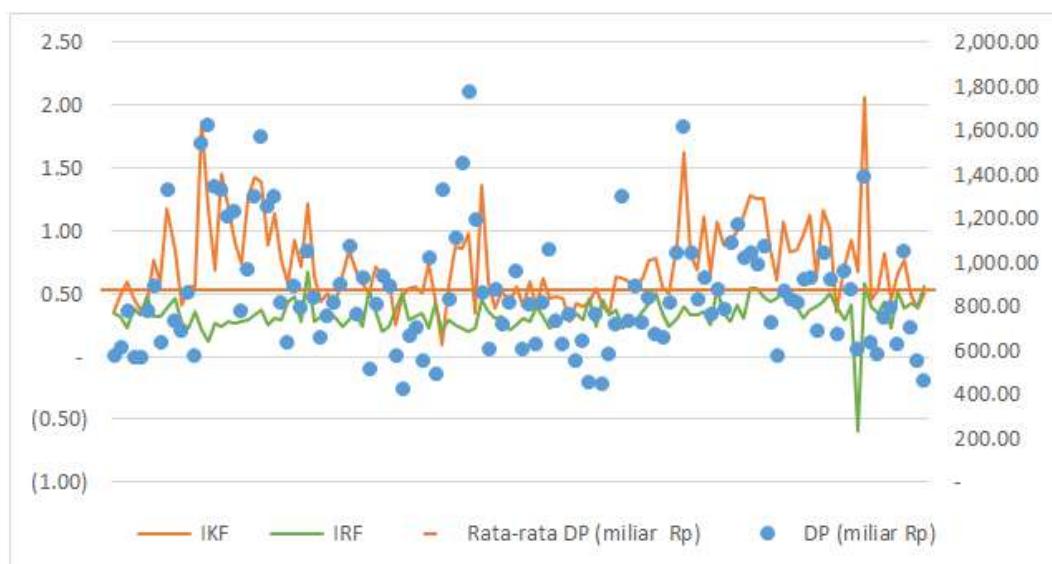
Besarnya dana perimbangan yang diterima daerah dapat meningkatkan kapasitas daerah dalam membiayai prioritas kebutuhan daerah. Penilaian kapasitas daerah sangat penting untuk menentukan besaran alokasi dana transfer tertentu dan pemenuhan kebutuhan sumber pendanaan lain bagi daerah, misalnya melalui pinjaman daerah. Dengan kapasitas fiskal yang tinggi, daerah tidak hanya mampu membiayai prioritasnya sendiri, namun juga memiliki akses sumber pendanaan lain. Hal ini menjadi semakin penting di tengah banyaknya komponen belanja baik di tingkat pusat maupun daerah yang harus dipenuhi oleh pemerintah, sehingga pemerintah perlu melakukan prioritas utama dalam membiayai belanjanya.

Besar kecilnya kemampuan pemerintah untuk membiayai prioritasnya dikaitkan dengan besarnya ruang fiskal yang dimiliki oleh pemerintah. Kapasitas fiskal dan ruang fiskal yang dimiliki pemerintah daerah tertinggal dalam periode tahun 2015-2018 menunjukkan bahwa indeks kapasitas fiskal daerah tertinggal di tahun 2018 secara rata-rata sebesar 0,733 (kategori sedang) dan relatif tidak mengalami perbaikan berarti dibandingkan tahun 2015 yang sebesar 0,742 dan indeks ruang fiskal daerah tertinggal sebesar 36 persen.

Merujuk pada tujuan utama dana perimbangan yaitu untuk mengatasi *horizontal imbalances* (kesenjangan horizontal) antar daerah dan memperbaiki *vertical imbalances* (kesenjangan vertikal) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, maka sudah selayaknya pemerintah memberikan perhatian yang lebih optimal kepada daerah tertinggal untuk mengejar ketertinggalannya.

Daerah tertinggal yang memiliki kapasitas fiskal yang rendah dan ruang fiskal yang kecil seharusnya mendapatkan alokasi dana perimbangan yang lebih banyak dibandingkan daerah lain, terutama daerah yang tidak masuk kategori tertinggal. Prinsip utamanya adalah yang paling membutuhkan mendapatkan alokasi yang lebih banyak.

Gambar 2. IKF, IRF, dan DP Kabupaten Daerah Tertinggal Tahun 2018



Sumber: BPS, (diolah)

Pembangunan daerah tertinggal merupakan pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 untuk mempercepat pembangunan kabupaten tertinggal atau kurang berkembang dibanding kabupaten lainnya. Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, jumlah daerah tertinggal tahun 2015-2019 adalah sebanyak 122 kabupaten daerah tertinggal yang tersebar di Kawasan Timur Indonesia (KTI) mencapai 103 kabupaten atau 84,42 persen dan Kawasan Barat Indonesia (KBI) 19 kabupaten atau 15,57 persen dari 122 kabupaten daerah tertinggal. Kabupaten daerah tertinggal paling banyak terletak di Provinsi Papua dengan 26 kabupaten daerah tertinggal dari total 29 kabupaten, atau dengan persentase sebesar 89,66 persen. Posisi kedua adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan 18 dari 22 kabupaten atau 81,82 persen wilayahnya yang dikategorikan sebagai daerah tertinggal. Daerah tertinggal KBI 11,66 persen dan KTI 49,76 persen.

Dalam perkembangannya di tahun 2015, pemerintah memperbarui langkah-langkah kebijakan bagi daerah tertinggal sebagaimana diatur dalam Perpres No. 131 Tahun 2015. Keluarnya Perpres ini berdasarkan pada perkembangan jumlah daerah tertinggal yang terus mengalami penurunan sejak tahun 2005. Dalam periode tahun 2005-2009 terdapat 199 daerah tertinggal. Selama periode ini dari 199 daerah tertinggal terdapat 50 daerah yang telah terentaskan, namun demikian pada periode tersebut terdapat 34 Daerah Otonomi Baru (DOB) atau daerah pemekaran yang termasuk dalam kategori tertinggal,

sehingga pada periode 2010-2014 terdapat 183 daerah tertinggal. Pada periode 2010-2014 terdapat 70 daerah tertinggal yang telah terentaskan, namun masih terdapat 9 kabupaten DOB yang termasuk kategori daerah tertinggal. Pada periode 2015-2019 terdapat 122 daerah tertinggal dengan 9 DOB, dan target daerah tertinggal yang terentaskan sampai tahun 2019 sebanyak 80 daerah tertinggal.

Salah satu permasalahan dari daerah tertinggal adalah minimnya sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah, sehingga tidak mampu meningkatkan pendapatan daerah. Sementara daerah lain yang lebih beruntung dapat mengandalkan sumber daya alam yang dimilikinya untuk kebutuhan daerahnya. Oleh karenanya, dibutuhkan anggaran yang lebih banyak bagi daerah yang kurang beruntung agar dapat berada di posisi yang setara dengan daerah lain. Kurangnya kapasitas fiskal daerah tertinggal dan minimnya ruang fiskal yang tersedia bagi daerah tertinggal menyebabkan kebutuhan anggaran yang lebih banyak dalam bentuk dana perimbangan. Dibutuhkan kebijakan afirmasi yang tidak hanya menjadikan indikator jumlah penduduk sebagai penentu besaran dana perimbangan, tapi juga indikator yang secara spesifik menjadi ciri daerah tertinggal seperti IFKD dan ruang fiskal.

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Melihat pengaruh variabel Indeks Kapasitas Fiskal Daerah dan Indeks Ruang Fiskal Daerah terhadap dana perimbangan yang diterima daerah tertinggal
- b. Memberikan masukan kebijakan untuk mempercepat pengentasan daerah tertinggal.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Tinjauan Teoritis

Berdasarkan Perpres No. 131 Tahun 2015 tentang Penetapan Daerah Tertinggal Tahun 2015-2019, menetapkan sebanyak 122 kabupaten daerah tertinggal yang harus mendapatkan perhatian serius dari pemerintah pusat. Penetapan daerah tertinggal berdasarkan kriteria yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, yaitu (i) perekonomian masyarakat; (ii) sumber daya manusia; (iii) sarana dan prasarana; (iv) kemampuan keuangan daerah; (v) aksesibilitas; (vi) karakteristik daerah. Seratus dua puluh dua kabupaten daerah tertinggal ini ditargetkan akan berkurang menjadi 80 daerah kabupaten di tahun 2019. Dibutuhkan *affirmative action* dari pemerintah pusat untuk menurunkan jumlah kabupaten tertinggal, baik dari sisi peraturan perundang-undangan maupun dari sisi anggaran. Dari sisi pengalokasian anggaran dana perimbangan, besarnya alokasi seringkali disesuaikan dengan besarnya jumlah penduduk. Dengan kondisi ini, maka sebagian besar dana transfer terkonsentrasi di wilayah padat penduduk seperti Pulau Jawa dan Sumatera, sementara wilayah lain dengan status daerah tertinggal mendapatkan alokasi yang tidak sesuai

dengan besaran kebutuhannya untuk dapat tumbuh sejajar dengan daerah lain. Kondisi ini menjadi menimbulkan ketidakpastian jumlah yang akan diterima daerah serta memengaruhi pembangunan di daerah terutama di 112 kabupaten tertinggal.

2.1.1. Dana Perimbangan

Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan negara yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus (Kementerian Keuangan/Kemenkeu, 2014a). Perhitungan dana perimbangan merujuk pada masing-masing komponen dana perimbangan yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dalam DAU, secara nasional besaran DAU dihitung berdasarkan persentase tertentu dari Pendapatan Dalam Negeri neto (PDN neto) yaitu total penerimaan dalam negeri dikurangi penerimaan dalam negeri yang dibagikan, yang sesuai dengan Undang-Undang (UU) No. 33 Tahun 2004, ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari PDN Neto. Untuk perhitungan ke masing-masing daerah didasarkan atas selisih perhitungan alokasi dasar (gaji PNS daerah) ditambah celah fiskal. Cela fiskal merupakan selisih antara kebutuhan fiskal dengan kapasitas fiskal. Dalam penentuan kebutuhan fiskal perhitungannya menggunakan sejumlah variabel yaitu: jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), indeks kemahalan konstruksi (IKK), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita. Sedangkan kapasitas fiskal dihitung dari besaran alokasi yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan DBH yang diterima suatu daerah.

Sementara perhitungan DAK didasarkan pada kesesuaian antara kebutuhan daerah dengan prioritas nasional pada bidang-bidang kegiatan pembangunan fisik dan non fisik yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Usulan DAK dilakukan melalui sistem aplikasi KRISNA (Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran) yang merupakan integrasi antara 3 (tiga) Kementerian, yaitu Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, dan Kementerian PAN-RB untuk mendukung proses perencanaan, penganggaran, serta pelaporan informasi kinerja. Proses verifikasi usulan dilakukan di tingkat provinsi dan disinkronisasi di tingkat pemerintah pusat yang melibatkan kementerian teknis dan Bappenas. Sedangkan dalam DBH, perhitungan alokasi berdasarkan pada angka persentase tertentu untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DBH terdiri DBH pajak dan DBH Sumber Daya Alam (SDA) yang keduanya dihitung berdasarkan persentase tertentu terhadap penerimaan negara.

2.1.2. Ruang Fiskal Daerah.

Ruang fiskal daerah diperoleh dengan menghitung total pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan hibah, pendapatan yang sudah ditentukan penggunaannya (*earmarked*) yaitu DAK, Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian serta Dana Darurat, dan belanja yang sifatnya mengikat, yaitu

Belanja Pegawai dan Belanja Bunga, dan selanjutnya dibagi dengan total pendapatannya (Kemenkeu, 2014b).

Ruang Fiskal

$$Ruang\ Fiskal = \frac{Total\ Pendapatan - (Pendapatan\ Hibah + Pendapatan\ yang\ Ditentukan\ Penggunaannya)}{Total\ Pendapatan}$$

Dengan kata lain, ruang fiskal adalah dana yang tersedia setelah seluruh kewajiban atau belanja yang sifatnya wajib dan mengikat bagi kelangsungan pemerintahan telah terpenuhi. Pengalokasiannya ke sektor-sektor prioritas maupun non prioritas menjadi diskresi sepenuhnya bagi pemerintah daerah.

Ruang fiskal (*fiscal space*) merupakan suatu konsep untuk mengukur fleksibilitas yang dimiliki pemerintah daerah dalam mengalokasikan APBD untuk membiayai kegiatan yang menjadi prioritas daerah. Semakin besar ruang fiskal yang dimiliki suatu daerah, maka akan semakin besar pula fleksibilitas yang dimiliki oleh pemerintah daerah untuk mengalokasikan belanjanya pada kegiatan-kegiatan yang menjadi prioritas daerah, seperti pembangunan infrastruktur daerah (Kemenkeu, 2014b). Pilihan untuk alokasi anggaran pada bidang-bidang prioritas tentunya tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah secara umum. Karenanya, Heller (2005) juga mendefinisikan ruang fiskal sebagai ketersediaan ruang yang memungkinkan pemerintah menyediakan sumber daya untuk tujuan yang diinginkan tanpa mengancam kesinambungan posisi keuangan pemerintah. Semakin besar ruang fiskal tentu semakin memudahkan daerah dalam menetapkan sendiri prioritas belanjanya.

2.1.3. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) adalah kemampuan keuangan masing-masing daerah yang dicerminkan melalui pendapatan daerah dikurangi dengan pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan dan belanja tertentu.

$$KFD\ Kab/Kota_i = Pendapatan - (Pendapatan\ yang\ Ditentukan\ Penggunaannya + Belanja\ Tertentu)$$

Pendapatan yang penggunaannya sudah ditentukan meliputi: a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok; b) Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau; c) Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi; d) Dana Alokasi Khusus Fisik; e) Dana Alokasi Khusus Nonfisik; f) Dana Otonomi Khusus; dan g) Dana Desa.

Belanja tertentu meliputi: a) Belanja Pegawai; b) Belanja Bunga; c) Belanja Hibah untuk Daerah Otonom Baru; d) Belanja Bagi Hasil; dan e) Alokasi Dana Desa.

Indeks kapasitas fiskal dibagi menjadi empat golongan yaitu a) kapasitas fiskal sangat tinggi, b) kapasitas fiskal tinggi, c) kapasitas fiskal sedang, dan d) kapasitas fiskal rendah.

Peta Kapasitas Fiskal Daerah dapat digunakan untuk: a) pertimbangan dalam penetapan daerah penerima hibah; b) penilaian atas usulan pinjaman daerah; c) penentuan besaran dana pendamping oleh pemerintah daerah, jika dipersyaratkan; dan/atau d) penggunaan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Studi dari Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran/FITRA (2015) tentang ketergantungan pada sektor SDA & ruang fiskal di Kabupaten Indragiri Hulu menunjukkan bahwa tingginya ruang fiskal di daerah ini, sangat dipengaruhi oleh pendapatan daerah yang berasal dari DB (SDA dan DAU). Daerah penghasil sumber daya alam berada jauh lebih tinggi di atas rerata kabupaten nasional, termasuk kondisi ruang fiskal daerahnya. Dapat dikatakan bahwa daerah penghasil memiliki kapasitas keuangan yang lebih fleksibel dibandingkan daerah lain.

Studi dari Herdiyana (2019) tentang Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah menyimpulkan bahwa faktor yang paling memengaruhi peta Kapasitas Fiskal Daerah (KFD) bagi provinsi adalah PAD dan DBH sedangkan bagi kabupaten/kota adalah PAD, DAU, dan DBH. Pada umumnya daerah yang memiliki proporsi PAD/DBH terhadap pendapatan tinggi memiliki indeks KFD yang tinggi pula, sedangkan daerah dengan indeks KFD rendah pada umumnya memiliki PAD yang rendah. Bagi pemerintah provinsi yang memiliki indeks KFD rendah maka sebagian besar (> 50 persen) kabupaten/kota di wilayahnya memiliki indeks KFD yang rendah, sedangkan bagi provinsi yang memiliki indeks KFD tinggi, tidak serta merta sebagian besar kabupaten/kota di wilayahnya memiliki indeks KFD yang tinggi.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menggunakan analisis kuantitatif. Data yang digunakan untuk penelitian ini adalah data panel berbentuk *time series* dari tahun 2006-2015, dan data *cross section* yang terdiri atas 33 provinsi di Indonesia. Data diperoleh dari BPS, Kementerian Keuangan, dan instansi terkait lainnya.

3.2. Model Penelitian

Besarnya ruang fiskal dan kapasitas fiskal daerah memberi keleluasaan daerah dalam mengalokasikan anggarannya ke sektor-sektor yang menjadi prioritas daerah. Skema hubungan antara variabel dana perimbangan dengan variabel-variabel yang memengaruhinya dapat digambarkan sebagai berikut:

$$Daper = \alpha + \beta_1 IKFD_{it} + \beta_2 IRFD_{it} + \varepsilon_i$$

Keterangan:

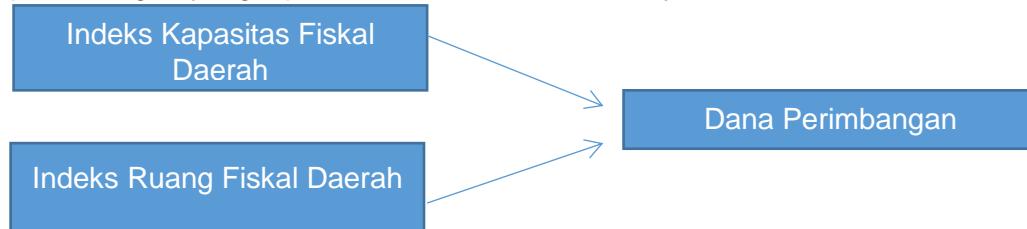
Daper : Dana Perimbangan

IKFD	: Indeks Kapasitas Fiskal Daerah
IRFD	: Indeks Ruang fiskal Daerah
$\beta_1 - \beta_2$: Koefisien
i	: cross section
t	: time series
ε_i	: error term

3.3. Hubungan Antar Variabel

Kapasitas fiskal menggambarkan kemampuan daerah dalam memperoleh sumber-sumber pendanaan lain di luar dana perimbangan. Kapasitas fiskal daerah yang tinggi, dapat menjadi pertimbangan sebagai daerah penerima hibah, mengusulkan pinjaman daerah, dan penggunaan lain sesuai ketentuan perundang-undangan. IKFD juga menggambarkan kemandirian daerah terhadap transfer dana dari pemerintah pusat. Dengan berbagai sumber pendanaan di luar dana perimbangan ini, maka semakin tinggi IKFD (semakin mandiri) maka semakin kecil dana perimbangan yang diperolehnya, dan sebaliknya.

IRFD menggambarkan kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan daerah. IRFD yang besar menunjukkan kemampuan daerah dalam membiayai sendiri kebutuhan daerahnya. Semakin tinggi IRFD maka semakin rendah dana perimbangan yang diperoleh daerah, dan sebaliknya.



4. Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan pada tahapan tersebut, maka dilakukan proses pemilihan model terbaik melalui tahapan, yaitu:

4.1. Pemilihan Model Terbaik

Pemilihan model terbaik dilakukan melalui model estimasi awal yang dilanjutkan dengan serangkaian uji yaitu *Chow-Test*, *Hausman Test* dan *Lagrange Multiplier Test (LM test)*.

4.1.1. Pemilihan Model CEM dan FEM

Proses pemilihan model dilakukan melalui *Chow Test* untuk menentukan apakah *common effect model* (CEM/PLS) yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model* (FEM).

Hipotesis:

H_0 = Jika *Chi Square* > 0,05 , maka yang diterima adalah CEM.

H_1 = Jika *Chi Square* < 0,05, maka tolak H_0 dan menerima FEM.

Tabel 1. Hasil Chow Test

Redundant Fixed Effects Tests

Equation: Untitled

Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	21,648018	(121,364)	0,0000
Cross-section Chi-square	1026,590180	121	0,0000

Sumber: BPS, (data diolah)

Hasil pengujian menunjukkan baik F test maupun *Chi-square* signifikan (*p-value* 0,000 atau lebih kecil dari 0,05 persen) sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima, maka model mengikuti *fixed effect model*.

4.1.2. Pemilihan Model REM dan FEM.

Proses pemilihan model dilakukan melalui *Hausman-test* untuk menentukan apakah *random effect model* (REM) yang tepat dijadikan metode analisis, ataukah *fixed effect model* (FEM).

Hipotesis:

H_0 = Jika *Chi Square* > 0,05, maka terima H_0 yaitu REM lebih tepat.

H_1 = Jika *Chi Square* < 0,05, maka tolak H_0 , yaitu FEM lebih tepat.

Tabel 2. Hasil Hausman Test

Correlated Random Effects - Hausman Test

Equation: Untitled

Test cross-section random effects

Test Summary	Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob.
Cross-section random	32,624682	2	0,0000

Sumber: BPS, (data diolah)

Hasil pengujian menunjukkan signifikan (*p-value* 0,0000 kurang dari 0,05 persen), sehingga H_0 ditolak dan H_1 diterima. Dengan demikian model yang digunakan adalah *fixed effect model*.

4.1.3. Uji LM Test

Lagrange Multiplier Test harus dilakukan jika pada proses pemilihan model melalui *Chow-test* dan *Hausman test* menunjukkan hasil yang berbeda, yaitu:

- Chow Test* menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *common effect* daripada *fixed effect*. Sehingga langkah berikutnya untuk

menentukan apakah *common effect* lebih baik daripada *random effect*, maka diperlukan uji *Lagrange Multiplier Test*.

- b. *Hausman Test* menunjukkan bahwa metode yang terbaik adalah *random effect* daripada *fixed effect*. Sehingga langkah berikutnya untuk menentukan apakah *random effect* lebih baik dari pada *common effect*, maka diperlukan *Lagrange Multiplier Test*.

Dikarenakan *Chow-test* maupun *Hausman-test* menunjukkan bahwa model yang terbaik adalah *fixed effect*, maka tidak diperlukan *LM test*.

4.2. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam model regresi mencakup uji multikolinearitas dan uji heteroskedastisitas.

4.2.1. Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi panel ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Model yang baik adalah model yang tidak terjadi korelasi antar variabel independennya.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas

	IKF	IRF
IKF	1	0,4364251416320795
IRF	0,4364251416320795	1

Sumber: BPS, (data diolah)

Dari tabel di atas dapat dilihat nilai koefisien korelasinya antar variabel independen IKFD dan IRFD di bawah 0,80 yang berarti tidak ada multikolinearitas.

4.2.2. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya penyimpangan asumsi klasik heteroskedastisitas yaitu adanya ketidaksejalan varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Proses melakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser. Uji Glejser meregresikan variabel-variabel bebas terhadap residual absolut. Residual adalah selisih antara nilai observasi dengan nilai prediksi, sementara absolut adalah nilai mutlaknya. Uji Glejser ini hanya berlaku pada *fixed effect*. Jadi, ketika hasil analisis dan pemilihan model regresi yang dipilih adalah *fixed effect model* (FEM), maka uji Glejser perlu digunakan. Hal itu untuk melihat apakah terjadi pelanggaran asumsi klasik heteroskedastis pada model regresi atau tidak.

Tabel 4. Hasil Uji Glejser atas Variabel Absolut Residual

Dependent Variable: RESABS
 Method: Panel Least Squares
 Date: 05/03/20 Time: 21:23
 Sample: 2015 2018
 Periods included: 4
 Cross-sections included: 122
 Total panel (balanced) observations: 488
 White diagonal standard errors & covariance (d.f. corrected)

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IKF	-5476.011	5535.126	-0.989320	0.3232
IRF	-74835.94	50654.07	-1.477393	0.1404
C	90902.55	18135.06	5.012532	0.0000

 Effects Specification

 Cross-section fixed (dummy variables)

Sumber: BPS, (data diolah)

Indikator untuk mengetahui ada atau tidaknya heteroskedastisitas, adalah apabila nilai probabilitas $< 0,05$ maka adanya heteroskedastisitas. Sebaliknya apabila nilai probabilitas pada setiap variabel independen $> 0,05$ maka terbebas dari pelanggaran asumsi heteroskedastis. Karena nilai probabilitas untuk variabel IKF dan IRF lebih dari 0,05, maka tidak terdapat pelanggaran asumsi heteroskedastisitas.

4.3. Interpretasi Hasil

Setelah terpilihnya model *fixed effect* dengan serangkaian uji asumsi klasik, maka akan dilakukan uji *Goodness of Fit*. Uji *Goodness of Fit* pada penelitian ini terdiri dari uji F, uji t, dan uji koefisien determinasi (R^2).

4.3.1. Uji F

Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen (Kuncoro, 2011). Pengujian ini dilakukan untuk melihat pengaruh secara simultan variabel independen terhadap variabel dependen.

Tabel 5. Hasil Uji F

Nilai	F-Statistik	P-value	Kesimpulan
26,06000	0,000000	Signifikan	
Daerah kritis H_0 ditolak jika $p\text{-value} < \alpha = 0,05$			

Sumber: BPS, (data diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa nilai $p\text{-value} 0,0000 < \alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel independen secara bersama berpengaruh terhadap variabel dependen.

4.3.2. Uji t

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh signifikansi setiap variabel independen terhadap variabel dependen. Hipotesis dalam pengujian t adalah:

H_0 : secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

H_1 : secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen

Jika probabilitas nilai t hitung $> 0,05$ maka H_0 diterima atau menolak H_1 , sebaliknya jika probabilitas nilai t hitung $< 0,05$ maka H_0 ditolak atau menerima H_1 . Tingkat signifikansi yang digunakan dalam pengujian ini sebesar 5 persen.

Tabel 6. Hasil Uji t

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
IKF	28.965,10	10424,26	2,778623	0,0057
IRF	-221.625,8	86494,10	-2,562323	0,0108
C	888.398,4	30651,46	28,98389	0,0000

Sumber: BPS, (diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa semua variabel independen telah signifikan berpengaruh terhadap variabel dana perimbangan. Dengan nilai *p-value* berturut-turut sebesar 0,0057; 0,0108; dan 0,0000, yang lebih kecil dibandingkan α , 0,05.

4.3.3. Uji Koefisien Determinasi R^2 dengan Variabel yang Signifikan

Uji koefisien determinasi R^2 dilakukan untuk mengukur seberapa besar variabel-variabel independen dalam model penelitian mampu menjelaskan variabel dependennya.

Tabel 7. Uji R^2 dengan Variabel yang Signifikan

Koefisiensi Determinasi	
<i>R-squared</i>	0,898022
<i>Adjusted R-squared</i>	0,863562

Sumber : BPS, (diolah)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa 89,8 persen dari dana perimbangan pemerintah kabupaten daerah tertinggal dapat dijelaskan oleh variabel IKF dan IRF, sedangkan sisanya sebesar 10,2 persen dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

4.3.4. Interpretasi Persamaan Regresi

Berdasarkan Tabel 6 di atas, maka hasil estimasi dengan menggunakan model *fixed effect* akan diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

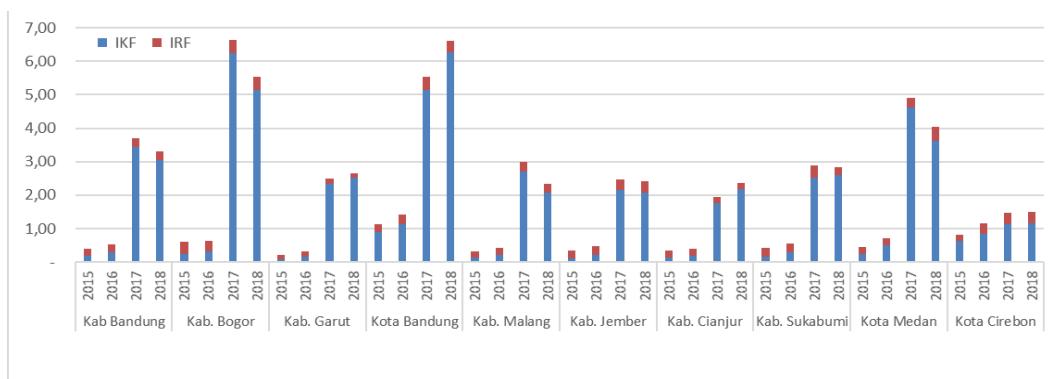
$$\text{Daper} = 28.965,101289 * \text{IKFD} - 221.625,818429 * \text{IRFD} + 888.398,422788 + [\text{CX}=\text{F}]$$

Berdasarkan pada persamaan di atas, hubungan antar variabel dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pengaruh Indeks Kapasitas Fiskal (IKF) terhadap Dana Perimbangan
- Hasil dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan IKF, akan meningkatkan dana perimbangan yang diperoleh kabupaten daerah tertinggal. Kenaikan sebesar 1 persen IKF akan meningkatkan dana perimbangan sebesar 28,96 miliar.

Semakin tinggi IKF mencerminkan semakin besar kemandirian daerah atau semakin kecil ketergantungan daerah atas transfer dana dari pusat. Tingginya IKF menunjukkan kemampuan daerah dalam mengelola sumber pendapatannya sekaligus memperbesar peluang daerah dalam memperoleh sumber pendanaan lain di luar dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan data 10 besar kabupaten/kota penerima dana perimbangan terbesar di tahun 2018 yang secara rata-rata memiliki IKF sebesar 1,74 (kategori tinggi), dengan ruang fiskal rata-rata sebesar 26 persen. Seluruh kabupaten daerah tertinggal di Provinsi Papua dan Papua Barat juga rata-rata memiliki IKF tinggi karena di samping mendapatkan dana perimbangan, kedua provinsi ini juga mendapatkan dana Otonomi Khusus.

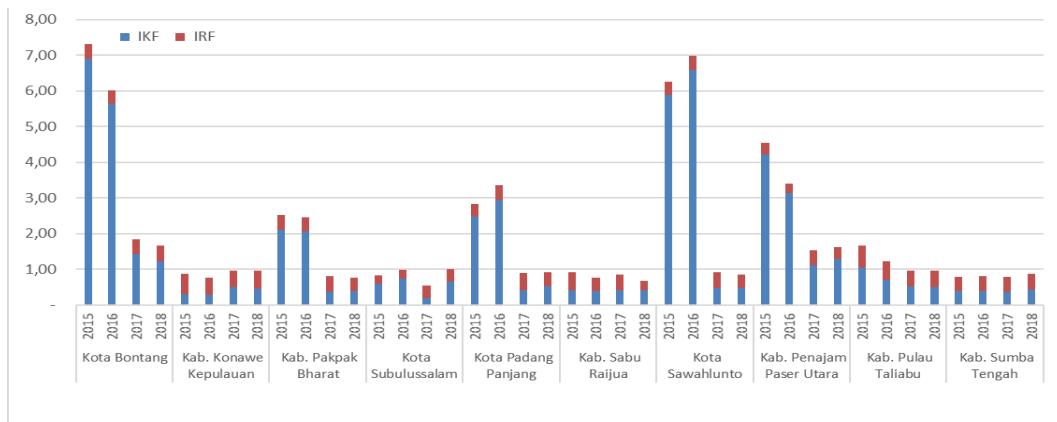
Gambar 3. Perkembangan IKF dan IRF di 10 Kabupaten/Kota Penerima Terbesar Dana Perimbangan Tahun 2018.



Sumber: BPS & Kementerian Keuangan, diolah

- b. Pengaruh Indeks Ruang Fiskal (IRF) terhadap Dana Perimbangan
- Hasil dari persamaan regresi tersebut menunjukkan bahwa kenaikan IRF, akan mengurangi dana perimbangan yang diperoleh kabupaten daerah tertinggal. Kenaikan sebesar 1 persen IRF akan mengurangi dana perimbangan sebesar Rp22,1 miliar. Semakin besar IRF mencerminkan semakin besar kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhan prioritasnya sendiri di luar kebutuhan prioritas nasional yang pendanaannya berasal dari dana perimbangan. Hal ini sejalan dengan data 10 besar kabupaten/kota penerima dana perimbangan terkecil di tahun 2018 yang secara rata-rata memiliki IKF sebesar 1,44 (kategori tinggi) dan IRF sebesar 40 persen.

Gambar 4. Perkembangan IKF dan IRF di 10 Kabupaten/Kota Penerima Terkecil Dana Perimbangan Tahun 2018.



Sumber: BPS & Kementerian Keuangan, diolah

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Hasil persamaan regresi data panel dengan model *fixed effect* menunjukkan variabel dana perimbangan dan IKF memiliki hubungan dengan arah positif, yang artinya kenaikan IKF akan meningkatkan besaran dana perimbangan. Data penerima 10 besar dana perimbangan di tahun 2018 juga menunjukkan rata-rata daerah tersebut memiliki IKF yang tinggi dengan IRF yang rendah. Sebagian besar daerah penerima 10 terbesar dana perimbangan berlokasi di Pulau Jawa, yang dicirikan sebagai pulau dengan jumlah penduduk terpadat di Indonesia. Ini dapat dikatakan bahwa kepadatan jumlah penduduk memegang porsi yang lebih banyak dalam menentukan besaran dana perimbangan yang diterima suatu daerah.

Sementara itu hubungan variabel dana perimbangan dengan IRF memiliki hubungan dengan arah negatif, yang berarti kenaikan IRF akan mengurangi besaran dana perimbangan yang diperoleh oleh kabupaten daerah tertinggal. Data penerima 10 kabupaten/kota penerima dana perimbangan terkecil rata-rata memiliki IKF yang tinggi yaitu sebesar 1,47. Angka ini lebih banyak disumbang oleh daerah dengan IKF sangat tinggi seperti Kota Bontang, Kab. Pakpak Bharat, Kota Padang Panjang, Kota Sawahlunto, dan Kab. Penajam Paser Utara yang memiliki IKF diatas 2. Sementara 4 daerah tertinggal penerima dana perimbangan terkecil di tahun 2018 yaitu Kab. Konawe Kepulauan, Kab. Sabu Raijua, Kab. Pulau Taliabu, dan Kab. Sumba Tengah hanya memiliki IKF rata-rata 0,47 (kategori sangat rendah).

Hal ini menjelaskan bahwa pengalokasian dana perimbangan tidak sepenuhnya bergantung pada variabel IKF dan IRF semata, namun ada banyak variabel lain seperti jumlah penduduk.

5.2. Saran

Pengalokasian dana perimbangan semestinya tetap berpegang pada tujuan utama, khususnya mengurangi kesenjangan horizontal antar daerah. Berpedoman pada tujuan ini, maka selayaknya daerah dengan kapasitas fiskal yang rendah layak mendapatkan dana perimbangan lebih banyak dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal yang lebih tinggi. Daerah dengan kapasitas yang rendah, bahkan sangat rendah hanya dapat mengandalkan sumber pendanaannya dari dana perimbangan, dan sulit untuk mengusulkan pinjaman daerah. Dengan kata lain, tingkat ketergantungannya kepada pemerintah pusat jauh lebih tinggi dibandingkan daerah dengan kapasitas fiskal yang tinggi atau bahkan sangat tinggi.

Daftar Pustaka

- Schick, Allen. 2008. Budgeting For Fiskal Space, Asian OECD Senior Budget Officials Meeting, January 2008.
- Badan Pusat Statistik. Statistik Keuangan Pemerintahan Kabupaten/Kota, berbagai tahun, Badan Pusat Statistik. Jakarta.
- Ekananda, Makyus (2016). Analisis Ekonometrika Data Panel, Edisi 2. Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran/FITRA. 2015. Ketergantungan Pada Sektor SDA & Ruang Fiskal Kabupaten Indragiri Hulu. Fact Sheet 15 Oktober 2015
- Haryanto, Joko Tri. 2015. Desentralisasi Fiskal Seutuhnya dalam <https://www.kemenkeu.go.id/publikasi/artikel-dan-opini/desentralisasi-fiskal-seutuhnya> diakses 28 April 202.
- Heller, Peter S. 2005. Understanding Fiskal Space. IMF
- Herdiyana, Deni. 2019. Analisis Data Peta Kapasitas Fiskal Daerah. Jurnal Pajak dan Keuangan Negara, Vol. 1, No. 1 (2019), Hal. 112-133
- Kementerian Keuangan. 2014a. Postur APBN Indonesia. Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta
- _____. 2014b. Deskripsi dan Analisis APBD 2014. Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan. Jakarta.
- _____. 2014c. Dasar-Dasar Praktek Penyusunan APBN di Indonesia Edisi II. Direktorat Jenderal Anggaran. Jakarta
- _____. Leaflet Dana Alokasi Umum. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- _____. Leaflet Dana Bagi Hasil. Kementerian Keuangan. Jakarta.
- PMK Nomor 33 /PMK.07 /2015 Tentang Peta Kapasitas Fiskal

PMK Nomor 37/PMK.07/2016 Tentang Peta Kapasitas Fiskal

PMK Nomor 119/PMK.07/2017 Tentang Peta Kapasitas Fiskal

PMK Nomor 107/PMK.07/2018 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

ANALISIS FAKTOR DETERMINASI PENANAMAN MODAL ASING (PMA) LANGSUNG DI ASEAN

Analysis of Foreign Direct Investment (FDI) Determinant in ASEAN

Dwi Resti Pratiwi

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: dwi.pratiwi@dpr.go.id

Abstract

The number of Foreign Direct Investment (FDI) in ASEAN has been increasing over the past years. FDI is one of the sources of investment that is really important, mainly for developing countries. This research aims to analyse the development and determinants of Foreign Direct Investment (FDI) inflows in ASEAN countries over the period 2007 to 2018. It focused on six members of ASEAN countries including Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand, Philipines and Vietnam. By using data panel analysis with common effect model, it indicates that market size, exchange rate, trade openness, and political stability, were significant and positively attracted FDI inflow in ASEAN. Additionally, real interest rate was significantly proven to have negative effect on FDI Inflow. Meanwhile, inflation rate was not significant in attracting FDI to the region. This result shows that macroeconomic indicators are the key factors that attract more FDI. So that, the Government of ASEAN Countries have to maintain macroeconomic stability in encouraging more investors to the ASEAN countries. Beside that, political risk and uncertainty has to be minimized by increasing the political stability and good control of corruption in order to create condusive investment environment for foreign investors.

Keywords: *Foreign Direct Investment, FDI, ASEAN*

1. Pendahuluan

Penanaman Modal Asing (PMA) langsung atau *Foreign Direct Investment* (FDI) memainkan peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi terutama di negara-negara berkembang karena dapat memberikan sarana untuk meningkatkan modal dengan biaya yang efektif (Changwatchai, 2010). Ditambah lagi, FDI juga meningkatkan aset berwujud dan tidak terwujud seperti teknologi maju, kemampuan manajemen yang baik dan desain produk yang inovatif (Wang, 2009). Argumen ini masuk akal karena banyak negara berkembang, yang relatif mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi setelah menerima mayoritas FDI dunia, termasuk anggota *Association of South East Asia Nations*

(ASEAN). Banyak penelitian sebelumnya telah mengonfirmasi hubungan positif antara integrasi regional berkaitan dengan penciptaan perdagangan (Ismail, 2009). Sejalan dengan hal tersebut, sejak implementasi Perjanjian Investasi ASEAN (ASEAN Investment Agreement/AIA), ASEAN telah berkomitmen untuk memperkuat rezim investasinya. Di bawah ASEAN *Free Trade Agreement* (AFTA) arus bebas investasi ditargetkan sebagai ukuran inti untuk mencapai pasar tunggal dan basis produksi terintegrasi, bersama dengan pergerakan bebas barang, jasa, dan aliran modal bebas. Selain itu, dengan lokasi yang strategis, sumber daya alam yang melimpah, kualitas sumber daya manusia yang tinggi, dan pertumbuhan ekonomi yang tahan terhadap krisis, ASEAN telah terlibat secara ekonomi, perdagangan dan investasi dengan semua ekonomi besar dunia. Hal ini diharapkan dapat membantu negara-negara ASEAN menarik lebih banyak FDI. Pada periode 1991-1997, ASEAN telah menjadi tujuan merah bagi investor internasional dalam memilih lokasi investasi (Hoang dan Bui, 2014). Pada periode ini, arus masuk FDI ke ASEAN mencapai 8 persen dari total FDI dunia. Keberhasilan reformasi ekonomi dan kebangkitan kembali pertumbuhan ekonomi setelah krisis telah mendorong aliran FDI ke ASEAN.

Prestasi ASEAN sebagai kawasan yang memiliki daya tarik dalam berinvestasi terus berlanjut hingga saat ini. Di tahun 2010, arus masuk FDI ke ASEAN mencapai 7,8 persen selanjutnya di tahun 2018 mengalami peningkatan hingga 11,5 persen. Meskipun demikian, arus masuk FDI ke ASEAN sempat mengalami penurunan di tahun 2011 dan 2015. Sebagai bentuk aliran modal yang bersifat jangka panjang dan relatif tidak rentan terhadap gejolak perekonomian, aliran *Foreign Direct Investment* (FDI) sangat diharapkan untuk membantu mendorong pertumbuhan investasi yang *sustainable* di dalam suatu negara. Investasi langsung berupa FDI ini juga lebih disukai daripada investasi portofolio. Oleh karena itu menjadi penting untuk mengetahui determinan FDI di suatu negara sehingga dapat dirumuskan suatu kebijakan untuk mendorong peningkatan aliran FDI menjadi lebih efektif dan diarahkan pada faktor-faktor yang berperan penting dan berpengaruh untuk mendorong minat investor asing menanamkan modal dalam bentuk FDI. Aliran FDI yang cukup tinggi ke ASEAN tidak dibarengi dengan pendistribusianya yang merata diantara anggota ASEAN tersebut. Tabel 1 menunjukkan nilai FDI yang masuk ke negara-negara ASEAN dari tahun 2015-2018, dimana hingga tahun 2018 total FDI yang masuk sebesar USD154,7 miliar. Nilai FDI tersebut terkonsentrasi pada 6 negara ASEAN yaitu Singapura, Indonesia, Vietnam, Thailand, Filipina dan Malaysia. Keenam negara tersebut menyumbang 94,5 persen dari total arus masuk FDI ke ASEAN.

Oleh karena itu, penelitian ini akan difokuskan pada 6 (enam) negara ASEAN yang mendominasi aliran FDI di kawasan ini. Sejak diresmikannya ASEAN *Economics Community* (AEC) kebijakan di bidang investasi menjadi hal yang krusial. Dengan demikian, semakin penting penelitian mengenai FDI negara ASEAN, terutama faktor-faktor yang memengaruhinya, sehingga kawasan ASEAN semakin mampu menarik FDI, baik FDI dari sesama negara ASEAN (*intra ASEAN*) maupun FDI dari negara *partner*.

**Tabel 1. Arus Masuk Foreign Direct Investment di ASEAN Tahun 2015-2018
(USD Miliar)**

Negara	2015	2016	2017	2018
Brunei Darussalam	0,2	-0,2	0,5	0,5
Kamboja	1,7	2,3	2,7	3,1
Indonesia	16,6	3,9	20,6	22
Laos	1,1	1,1	1,7	1,3
Malaysia	10,2	11,3	9,3	8,1
Myanmar	2,8	3	4	3,6
Filipina	5,6	8,3	10,3	9,8
Singapura	59,7	73,9	75,7	77,6
Thailand	9,9	2,8	8	13,2
Vietnam	11,8	12,6	14,1	15,5
ASEAN	118,7	119	146,9	154,7

Sumber: ASEAN Secretariat 2019

Di Indonesia sendiri FDI sangat berperan bagi perekonomian dan penciptaan lapangan kerja. Selain itu, arus modal yang masuk melalui FDI menjadi penopang nilai neraca pembayaran Indonesia (NPI) agar terjaga surplusnya. Hal ini tentunya akan memperkuat ketahanan eksternal Indonesia yang kemudian dapat menjaga nilai tukar rupiah dan kestabilan perekonomian. Dengan mengetahui perkembangan dan faktor-faktor yang memengaruhi FDI, maka dapat dirumuskan kebijakan investasi yang terus relevan dan efektif untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan investasi arus masuk ke dalam ASEAN. Kemampuan menarik FDI ini juga pada akhirnya akan semakin menguatkan posisi ASEAN di kancah ekonomi internasional dan juga meningkatkan ekonomi negara anggota, terutama Indonesia. Untuk itulah dalam studi ini akan membahas mengenai perkembangan *Foreign Direct Investment (FDI)* dan faktor determinasi FDI di 6 negara ASEAN.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Konsep Penanaman Modal Asing Langsung

Penanaman Modal Asing (PMA) merupakan aliran arus modal yang berasal dari luar negeri yang mengalir ke sektor swasta baik yang melalui investasi langsung (*direct investment*) maupun investasi tidak langsung berbentuk portofolio. Investasi tidak langsung (portofolio) merupakan investasi keuangan yang dilakukan di luar negeri. Investor membeli utang atau ekuitas, dengan harapan mendapat manfaat finansial dari investasi tersebut. Bentuk investasi portofolio yang sering ditemui adalah pembelian obligasi/saham dalam negeri oleh orang/perusahaan asing (Ambarsari & Purnomo, 2005). Sementara itu, PMA langsung atau *foreign direct investment (FDI)* dapat mengambil beberapa bentuk, yaitu pembentukan suatu cabang perusahaan di negara pengimpor modal, pembentukan suatu perusahaan dimana perusahaan dari negara penanam modal memiliki mayoritas saham, pembentukan suatu perusahaan di negara pengimpor yang semata-mata dibiayai oleh perusahaan yang terletak di

negara penanam modal, mendirikan suatu korporasi di negara penanam modal untuk secara khusus beroperasi di negara lain, menaruh aset (aktiva) tetap di negara lain oleh perusahaan nasional dari negara penanam modal (Jhingan dalam Permana & Rivani, 2013). Menurut Kurniati et al. (2007), FDI yang dilakukan oleh negara-negara di dunia pada hakikatnya berawal dari pemikiran sebagai berikut:

- a) Ketidaksempurnaan pasar (Hymer, 1976), yang mengemukakan bahwa FDI merupakan efek langsung dari pasar yang tidak sempurna.
- b) Teori internalisasi (Rugman, 1986), dimana FDI digunakan oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk mengambil keuntungan dari efisiensi internal *host country*.
- c) Pendekatan eklektik (Dunning, 1988) dimana FDI digunakan untuk mengambil keuntungan *ownership*, *internalisation*, dan *locational advantages*.

Ciri yang menonjol dari penanaman modal asing langsung adalah melibatkan bukan hanya pemindahan sumber daya tetapi juga pemberlakuan pengendalian. Dengan begitu, cabang atau anak perusahaan tidak hanya memiliki kewajiban finansial kepada induk perusahaannya; tetapi juga merupakan bagian dari struktur organisasi yang sama (Mudara; 2011). Penanaman modal asing langsung merupakan salah satu konsep ekonomi yang dapat dilihat sebagai faktor penentu pertumbuhan ekonomi dan pembangunan teknologi. Hal ini didasari pada sebagian besar penelitian menyatakan bahwa inti dari pembangunan ekonomi adalah transfer sumber daya yang cepat dan efisien serta mengadopsi praktek-praktek terbaik antar lintas negara (Kok & Ersoy, 2009). IMF telah memiliki bukti empiris bahwa arus modal langsung (FDI) tidak stabil (*less volatile*) dibandingkan arus modal lainnya, meskipun demikian FDI lebih baik bagi *outcome* pertumbuhan dan pengembangan suatu negara.

FDI memberikan dampak ekonomi baik pada negara investor (*home country*) ataupun negara penerima modal (*host country*). Bagi negara maju yang pada modal umumnya melakukan penanaman modal pada negara yang memiliki keterbatasan modal jika kedua negara tersebut menjalin hubungan ekonomi. Negara investor tersebut atau *home country* akan memperoleh peningkatan total pendapatan nasional dari faktor produksi modal. Sementara itu, rata-rata dari faktor produksi tenaga kerja di *home country* mengalami penurunan. Sehingga pembatasan penanaman modal ke luar negeri banyak dilakukan oleh negara untuk melindungi tenaga kerja di negaranya. Transfer modal tersebut juga mengakibatkan redistribusi pendapatan domestik dari para pemilik faktor produksi tenaga kerja ke para pemilik faktor produksi modal di negara sumber investasi. Meskipun *host country* secara keseluruhan diuntungkan oleh adanya modal dari negara lain, namun ada pula sebagian warganya yang mengalami kerugian. PMA memberikan kerugian bagi para pemilik modal karena tingkat hasil modal domestik menjadi berkurang setelah masuknya modal asing (Salvatore, 1997). Meskipun demikian, bila dibandingkan dengan investasi

portofolio, PMA atau FDI lebih banyak mempunyai kelebihan khususnya bagi negara berkembang. Selain sifatnya yang permanen/jangka panjang, penanaman modal asing memberi andil dalam transfer teknologi, alih keterampilan manajemen dan yang terpenting membuka lapangan kerja baru.

2.2. Motivasi/Faktor Determinasi *Foreign Direct Investment (FDI)*

Ada banyak teori yang menjelaskan penentu atau motivasi FDI. Di antaranya Dunning dan Lundan (2008) mengusulkan kerangka teori komprehensif yang relatif dari penentu FDI. Mereka menggambarkan empat jenis utama FDI, yaitu:

a) *market-seeking*

Motivasi *market-seeking* FDI bertujuan untuk menembus pasar negara domestik dan umumnya dihubungkan dengan ukuran pasar dan pendapatan per kapita, pertumbuhan pasar, akses ke pasar global dan regional, struktur dan pilihan konsumen pasar domestik. Investasi pencarian pasar dapat dilakukan untuk mempertahankan atau melindungi pasar yang ada, atau untuk mengeksplorasi atau mempromosikan pasar baru. Bersama dengan ukuran pasar dan pertumbuhan pasar ekonomi *host country*, hambatan untuk mengakses pasar lokal, seperti tarif dan biaya transportasi, juga mendorong jenis FDI ini.

b) *resource-seeking*

Ada tiga jenis *resource-seeking*, yaitu pertama, ada yang mencari sumber daya fisik dari satu atau lain jenis. Sumber daya yang mereka cari termasuk bahan bakar mineral, mineral industri, logam dan produk pertanian, dan lain-lain. Kelompok kedua ialah perusahaan multinasional yang mencari pasokan berlimpah dari tenaga kerja tidak terampil atau semi-terampil yang murah dan termotivasi dengan baik. Jenis ketiga dari *resource-seeking* FDI didorong oleh kebutuhan perusahaan untuk memperoleh kemampuan teknologi, manajemen atau keahlian pemasaran dan keterampilan organisasi.

c) *efficiency-seeking*

FDI yang mencari efisiensi ada dua jenis utama. Yang pertama adalah yang dirancang untuk mengambil keuntungan dari perbedaan dalam ketersediaan dan biaya relatif dari berbagai negara. Jenis investasi *efficiency-seeking* yang kedua adalah yang terjadi di negara-negara dengan struktur ekonomi dan tingkat pendapatan yang hampir sama dan dirancang untuk mengambil keuntungan dari skala ekonomi dan ruang lingkup, serta perbedaan dalam selera konsumen dan kemampuan pasokan. Intinya, *efficiency-seeking* FDI karena dimotivasi untuk menciptakan sumber daya saing yang baru bagi perusahaan serta karena biaya-biaya produksi yang lebih rendah termasuk juga pertimbangan produktivitas.

d) *asset-seeking*

Perusahaan yang melakukan *asset-seeking* umumnya datang dengan mengakuisisi aset perusahaan asing, untuk mempromosikan tujuan strategis jangka panjang mereka - terutama untuk mempertahankan atau meningkatkan daya saing global mereka.

Motivasi utama FDI yang dikenal hingga hari ini mungkin adalah *market size*. Seperti yang disebutkan oleh Dunning (2008), FDI yang mencari pasar dirancang untuk memuaskan pasar tertentu atau serangkaian pasar asing. Semakin besar pasar lokal, semakin besar daya tarik pasar ini bagi perusahaan untuk terlibat dalam FDI. Hubungan positif antara ukuran pasar dan FDI ini telah dikonfirmasi secara luas oleh banyak peneliti (Çeviç & Çamurdan, 2007). Ukuran pasar yang paling umum adalah PDB dan variasi lainnya, seperti PDB per kapita, pertumbuhan PDB, dan lain-lain (Resmini, 2000).

Selain faktor *market size*, keterbukaan ekonomi yang semakin luas dari setiap negara di dunia, baik keterbukaan dalam perdagangan luar negeri (*trade openness*) maupun keterbukaan di sektor finansial (*financial openness*) semakin tidak terelakkan. Dimana keterbukaan ini menggambarkan semakin hilangnya hambatan dalam melakukan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif, dan semakin lancarnya mobilitas modal antarnegara. Secara teori keterbukaan ekonomi memberi keuntungan bagi semua negara yang terlibat di dalamnya (Ruth & Syofyan, 2014). Hoang (2012) juga menyatakan bahwa dengan adanya *trade openness* yang tinggi, menyebabkan *trade barrier* semakin menurun. Hal ini merupakan suatu kesempatan bagi investor asing untuk dapat memanfaatkan keunggulan komparatif *host country* tersebut untuk dapat melakukan *re-export*.

Inflasi juga memengaruhi penanaman modal asing. Inflasi yang tinggi akan menyebabkan mahalnya harga barang dan jasa sehingga biaya input produksi menjadi meningkat. Hal ini juga seperti yang dikatakan Mishkin (2001), bahwa tingkat inflasi dapat berpengaruh secara tidak langsung terhadap investasi. Ketika terjadi inflasi, maka harga-harga akan mengalami kenaikan termasuk faktor-faktor produksi. Ketika harga-harga faktor produksi meningkat maka perusahaan cenderung mengurangi investasinya, yang pada akhirnya menyebabkan investasi akan menurun.

Nilai tukar riil yang lebih lemah mungkin dapat meningkatkan FDI karena perusahaan mengambil keuntungan dari harga yang relatif rendah di pasar tuan rumah untuk membeli fasilitas atau, jika produksi dieksport kembali, untuk meningkatkan keuntungan negara asal pada barang yang dikirim ke pasar ketiga. Goldberg (1995) menyatakan bahwa nilai tukar dapat berpengaruh dari sisi jumlah total modal asing yang masuk ke dalam suatu negara, maupun alokasi dari penanaman modal asing (PMA) langsung tersebut. Froot dan Stein (1991) menemukan bukti hubungan: mata uang negara tuan rumah yang lebih lemah cenderung meningkatkan FDI ke dalam model pasar modal yang tidak sempurna karena depresiasi membuat aset negara tuan rumah lebih murah

dibandingkan dengan aset di negara asal. Saat nilai tukar suatu negara mengalami depresiasi, maka upah pekerja dan juga biaya produksi di negara tersebut akan mengalami penurunan. Sehingga hak itu meningkatkan daya tarik bagi investor asing untuk melakukan investasi. Selain itu, depresiasi nilai tukar ini juga meningkatkan potensi untuk meningkatkan ekspor barang, yang dapat menarik perhatian investor.

Tingkat suku bunga juga dapat digunakan untuk merefleksikan biaya/*cost* dari modal yang dibutuhkan oleh investor saat mereka ingin menggunakan/meminjam dana dari lembaga perbankan di *host country*. Tingkat suku bunga yang rendah dapat mendorong investor untuk meningkatkan modal yang mereka keluarkan untuk membiayai aktivitas investasi mereka. Hubungan negatif antara tingkat suku bunga dan penanaman modal asing juga ditegaskan dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian Lubis (2010), yang menunjukkan adanya pengaruh negatif dan signifikan antara suku bunga dalam negeri dengan penanaman modal asing langsung di Indonesia.

Selain faktor beberapa variabel makro ekonomi di atas, faktor politik dan institusi atau kelembagaan merupakan salah satu perhatian utama calon investor asing. Tidak ada keraguan bahwa lingkungan politik (rezim politik, stabilitas, risiko, dan lain-lain) memengaruhi ketidakpastian dalam proses pengambilan keputusan tentang investasi asing. Lingkungan kelembagaan berdampak pada biaya investor, perlindungan kepentingan mereka turut memengaruhi keputusan mengenai FDI. Faktor-faktor kelembagaan dan politik saling terkait dan mendefinisikan satu sama lain (Tocar, 2018). Namun, hasil empiris pengaruh faktor politik dan institusi terhadap FDI agak beragam. Wheeler dan Mody (1992) menemukan bahwa risiko politik dan efisiensi administrasi tidak signifikan dalam menentukan keputusan lokasi produksi perusahaan AS. Di sisi lain, Schneider dan Frey (1986) menemukan bahwa ketidakstabilan politik secara signifikan memengaruhi aliran masuk FDI.

3. Metodologi Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan kuantitatif dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi besarnya *FDI* di keenam negara ASEAN, yaitu Vietnam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand pada periode 2007-2018. Pada tahap pertama dilakukan analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk mengetahui perkembangan FDI di 6 negara ASEAN. Adapun analisis ini dilakukan untuk mengidentifikasi sumber terbesar investor FDI di ASEAN dan sektor yang paling diminati. Pada tahap selanjutnya yaitu dilakukan analisis faktor determinasi FDI di ASEAN yang difokuskan pada faktor-faktor ekonomi. Dalam melakukan analisis ini dilakukan pendekatan analisis kuantitatif dengan menggunakan alat analisis data panel karena memiliki data yang terdiri dari *time series* dan *cross section*. Data panel adalah data yang memiliki dimensi ruang dan waktu, yang merupakan gabungan antara data silang (*cross section*) dengan data runtut waktu (*time series*). Model data panel yang

dapat dihasilkan adalah *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect*. Jenis data panel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *balanced panel*, di mana setiap unit *cross section* memiliki jumlah observasi *time series* yang sama. Variabel yang digunakan dibedakan menjadi dua (2), yaitu variabel terikat (*dependent variable*) dan variabel bebas (*independent variable*). Variabel terikat di dalam penelitian ini adalah *Foreign Direct Investment* (Y). Data variabel dependen ini akan menggunakan natural logaritma dari FDI. Adapun variabel bebas yang digunakan terdiri dari *market size* (PDB), nilai tukar, tingkat inflasi, tingkat suku bunga, *trade openness*, infrastruktur dan stabilitas politik.

Rancangan model yang akan diajukan adalah model regresi linear dengan enam variabel independen, dengan model sebagai berikut:

$$\ln(\text{FDI}) = \beta_0 + \beta_1 \ln(\text{PDB}) + \beta_2 \ln(\text{KURS}) + \beta_3 \text{INFLASI} + \beta_4 \text{SUKUBUNGA} + \beta_5 \text{OPENNESS} + \beta_6 \text{POLITIK} + e$$

Dengan: e = *residual/error*

Adapun penjelasan dari masing-masing variabel bebas tersebut yaitu:

1. *Market size* yang diperkirakan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) atau ukuran pasar merefleksikan kondisi ekonomi suatu negara dan potensi permintaan. Ini merupakan faktor penting dalam memengaruhi investor asing. Investor asing akan tertarik menanamkan modal di suatu negara karena tersedianya pasar yang luas sehingga memperoleh keuntungan dari *host country*. Pada studi ini, dalam merepresentasikan *market size* akan menggunakan natural logaritma (ln) dari PDB keenam negara ASEAN. Dalam analisis ini diasumsikan terdapat dampak positif pada arus masuk FDI. Data PDB Harga Berlaku yang digunakan menggunakan satuan USD dan diperoleh dari dataset *World Economic Outlook* (WEO) *Database IMF* yang terbit pada Oktober 2019.
2. Nilai tukar (KURS) merepresentasikan kompetisi harga. Dalam analisis ini diasumsikan terdapat hubungan positif antara nilai tukar dan arus FDI, karena nilai tukar yang tinggi (dalam hal ini nilai tukar *host country* terdepresiasi terhadap nilai tukar dolar Amerika Serikat) merefleksikan peningkatan dalam daya saing barang-barang ekspor. Mamadou (2002) dalam Hoang dan Bui (2013) menemukan korelasi positif yang signifikan antara nilai tukar dan aliran FDI ke ASEAN. Studi ini menggunakan logaritma natural (ln) nilai tukar mata uang negara tuan rumah terhadap dolar AS untuk nilai tukar saat ini. Sumber data diperoleh dari IMF, dan Bank Dunia.
3. Tingkat inflasi (INFLASI) merefleksikan stabilitas ekonomi makro di suatu negara. Ekonomi makro yang stabil akan mengurangi ketidakpastian investasi dan meningkatkan kepercayaan terhadap perekonomian suatu negara. Sehingga inflasi yang tinggi dapat membatasi arus FDI yang masuk. Beberapa peneliti sebelumnya seperti Asiedu (2006) menemukan hubungan negatif antara inflasi dan FDI. Pada penelitian ini, variabel inflasi diukur dari

persentasi pertumbuhan tahunan dari Indeks Harga Konsumsi (IHK) tiap tahunnya. Adapun data diperoleh dari WEO *Database* IMF tahun 2019.

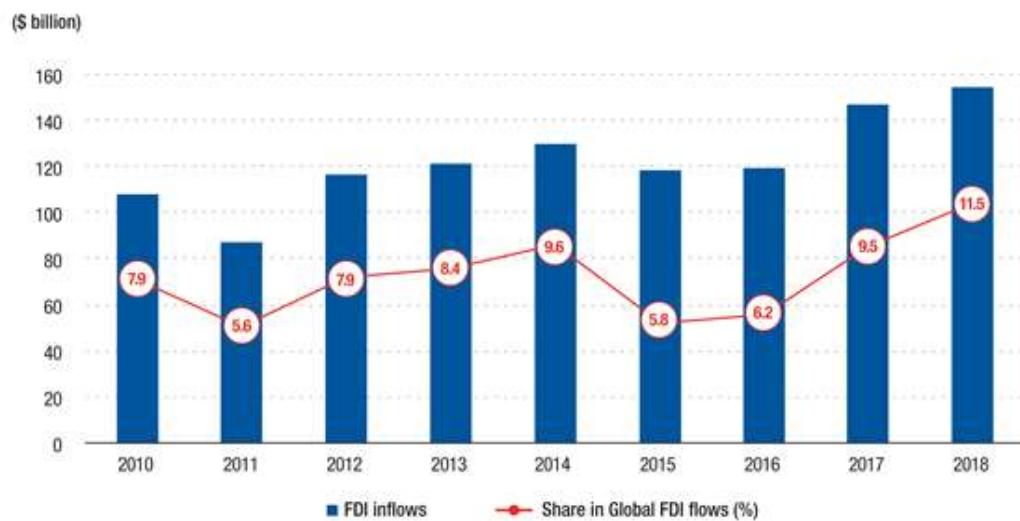
4. Suku bunga (SUKUBUNGA) merefleksikan biaya modal ketika investor ingin menggunakan sumber daya keuangan di *host country*, dimana hal ini merupakan biaya masuk dari kegiatan produksi dan bisnis. Suku bunga rendah dapat mendorong investor untuk meningkatkan modal di *host country* untuk membiayai kegiatan investasi mereka. Arbatli (2011) juga menyimpulkan bahwa suku bunga rendah cenderung meningkatkan aliran masuk FDI ke suatu negara. Pada studi ini menggunakan tingkat bunga riil untuk variabel dan mengasumsikan terdapat hubungan negatif dengan arus masuk FDI. Adapun data diperoleh dari WEO *Database* IMF tahun 2019.
5. *Trade Openness* atau keterbukaan perdagangan (OPENNESS) menunjukkan tingkat integrasi ekonomi di *host country* dengan ekonomi dunia. Keterbukaan ini berarti bahwa hambatan perdagangan di *host country* secara bertahap berkurang dan hal ini merupakan peluang bagi investor asing agar dapat memanfaatkan keunggulan komparatif negara tuan rumah untuk mengeksport kembali ke negara asal serta meningkatkan ekspor ke seluruh dunia (FDI vertikal). Studi Noorbakhsh et al. (2001) mengonfirmasi efek positif signifikan dari keterbukaan terhadap FDI. Dalam studi ini, keterbukaan perdagangan didefinisikan sebagai jumlah ekspor dan impor terhadap PDB. Analisis ini mengasumsikan terdapat korelasi positif yang signifikan antara keterbukaan dan aliran masuk FDI
6. Stabilitas politik (POLITIK) menunjukkan tingkat risiko politik, kualitas kelembagaan, dan juga sebagian mencerminkan lingkungan investasi "lunak". Wei (2000) dan Asiedu (2006) menemukan hubungan positif yang signifikan antara arus masuk FDI dan stabilitas politik. Dalam studi ini menggunakan logaritma natural dari indeks umum risiko politik dari *The Global Economy*.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Perkembangan FDI di ASEAN

Aliran modal masuk melalui FDI ke ASEAN mengalami peningkatan tiap tahunnya terutama sejak tahun 2015 hingga 2018. Hal ini tak terlepas dari pertumbuhan ekonomi yang stabil, meningkatnya jumlah konsumen kelas menengah, wilayah dengan integrasi lebih dari 650 juta orang dan lanskap industri yang dinamis terus mendukung daya tarik kawasan untuk FDI. Bahkan aliran masuk FDI ke ASEAN di tingkat global merupakan yang tertinggi. Dalam Gambar 1 menunjukkan bahwa proporsi aliran modal FDI yang masuk ke ASEAN di tingkat global sebesar 5,8 persen di tahun 2015 dan meningkat hingga 11,5 persen. Adapun enam negara ASEAN yang menerima aliran masuk FDI tertinggi yaitu Singapura, Malaysia, Indonesia, Thailand, Filipina dan Vietnam (ASEAN Secretariat, 2019).

**Gambar 1. Aliran Masuk Foreign Direct Investment ke Kawasan ASEAN
Tahun 2010-2018**



Sumber: ASEAN Secretariat 2019

Kerjasama yang semakin kuat antar negara ASEAN menjadi aliran masuk antar negara ASEAN menjadi sumber FDI terbesar di tahun 2017 maupun 2018 (masing-masing 17 persen dan 16 persen). Dimana Singapura merupakan negara investor terbesar sementara Indonesia menerima aliran modal masuk terbesar yang bersumber dari antar negara ASEAN. Meskipun demikian, tidak semua investasi intraregional dari Singapura adalah asli. Hal ini dikarenakan banyak anak perusahaan asing yang berbasis di Singapura (mis. perusahaan induk dan fungsi kantor pusat regional) juga berinvestasi di negara-negara anggota ASEAN lainnya melalui operasi perusahaan mereka yang berbasis di Singapura (UNCTAD, 2019). Selanjutnya, negara dengan nilai FDI terbesar ke ASEAN ialah Jepang yang sebelumnya diduduki oleh Amerika Serikat. FDI dari Jepang meningkat tajam sebesar 30 persen menjadi USD21 miliar pada tahun 2018, dengan negara tujuan investasi terkonsentrasi di Thailand, Singapura, Indonesia dan Vietnam. Posisi ketiga dengan nilai FDI terbesar ke ASEAN tahun 2018 ialah China. FDI dari Cina turun 26 persen menjadi USD10 miliar tetapi tetap pada tingkat tinggi. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan investasi yang signifikan di Singapura dan Malaysia. Singapura dan Indonesia adalah dua penerima FDI Tiongkok terbesar, dan mereka menyumbang hampir 60 per persen dari semua investasi Tiongkok ke ASEAN pada tahun 2018. Penurunan keseluruhan mencerminkan kejatuhan global aliran FDI akibat penurunan aliran investasi keluar dari Tiongkok pada tahun 2018 seiring dengan kebijakan pembatasan aliran investasi keluar dalam sektor industri (UNCTAD, 2019).

**Tabel 2. Sepuluh Negara/Kawasan Penanam Modal Terbesar di ASEAN
Tahun 2017-2018**

Economy/Region	2017		Economy/Region	2018	
	Nilai (USD Miliar)	Proporsi (persen)		Nilai (USD Miliar)	Proporsi (persen)
Intra-ASEAN	25	17	Intra-ASEAN	25	16
Amerika Serikat	25	17	Jepang	21	14
Jepang	16	11	Tiongkok	10	7
Tiongkok	14	9	Hongkong	10	7
Belanda	10	7	Amerika Serikat	8	5
Hongkong, China	6	4	Belanda	8	5
Republik Korea	5	3	Republik Korea	7	4
Jerman	3	2	Luxemburg	4	3
Swis	3	2	Inggris	4	2
Inggris	3	2	Jerman	2	1
Total Top 10	110	75	Total Top 10	98	64
Other	37	25	Other	56	36
Total ASEAN	147	100	Total ASEAN	155	100

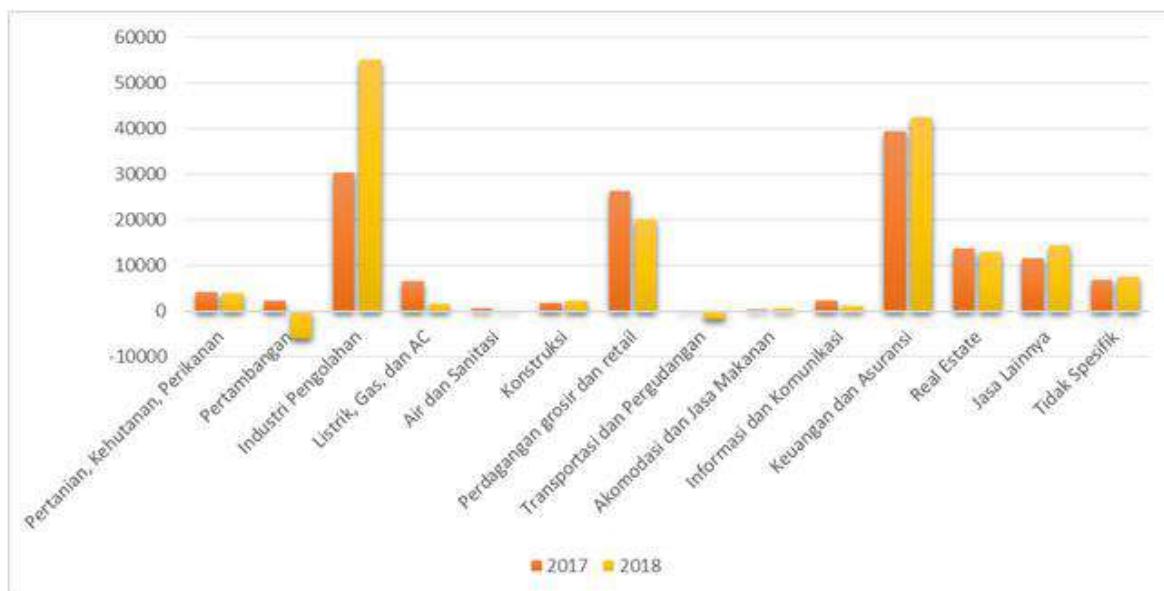
Sumber: ASEAN Secretariat, ASEAN FDI Database, 2019

Bila dilihat sektor ekonominya, aliran masuk FDI ke ASEAN didominasi pada sektor industri, dan beberapa sektor jasa diantaranya keuangan, perdagangan dan *real estate*. Di tahun 2018, keempat sektor tersebut menerima nilai total investasi langsung sebesar USD130 miliar atau 80 persen dari total FDI yang masuk ke ASEAN. Pada Gambar 2, menunjukkan bahwa sektor ekonomi yang menjadi favorit aliran masuk FDI ialah sektor jasa sementara sektor primer kurang diminati beberapa tahun terakhir ini. Di sektor pertanian, didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara-negara ASEAN itu sendiri. ASEAN Secretariat mencatat bahwa 84 persen aliran masuk FDI berasal dari negara ASEAN. Indonesia adalah negara penerima utama aliran masuk FDI pada sektor pertanian yaitu lebih dari 80 persen total FDI sektor pertanian yang masuk ke ASEAN. Perusahaan Malaysia dan Singapura adalah investor aktif di Indonesia.

Sektor manufaktur merupakan salah satu sektor yang paling diminati di ASEAN. Terlihat di tahun 2018, aliran masuk FDI ke sektor ini meningkat 83 persen dari USD30 miliar menjadi USD55 miliar. Hal ini menjadikan sektor ini menyumbang 35 persen terhadap total aliran masuk FDI ke ASEAN. Hampir semua negara ASEAN mengalami kenaikan aliran masuk FDI pada sektor industri tersebut terutama ke negara Singapura, Indonesia, Vietnam dan Thailand. Adapun enam negara/kawasan investor terbesar di sektor ini yaitu

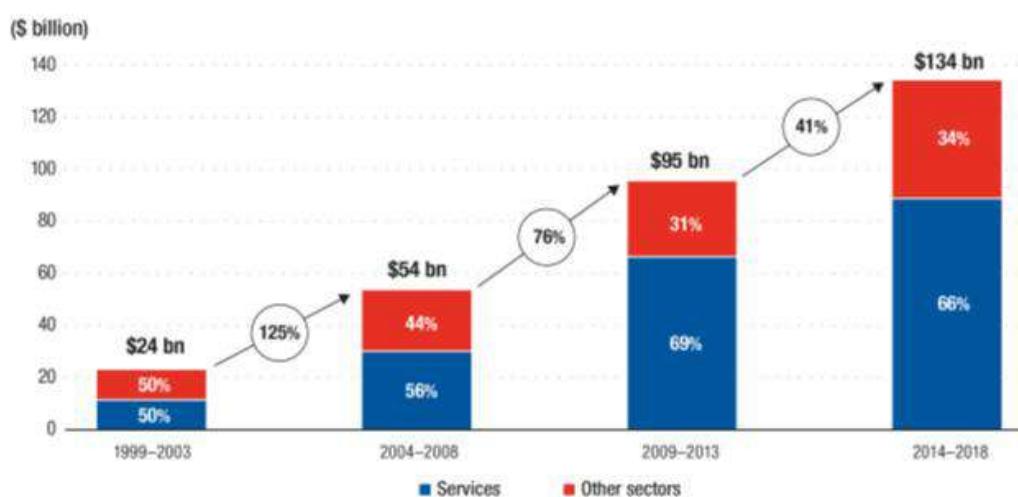
Amerika Serikat, Jepang, negara-negara ASEAN, *European Union*, Hongkong dan Republik Korea. Peningkatan FDI manufaktur di ASEAN sebagian disebabkan oleh pergeseran bertahap kapasitas produksi jangka panjang dari Cina dan tempat lain ke ASEAN. Salah satu penyebab penggerakan tersebut adalah peningkatan biaya tenaga kerja relatif di Cina, dan sekarang pergeseran itu telah dipercepat sebagai akibat dari efek dari ketegangan perdagangan Amerika Serikat-Cina (ASEAN Secretariat, 2019).

Gambar 2. Aliran Masuk FDI pada Sektor Ekonomi di ASEAN Tahun 2017-2018 (dalam USD Miliar)



Sumber: ASEAN Secretariat 2019

Sektor jasa merupakan penerima terbesar aliran masuk FDI di ASEAN. Gambar 3 menunjukkan peningkatan proporsi sektor jasa terhadap total FDI dari 50 persen di tahun 1999-2003 menjadi 66 persen di tahun 2014-2018. Hal ini sejalan dengan perubahan rata-rata aliran masuk FDI di tingkat global. Adapun sektor jasa yang paling mendominasi peningkatannya yaitu jasa keuangan, grosir dan perdagangan serta *real estate*. Ketiga sektor itu terhitung menyerap 78 persen dari total FDI pada sektor jasa di tahun 2012-2018. Lebih dari 70 persen dari FDI sektor jasa tersebut masuk ke Singapura. Hal ini meliputi investasi di perusahaan *holding*, aktivitas *back office*, kantor pusat kawasan dan fungsi distribusi yang mendukung aktivitas industri di seluruh kawasan ASEAN. Oleh karena itu, aliran masuk terbesar FDI di sebagian besar negara anggota ASEAN ialah pada sektor industri pengolahan.

Gambar 3. Aliran Masuk FDI di ASEAN pada Sektor Jasa (USD Miliar)

Sumber: ASEAN Secretariat

4.2. Analisis Faktor-Faktor yang Memengaruhi FDI

Penelitian ini menggunakan analisis regresi data panel terhadap enam negara ASEAN yaitu Indonesia, Singapura, Malaysia, Vietnam, Filipina dan Thailand dengan jangka waktu 2007-2018. Analisis ini menggunakan enam variabel bebas yang terdiri dari *market size*, inflasi, nilai kurs, suku bunga, keterbukaan perdagangan (*trade openness*), dan kestabilan politik. Berdasarkan hasil uji Chow diperoleh bahwa *p-value* (0,111) lebih besar dari 5 persen sehingga *Ho* diterima, yang berarti bahwa model yang tepat ialah *Common Effect Model*. Hasil regresi tersebut ditunjukkan dalam Tabel 3 berikut ini.

Tabel 3. Hasil Estimasi Regresi Panel dengan Variabel Dependen: Ln (FDI)

Independent Variable	Coef.	Std. Error	Prob	Conclusion
Ln (Market Size)	0,8737	0,1628	0,000	Sig*
Ln(Kurs)	0,2118	0,037	0,000	Sig*
Suku Bunga	-0,1421	0,0296	0,000	Sig*
Inflasi	-0,038	0,027	0,172	-
Keterbukaan Perdagangan	0,005	0,0013	0,0001	Sig*
Stabilitas Politik	10,37	2,391	0,0001	Sig*
Constanta	-8,111	3,927	0,042	Sig*
Adjusted R²	0,712			
F-statistic	30,37			
Prob (F-statistic)	0,000			
N	72			

*Significant 5 persen ** Significant 10 persen

Pada Tabel 3 mengindikasikan bahwa secara agregat besarnya FDI di keenam negara ASEAN yang diteliti dipengaruhi secara signifikan oleh *market size*

(PDB), nilai kurs, *trade openness*, tingkat suku bunga, dan stabilitas politik secara bersama-sama. Hal ini tercermin dari besarnya nilai probabilitas *F-statistic* yang memiliki nilai signifikan, yaitu sebesar 0,0000, Seluruh variabel yang digunakan juga memiliki arah korelasi yang sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan, di mana tingkat *market size*, depresiasi nilai tukar, *trade openness*, dan stabilitas politik memiliki pengaruh yang positif terhadap FDI, sedangkan tingkat inflasi dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif. Namun, berdasarkan hasil signifikansi masing-masing variabel tersebut, ditemukan bahwa variabel inflasi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya FDI di ASEAN walaupun memiliki arah korelasi yang sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan. Nilai konstanta menunjukkan besarnya nilai variabel dependen saat tidak ada pengaruh dari variabel independen yang digunakan. Besarnya nilai *adjusted R-squared* sebesar 0,712 mengindikasikan bahwa seluruh variabel independen yang digunakan mampu menjelaskan perilaku dari variabel dependen (FDI) sebesar 71,2 persen, sedangkan sisanya, sebesar 28,2 persen perilaku dari variabel dependen dijelaskan oleh variabel-variabel lain yang tidak digunakan di dalam model ini.

Ukuran pasar domestik (*market size*) yang diproksikan dengan PDB memiliki efek positif yang signifikan secara statistik untuk aliran FDI ke ASEAN. Dengan demikian, ukuran pasar internal merupakan faktor penting dalam menarik aliran FDI ke ASEAN. Ukuran pasar memiliki efek positif dan signifikan terhadap FDI di 6 negara ASEAN; jika ukuran pasar meningkat 1 persen maka FDI akan meningkat sebesar 0,87 persen. Temuan penelitian ini konsisten dengan beberapa penelitian terdahulu diantaranya Hoang dan Bui (2015) yang menggunakan data panel dari 6 negara ASEAN dari tahun 1991 hingga 2009 mengungkapkan bahwa ukuran pasar memengaruhi minat aliran modal masuk melalui FDI ke negara-negara ASEAN. Hal senada juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Masudi (2016) bahwa ukuran pasar dari masing-masing negara ASEAN memiliki dampak yang positif terhadap aliran FDI antar ASEAN. Temuan ini juga mengindikasikan bahwa perusahaan-perusahaan di negara-negara ASEAN mulai berekspansi ke antar negara tetangga dalam kawasan ASEAN dan mulai berkompetisi terhadap perusahaan asing dari negara luar ASEAN.

Faktor-faktor kebijakan ekonomi makro lainnya yaitu nilai tukar menunjukkan hubungan yang positif terhadap aliran FDI serta signifikan secara statistik. Ini menandakan bahwa nilai mata uang negara tuan rumah lebih rendah dari dolar AS dapat menarik aliran FDI ke wilayah tersebut. Hasil ini sesuai dengan temuan Hoang dan Bui (2015) yang menyimpulkan bahwa depresiasi mata uang justru dapat menarik aliran masuk FDI. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar terhadap USD sebesar 1 persen akan meningkatkan aliran FDI sebesar 0,2 persen.

Tingkat suku bunga acuan bank sentral di enam negara ASEAN secara agregat menunjukkan koefisien negatif dan secara statistik signifikan. Hal ini menandakan terdapat hubungan negatif antara suku bunga dan aliran masuk

FDI, dimana kenaikan tingkat bunga riil mendorong biaya modal meningkat, itu juga berarti bahwa risiko keuangan ada, sehingga akan membatasi aliran FDI ke wilayah tersebut. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa kenaikan 1 persen suku bunga akan menurunkan aliran masuk FDI sebesar 0,142 persen. Hal serupa juga terjadi pada penelitian yang dilaksanakan oleh Ruth dan Syofyan (2014) dalam analisis faktor determinasi FDI di tujuh negara ASEAN. Dimana dalam penelitiannya menunjukkan bahwa saat terjadi peningkatan tingkat suku bunga sebesar 1 persen di ASEAN, maka besarnya FDI ASEAN akan menurun sebesar 0,4135101 persen dari tingkat GDP. Sementara itu, stabilitas ekonomi makro yang dinilai melalui tingkat inflasi menunjukkan nilai koefisien yang negatif, dimana arah hubungannya sesuai yang diharapkan, tetapi tidak signifikan secara statistik. Beberapa penelitian seperti Masudi (2016) menunjukkan hasil yang serupa bahwa hubungan inflasi dan FDI tidak signifikan secara statistik. Menurutnya kredibilitas ASEAN sebagai mesin utama integrasi regional telah mendorong optimisme terkait stabilitas di kawasan.

Keterbukaan perdagangan atau *trade openness* merupakan faktor eksternal yang dapat memengaruhi besarnya FDI. Hasil penelitian ini menunjukkan koefisien yang positif dan signifikan secara statistik. Hal ini menandakan bahwa semakin tingginya *trade openness*, akan meningkatkan FDI di ASEAN. Saat *trade openness* negara ASEAN meningkat sebesar 1 persen, maka FDI akan meningkat sebesar 0,005 persen. Begitu juga saat *trade openness* negara ASEAN menurun sebesar 1 persen, akan menyebabkan FDI menurun sebesar 0,005 persen. Hal ini mengartikan bahwa saat negara ASEAN mampu meningkatkan kegiatan perdagangan internasional mereka, potensi untuk meningkatkan FDI akan semakin besar. Faktor terakhir yaitu stabilitas politik menunjukkan hasil yang sesuai diasumsikan, dimana koefisiennya menunjukkan nilai positif dan signifikan secara statistik. Hal ini sesuai pula dengan penelitian yang dilakukan oleh Hoang dan Bui (2015) yang menyimpulkan bahwa stabilitas politik yang lebih besar (artinya risiko politik yang lebih rendah) akan sangat mendorong aliran FDI ke wilayah tersebut.

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan FDI di ASEAN serta faktor-faktor yang memengaruhinya. Adapun kesimpulan dari hasil temuan penelitian ini yaitu:

- a) Kawasan ASEAN merupakan salah satu negara yang diminati dalam berinvestasi, hal ini terlihat dari aliran modal yang masuk melalui FDI tercatat 11 persen di tingkat global pada tahun 2018. Adapun penanaman modal terbesar ialah berasal dari negara-negara intra kawasan ASEAN tersebut, diikuti oleh Jepang dan Tiongkok. Sementara itu, enam negara penerima aliran masuk FDI yaitu Singapura, Indonesia, Vietnam, Thailand,

Filipina dan Malaysia. Sektor yang paling diminati ialah sektor industri pengolahan, jasa keuangan, perdagangan grosir dan retail serta *real estate*.

- b) Dengan menggunakan analisis regresi data panel dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi FDI di ASEAN dihasilkan bahwa secara agregat besarnya FDI di keenam negara ASEAN yang diteliti dipengaruhi secara signifikan oleh *market size* (PDB), nilai kurs, *trade openness*, tingkat suku bunga, dan stabilitas politik. Seluruh variabel yang digunakan juga memiliki arah korelasi yang sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan, di mana tingkat *market size*, depresiasi nilai tukar, *trade openness*, dan stabilitas politik memiliki pengaruh yang positif terhadap FDI, sedangkan tingkat inflasi dan tingkat suku bunga memiliki pengaruh negatif. Namun, berdasarkan hasil signifikansi masing-masing variabel tersebut, ditemukan bahwa variabel inflasi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap besarnya FDI di ASEAN walaupun memiliki arah korelasi yang sesuai dengan teori dan hipotesis yang diajukan.
- c) Kondisi makro ekonomi sangat memengaruhi aliran masuk FDI ke ASEAN. Terutama faktor *market size* yang diperlukan dengan PDB yang bernilai positif menunjukkan bahwa dalam jangka panjang seiring dengan meningkatnya PDB akan meningkatkan pula masuknya FDI ke Indonesia. Ini membuktikan bahwa motivasi investor untuk melakukan investasi adalah mendapatkan *return* yang tinggi di suatu negara dengan tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.
- d) Koefisien kurs yang bernilai positif menunjukkan bahwa depresiasi nilai tukar di negara-negara ASEAN terhadap USD dapat meningkatkan aliran masuk FDI. Hal ini dikarenakan depresiasi membuat aset negara tuan rumah lebih murah dibandingkan dengan aset di negara asal (Froot dan Stein, 1991). Begitu juga faktor *trade openness* menunjukkan hubungan yang positif dengan aliran masuk FDI. Hal ini tak terlepas dari keterbukaan perdagangan luar negeri yang semakin tinggi maka akan semakin hilang hambatan dalam melakukan perdagangan, baik berupa tarif maupun non-tarif, dan semakin lancarnya mobilitas modal antarnegara. Sementara itu, suku bunga menunjukkan koefisien yang negatif dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga akan mendorong biaya modal untuk meningkat, itu juga berarti bahwa risiko keuangan ada, sehingga akan membatasi aliran FDI ke suatu wilayah atau negara.
- e) Selain faktor beberapa variabel makro ekonomi di atas, faktor politik dan institusi atau kelembagaan merupakan salah satu perhatian utama calon investor asing. Hal ini sesuai dengan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa indikator stabilitas politik berhubungan positif terhadap aliran FDI yang masuk ke kawasan ASEAN.

5.2. Saran

Guna mendorong masuknya FDI ke ASEAN yang tentunya akan berdampak ke Indonesia, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal kepada para pembuat kebijakan:

- a) Secara global, aliran investasi asing langsung (FDI) merosot selama tiga tahun berturut-turut hingga tahun 2018 (UNCTAD, 2019). Sementara itu, kondisi berbeda terjadi di ASEAN, dimana aliran modal masuk FDI mengalami tren yang terus meningkat hingga tahun 2018. Hal ini ditengarai oleh meningkatnya upah di Tiongkok yang telah mendorong bisnis untuk mencari di sekitar Asia untuk situs manufaktur berbiaya lebih rendah. Kondisi ini menjadi salah satu peluang ASEAN namun dalam mempertahankan aliran masuk FDI dan meningkatkan daya saing, ASEAN perlu menjaga kondisi makro ekonomi kawasan. Menjaga stabilitas makro ekonomi dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan suatu determinan yang kuat dalam merangsang masuknya FDI. Pertumbuhan yang baik secara otomatis akan meningkatkan PDB kawasan sekaligus merangsang investor untuk berinvestasi dengan sasaran pangsa pasar yang besar di ASEAN. Terdapat beberapa sektor yang diminati di ASEAN yaitu sektor jasa keuangan, perdagangan serta *real estate*. Sehingga penguatan ketiga sektor harus tetap dipertahankan.
- b) Tidak dipungkiri, di tengah krisis global akibat pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) akan berdampak pada aliran FDI ke kawasan ASEAN. Kondisi ekonomi makro akan terlihat dampaknya seperti pertumbuhan ekonomi hampir di semua negara yang mengalami penurunan. Langkah responsif telah diambil berbagai negara dalam meminimalkan dampak Covid-19 terhadap kestabilan perekonomian negara. Diantaranya ialah menurunkan suku bunga acuan bank sentral di masing-masing negara. Seperti Singapura telah menurunkan suku bunga menjadi 1,26 persen dari sebelumnya 1,65 persen di bulan Februari, Indonesia menurunkan suku bunganya dari 5 persen di awal tahun menjadi 4,5 persen, dan Thailand juga menurunkan suku bunga acuannya menjadi 0,75 persen dari sebelumnya 1,25 persen di awal tahun. Mengingat terdapat pengaruh yang signifikan antara suku bunga dan aliran masuk FDI, maka berbagai negara di ASEAN perlu mempertahankan suku bunga yang rendah hingga meredanya pandemi Covid-19 ini.
- c) Negara-negara di kawasan ASEAN perlu menarik investor baru dalam menanamkan modalnya di ASEAN dan tidak bergantung pada beberapa negara saja seperti Amerika Serikat, Tiongkok dan Jepang. Dimana ketiga negara tersebut memiliki proporsi yang cukup besar dalam menanamkan modalnya di ASEAN. Belajar dari krisis akibat pandemi ini, dan ketiga negara tersebut mengalami dampak buruk terhadap perekonomian negaranya yang cukup kuat, maka sudah saatnya negara-negara ASEAN

mencari investor baru dari negara-negara yang lebih stabil perekonomiannya dalam menghadapi krisis Covid-19 ini.

- d) Selain menjaga faktor ekonomi makro, pemerintah di negara ASEAN perlu menjaga kestabilan politik dan keamanan di masing-masing negaranya. Hal ini tidak dipungkiri menjadi salah satu faktor penting bagi pengusaha dalam menentukan modalnya di suatu negara. Terutama dalam kondisi krisis ekonomi seperti ini, pemerintah perlu mengandalkan faktor non ekonomi dalam menarik investor seperti menjanjikan stabilitas politik, keamanan, kemudahan berusaha serta perizinan.

Daftar Pustaka

- Asiedu, E. 2006. Foreign Direct Investment in Africa: The Role of Natural Resources, Market Size, Government Policy, Institutions and Political Instability. *The World Economy*, 29(1), 63-77.
- Ambarsari, Indah & Purnomo, Dudit, 2005, "Studi Tentang Penanaman Modal Asing di Indonesia", *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan*, Volume 6, No. 1, hal. 26-47.
- Arbatli, E. 2011, Economic Policies and FDI Inflows to Emerging Market Economies. *International Monetary Fund Working Paper*.
- Bende-Nabende A. 2000 Foreign Direct Investment in ASEAN: a Historical Perspective. In: Strange R., Slater J., Molteni C. (eds) *The European Union and ASEAN: Trade and Investment Issues*. Palgrave Macmillan, London
- Çeviş, İ., & Çamurdan, B. 2007. The Economic Determinants of Foreign Direct Investment in Developing Countries AND Transition Economies. *Pakistan Development Review*, 46(3), 285-299.
- Changwatchai, P. 2010. The Determinants of FDI Inflows by Industry To ASEAN (Indonesia, Malaysia, Philippines, Thailand, and Vietnam). UMI, 96-175.
- Dunning, J.H. 1988 Explaining International Production, London: Unwin Hyman.
- _____, J. H. 2000. The Eclectic Paradigm as An Envelope for Economic and Business Theories of MNE Activity. *International Business Review*, 9, 163-190.
- _____, J. H., & Lundan, S. M. 2008. *Multinational Enterprises and The Global Economy*. Edward Elgar Publishing.
- Froot, K. A., & Stein, J. C. 1991. Exchange Rates And Foreign Direct Investment: An Imperfect Capital Markets Approach
- Goldberg, Linda S. dan Kolstad Charles D. 1995. Foreign Direct Investment, Exchange Rate Variability and Demand Uncertainty. *International Economic Review*, Department of Economics, University of Pennsylvania

- and Osaka University Institute of Social and Economic Research Association, Vol. 36(4): pages 855-879
- Hady, Hamdy. 2001. Ekonomi Internasional: Teori dan Kebijakan Keuangan Internasional. Buku 2. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hoang, Hong. 2012. Foreign Direct Investment In Southeast Asia: Determinants And Spatial Distribution. Depocin Working Paper Series No 2012/30
- _____ dan Hung Bui. 2014. Determinants of Foreign Direct Investment in ASEAN: A Panel Approach. Management Science Letters 5 (2015) 213–222
- Hymer, S. 1976 The International Operations of National Firms: A Study of Direct Investment, Ph.D. Thesis, MIT, 1960, Cambridge Mass, MIT Press.
- Ismail, N. W. 2009. The Determinant of Foreign Direct Investment in ASEAN: A Semi-Gravity Approach. Transition Studies Review, 16(3), 710-722.
- International Monetary Fund. 2019. World Economic Outlook Dataset October 2019
- Kok, R., & Ersoy, B. 2009, Analyses of FDI Determinants in Developing Countries. International Journal of Social Economics, Vol. 36, pp. 105-123.
- Kurniati Y, Prasmuko A, Yanfitri. 2007. Determinan FDI: Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi Langsung. [Internet] Working Paper; 2007 Aug: Tersedia pada: <http://www.bi.go.id/NR/rdonlyres/>
- Lubis, Pardamean, dkk. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Permintaan Investasi di Indonesia. MEPA Ekonomi, Mei Volume 3, Nomor 2
- Masudi, Aswin. 2016. An Analysis of Intra-ASEAN FDI Determinants in the Wake of ASEAN Economic Community. Faculty of Economics Parahyangan Catholic University
- Mudara. 2011. Pengaruh Produk Domestik Bruto, Suku Bunga, Upah Pekerja dan Nilai Total Ekspor terhadap Investasi Asing Langsung di Indonesia, 1990-2009. Universitas Diponegoro, Skripsi
- Mishkin, Frederics. 2001. The Economics of Money, Banking and Financial Markets. 6th ed. Addison Wesley Longman.
- Noorbakhsh, F., Paloni, A., & Youssef, A. 2001, Human Capital and FDI Inflows to Developing Countries: New Empirical Evidence. World Development, Vol. 29, pp. 1593-1610.
- Permana, Sony dan Edmira Rivani. 2013. Pengaruh Produk Domestik Bruto, Inflasi, Infrastruktur, dan Risiko Politik Terhadap Investasi Langsung Asing di Indonesia. P3DI Bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik. Sekretariat Jenderal DPR RI

- Rahayu, Tri. 2010. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penanaman Modal Asing di Indonesia (Tahun 1994:1-2008:4). Tugas Akhir Sarjana pada Fakultas Ekonomi Universitas Sebelas Maret.
- Resmini, L., 2000, The Determinants of Foreign Direct Investment in the CEECs. *Economics of Transition*, Vol. 8 (3), pp. 665–89.
- Rugman, A.M. 1986 New Theories of the Multinational Enterprise: An Assessment of Internalisation Theory. *Bulletin of Economic Research*, 38 (2).
- Ruth, Astrid dan Syofriza Syofyan. 2014. Faktor Penentu Foreign Direct Investment di ASEAN-7: Analisis Data Panel 2002-2012 *Media Ekonomi* Vol. 22, No. 1, April 2014
- Salvatore. 1997. Ekonomi Internasional. Edisi Kelima Jilid 1. Munandar H, Penerjemah. Jakarta: Erlangga. Terjemahan dari: International Economic, Fifth Edition.
- Scheider and Frey. 1986. "Economic and Political Determinant of Foreign Direct Investment in Developing Country", *World Development*, 13, 1986.
- Taufik, Mohamad. 2014. Fluctuations in Direct Investment in Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol.15, No.1 Hlm 1-6
- The ASEAN Secretariat. 2019. "ASEAN Investment Report 2019. FDI IN Services :Focus on Health Care. Jakarta
- Tocar, Sebastian. 2018. "Determinants of Foreign Direct Investment : A Review". *REBS* Vol. 11, Issue 1, pp.165-196. ISSN 1843-763x
- UNCTAD. 2019. *World Investment Report 2019: Special Economic Zone*. Geneva
- Wang, M. 2009. Manufacturing FDI and Economic Growth: Evidence from Asian Economies. *Applied Economics*, 41(8), 991-1002.
- Walsh, James and Jiangyan Yu. 2010. "Determinants of FDI : A Sector and Institutional Approach . IMF Working Paper WP/10/187
- Wei Shang-Jin. 2000. "How Taxing Is Corruption On International Investors?". *The Review of Economics and Statistics*
- Wheeler, David, and Ashoka Mody, 1992, "International Investment Location Decisions: The Case of U.S. firms," *Journal of International Economics*, Vol. 33, pp. 57–76.

MEMAHAMI SEBARAN KINERJA PENDIDIKAN INDONESIA: STUDI NERACA PENDIDIKAN DAERAH

***Understanding the Distribution of Indonesia's Education Performance:
Study of Regional Education Balance Sheet***

Marihot Nasution

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: marihot.nasution@dpr.go.id

Abstract

This study examines the differences in the results of education development in Indonesia by differentiating these results by region. This is done to determine the weaknesses and weaknesses of each region so that subsequent development is directed to cover up existing weaknesses. The comparison of the regions is carried out by using the different test of the western and eastern regions on the performance of education development recorded in Neraca Pendidikan Daerah 2018/2019 published by the Ministry of Education and Culture. The results of the study note that educational performance in the western and eastern regions of Indonesia has a statistically significant difference. Especially in performance as measured by pure participation rates and national examination results at all levels of education tested. The eastern region has a weaker educational performance than the western region of Indonesia. This needs to be a concern for the government if it wants to reduce development inequality in the education sector.

Keywords: Education, Regional Education Balance Sheet, Western and Eastern Regions of Indonesia

1. Pendahuluan

Indonesia telah memperkenalkan paket komprehensif reformasi pendidikan yang dirancang untuk memperluas akses dan meningkatkan kualitas. Komponen utama dari proses reformasi tersebut adalah pelimpahan tanggung jawab atas layanan pendidikan dasar kepada pemerintah daerah dan sekolah. Reformasi ini, ditambah dengan peningkatan investasi pemerintah dalam bidang pendidikan telah menghasilkan peningkatan akses pendidikan yang signifikan terutama bagi anak-anak miskin. Namun, peningkatan prestasi belajar yang dicapai masih belum signifikan dan anak-anak masih meninggalkan sekolah dengan keterampilan yang tidak memadai untuk memenuhi kebutuhan pasar

tenaga kerja. Seperti halnya sistem pendidikan lain di seluruh dunia, peningkatan kualitas pendidikan dasar terus menjadi tantangan utama.

Sebagian besar pembiayaan publik untuk pendidikan di Indonesia berasal dari pemerintah pusat namun dikelola pengalokasianya di tingkat daerah. Proses ini dilakukan dalam rangka desentralisasi, dimana pemerintah pusat mendukung penyelenggaraan urusan wajib pemerintah daerah melalui transfer fiskal. Sebagian besar pembiayaan publik untuk sektor pendidikan berasal dari pemerintah pusat, tetapi hampir dua pertiga dari pengeluaran pendidikan dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten/kota. Pemerintah pusat mengalokasikan Rp492 triliun untuk pendidikan pada tahun 2019. Dari jumlah ini, Rp52 triliun untuk layanan pendidikan di bawah Kementerian Agama (Kemenag), sedangkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dialokasikan Rp36 triliun. Mayoritas, Rp308 triliun, ditransfer ke pemerintah daerah (Peraturan Presiden 107/2017, Peraturan Presiden 129/2018), dan sisanya dialokasikan untuk pendidikan tinggi dan belanja pendidikan lainnya. Meskipun demikian, proses desentralisasi justru menggarisbawahi lemahnya *check and balance* dalam penyediaan layanan pendidikan. Desentralisasi sangat cocok untuk sistem besar seperti Indonesia, namun kabupaten yang kecil cenderung memiliki kapasitas rendah untuk mengelola layanan pendidikan mereka, hal tersebut berdampak negatif pada efisiensi pengeluaran dan pembelajaran siswa (Al-Samarrai 2013, Bank Dunia 2018a). Proses desentralisasi juga mengungkapkan sistem *check and balance* yang lemah dalam pemberian layanan pendidikan antara tingkat pusat dan daerah, dan di antara tingkat daerah sendiri (Al-Samarrai 2013; Bank Dunia 2017).

Lemahnya *check and balances* tersebut dapat mendasari hadirnya kesenjangan pendidikan antar wilayah. Hingga kini, pembelajaran berkualitas belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Sejumlah langkah sudah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Sayangnya, upaya yang dilakukan belum dapat meningkatkan kualitas pembelajaran yang menumbuhkan kecakapan berpikir tingkat tinggi (*higher order thinking skills*). Hasil PISA (Program for International Student Assessment) tahun 2015 menunjukkan bahwa proporsi siswa di Indonesia yang berada di atas standar kompetensi masih lebih rendah dibandingkan negara-negara lain di kawasan ASEAN.

Guna menentukan strategi yang tepat dalam menghadapi tantangan pembangunan di bidang pendidikan, dibutuhkan informasi yang secara lengkap dapat menjelaskan kondisi dan situasi pembangunan pendidikan di Indonesia. Informasi tersebut perlu dikaji secara seksama sebagai upaya *monitoring* atas strategi yang telah dilaksanakan. Kajian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan dan bahan evaluasi yang dapat mendukung Sistem Pendidikan Nasional serta menentukan strategi dan arah kebijakan pembangunan pendidikan nasional dengan menelaah sebaran indikator pendidikan di Indonesia dan melihat letak kesenjangan dalam indikator pembangunan pendidikan.

2. Tinjauan Pustaka

Sistem pendidikan Indonesia sangat kompleks dan sangat besar. Ini adalah sistem pendidikan terbesar ke-4 di dunia dengan 3,9 persen populasi siswa dunia. Sistem formal secara kolektif mempekerjakan 3,3 juta guru yang mendidik 53,1 juta anak di kelas 1 hingga 12 di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag). Tambahan 231.446 pusat Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mendukung pembelajaran awal dari 7,4 juta anak (DAPODIK 2019, Kemendikbud, 2019). Dan 4.670 institusi pendidikan tinggi menyediakan layanan untuk 8 juta siswa. Sistem pelatihan kejuruan non formal terdiri dari lebih dari 40.000 lembaga di bawah pengawasan Kemendikbud dan Kementerian Tenaga Kerja, serta beberapa kementerian lini (DAPODIK 2019, Kemendikbud, 2019).

Sistem pendidikan tersebut dibiayai dengan 20 persen anggaran negara yang merupakan mandat undang-undang. Jika melihat total Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 sebesar 2.080 triliun, maka *mandatory spending* anggaran pendidikan 20 persen dari APBN adalah sekitar 416,1 triliun. Dan jumlah ini tersebar di berbagai kementerian dan lembaga negara (K/L). Anggaran Kemendikbud tahun 2019 adalah sebesar 39,8 triliun. Jumlah tersebut terbesar ke-8 diantara 10 kementerian dengan APBN tertinggi. Selain itu, anggaran tambahan untuk pendidikan dasar diperoleh dari pertambangan minyak bumi sebesar 0,5 persen di daerah yang bersangkutan sesuai UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, pasal 20. Pemerintah telah membuat sasaran pendidikan dalam Nota Keuangan tahun 2019 ini. Pertama, rehabilitasi ruang belajar yang meliputi 54.739 ruang (pusat) dan 27.140 ruang (daerah) dengan rincian: SD: 15.420 ruang, SMP: 8.720 ruang dan SMA: 3.000 ruang. Kedua, tunjangan profesi untuk guru (Pegawai Negeri Sipil Daerah) PNSD sebanyak 1,3 juta guru, tunjangan khusus guru PNSD khusus sebanyak 41,6 ribu guru, dan tunjangan sertifikasi dosen 102,7 ribu dosen. Ketiga, Kartu Indonesia Pintar dengan total 19,7 juta siswa, dengan rincian: SD sebesar Rp450 ribu/siswa per tahun, SMP sebesar Rp750 ribu/siswa per tahun, SMA-SMK sebesar Rp1 juta/siswa per tahun. Keempat, Bantuan Bidik Misi untuk 362,7 ribu mahasiswa, dengan rincian: ke Perguruan Tinggi (PT) untuk uang kuliah sebesar Rp2,4 juta/mahasiswa per semester, dan ke mahasiswa sebesar Rp3,9 juta/mahasiswa per semester. Kelima, Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk 8,5 juta siswa (pusat) dengan rincian: MI sebesar Rp800 ribu/siswa per tahun, dan MTs sebesar Rp1 juta/siswa per tahun. Selain itu BOS diperuntukkan 46,2 juta siswa (Daerah), dengan rincian: SD/SDLB sebesar Rp800 ribu/siswa per tahun, SMP/SMPLB/SMPT sebesar Rp1 juta/siswa per tahun, dan SMA/SMK sebesar Rp1,4 juta/siswa per tahun.

Meski pemerintah telah membuat sasaran pendidikan, dan hal ini telah berlangsung sejak tahun-tahun sebelumnya, namun masih banyak persoalan umum pendidikan di Indonesia. Fokus utama dalam pembangunan pendidikan hingga kini masih pada peningkatan kualitas dan pemerataan pendidikan. Sebagaimana dikutip dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah

(RPJMN) 2015-2019, tantangan dalam pembangunan pendidikan salah satunya adalah menurunkan kesenjangan partisipasi pendidikan antar kelompok sosial-ekonomi, antar wilayah, dan antar jenis kelamin. Tahun 2019 merupakan akhir periode RPJMN 2015-2019. Dalam periode pembangunan ini tingkat pendidikan masyarakat telah membaik, namun belum menjangkau seluruh penduduk. Kesenjangan pendidikan masih tinggi apabila dibandingkan antar wilayah. Pembelajaran berkualitas juga belum berjalan secara optimal dan merata antar wilayah. Salah satu faktor yang memengaruhi hal ini adalah belum memadainya kualitas dan kuantitas infrastruktur wilayah, terutama di wilayah timur Indonesia.

Dalam kurun waktu 2009-2019, anggaran pendidikan yang sudah dialokasikan oleh pemerintah melalui APBN mencapai Rp3.920,45 triliun. Selama periode waktu tersebut, jumlah anggaran pendidikan mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Untuk mendanai sektor pendidikan dalam konteks desentralisasi, pemerintah pusat mendukung pemerintah daerah melalui transfer fiskal. Sebagian besar pembiayaan publik untuk sektor pendidikan berasal dari pemerintah pusat, namun hampir dua pertiga dari pengeluaran pendidikan dikelola oleh pemerintah daerah, yaitu provinsi dan kabupaten. Selain itu, pemerintah daerah sendiri wajib mengalokasikan 20 persen dari anggaran daerahnya untuk pendidikan. Hal ini menekankan tingginya peran pemerintah daerah dalam pembangunan pendidikan.

Sejalan dengan proses desentralisasi secara keseluruhan, Indonesia sejak 1999 telah mendesentralisasi sistem pendidikan sehingga sekarang melibatkan banyak aktor di tingkat pusat, provinsi, kabupaten, dan sekolah (UU 23/2014 tentang Otonomi Daerah dan UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan). Implikasi dari otonomi daerah ini adalah bahwa penyediaan pendidikan dasar dan menengah dialihkan ke pemerintah daerah di tingkat kabupaten. Sementara itu, wewenang pemerintah daerah provinsi diperuntukkan bagi pendidikan menengah atas. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa hasil pembangunan pendidikan akan bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola pembangunan pendidikannya.

Berdasarkan kajian dari World Bank yang mengkaji peran pemerintah daerah dalam kinerja pembangunan pendidikan menyatakan bahwa secara keseluruhan, keputusan yang dibuat kabupaten tentang pembiayaan pendidikan, campuran input pendidikan untuk digunakan dan distribusinya tampaknya sangat terkait dengan hasil pendidikan. Misalnya, kabupaten yang memprioritaskan layanan pendidikan dan mencurahkan bagian lebih besar dari anggaran mereka untuk pendidikan cenderung memiliki hasil pendidikan yang lebih baik. Kajian ini juga menyatakan bahwa kabupaten yang dikelola lebih baik, memiliki proporsi sekolah yang lebih besar jumlah guru yang tepat yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas pendidikan secara keseluruhan.

Selain itu, kinerja pendidikan lebih tinggi di kabupaten-kabupaten yang memiliki upaya lebih besar untuk menghasilkan dan menyebarkan informasi tentang penggunaan sumber daya publik. Hasilnya juga menunjukkan bahwa kinerja lebih baik di kabupaten yang mendorong partisipasi yang lebih besar dari

pemangku kepentingan utama (misalnya dewan pendidikan lokal) dalam proses pengambilan keputusan pendidikan. Kinerja pendidikan juga cenderung lebih lemah di kabupaten-kabupaten dengan tingkat kemiskinan yang lebih tinggi. Ini menyoroti tantangan yang lebih besar yang dihadapi oleh kabupaten miskin dalam memberikan layanan pendidikan yang berkualitas bahkan setelah mengendalikan tata kelola dan keseluruhan ukuran anggaran pemerintah. Hasilnya menunjukkan, misalnya, bahwa kabupaten yang lebih miskin cenderung memiliki proporsi tenaga pengajar yang lebih kecil untuk didistribusikan sesuai dengan standar nasional. Ini mencerminkan kesulitan yang dihadapi dalam mengalokasikan guru ke daerah miskin dan terpencil (lihat misalnya, UNCEN, UNIPA et al. 2012).

Kualitas tata kelola lokal secara keseluruhan juga terkait positif dengan rata-rata tingkat partisipasi sekolah dasar dan menengah pertama tetapi tidak signifikan secara statistik. Namun, kabupaten dengan tata kelola keseluruhan yang lebih baik tampaknya memiliki hasil ujian nasional yang lebih baik dibandingkan dengan kabupaten yang kinerjanya lebih buruk. Transparansi dan akuntabilitas kembali menonjol karena memiliki hubungan yang kuat dan positif dengan hasil pendidikan. Ketika masing-masing komponen indeks tata kelola digunakan dalam analisis, transparansi dan indeks kelonggaran berhubungan positif dengan tingkat partisipasi dan nilai ujian. Asosiasi ini juga signifikan secara statistik.

3. Metodologi Penelitian

Studi ini menggunakan populasi seluruh pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota di Indonesia yang terdiri atas 542 pemerintah daerah. Data yang diambil merupakan data Neraca Pendidikan Daerah (NPD) tahun ajaran 2018/2019. NPD merupakan data yang menampilkan dan menyajikan potret, informasi, kondisi, dan capaian pendidikan di suatu daerah (provinsi/kabupaten/kota). Data tersebut diterbitkan oleh Kemendikbud. Penelitian ini memberikan gambaran *snapshot* evaluasi pembangunan pendidikan di tahun 2018/2019, 15 tahun sejak UU Sisdiknas diterbitkan.

Seperi disampaikan sebelumnya bahwa studi ini menguji perbedaan kondisi pembangunan pendidikan di wilayah Indonesia dengan beragam kriteria yang dimiliki tiap daerah. Kriteria tersebut antara lain: a) daerah tertinggal/perbatasan atau tidak; b) kabupaten, kota atau provinsi; dan d) kawasan barat Indonesia atau kawasan timur Indonesia. Kriteria ini dipilih untuk menunjukkan perbedaan pembangunan pendidikan berdasarkan kondisi geografis dan karakter pengelolaan pemerintahan daerah khususnya di bidang pendidikan. Kriteria kelima yang juga digunakan adalah pengelolaan keuangan pemerintah daerah yang ditunjukkan dari penerapan *mandatory spending* pendidikan 20 persen dari APBD serta besarnya alokasi anggaran pendidikan dibanding dana Transfer ke Daerah. Kriteria ini dipilih untuk menunjukkan perbedaan pembangunan pendidikan di daerah sesuai dengan pengelolaan keuangannya.

Sementara itu, pembangunan pendidikan ditunjukkan dari beberapa pencapaian kinerja pendidikan seperti Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM), kondisi ruang kelas, kondisi guru bersertifikat dan berijazah D4/S1, rasio guru dan murid, dan hasil ujian nasional (UN). pencapaian kinerja yang diukur merupakan pencapaian di level pendidikan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Pengujian dilakukan dengan uji beda *t-test* dan deskripsi statistik atas sebaran data yang ada. Uji beda *t-test* digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji beda *t-test* dilakukan melalui Microsoft Excel dengan cara membandingkan perbedaan antara dua nilai rata-rata dengan *standard error* dari perbedaan rata-rata dua sampel. Sedangkan deskripsi statistik untuk menggambarkan kondisi sebaran data demi memahami keadaan pembangunan pendidikan Indonesia. Hasil uji beda *t-test* ini akan digambarkan dari nilai *p-value* (sig.). Jika nilai *p-value*/sig. kurang dari 0,05 maka terdapat perbedaan antara sampel yang dibandingkan, dan sebaliknya.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Deskriptif Statistik

Dari pengumpulan data diperoleh 542 pemerintah daerah yang memiliki data lengkap yang diperoleh dari NPD. Data tersebut merupakan jumlah seluruh pemerintah daerah di Indonesia. Tabel 1 menyajikan statistik deskriptif atas data yang diperoleh. Dari tabel tersebut, diketahui bahwa rata-rata pemerintah daerah hanya menganggarkan 12,59 persen dari APBD-nya untuk pendidikan di daerahnya. Angka tersebut di luar jumlah transfer ke daerah dari pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah belum mematuhi amanat UUD 1945 dan UU Sisdiknas yang mengharuskan agar pemerintah daerah mengalokasikan 20 persen dari APBD untuk pendidikan.

Tabel 1. Statistik Deskriptif Kinerja Pendidikan Indonesia

	Mean	Median	Standard Deviation	Range	Minimum	Maximum	Sum	Count
APBD (mil. Rp)	2,290.63	1,393.85	4,467.73	80,327.82	574.27	80,902.09	1,241,522.43	542
APBD Pendidikan (mil. Rp)	271.88	149.20	715.42	14,801.59	(125.99)	14,675.60	147,357.76	542
Transfer ke Daerah Bid. Pendidikan (mil. Rp)	359.31	182.50	825.43	11,443.60	5.60	11,449.20	194,747.82	542
Belanja Pendidikan Daerah	631.19	335.65	1,366.48	18,128.34	60.50	18,188.84	342,105.58	542
Percentase Belanja Pendidikan Daerah	12.59	12.61	4.82	37.08	(7.88)	29.20	6,824.63	542
APK PAUD (%)	39.01	35.06	21.40	180.47	-	180.47	21,144.65	542
APK SD (%)	102.84	104.10	6.73	38.40	76.16	114.56	55,737.97	542
APK SMP (%)	99.81	101.53	10.62	71.30	43.36	114.66	54,095.65	542
APK SMA (%)	89.47	91.53	16.45	108.24	11.91	120.15	48,491.54	542
APM SD (%)	89.46	91.28	7.26	61.05	38.94	99.99	48,485.34	542
APM SMP (%)	73.02	74.59	9.48	64.12	24.53	88.65	39,576.08	542
APM SMA (%)	66.88	67.67	12.59	86.64	10.21	96.85	36,249.73	542
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat PAUD	0.10	0.08	0.09	1.00	-	1.00	55.06	542
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SD	0.19	0.18	0.15	3.07	(2.28)	0.78	104.63	542
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMP	0.19	0.18	0.11	0.89	(0.29)	0.60	101.31	542
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMA	0.11	0.09	0.10	0.55	-	0.55	62.11	542
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMK	0.06	0.04	0.07	0.58	-	0.58	31.24	542
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 PAUD (%)	47.68	48.95	27.28	559.00	-	559.00	25,843.30	542
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat PAUD (%)	27.16	23.85	17.73	76.40	-	76.40	14,722.90	542
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SD (%)	85.17	86.60	36.46	859.90	23.10	883.00	46,163.90	542
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat SD (%)	44.11	46.80	14.44	92.10	-	92.10	23,905.70	542
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMP (%)	93.34	94.40	4.49	39.40	60.30	99.70	50,590.20	542
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat SMP (%)	45.43	44.90	17.34	86.40	-	86.40	24,623.70	542
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMA (%)	97.49	98.10	4.48	92.20	7.80	100.00	52,841.90	542
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat SMA (%)	46.44	47.00	17.04	87.70	1.90	89.60	25,168.30	542
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMK (%)	94.04	95.50	8.98	100.00	-	100.00	50,968.20	542
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat SMK (%)	34.28	34.20	15.00	86.30	-	86.30	18,580.80	542
Rasio Guru Murid SD	0.07	0.06	0.02	0.13	0.01	0.14	35.50	542
Rasio Guru Murid SMP	0.08	0.07	0.02	0.13	0.04	0.17	40.93	542
Rasio Guru Murid SMA	0.07	0.07	0.02	0.16	0.04	0.20	38.54	542
Rasio Guru Murid SMK	0.08	0.08	0.03	0.25	-	0.25	43.98	542
Hasil UN SMP	62.66	49.80	266.17	6,209.42	36.58	6,246.00	33,962.06	542
Hasil UN SMA IPA	49.85	48.62	7.44	71.91	-	71.91	27,017.51	542
Hasil UN SMA IPS	45.21	43.91	6.57	38.90	30.50	69.40	24,504.97	542
Hasil UN SMK	43.70	43.34	5.97	64.97	-	64.97	23,686.83	542

Sumber: data diolah

Untuk melihat kondisi pendidikan Indonesia sesungguhnya perlu membandingkan data keseluruhan dengan data per kawasan. Seperti disampaikan sebelumnya pembagian kawasan akan dilakukan dengan membagi wilayah Indonesia menjadi kawasan barat dan timur. Kawasan barat meliputi wilayah Sumatera, Jawa dan Bali. Kawasan timur terdiri atas Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua dan Nusa Tenggara. Pembedaan ini menghasilkan 293 pemerintah daerah di kawasan barat dan 249 pemerintah daerah di kawasan timur. Pemerintah daerah ini terdiri dari pemerintah provinsi, kabupaten dan kota. Di dalam kawasan tersebut terdapat pula daerah tertinggal dan daerah perbatasan yang memiliki kondisi pembangunan yang lemah dibanding daerah lainnya. Selain itu, masing-masing daerah memiliki

kondisi pengelolaan keuangan khususnya di bidang pendidikan yang berbeda pula. Terdapat daerah yang mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sesuai dengan UU Sisdiknas, 20 persen dari APBD, namun banyak pula daerah yang tidak mengalokasikan sejumlah tersebut.

Tabel 2. Statistik Deskriptif Kinerja Pendidikan Kawasan Barat Indonesia

	Kawasan Barat Indonesia							
	Mean	Median	Standard Deviation	Range	Minimum	Maximum	Sum	Count
APBD (mil. Rp)	2,861.43	1,760.96	5,859.81	80,327.82	574.27	80,902.09	838,398.30	293
APBD Pendidikan (mil. Rp)	364.61	188.60	951.61	14,796.09	(120.49)	14,675.60	106,831.51	293
Transfer ke Daerah Bid. Pendidikan (mil. Rp)	481.37	258.30	1,065.30	11,419.30	29.90	11,449.20	141,039.98	293
Belanja Pendidikan Daerah (mil. Rp)	845.98	500.20	1,778.29	18,111.64	77.20	18,188.84	247,871.49	293
Percentase Belanja Pendidikan Daerah	13.74	13.68	4.96	36.06	(7.88)	28.18	4,024.52	293
APK PAUD (%)	43.11	37.49	22.25	180.47	-	180.47	12,631.83	293
APK SD (%)	102.98	103.85	5.50	37.78	76.16	113.94	30,172.62	293
APK SMP (%)	100.82	101.26	5.24	44.41	69.99	114.40	29,539.38	293
APK SMA (%)	91.12	91.78	12.60	61.38	58.77	120.15	26,697.96	293
APM SD (%)	91.19	91.93	5.79	61.05	38.94	99.99	26,719.20	293
APM SMP (%)	75.52	75.33	4.98	29.37	59.28	88.65	22,127.61	293
APM SMA (%)	69.37	69.00	10.62	53.93	42.92	96.85	20,324.62	293
Per센. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat PAUD	0.09	0.07	0.06	0.46	0.01	0.46	25.78	293
Per센. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SD	0.17	0.16	0.10	0.84	(0.31)	0.52	49.45	293
Per센. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMP	0.17	0.17	0.10	0.85	(0.29)	0.56	50.53	293
Per센. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMA	0.11	0.08	0.09	0.54	-	0.54	30.99	293
Per센. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMK	0.05	0.03	0.07	0.47	-	0.47	15.01	293
Per센. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 PAUD (%)	52.05	51.10	32.49	549.40	9.60	559.00	15,250.80	293
Per센. Jml. Guru Bersertifikat PAUD (%)	32.35	32.10	17.64	76.40	-	76.40	9,477.20	293
Per센. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SD (%)	91.69	91.30	46.87	825.10	57.90	883.00	26,864.30	293
Per센. Jml. Guru Bersertifikat SD (%)	49.92	50.50	10.21	77.20	14.90	92.10	14,627.40	293
Per센. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMP (%)	94.40	94.80	3.09	29.90	69.80	99.70	27,659.00	293
Per센. Jml. Guru Bersertifikat SMP (%)	51.38	51.10	15.75	72.80	13.60	86.40	15,055.40	293
Per센. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMA (%)	97.87	98.00	1.18	7.30	92.70	100.00	28,676.50	293
Per센. Jml. Guru Bersertifikat SMA (%)	52.90	53.30	14.80	78.80	10.80	89.60	15,498.50	293
Per센. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMK (%)	95.06	95.80	3.59	31.00	69.00	100.00	27,851.90	293
Per센. Jml. Guru Bersertifikat SMK (%)	36.75	36.20	14.47	80.60	4.60	85.20	10,768.90	293
Rasio Guru Murid SD	0.06	0.06	0.02	0.11	0.04	0.14	18.82	293
Rasio Guru Murid SMP	0.07	0.07	0.02	0.13	0.04	0.17	21.13	293
Rasio Guru Murid SMA	0.07	0.07	0.02	0.13	0.04	0.17	20.25	293
Rasio Guru Murid SMK	0.07	0.07	0.03	0.21	0.04	0.25	21.65	293
Hasil UN SMP	73.10	50.90	361.91	6,205.61	40.39	6,246.00	21,419.38	293
Hasil UN SMA IPA	52.74	51.58	7.40	33.28	38.63	71.91	15,451.39	293
Hasil UN SMA IPS	47.57	46.07	6.73	34.07	35.33	69.40	13,937.01	293
Hasil UN SMK	45.74	45.03	4.39	23.65	37.19	60.84	13,401.53	293

Sumber: data diolah

Dengan membandingkan hasil di Tabel 1 dan Tabel 2, diketahui bahwa nilai rata-rata untuk seluruh indikator pendidikan yang dimiliki pemerintah daerah di kawasan barat Indonesia memiliki angka yang lebih tinggi dari rata-rata nasional. Sebaliknya, kondisi di kawasan timur Indonesia (Tabel 3) memiliki angka rata-rata indikator pendidikan yang lebih rendah dari rata-rata nasional. Hal ini berarti kondisi pendidikan di kawasan timur Indonesia masih tertinggal dari kawasan barat. Dilihat dari fasilitas pendidikan dan kualitas pengajar, kawasan timur memiliki kondisi yang lebih lemah daripada kawasan barat. Hal ini dapat memengaruhi pencapaian indikator pendidikan seperti APK/APM dan

hasil ujian nasional, dimana kawasan timur memiliki pencapaian yang lebih rendah dari kawasan barat.

Tabel 3. Statistik Deskriptif Kinerja Pendidikan Kawasan Timur Indonesia

	Kawasan Timur Indonesia								
	Mean	Median	Standard Deviation	Range	Minimum	Maximum	Sum	Count	
APBD (mil. Rp)	1,618.97	1,232.95	1,508.53	13,340.95	587.17	13,928.12	403,124.13	249	
APBD Pendidikan (mil. Rp)	162.76	118.30	167.85	1,304.29	(125.99)	1,178.30	40,526.25	249	
Transfer ke Daerah Bid. Pendidikan (mil. Rp)	215.69	135.80	334.32	3,281.09	5.60	3,286.69	53,707.84	249	
Belanja Pendidikan Daerah (mil. Rp)	378.45	249.50	480.96	4,370.89	60.50	4,431.39	94,234.09	249	
Persentase Belanja Pendidikan Daerah	11.25	11.16	4.28	36.81	(7.61)	29.20	2,800.11	249	
APK PAUD (%)	34.19	31.99	19.30	121.68	-	121.68	8,512.82	249	
APK SD (%)	102.67	104.69	7.94	34.50	80.06	114.56	25,565.35	249	
APK SMP (%)	98.62	102.44	14.52	71.30	43.36	114.66	24,556.27	249	
APK SMA (%)	87.52	91.43	19.91	102.59	11.91	114.50	21,793.58	249	
APM SD (%)	87.41	90.08	8.24	40.35	59.08	99.43	21,766.14	249	
APM SMP (%)	70.07	73.48	12.29	61.00	24.53	85.53	17,448.47	249	
APM SMA (%)	63.96	66.49	14.04	82.29	10.21	92.50	15,925.11	249	
Perse. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat PAUD	0.12	0.10	0.11	1.00	-	1.00	29.27	249	
Perse. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SD	0.22	0.22	0.20	3.07	(2.28)	0.78	55.18	249	
Perse. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMP	0.20	0.19	0.11	0.72	(0.11)	0.60	50.50	249	
Perse. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMA	0.12	0.11	0.13	1.61	(1.06)	0.55	29.87	249	
Perse. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMK	0.07	0.04	0.08	0.58	-	0.58	16.23	249	
Perse. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 PAUD (%)	42.54	45.00	18.20	80.50	-	80.50	10,592.50	249	
Perse. Jml. Guru Bersertifikat PAUD (%)	21.07	18.40	15.83	71.40	-	71.40	5,245.70	249	
Perse. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SD (%)	77.51	81.60	14.25	74.10	23.10	97.20	19,299.60	249	
Perse. Jml. Guru Bersertifikat SD (%)	37.26	39.60	15.67	72.10	-	72.10	9,278.30	249	
Perse. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMP (%)	92.09	93.70	5.47	38.70	60.30	99.00	22,931.20	249	
Perse. Jml. Guru Bersertifikat SMP (%)	38.43	39.10	16.52	77.20	-	77.20	9,568.30	249	
Perse. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMA (%)	97.05	98.10	6.46	92.20	7.80	100.00	24,165.40	249	
Perse. Jml. Guru Bersertifikat SMA (%)	38.83	38.40	16.37	81.90	1.90	83.80	9,669.80	249	
Perse. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMK (%)	92.84	94.90	12.57	100.00	-	100.00	23,116.30	249	
Perse. Jml. Guru Bersertifikat SMK (%)	31.37	31.10	15.12	86.30	-	86.30	7,811.90	249	
Rasio Guru Murid SD	0.07	0.07	0.02	0.11	0.01	0.13	16.67	249	
Rasio Guru Murid SMP	0.08	0.08	0.02	0.13	0.04	0.17	19.80	249	
Rasio Guru Murid SMA	0.07	0.07	0.02	0.15	0.05	0.20	18.28	249	
Rasio Guru Murid SMK	0.09	0.08	0.03	0.25	-	0.25	22.33	249	
Hasil UN SMP	50.37	49.11	6.42	47.29	36.58	83.87	12,542.68	249	
Hasil UN SMA IPA	46.45	46.50	5.91	66.26	-	66.26	11,566.12	249	
Hasil UN SMA IPS	42.44	41.96	5.16	31.91	30.50	62.41	10,567.96	249	
Hasil UN SMK	41.31	41.48	6.67	64.97	-	64.97	10,285.30	249	

Sumber: data diolah

4.2. Hasil Pengujian Empiris

Seperti disampaikan sebelumnya, diperoleh 293 pemerintah daerah di kawasan barat dan 249 pemerintah daerah di kawasan timur. Dari hasil uji beda atas wilayah kawasan barat dan timur Indonesia, kedua wilayah memiliki banyak perbedaan yang signifikan secara statistik dalam indikator pendidikannya (Tabel 4). Hal ini menandakan bahwa kondisi di timur Indonesia lebih lemah daripada kondisi di kawasan barat ($p\text{-value/sig.} > 0,05$). Namun perbandingan ini belum memisahkan daerah yang tertinggal dan daerah perbatasan yang memiliki kondisi pembangunan jauh lebih rendah dari daerah sekitarnya. Secara rinci, indikator pendidikan yang tidak memiliki perbedaan signifikan hanya APK SD (sig. 0,2990 $> 0,05$). Hal ini perlu menjadi perhatian

pemerintah dalam memfokuskan pembangunan pendidikan. Perhatian ini tidak hanya dalam pengalokasian anggaran, namun juga pengawasan pelaksanaan pembangunan pendidikan, seperti penyediaan ruang kelas yang layak serta guru berijazah sarjana dan bersertifikat di kawasan timur Indonesia.

Beberapa indikator seperti persentase jumlah ruang kelas rusak berat memiliki t-hitung dengan nilai negatif. Hal ini menandakan bahwa kondisi di wilayah timur mayoritas memiliki nilai persentase yang lebih tinggi dibanding kawasan barat Indonesia. Hal ini perlu menjadi perhatian bagi pemerintah pusat dalam memusatkan pembangunan infrastruktur pendidikan di wilayah timur. Meskipun perbedaannya tidak signifikan namun hal ini cukup menjadi alasan bagi pemerintah pusat untuk memberikan perhatian khusus dalam pembangunan infrastruktur pendidikan khususnya ruang kelas untuk mengurangi persentase jumlah ruang kelas rusak, hal ini dapat dilakukan tidak hanya dengan mengalokasikan dana transfer ke daerah pendidikan lebih banyak namun mengalokasikan anggaran langsung dari pusat untuk pembiayaan pembangunan ruang kelas juga mengawasi pelaksanaan pembangunannya.

Tabel 4. Hasil Uji Beda Kawasan Barat dan Timur Indonesia dengan t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances

Indikator	Rata-rata		Varians		t-hitung	p-value (sig. 0,05)	t-tabel
	KBI	KTI	KBI	KTI			
APK PAUD (%)	43.1120	34.1880	495.1434	372.3343	4.9430	0.0000	1.6477
APK SD (%)	102.9782	102.6721	30.2806	63.0593	0.5275	0.2990	1.6477
APK SMP (%)	100.8170	98.6196	27.4693	210.8442	2.4124	0.0081	1.6477
APK SMA (%)	91.1193	87.5244	158.7764	396.6072	2.5477	0.0056	1.6477
APM SD (%)	91.1918	87.4142	33.5574	67.8301	6.2422	0.0000	1.6477
APM SMP (%)	75.5209	70.0742	24.8207	150.9240	6.9474	0.0000	1.6477
APM SMA (%)	69.3673	63.9563	112.7575	197.1931	5.0999	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat PAUD	0.0880	0.1176	0.0040	0.0121	-3.9089	0.0001	1.6477
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SD	0.1703	0.2315	0.0090	0.0135	-6.7552	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMP	0.1736	0.2039	0.0101	0.0114	-3.4025	0.0004	1.6477
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMA	0.1058	0.1250	0.0084	0.0101	-2.3226	0.0103	1.6477
Persen. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMK	0.0512	0.0652	0.0044	0.0067	-2.1904	0.0145	1.6477
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 PAUD (%)	50.3334	42.5402	172.3181	331.2898	5.7727	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Bersertifikat PAUD (%)	32.3454	21.0671	311.0700	250.6795	7.7737	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SD (%)	88.9747	77.5084	45.4158	203.1492	12.2541	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SD (%)	49.9229	37.2622	104.2137	245.4553	11.2965	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMP (%)	94.3993	92.0932	9.5592	29.8902	6.1550	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMP (%)	51.3836	38.4269	247.9320	272.7817	9.3345	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMA (%)	97.8720	97.0498	1.3871	41.7839	2.1363	0.0166	1.6477
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMA (%)	52.8959	38.8345	218.9076	268.0091	10.4988	0.0000	1.6477
Persen. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMK (%)	95.0577	92.8365	12.8924	158.0384	2.8892	0.0020	1.6477
Persen. Jml. Guru Bersertifikat SMK (%)	36.7539	31.3731	209.2684	228.6710	4.2265	0.0000	1.6477
Rasio Guru Murid SD	0.0642	0.0670	0.0003	0.0004	-1.6412	0.0507	1.6477
Rasio Guru Murid SMP	0.0721	0.0795	0.0005	0.0004	-4.0988	0.0000	1.6477
Rasio Guru Murid SMA	0.0691	0.0734	0.0003	0.0003	-2.8222	0.0025	1.6477
Rasio Guru Murid SMK	0.0739	0.0897	0.0008	0.0011	-5.8865	0.0000	1.6477
Hasil UN SMP	51.9995	50.3722	40.5066	41.1952	2.9548	0.0016	1.6477
Hasil UN SMA IPA	52.7351	46.4503	54.7057	34.8845	10.7977	0.0000	1.6477
Hasil UN SMA IPS	47.5666	42.4416	45.2931	26.6046	9.8137	0.0000	1.6477
Hasil UN SMK	45.7390	41.3064	19.2747	44.4851	9.2586	0.0000	1.6477

Sumber: data diolah

Dengan memisahkan daerah tertinggal dan perbatasan, diperoleh hasil uji beda seperti disajikan di Tabel 5. Pemisahan daerah tertinggal dan perbatasan ini penting untuk dapat membandingkan pemerintah daerah yang memiliki fase pembangunan yang kurang lebih serupa. Pemisahan tersebut menghasilkan

jumlah sampel yang diuji sebanyak 260 pemerintah daerah di kawasan barat Indonesia dan 139 pemerintah daerah di kawasan timur. Hasil uji beda *t-test* untuk kawasan barat dan timur Indonesia tanpa daerah tertinggal dan perbatasan menunjukkan hasil yang kurang lebih sama dengan hasil sebelumnya, dimana terdapat perbedaan yang signifikan dalam indikator pendidikan untuk kedua kawasan tersebut.

Tabel 5. Hasil Uji Beda Kawasan Barat dan Timur Indonesia dengan t-Test: Two-Sample Assuming Equal Variances - Tanpa Daerah Tertinggal dan Perbatasan

Indikator	Rata-rata		Varians		t-hitung	p-value (sig. 0,05)	t-tabel
	KBI	KTI	KBI	KTI			
APK PAUD (%)	44.3134	37.0863	503.8270	277.3905	3.3359	0.0005	1.6487
APK SD (%)	103.2997	103.5035	23.2182	38.4678	-0.3633	0.3583	1.6487
APK SMP (%)	100.9631	102.3243	24.7145	85.4686	-1.9136	0.0282	1.6487
APK SMA (%)	91.5517	93.3424	157.3286	176.7788	-1.3304	0.0921	1.6487
APM SD (%)	91.6973	89.6687	27.5970	40.5787	3.4071	0.0004	1.6487
APM SMP (%)	75.9770	73.0709	22.9092	67.7593	4.4575	0.0000	1.6487
APM SMA (%)	69.8204	66.9419	111.4037	90.9521	2.6826	0.0038	1.6487
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat PAUD	0.0845	0.0946	0.0035	0.0048	-1.5358	0.0627	1.6487
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SD	0.1620	0.2087	0.0080	0.0112	-4.6756	0.0000	1.6487
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMP	0.1687	0.1889	0.0093	0.0097	-1.9856	0.0239	1.6487
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMA	0.0978	0.1060	0.0060	0.0065	-0.9956	0.1600	1.6487
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMK	0.0472	0.0486	0.0026	0.0034	-0.2534	0.4001	1.6487
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 PAUD (%)	51.3542	48.2770	161.0040	279.1590	2.0602	0.0200	1.6487
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat PAUD (%)	34.1977	26.6245	294.2190	247.5890	4.3227	0.0000	1.6487
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SD (%)	89.4438	83.4216	42.1974	81.2695	7.6742	0.0000	1.6487
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat SD (%)	51.1342	44.7662	88.6494	148.5325	5.7926	0.0000	1.6487
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMP (%)	94.4881	93.5791	9.6492	16.6020	2.4904	0.0066	1.6487
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat SMP (%)	53.3031	46.9281	221.4641	181.9565	4.2096	0.0000	1.6487
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMA (%)	97.9515	97.2719	1.1112	60.8177	1.3832	0.0837	1.6487
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat SMA (%)	54.7262	47.4309	193.7636	177.5506	5.0620	0.0000	1.6487
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMK (%)	95.1577	94.1978	12.8306	79.7030	1.5209	0.0645	1.6487
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat SMK (%)	38.1488	37.7180	200.6511	175.7467	0.2959	0.3837	1.6487
Rasio Guru Murid SD	0.0632	0.0711	0.0003	0.0004	-4.1649	0.0000	1.6487
Rasio Guru Murid SMP	0.0709	0.0783	0.0005	0.0003	-3.5171	0.0002	1.6487
Rasio Guru Murid SMA	0.0686	0.0707	0.0003	0.0001	-1.2675	0.1029	1.6487
Rasio Guru Murid SMK	0.0719	0.0847	0.0007	0.0006	-4.6968	0.0000	1.6487
Hasil UN SMP	52.3151	49.5722	41.9665	17.7075	4.5079	0.0000	1.6487
Hasil UN SMA IPA	53.4270	48.3561	54.5914	22.4929	7.3228	0.0000	1.6487
Hasil UN SMA IPS	48.1570	43.1540	46.2338	19.1314	7.8476	0.0000	1.6487
Hasil UN SMK	46.0652	42.1606	19.5566	23.7462	8.1068	0.0000	1.6487

Sumber: data diolah

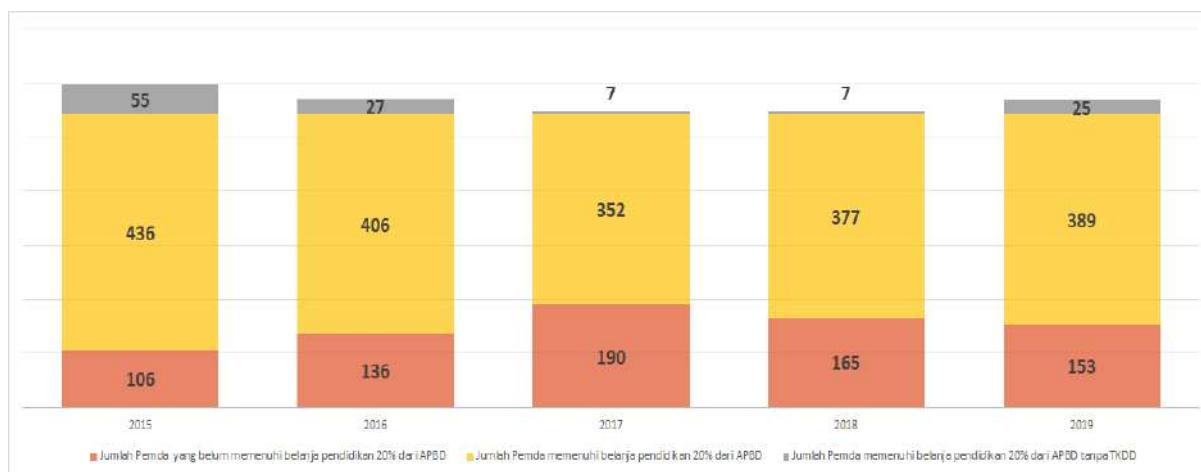
Dari tabel 5 di atas terlihat bahwa kinerja pendidikan yang diukur dengan angka partisipasi kasar di jenjang PAUD dan SMP memiliki perbedaan yang signifikan (sig. < 0,05) antara kedua kawasan). Sementara itu, untuk APK jenjang SD dan SMA tidak terdapat perbedaan yang signifikan (sig. > 0,05). Untuk APM di ketiga jenjang pendidikan memiliki perbedaan yang signifikan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Hasil pendidikan yang diukur melalui hasil Ujian Nasional (UN) juga menunjukkan hal yang sama, dimana kawasan barat memiliki hasil yang lebih baik daripada kawasan timur. Hal ini dapat dipahami karena sumber daya yang diperlukan untuk mendapatkan hasil tersebut juga memiliki perbedaan yang signifikan. Seperti disampaikan sebelumnya bahwa wilayah barat Indonesia memiliki riwayat pembangunan yang lebih cepat dibandingkan wilayah timur. Di bidang pendidikan terlihat dengan sedikitnya jumlah ruang kelas yang rusak berat dan banyaknya pengajar berkualitas di wilayah tersebut. Hadirnya sumber daya pendidikan yang lebih baik ini terlihat

dari nilai signifikansi dalam uji t di atas, dimana untuk jenjang pendidikan dasar, SD dan SMP, terdapat perbedaan yang signifikan. Hal ini perlu menjadi sinyal bagi pemerintah untuk mengalokasikan sumber daya utamanya dengan beralih ke wilayah timur sebagai fokus pembangunan. Hingga kini, pembangunan di wilayah timur masih sporadis, hanya untuk wilayah tertentu saja, seperti Papua dan Papua Barat, namun hasilnya hingga kini masih belum terlihat.

Seperti disampaikan sebelumnya bahwa sebagian besar anggaran pendidikan Indonesia terdiri dari transfer fiskal ke sekolah dan ke pemerintah daerah. Sesuai amanat konstitusi, 20 persen belanja pendidikan dari nilai total belanja yang dianggarkan tidak hanya berlaku di pusat saja. Di daerah juga diterapkan amanat tersebut. Namun berdasarkan penelusuran data Neraca Pendidikan Daerah (Kemendikbud) dari tahun 2015 hingga 2019, belanja pendidikan daerah meskipun mencapai batas amanat konstitusi atau bahkan melebihi, nilai belanja pendidikan tersebut masih didominasi oleh dana transfer ke daerah dari pusat. Gambar 1 menunjukkan bahwa pemerintah daerah masih belum mengutamakan pendidikan sesuai amanat UUD 1945. Hanya sebagian kecil pemerintah daerah (25 pemerintah daerah dari total 542 pemerintah daerah di tahun 2019) yang mengalokasikan belanja pendidikan sebesar 20 persen dari APBD tanpa mengandalkan transfer ke daerah. Jumlah pemerintah daerah yang mematuhi amanat tersebut pun tiap tahun bervariasi, artinya pendidikan masih belum menjadi misi utama daerah dalam pembangunan¹. Selain itu, terdapat bukti bahwa dana yang dimaksudkan untuk pendidikan kadang-kadang dialihkan ke prioritas lokal lain atau dibelanjakan secara tidak efektif (Suryadarma 2012, Al-Samarrai dan Cedran-Infantes 2013). Dalam mengatasi hal tersebut, muncul kebutuhan mendesak untuk mengembangkan kapasitas sumber daya manusia dari dinas pendidikan dan sekolah serta pemerintah daerah, terutama di daerah-daerah tertinggal.

¹ Dari data tahun 2019 juga diketahui bahwa daerah yang memenuhi *mandatory spending* pendidikan tanpa bergantung pada transfer ke daerah tersebut merupakan daerah di wilayah Kawasan Barat Indonesia, yaitu: Provinsi Sumatera Barat; Provinsi Kepulauan Riau; Provinsi Riau; Kab. Mandailing Natal; Kab. Limapuluh Kota; Kota Padang; Kota Dumai; Kab. Lahat; Kota Palembang; Kab. Banyuasin; Kab. Ogan Ilir; Kab. OKU Timur; Kab. Bekasi; Kab. Subang; Kab. Tasikmalaya; Kota Bandung; Kab. Blora; Kab. Klaten; Kab. Wonogiri; Kota Yogyakarta; Kab. Banyuwangi; Kab. Nganjuk; Kab. Lebak; Kab. Pandeglang; Kota Tangerang. Hal ini berarti Kawasan Timur Indonesia belum memenuhi amanat tersebut, sehingga wajar jika pembangunan pendidikan juga mengalami ketimpangan antar kawasan.

Gambar 1. Sebaran Pemerintah Daerah Dalam Pemenuhan Mandatory Spending Pendidikan, 2015-2019



Sumber: Neraca Pendidikan Daerah 2015-2019, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Kondisi lemahnya pemenuhan *mandatory spending* di daerah ini merupakan bukti lemahnya koordinasi pembangunan pendidikan. Hal ini berdampak pada kualitas layanan pendidikan yang diberikan pemerintah daerah dan akhirnya berdampak pada kualitas hasil pembelajaran. Dengan sedikitnya sampel pemerintah daerah yang memenuhi *mandatory spending* pendidikan maka perbandingan kualitas layanan dan hasil pendidikan di kawasan barat dan timur Indonesia dialihkan pada perbandingan daerah yang memiliki nilai anggaran belanja pendidikan yang bersumber dari APBD lebih besar dari belanja pendidikan dari transfer ke daerah bidang pendidikan. Kriteria ini dipilih karena dapat menunjukkan kemandirian dan kepedulian pemerintah daerah terhadap pembangunan pendidikan sesuai dengan amanat undang-undang.

Dari hasil uji t, daerah dengan anggaran pendidikan dalam APBD lebih tinggi dari transfer ke daerah memiliki perbedaan yang signifikan antara kawasan barat dan timur Indonesia. Perbedaan rata-rata tersebut terutama di indikator APM SD, APM SMP, APM SMA, persentase jumlah guru berijazah untuk jenjang PAUD, SD, SMP dan SMA, persentase jumlah guru bersertifikat untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP, rasio guru dan murid di semua jenjang pendidikan, dan hasil UN SMP, SMA, dan SMK. Indikator tersebut menunjukkan angka signifikansi yang kurang dari nilai alpha 0,05. Hasil ini tidak jauh berbeda dari uji t sebelumnya, yang menunjukkan terdapat *gap* yang signifikan antara kawasan barat dan timur Indonesia dalam hal pembangunan pendidikan.

Dengan hasil tersebut maka perlu kebijakan dari pemerintah untuk memusatkan pembangunan pendidikan di kawasan timur Indonesia. Penerapan pengawasan pengelolaan keuangan di bidang pendidikan perlu diperkuat untuk memastikan agar pemerintah daerah melakukan belanja yang efektif. Hadirnya *reward/punishment* bagi pemerintah yang memenuhi amanat

UU Sisdiknas dalam memenuhi belanja wajib pendidikan perlu ditegakkan agar pembangunan pendidikan jadi optimal.

**Tabel 6. Hasil Uji Beda Kawasan Barat dan Timur Indonesia dengan t-Test:
Two-Sample Assuming Equal Variances - Tanpa Daerah Tertinggal dan
Perbatasan dengan Pengalokasian Anggaran Pendidikan Daerah Melebihi
Transfer ke Daerah**

Indikator	Rata-rata		Varians		t-hitung	p-value (sig. 0,05)	t-tabel
	KBI	KTI	KBI	KTI			
APK PAUD (%)	40.3403	36.1804	375.8192	316.3110	1.1757	0.1210	1.6578
APK SD (%)	103.5292	103.4953	32.3949	52.6129	0.0285	0.4886	1.6578
APK SMP (%)	100.3904	100.4424	25.9483	149.8125	-0.0327	0.4870	1.6578
APK SMA (%)	94.5800	89.2336	188.4506	242.8662	1.9682	0.0257	1.6578
APM SD (%)	91.3695	88.7062	59.5113	61.1587	1.8261	0.0352	1.6578
APM SMP (%)	74.9659	70.6720	30.5330	117.1139	2.8865	0.0023	1.6578
APM SMA (%)	71.5520	63.9598	136.0106	106.0357	3.6113	0.0002	1.6578
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat PAUD	0.0656	0.0663	0.0033	0.0027	-0.0754	0.4700	1.6578
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SD	0.1278	0.1707	0.0085	0.0133	-2.2516	0.0131	1.6578
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMP	0.1304	0.1441	0.0102	0.0117	-0.7011	0.2423	1.6578
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMA	0.0899	0.0987	0.0088	0.0114	-0.4721	0.3189	1.6578
PerSEN. Jml. Ruang Kelas Rusak Berat SMK	0.0402	0.0391	0.0041	0.0022	0.0955	0.4620	1.6578
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 PAUD (%)	49.9974	43.1778	206.8861	287.4240	2.3567	0.0100	1.6578
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat PAUD (%)	30.9026	20.9822	333.1336	192.0188	3.1465	0.0010	1.6578
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SD (%)	88.6632	82.7489	47.1858	69.5898	4.2218	0.0000	1.6578
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat SD (%)	49.1539	41.6000	119.9940	224.4223	3.1889	0.0009	1.6578
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMP (%)	94.1632	92.9933	9.4365	15.2488	1.8272	0.0351	1.6578
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat SMP (%)	49.3395	42.2178	251.1059	187.2092	2.5103	0.0067	1.6578
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMA (%)	97.8461	95.8600	1.0433	182.0056	1.2809	0.1014	1.6578
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat SMA (%)	52.0447	43.1844	262.4977	187.5241	3.0743	0.0013	1.6578
PerSEN. Jml. Guru Berijazah >D4/S1 SMK (%)	94.8816	92.2844	11.8559	210.4691	1.4951	0.0688	1.6578
PerSEN. Jml. Guru Bersertifikat SMK (%)	37.8974	35.2467	301.3835	242.4421	0.8428	0.2005	1.6578
Rasio Guru Murid SD	0.0571	0.0653	0.0002	0.0003	-2.8040	0.0029	1.6578
Rasio Guru Murid SMP	0.0664	0.0739	0.0003	0.0003	-2.2150	0.0143	1.6578
Rasio Guru Murid SMA	0.0667	0.0708	0.0002	0.0002	-1.6895	0.0469	1.6578
Rasio Guru Murid SMK	0.0686	0.0829	0.0007	0.0010	-2.7027	0.0039	1.6578
Hasil UN SMP	53.1287	49.3769	60.0063	18.9827	2.9788	0.0018	1.6578
Hasil UN SMA IPA	54.7068	48.7182	77.1073	34.9176	4.0596	0.0000	1.6578
Hasil UN SMA IPS	49.3012	43.5318	63.2612	32.3444	4.2605	0.0000	1.6578
Hasil UN SMK	46.2284	41.6024	25.2920	56.5814	4.0508	0.0000	1.6578

Sumber: data diolah

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini menguji perbedaan kinerja indikator pendidikan nasional di kawasan barat dan timur Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kawasan barat Indonesia memiliki hasil pembangunan pendidikan yang lebih maju dibanding kawasan timur Indonesia. Hal ini terlihat dari beberapa indikator seperti APM, persentase jumlah guru berijazah D4/S1, dan persentase jumlah guru bersertifikat, rasio guru dan murid serta hasil ujian nasional. Perbedaan ini terjadi di jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Perbandingan juga dilakukan dengan menggunakan kriteria keuangan berupa pengalokasian anggaran pendidikan daerah yang lebih tinggi dari anggaran transfer ke daerah dari pemerintah pusat yang bersumber dari APBN. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan hasil yang serupa, bahwa kawasan barat memiliki pembangunan pendidikan yang lebih unggul daripada kawasan timur Indonesia.

5.2. Saran

Untuk mencapai potensi pendidikannya, Indonesia perlu meningkatkan lingkungan belajar dan mengajar, manajemen sekolah, dan koordinasi lintas tingkat pemerintahan. Desentralisasi telah menciptakan tantangan besar terkait dengan kapasitas, serta sistem lemahnya *check and balances* dalam pemberian layanan pendidikan.

Solusi praktis untuk masalah ini diperlukan agar sistem pendidikan Indonesia bergerak maju. Ini termasuk hanya memilih kandidat dengan kualitas tertinggi untuk menjadi guru, mengarahkan sekolah, kabupaten dan provinsi untuk merencanakan dan menganggarkan secara efisien untuk mencapai standar nasional dalam pendidikan, dan memberikan program efektif dukungan teknis bagi guru dan sekolah untuk meningkatkan pembelajaran siswa.

Daftar Pustaka

- Al-Samarrai, S. 2013. Local Governance and Education Performance: A Survey of the Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts. World Bank, Jakarta Indonesia.
- Al-Samarrai, S. and P. Cerdan-Infantes. 2013. "Where Did All the Money Go? Financing Basic Education in Indonesia." *Education in Indonesia*, 109-138.
- Al-Samarrai, S., M. C. Chang, A. B. Ragatz, S. Shaeffer, R. Stevenson and J. J. De Ree. 2013. Teacher Reform in Indonesia: The Role of Politics and Evidence in Policy Making: Main Report (English). Directions in Development; Human Development, World Bank, Washington DC.
- Cerdan-Infantes, P., Y. Makarova, S. Al-Samarrai, D. Chen, P. Cerdan-Infantes, Y. Makarova, C. Al-Samarrai, D. Chen. 2013. Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia. Policy brief. World Bank, Washington DC.
- Delavallade, C. 2006. "Corruption and Distribution of Public Spending in Developing Countries." *Journal of Economics and Finance* 30 (2): 222-239.
- Dwiyanto, A. 2011. Functional Assignment in Indonesia: Policy issues and recommendations.
- Kaufman, D. and A. Kraay. 2002. "Growth without Governance." World Bank Policy Research Working Paper Series No. 2928, World Bank, Washington, DC.
- Kaufman, D., A. Kraay, et al. 2010. The Worldwide Governance Indicators: Methodology and Analytical Issues.
- KPPOD and Asia Foundation. 2011. Local Economic Governance: A survey of Business Operators in 245 Districts/Municipalities in Indonesia.

- Kristiansen, S. and M. Ramli. 2006. "Buying an Income: The Market for Civil Service Positions in Indonesia." *Contemporary Southeast Asia* 28(2): 207-233.
- Lewis, M. and G. Pettersson. 2009. Governance in Education: Raising Performance.
- McCulloch, N. and E. Malesky. 2010. Does Better Local Governance Improve District Growth Performance in Indonesia?
- Paris. Rajkumar, A. S. and V. Swaroop. 2008. "Public Spending and Outcomes: Does Governance Matter?" *Journal of Development Economics* 86: 96-111.
- Rorris, A. 2012. "Annual Sector Financial Report 2011", Australia's Education Partnership with Indonesia. Performance Oversight and Monitoring (POM).
- Suryadarma, D. 2011. How Corruption Diminishes the Effectiveness of Public Spending on Education in Indonesia.
- UNCEN, UNIPA, et al. 2012. We Like to be Taught: A Study on Teacher Absenteeism in Papua and West Papua.
- USAID. 2009. Study of The Legal Framework for The Indonesian Basic Education Sector.
- USAID. 2010. Implementing School-Based Management in Indonesia. The DBE1 Experience: 2005 – 2010.
- Von Luebke, C. 2009. "The Political Economy of Local Governance: Findings from an Indonesian Field Study." *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 45(2): 201-230.
- World Bank. 2009. Investing in Indonesia's Education at The District Level: An Analysis of Regional Public Expenditure and Financial Management. World Bank, Jakarta
- . 2010. Governance Matters to Education Outcomes. The Indonesia Local Education Governance inDex (ILEGI): A Report Card of 50 Local Governments. World Bank, Jakarta.
- . 2012a. The BOSDA Improvement Program: Enhancing Equity and Performance Through Local School Grants. World Bank, Jakarta.
- . 2012b. Improving Public Service Delivery and Financial Management in the Gateway to Eastern Indonesia: South Sulawesi Public Expenditure Analysis 2012.
- . 2012c. Making Better Use of Teachers: Strengthening Teacher Management to Improve the Efficiency and Equity of Public Spending. World Bank, Jakarta.
- . 2012d. School Based Management in Indonesia. Jakarta.

- _____. 2013a. "Additional Tables. Local Governance and Education Performance: A Survey of The Quality of Local Education Governance in 50 Indonesian Districts." World Bank, Jakarta.
- _____. 2013b. Spending More or Spending Better: Improving Education Financing in Indonesia. Education Public Expenditure Review. World Bank, Jakarta.
- _____. 2015. Reviewing 10 Years of Indonesia's School Grants Program. World Bank, Washington, DC. <https://www.indonesia-investments.com/upload/documents/World-Bank-Bantuan-Operasional-Sekolah-Indonesia-School-Grants-Program-Indonesia-Investments.pdf>
- _____. 2017. Indonesia Economic Quarterly: Decentralization that Delivers. December. World Bank, Jakarta, Indonesia.
- _____. 2018a. Indonesia Economic Quarterly: Learning More, Growing Faster. June. World Bank, Jakarta, Indonesia.
- _____. 2018b. World Development Report 2018: Learning to Realize Education's Promise. World Bank, Washington, DC.
- _____. 2018c. Mapping Indonesia's Civil Service. World Bank, Washington, DC. <http://documents.worldbank.org/curated/en/643861542638957994/pdf/126376-Mapping-Indonesia-Civil-Service-14977.pdf>
- _____. 2018d. Growing Smarter: Learning and Equitable Development in East Asia and Pacific. World Bank, Washington, DC.
- _____. 2019a. Indonesia Economic Quarterly: Oceans of Opportunity. June. World Bank, Jakarta
- _____. 2019b. World Development Report: The Changing Nature of Work. World Bank, Washington, DC.
- _____. 2019c. Ending Learning Poverty: What Will It Take? World Bank, Washington, DC.
- _____. Forthcoming. Primary Education in Remote Indonesia: Survey Results from West Kalimantan and East Nusa Tenggara.

ANALISIS PENGARUH PROFITABILITAS DAN LEVERAGE TERHADAP PRAKTIK PENGHINDARAN PAJAK

Analysis of Profitability and Leverage Towards Tax Avoidance

Martha Carolina

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: martha.carolina@dpr.go.id

Abstract

This study uses agency theory that explains the difference of interests (agency problems) between principals and agents. To solve these difference of interests, it uses aggressive tax avoidance in order to optimize both interests. This study uses observation of secondary data obtained from the audited financial statements of manufacturing companies. The results showed that this study had passed classic assumption test. The F test shows that the independent variables jointly influence the dependent variable with significant value of 0,000. The t test results showed profitability (ROA) and leverage (DER) with each a significant value of 0,000; 0,870. Finally, the conclusion of this study shows that ROA variable (X1) affects tax avoidance (Y), ROA has a negative effect on tax avoidance. whereas DER variable (X2) has no effect on tax avoidance (Y).

Keywords : Tax Avoidance, Profitability, and Leverage

1. Pendahuluan

Pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam optimalisasi pendapatan negara yang bersumber dari penerimaan pajak untuk mendorong investasi dan daya saing. Pemerintah melakukan intensifikasi pajak yaitu dengan melakukan pemotongan tarif pajak penghasilan badan (*tax cut rate*). Tarif pajak penghasilan badan pada awalnya menggunakan tarif pajak progresif terhadap Penghasilan Kena Pajak (PKP) sesuai dengan Undang-undang (UU) No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan, Pada tahun 2009 Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) diturunkan menjadi 28 persen untuk semua perusahaan berapa pun tingkat labanya sesuai dengan UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan. Pada tahun 2010 diturunkan kembali menjadi 25 persen dan pada tahun 2020 diturunkan kembali menjadi 22 persen dan pada tahun 2021 menjadi 20 persen berdasarkan Perpu 1 Tahun 2020. Pemerintah dalam intensifikasi pajak juga melakukan kombinasi insentif/belanja perpajakan (*tax expenditure*) seperti pemberian insentif *super deduction* sebagai bentuk dukungan bagi penyelenggaraan kegiatan vokasi dan penelitian juga bagi industri padat karya.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara adalah ekstensifikasi yaitu mencari Wajib Pajak (WP) baru dan meningkatkan kepatuhan sukarela WP namun upaya optimalisasi ini belum mampu memenuhi target penerimaan negara dari sektor pajak. Realisasi penerimaan pajak tahun 2019 hanya 84,4 persen atau lebih rendah (*short fall*) sebesar Rp245,4 triliun dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577,6 triliun. Begitu pula, pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 diperkirakan penerimaan pajak juga akan mengalami penurunan. Rasio pajak tahun 2020 diperkirakan hanya sebesar 8,7 persen atau turun 2-3 persen terhadap PDB dibandingkan tahun 2014-2019 dengan rata-rata rasio sebesar 10,3 persen.

Berdasarkan data Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tahun 2014-2019 penerimaan utama pajak berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Non Migas sebesar 52-54 persen. Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM) sebesar 40 persen. PBB sebesar 3 persen, pajak lainnya sebesar 1 persen, dan PPh Migas sebesar 4-5 persen. Realisasi penerimaan PPh Non Migas tahun 2019 berasal PPh pasal 21, dan PPh 25 untuk orang pribadi juga PPh 25/29 badan. Penerimaan PPh Pasal 21 dan PPh 25 untuk orang pribadi tahun 2019 pertumbuhannya cukup baik masing-masing tumbuh 10,2 persen dan 19,4 persen. Di sisi lain, pertumbuhan PPh Badan hanya tumbuh 1,1 persen.

Tantangan optimalisasi penerimaan PPh Badan salah satunya adalah praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Praktik penghindaran pajak muncul karena ada celah dalam Undang-Undang Perpajakan. Persoalan penghindaran pajak diperbolehkan secara hukum selama sesuai dengan ketentuan undang-undang yang ada. Dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak (DJP) tidak dapat berbuat apa-apa atau melakukan penuntutan secara hukum. Praktik penghindaran pajak adalah perlakuan aktif yang dilakukan WP dengan cara mengurangi kewajiban perpajakannya sebelum Surat Keterangan Pajak (SKP) dikeluarkan. WP melakukan praktik penghindaran pajak untuk meningkatkan labanya dengan cara mengurangi beban pajak perusahaan seminimal mungkin.

Praktik penghindaran pajak dibedakan berdasarkan golongan WP mulai dari WP yang mempunyai laba besar dan WP yang mempunyai laba kecil. WP yang mempunyai laba besar biasanya menggunakan jasa konsultan pajak. Sedangkan WP yang mempunyai laba kecil biasanya menghindari pengenaan pajak dengan cara menahan untuk membeli sesuatu barang. Cara lain praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh WP adalah dengan meminjam uang ke bank dengan nominal besar sehingga bunga pinjaman semakin besar yang dibebankan kepada laporan keuangan fiskal dan pinjaman tidak menambah modal wajib pajak sehingga laba tidak bertambah, WP juga memanfaatkan pemberian natura dan kenikmatan untuk mengurangi beban dalam laporan pajak, WP juga melakukan penghindaran pajak dengan menggunakan hibah yang diterima bukan dalam garis keturunan satu derajat dan WP juga dapat melakukan penghindaran pajak dengan cara membagi-bagi laporan keuangan perusahaan dalam satu atau dua laporan perusahaan sehingga bisa memanfaatkan pembayaran pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto jika

pendapatannya kurang dari Rp4,8milyar dalam satu tahun. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 tahun 2018 tentang Pengusaha dan Pelaku UMKM.

Praktik penghindaran pajak diproksikan dengan *Current Effective Tax Rate* (CETR) dengan rumus total beban pajak dikurangi pajak tangguhan. CETR yang persentasenya tinggi mendekati tarif pajak penghasilan badan maka semakin rendah tingkat praktik penghindaran pajak, sebaliknya semakin rendah tingkat persentase CETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak (Dewinta dan Setiawan, 2016).

Faktor-faktor yang memengaruhi praktik penghindaran pajak dalam penelitian ini adalah profitabilitas dan *leverage*. Profitabilitas menggunakan rasio *Return On Asset* (ROA). ROA sebagai pengukur laba bersih perusahaan dari sebuah aset. Penelitian Hidayat (2018) menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. ROA perusahaan meningkat maka laba meningkat namun praktik penghindaran pajak menurun. Hal ini disebabkan oleh aset perusahaan mampu melakukan laba besar tanpa perlu melakukan perencanaan pajak. Di sisi lain, hasil penelitian Dewinta dan Setiawan (2016) ROA berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak. Semakin besar laba perusahaan maka beban pajak perusahaan semakin besar maka mendorong WP melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara meningkatkan beban pajak yang ditanggung perusahaan.

Leverage digunakan untuk mengukur seberapa besar beban utang yang ditanggung perusahaan dalam memenuhi aset. Tujuannya adalah untuk memberikan keuntungan lebih besar daripada biaya tetap (*fixed rate return*). Bunga yang dibayar perusahaan melalui utang merupakan beban tetap sehingga meningkatkan pengembalian bagi pemegang saham. Di sisi lain, semakin besar hutang maka laba semakin kecil. Variabel proksi penelitian *leverage* ini menggunakan *Debt to Equity Ratio* (DER) untuk mengetahui pengaruh risiko hutang terhadap praktik penghindaran pajak melalui modal yang dimiliki oleh perusahaan. Praktik penghindaran pajak memanfaatkan celah dalam Pasal 6 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, dimana penggunaan utang menimbulkan beban bunga yang dapat meminimalkan beban pajak. Penelitian Maryani (2014) *leverage* berpengaruh positif terhadap praktik penghindaran pajak. Perusahaan yang memiliki kewajiban pajak tinggi akan memilih utang sebagai sumber pendanaan dan beban bunga tersebut dapat mengurangi pajak. Di sisi lain, penelitian Kurniasih dan Sari (2013) menyatakan bahwa *leverage* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak. Semakin besar utang perusahaan tidak ada kaitannya dengan penghindaran laba dan praktik penghindaran pajak.

Berdasarkan fenomena dan identifikasi masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER) secara bersama-sama (simultan) terhadap penghindaran pajak (CETR), pengaruh profitabilitas (ROA) terhadap penghindaran pajak (CETR), dan pengaruh *leverage* (DER) terhadap penghindaran pajak (CETR pada perusahaan

manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2015-2018. Alasan dipilihnya perusahaan manufaktur yaitu karena manufaktur merupakan sektor yang berkontribusi besar pada penerimaan pajak dan perusahaan manufaktur merupakan wajib pajak yang difokuskan dalam daftar pemeriksaan Direktorat Jenderal Pajak.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Agensi

Timbulnya praktik penghindaran pajak dapat dijelaskan dengan teori agensi. Konsep teori agensi adalah hubungan atau kontrak antara prinsipal kepada agen untuk melakukan suatu jasa bagi prinsipal (Pamungkas, 2013). Berdasarkan teori agensi jika prinsipal dan agen memiliki tujuan yang sama maka agen akan melaksanakan semua yang diperintahkan prinsipal namun ada kalanya agen bertindak tidak sesuai kepentingan pribadi dan memaksimalkan keuntungan untuk kepentingan pribadi.

Dalam penelitian ini praktik penghindaran pajak terjadi ketika agen tidak menjalankan perintah prinsipal. Prinsipal dalam penelitian ini adalah pemerintah, sedangkan agen adalah perusahaan. Pemerintah memerintahkan perusahaan membayar pajak sesuai peraturan perpajakan sedangkan perusahaan lebih mengutamakan untuk mengoptimalkan labanya dengan cara meminimalkan beban termasuk beban pajak dengan mempertimbangkan profitabilitas dan *leverage*. Praktik perusahaan meminimalkan beban pajak adalah salah satu tindakan penghindaran pajak.

Menurut Tommy (2020) dalam *posting* praktik penghindaran pajak di website Direktorat Jenderal Pajak dinyatakan bahwa praktik tersebut dapat dilakukan oleh perusahaan dengan beberapa cara yaitu: WP (agen) memanfaatkan Pasal 6 ayat (1) huruf a UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan memasukkan bunga menjadi biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, WP (agen) memanfaatkan pasal 6 ayat (1) huruf b UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan melakukan kegiatan pemberian natura yang dapat dibiayakan dalam laporan keuangan pajaknya. WP (agen) memanfaatkan Pasal 4 ayat (3) UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan dengan cara memberi harta atau hibah yang diterima bukan dalam garis keturunan satu derajat, dan WP (agen), dan WP (agen) memanfaatkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan bagi perusahaan yang memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam satu tahun dapat membayar pajak sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto. Perusahaan membagi-bagi laporan keuangan perusahaannya agar dapat memiliki pendapatan kurang dari Rp4,8 miliar dalam setahun.

2.2. Pengaruh Profitabilitas terhadap Praktik Penghindaran Pajak

Profitabilitas menunjukkan kinerja keuangan kemampuan perusahaan untuk mendapatkan laba dari pengelolaan aktiva. Indikator yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengukur profitabilitas adalah *Return on Asset* (ROA).

Penelitian Hidayat (2018) menemukan bahwa ROA berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak. Profitabilitas meningkat maka laba perusahaan akan meningkat sehingga perusahaan mampu membayar beban pajaknya tanpa melakukan praktik penghindaran pajak atau praktik penghindaran pajak rendah. Praktik penghindaran pajak rendah berarti tingkat persentase CETR yaitu proksi dari semakin tinggi mendekati PPh Badan. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

Ha₁: Profitabilitas berpengaruh negatif terhadap praktik penghindaran pajak

2.3. Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Leverage menunjukkan rasio untuk mengukur seberapa besar beban utang perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Berdasarkan penelitian Dewinta & Setiawan (2016) semakin tinggi leverage tidak akan memengaruhi praktik penghindaran pajak di perusahaan. Hal ini disebabkan oleh semakin tinggi tingkat utang suatu perusahaan, maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atas operasional perusahaan,

Ha₂ :Leverage tidak berpengaruh terhadap praktik penghindaran pajak

3. Metodologi Penelitian

3.1. Objek Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan keuangan perusahaan manufaktur yang telah diaudit dan terdaftar pada BEI tahun 2015-2018. Laporan keuangan digunakan untuk mengukur profitabilitas yang diukur dengan *Return on Asset* (ROA), leverage yang diukur dengan *Debt to Equity Ratio* (DER), dan *tax avoidance* diukur dengan *current ETR*.

3.2. Variabel Penelitian

Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu praktik penghindaran pajak dengan menggunakan CETR. Adapun rumus untuk menghitung CETR yang digunakan adalah sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = \frac{\text{Current Tax Expense}}{\text{Pre - Tax Income}}$$

Variabel independen dalam penelitian ini yaitu profitabilitas dan leverage

a) Profitabilitas (X₁)

Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja suatu perusahaan. Pengukuran profitabilitas dalam penelitian ini diprosksikan dengan rasio *Return on Asset* (ROA). Rumus perhitungan ROA adalah sebagai berikut:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

b) Leverage (X₂)

Leverage merupakan salah satu rasio keuangan yang menggambarkan seberapa besar aktiva perusahaan dibiayai oleh utang. Pengukuran

leverage dengan menggunakan rasio *Debt to Total Equity Ratio* (DER). Rumus perhitungan DER adalah sebagai berikut:

$$DER = \frac{\text{Total Kewajiban}}{\text{Total Modal}}$$

3.3. Teknik Pengambilan Sampel

Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *non probability sampling* dengan tipe *purposive sampling*. *Non probability sampling* adalah teknik pengambilan sampel dengan cara tidak memberikan peluang yang sama bagi anggota populasi. Kriteria-kriteria yang diterapkan peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a) Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI periode 2015–2018.
- b) Periode laporan keuangan 4 tahun berturut-turut (tahun 2015-2018).
- c) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami *delisting* selama periode penelitian.
- d) Menyajikan laporan keuangan dalam mata uang rupiah.
- e) Perusahaan manufaktur yang tidak mengalami kerugian.
- f) Menyajikan semua data yang diperlukan secara lengkap, yaitu pajak kini perusahaan, laba sebelum pajak, laba bersih, total asset, total kewajiban dan total modal.
- g) Memiliki nilai ETR lebih kecil dari 25 persen.
- h) Perusahaan yang bukan termasuk IPO baru

Tabel 1. Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah Perusahaan
Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI tahun 2015-2018	155 perusahaan
Perusahaan yang tidak menyajikan laporan keuangan <i>audited</i> selama tahun 2015-2018	(2 perusahaan)
Perusahaan manufaktur yang <i>delisting</i> selama periode 2015-2018	(2 perusahaan)
Perusahaan yang menyajikan laporan keuangan tidak dalam mata uang rupiah	(28 perusahaan)
Perusahaan yang memiliki <i>earning before tax</i> negatif (rugi)	(42 perusahaan)
Perusahaan yang menyajikan data tidak lengkap	(4 perusahaan)
Perusahaan yang memiliki <i>Current ETR</i> lebih dari 25 persen	(51 perusahaan)
Perusahaan yang termasuk IPO baru	(14 perusahaan)
Jumlah sampel penelitian	12 perusahaan
Tahun pengamatan	4 tahun
Jumlah total data sampel	48 data tahun perusahaan

Sumber: Data Olahan

3.4. Model Penelitian

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dua atau lebih variabel dependen dan variabel independen. Selain itu, analisis ini juga digunakan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dan variabel independen. Teknik estimasi dependen yang melandasi analisis regresi

disebut *Ordinary Least Square* (OLS). Adapun persamaan untuk menguji hipotesis secara keseluruhan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$CETR = \beta_0 + \beta_1 ROA + \beta_2 DER + \varepsilon$$

Keterangan:

- CETR : *Current ETR*
 β_0 : Konstanta
 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$: Koefisien regresi
 ROA : Profitabilitas
 DER : *Leverage*
 ε : *Error*

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Sampel Penelitian

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2015-2018. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI berjumlah 155 perusahaan, setelah dilakukan pengolahan, diperoleh sampel sebanyak 12 perusahaan, karena penelitian menggunakan periode penelitian sebanyak 4 tahun, maka jumlah data yang diteliti dalam penelitian ini menjadi 48 data laporan keuangan perusahaan.

Tabel 2. Sampel Perusahaan

Kode	Nama Perusahaan	Kategori Industri	Tanggal IPO
ADES	Akasha Wira International Tbk.	Kosmetik & Barang KRT	13 Juni 1994
BUDI	Budi Starch & Sweetener Tbk.	Kimia	8 Mei 1995
CPIN	Charoen Pokphand Indonesia Tbk.	Pakan Ternak	18 Maret 1991
IMPC	Impack Pratama Industri Tbk.	Plastik & Kemasan	17 Desember 2014
INTP	Indocement Tunggal Prakasa Tbk.	Semen	5 Desember 1989
KBLI	KMI Wire and Cable Tbk.	Kabel	6 Juli 1992
KLBF	Kalbe Farma Tbk.	Farmasi	30 Juli 1991
ROTI	Nippon Indosari Corporindo Tbk.	Makanan & Minuman	28 Juni 2010
SMGR	Semen Indonesia (Persero) Tbk.	Semen	8 Juli 1991
SMSM	Selamat Sempurna Tbk.	Otomotif & Komponen	9 September 1996
STTP	Siantar Top Tbk.	Makanan & Minuman	16 Desember 1996
WTON	Wijaya Karya Beton Tbk.	Semen	8 April 2014

Sumber: Data Olahan

4.2. Analisis Deskriptif

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk memberikan deskripsi dari data yang diteliti seperti nilai maksimum, rata-rata (*mean*), dan standar deviasi dari setiap variabel yang sedang diteliti.

Tabel 3. Hasil Statistik Deskriptif

	N	Range	Minimum	Maximum	Mean		Std. Deviation	Variance
	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Statistic	Std. Error	Statistic	Statistic
DER	48	1.6780	.1535	1.8315	.708079	.0610771	.4231543	.179
ROA_a	48	.3961373210	.0806225770	.4767598980	.286123251935	.0141045875949	.0977194493367	.010
CETR_d	48	.4883646179	.0000000000	.4883646179	.200557027060	.0183939622933	.1274371089777	.016
Valid N (listwise)	48							

Sumber: Data Output SPSS, 2020

Berdasarkan hasil perhitungan statistik deskriptif menunjukkan bahwa N atau jumlah data pada setiap variabel yang valid adalah 48. Variabel dependen (Y) penghindaran pajak yang diprosikan dengan *current ETR* dari 48 sampel diketahui nilai minimum sebesar 0,00000, nilai maksimum sebesar 0,488346179, nilai rata-rata sebesar 0,20057027060, serta nilai standar deviasi sebesar 0,12744371089777. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan sebaran variabel CETR kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari CETR.

Variabel Profitabilitas dengan proksi *Return on Asset* (ROA) dari 48 sampel diketahui nilai minimum sebesar 0,0806225770, nilai maksimum 0,4767598880, rata-rata dari ROA sebesar 0,286123251935, serta nilai standar deviasi sebesar 0,0977194493367. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan sebaran ROA kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari ROA.

Variabel *Leverage* dengan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER) dari 48 sampel diketahui nilai minimum sebesar 0,1535, nilai maksimum sebesar 0,18315, dan nilai rata-rata sebesar 0,708079, serta nilai standar deviasi dari DER 0,4231543. Standar deviasi yang lebih kecil dari rata-rata menunjukkan sebaran DER kecil atau tidak adanya kesenjangan yang cukup besar dari DER.

4.3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian model regresi linear dapat dilakukan apabila data pada penelitian ini memenuhi kriteria-kriteria uji asumsi klasik. Kriteria tersebut adalah data harus terdistribusi normal, uji heteroskedastisitas dan tidak mengalami autokorelasi. (Ghozali, 2016).

4.3.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas digunakan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel penganggu atau residual memiliki distribusi yang normal. Salah satu cara uji normalitas dengan uji statistik non parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Hasil uji Kolmogorov-Smirnov (K-S) dapat dilihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Uji Normalitas

		One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		CETR	ROA	DER
N		48	48	48
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.187575	.091217	.708079
	Std.	.0605542	.0583027	.4231543
	Deviation			
Most Extreme	Absolute	.224	.135	.107
Differences	Positive	.177	.135	.107
	Negative	-.224	-.073	-.095
Test Statistic		.224	.135	.107
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.029 ^c	.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Data Output SPSS, 2020

Berdasarkan hasil uji normalitas pada tabel diketahui bahwa hasil signifikansi penghindaran pajak yang diproksikan dengan *current ETR* (CETR) 0,000 lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel CETR memiliki distribusi tidak normal sehingga dilakukan transformasi data. Berdasarkan hasil uji normalitas profitabilitas dengan proksi *Return On Asset* (ROA) 0,029^c lebih kecil dari 0,05 yang menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel ROA memiliki distribusi tidak normal sehingga dilakukan transformasi data. Berdasarkan hasil uji variabel *leverage* dengan proksi *Debt to Equity Ratio* (DER) 0,200^{c,d} lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel DER memiliki distribusi normal.

4.3.2. Uji Normalitas Setelah Penormalan Residual dengan Transformasi Data ke Bentuk Logaritma Natural

Setelah dilakukan uji asumsi klasik terhadap semua variabel, ternyata diketahui bahwa variabel penghindaran pajak (CETR) dan variabel profitabilitas (ROA) terdistribusi tidak normal. Oleh karena itu, variabel dependen dan variabel independen ditransformasikan ke dalam bentuk logaritma natural (Ghozali, 2011). Variabel CETR normal setelah ditransformasi data \sqrt{x} (nilai Max-X). Hasil signifikansi 0,058 lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel telah terdistribusi normal sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Tabel 5. Uji Normalitas CETR Setelah Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test							
	CETR_a	CETR_b	CETR_c	CETR_d	CETR_e	CETR_f	CETR
N	48	48	48	48	48	48	48
Normal Parameters ^{ab}	Mean	.423922874287	-.779097888633	10.272112012988	.200557027060	-1.575510786671	376.660434207163
	Std. Deviation	.0896198875581	.2895099661325	27.3461507016893	.1274371089777	.7778265914031	1497.1678010209520
Most Extreme Differences	Absolute	.236	.283	.417	.125	.181	.443
	Positive	.218	.283	.417	.125	.089	.443
	Negative	-.236	-.241	-.411	-.058	-.181	-.401
Test Statistic		.236	.283	.417	.125	.181	.443
Asymp. Sig. (2-tailed)		.000 ^c	.000 ^c	.000 ^c	.058 ^c	.000 ^c	.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Output SPSS, 2020

ROA normal pada transformasi data menggunakan rumus $\text{sqrt}(\text{ROA})$ dan $\text{Log}^{10}(\text{ROA})$. Hasil signifikansi 0,200^{c,d} lebih besar dari 0,05 yang menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel telah terdistribusi normal sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Tabel 6. Uji Normalitas ROA Setelah Transformasi

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test							
	ROA	ROA_a	ROA_b	ROA_c	ROA_d	ROA_e	ROA_f
N	48	48	48	48	48	48	48
Normal Parameters ^{ab}	Mean	.091217	.286123251935	-.144290198519	20.137487650498	.352928024375	-929292435563
	Std. Deviation	.0583027	.097719449337	-.3366371015464	25.0375998774035	.1084912842754	.4348506360870
Most Extreme Differences	Absolute	.135	.074	.090	.284	.210	.253
	Positive	.135	.074	.068	.284	.140	.244
	Negative	-.073	-.054	-.090	-.265	-.210	-.253
Test Statistic		.135	.074	.090	.284	.210	.253
Asymp. Sig. (2-tailed)		.029 ^c	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.000 ^c	.000 ^c	.000 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS, 2020

Hasil uji normalitas menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov pada tabel 6 diketahui bahwa hasil signifikansi profitabilitas (ROA) sebesar 0,200 lebih besar dari 0,05, profitabilitas (ROA) hasil signifikansi 0,200^{c,d} lebih besar dari 0,05, dan leverage (DER) 0,200^{c,d} lebih besar dari 0,05. Menunjukkan bahwa nilai seluruh variabel telah terdistribusi normal sehingga model regresi layak untuk digunakan.

Tabel 7. Uji Normalitas Setelah Transformasi

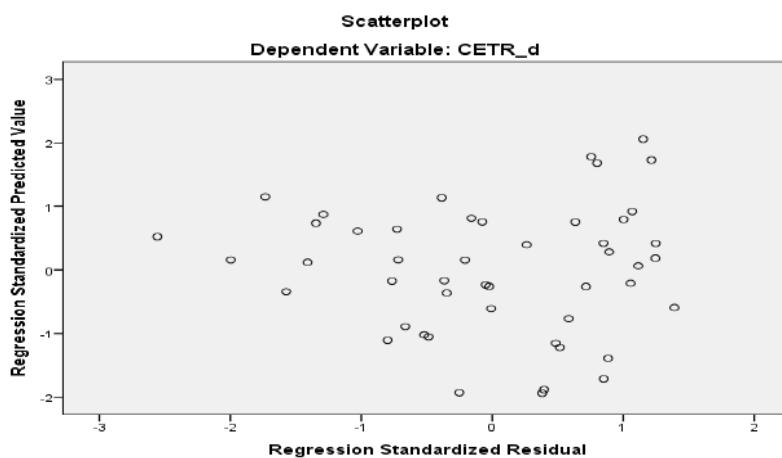
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
N	DER	ROA_a	CETR_d
Normal Parameters ^{a,b}	48	48	48
Mean	.708079	.286123251935	.200557027060
Std. Deviation	.4231543	.0977194493367	.1274371089777
Most Extreme Differences			
Absolute	.107	.074	.125
Positive	.107	.074	.125
Negative	-.095	-.054	-.058
Test Statistic			
Asymp. Sig. (2-tailed)	.200 ^{c,d}	.200 ^{c,d}	.058 ^c

- a. Test distribution is Normal.
 b. Calculated from data.
 c. Lilliefors Significance Correction.
 d. This is a lower bound of the true significance.

Sumber: Output SPSS, 2020

4.3.3. Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Gambar 1 menunjukkan bahwa titik-titik pada scatter plot tidak membentuk pola tertentu, serta menyebar di atas dan di bawah angka nol sumbu Y, sehingga disimpulkan tidak ada heteroskedastisitas dalam model regresi.

Gambar 1. Uji Heteroskedasitas

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2020

4.3.4. Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan terjadinya hubungan antara residual pengamatan t dengan residual pengamatan t-1 (sebelumnya). Berdasarkan Tabel 8, dapat dilihat bahwa hasil pengujian autokorelasi menunjukkan bahwa nilai tabel Durbin Watson (DW) sebesar 2.241, untuk jumlah data N=48, nilai dl sebesar

1,4064 dan du sebesar 1,6708 maka $1,670 < 2,241 < 2,330$ (du < d < 4 -du). Maka dapat disimpulkan bahwa tidak tolak H_0 atau tidak terjadi autokorelasi dalam model regresi pengujian ini.

Tabel 8. Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.613 ^a	.376	.349	.0488725	2.241

a. Predictors: (Constant), DER, ROA

b. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS, 2020

4.3.5. Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas menunjukkan terjadinya hubungan yang kuat (sempurna) antara variabel bebas dalam model regresi. Untuk mendeteksi multikolinearitas digunakan nilai *tolerance* dan VIF. Berdasarkan Tabel 9, terlihat bahwa nilai *tolerance* untuk ROA sebesar 0,682 dengan nilai VIF 1,466. Nilai *tolerance* untuk DER sebesar 0,682 dengan nilai VIF sebesar 1,466. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolinearitas antara variabel independen dalam model regresi, karena masing-masing variabel independen memiliki nilai *tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF $< 10,00$.

Tabel 9. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients			95.0% Confidence Interval for B		Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Lower Bound	Upper Bound	Tolerance	VIF	
1 (Constant)	.147	.026		5.727	.000	.095	.199			
ROA	.565	.148	.544	3.820	.000	.267	.864	.682	1.466	
DER	-.016	.020	-.110	-.774	.443	-.057	.025	.682	1.466	

a. Dependent Variable: CETR

Sumber: Output SPSS, 2020

4.4. Pengujian Hipotesis

4.4.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Berdasarkan hasil regresi tersebut dapat diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$\text{Current ETR} = 0,443 - 0,864\text{ROA} + 0,07\text{DER} + \varepsilon$$

Persamaan di atas menunjukkan bahwa nilai konstanta yang bernilai 0,443 mempunyai arti jika semua variabel bebas yaitu profitabilitas dan leverage dalam keadaan konstan, maka akan mengakibatkan nilai dari penghindaran pajak adalah sebesar 0,443. Koefisien profitabilitas (ROA) sebesar 0,864 memiliki arti bahwa apabila profitabilitas meningkat 1 persen maka akan menyebabkan penghindaran pajak menurun sebesar 0,0864 dengan asumsi faktor lain konstan. Koefisien leverage sebesar 0,007 memiliki arti bahwa

apabila *leverage* meningkat 1 persen menyebabkan penghindaran pajak meningkat sebesar 0,007 dengan asumsi faktor lainnya konstan.

Tabel 10. Analisis Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.443	.072	6.115	.000
	DER	.007	.041	.022	.870
	ROA_a	-.864	.176	-.662	.4904

Sumber: Output SPSS, 2020

4.4.2. Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Tax Avoidance (Uji F)

Uji F sebesar 13,577 dengan nilai sig. 0,000. Karena nilai sig. lebih kecil dari 0,05 maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi *tax avoidance* atau dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER) perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR).

Tabel 11. Uji Statistik F
ANOVAa

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.065	2	.032	13.577
	Residual	.107	45	.002	
	Total	.172	47		

a. Dependent Variable: CETR

b. Predictors: (Constant), DER, ROA

Sumber: Output SPSS, 2020

4.4.3. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Uji t/Uji Parsial)

a) Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak

Profitabilitas yang menggunakan rasio ROA merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari jumlah asetnya. Semakin tinggi nilai dari ROA, maka semakin tinggi keuntungan perusahaan yang akan meningkatkan beban pajaknya dan memiliki performa yang baik. Hasil uji t menunjukkan koefisien regresi untuk profitabilitas (ROA) sebesar -4,904 dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan H_0 ditolak maka profitabilitas pada penelitian ini menunjukkan pengaruh pada penghindaran pajak dengan arah negatif. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin mengurangi tindakan penghindaran pajak. Perusahaan dengan ROA yang tinggi akan memiliki kemampuan dalam membayar beban pajaknya dan menjaga reputasi perusahaan di mata pemegang saham serta menjadi sorotan publik, sehingga perusahaan akan melaporkan beban pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku yang akan meminimalkan tindakan *tax avoidance* perusahaan. Hasil penelitian ini

sejalan dengan penelitian Hidayat (2018) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Tabel 12. Uji Statistik t

Model	Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients	
	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	.443	.072	6.115	.000
	DER	.007	.041	.022	.870
	ROA_a	-.864	.176	-.662	.4904

Sumber: Output SPSS, 2020

b) Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Adanya indikasi perusahaan melakukan penghindaran pajak dapat dilihat dari kebijakan pendanaan yang diambil perusahaan. Salah satu kebijakan pendanaan adalah kebijakan *leverage* yaitu tingkat hutang yang digunakan perusahaan untuk membiayai aktivitas operasinya. Hasil uji t koefisien untuk *leverage* sebesar 0,164 dengan nilai signifikan signifikan $0,870 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan H_0 ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan *leverage* terhadap *current ETR*. *Leverage* pada penelitian ini menunjukkan tidak berpengaruh pada penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka tidak akan memengaruhi adanya praktik penghindaran pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan maka pihak manajemen akan lebih konservatif dalam melakukan pelaporan keuangan atau operasional perusahaan. Pihak manajemen akan lebih berhati-hati dan tidak akan mengambil risiko yang tinggi untuk melakukan aktivitas penghindaran pajak guna menekan beban pajaknya. Hasil penelitian *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak sejalan dengan penelitian Dewinta & Setiawan (2016).

5. Penutup

5.1. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah terdapat pengaruh profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER), terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI. Sampel perusahaan dalam penelitian ini berjumlah 12 perusahaan yang terdaftar di BEI pada periode 2015-2018. Berdasarkan hasil penelitian dapat diambil simpulan sebagai berikut:

- Pengaruh profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER) terhadap penghindaran pajak (CETR) berdasarkan hasil uji F menunjukkan uji F sebesar 13,577 dengan nilai sig 0,000. Karena nilai sig. lebih kecil dari 0,05 maka model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi penghindaran pajak atau dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER)

perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR).

- b) Pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak berdasarkan hasil uji t menunjukkan koefisien regresi untuk profitabilitas (ROA) sebesar $-4,904$ dengan nilai signifikan $0,000 < 0,05$. Hasil ini menunjukkan H_0 ditolak maka profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak dengan arah negatif. Semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka semakin menekan tindakan penghindaran pajak.
- c) Pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak berdasarkan hasil uji t koefisien untuk *leverage* sebesar $0,164$ dengan nilai signifikan $0,870 > 0,05$. Hasil ini menunjukkan H_0 ditolak artinya tidak ada pengaruh yang signifikan *leverage* terhadap penghindaran pajak. Semakin tinggi tingkat hutang suatu perusahaan, maka tidak akan memengaruhi adanya praktik penghindaran pajak.

5.2. Saran

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah untuk lebih memperketat dalam pembuatan peraturan perpajakan agar tidak ada “grey area” bagi perusahaan untuk melakukan tindakan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena berdasarkan hasil penelitian profitabilitas (ROA) dan *leverage* (DER) perusahaan secara bersama-sama (simultan) berpengaruh terhadap penghindaran pajak (CETR). Bagi penelitian selanjutnya dapat menggunakan sampel perusahaan lain selain manufaktur agar dapat melihat pengaruh variabel di sektor lain dan dapat mengganti atau menambah variabel lain, mengingat masih ada variabel lain seperti kompensasi rugi fiskal, ukuran perusahaan, umur perusahaan, komisaris independen dan variabel-variabel lainnya yang berperan dalam penghindaran pajak (*tax avoidance*).

Daftar Pustaka

- Dewinta, I. A. R., & Setiawan, P. E. 2016. Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana ISSN : 2302-8556, Vol.14, No.3, 1584–1613.
- Hidayat, W. W. 2018. Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis (JRMB) Fakultas Ekonomi UNIAT, Vol.3, No.1, 19–26.
- Ghozali, Imam. 2011. “Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2016. Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23 (Edisi 8). Cetakan ke VIII. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro

- Maryani, Irin Dwi. 2014. Pengaruh Karakter Eksekutif terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang listing di Bursa Efek Indonesia Tahun 2010-2012). Semarang: Universitas STIKUBANK.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2019. Undang-Undang APBN 2019. Diakses di <https://www.kemenkeu.go.id/apbn2019> tanggal 15 April 2020.
- Kurniasih, T. Sari, M. M. R. 2013. Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. Jurnal Ekonomi.Vol.18, No.1.
- Pamungkas, Ichsan. 2013. Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Good Corporate Governance Rating. Jurnal Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro Semarang. Diakses dari www.ejournal.undip.ac.id tanggal 22 Maret 2020.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan Dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.
- Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara. Jakarta
- Tommy, Josua. 2020. Praktik Penghindaran Pajak di Indonesia. Diakses dari <https://www.pajak.go.id/id/artikel/praktik-penghindaran-pajak-di-indonesia> tanggal 14 Mei 2020.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Tentang Pajak Penghasilan. Jakarta: Salemba Empat

EVALUASI DANA DESA DILIHAT DARI HUBUNGAN ANTARA PAGU DANA DESA DAN INDEKS DESA MEMBANGUN

Village Funds Evaluated from the Correlation between Village Budget and Village Building Index

Ratna Christianingrum

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: ratna.christianingrum@dpr.go.id

Abstract

The village law mandates the Government to allocate village funds. Village budget allocation continues to increase every year. But now, no study has evaluated the effectiveness of village fund using villages as research units. This research is conducted to analyze the correlation between village budget and IDM. The result show that village budget and IDM has positive and significant correlation. But the correlation between village budget and IDM are very weak. This is because the development in the village financed by village funds is smaller than the development captured by IDM, the formulation used to determine the allocation of village funds, and there are factors that hinder the management of village funds.

Keywords: Village Funds, IDM, Correlation

1. Pendahuluan

Desa merupakan representasi dari kesatuan masyarakat hukum terkecil yang telah ada dan bertumbuh kembang seiring dengan sejarah kehidupan masyarakat Indonesia dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan kehidupan berbangsa Indonesia (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2017). UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) mendefinisikan desa sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan definisi desa tersebut, menyebabkan desa memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem pemerintah. Pengertian desa sangat beragam tergantung dari sudut mana melihat desa. Dalam perspektif ekonomi desa dipotret sebagai komunitas masyarakat yang

memiliki modal produksi yang khas dan merupakan lumbung bahan mentah (*raw material*) dan sumber tenaga kerja (*man power*) (Khoiriah & Meylina, 2017). Hal ini menyebabkan keberadaan desa dapat menjadi ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Melihat pentingnya peranan desa, UU Desa lahir sebagai wujud pengakuan negara terhadap desa. Lahirnya UU Desa menjadi dasar hukum yang memperjelas fungsi dan kewenangan desa, serta memperkuat kedudukan desa dan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Guna mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi desa dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa, UU Desa mengamanatkan pemerintah pusat untuk mengalokasikan Dana Desa. Dana Desa dianggarkan setiap tahun dalam APBN yang diberikan kepada setiap desa sebagai salah satu sumber pendapatan desa.

Kebijakan Dana Desa merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka membangun perekonomian di tingkat desa maupun mengurangi kesenjangan kemiskinan di desa. Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan guna melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Adapun tujuan dari Dana Desa itu sendiri antara lain meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu indeks ketahanan sosial, indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi/lingkungan. IDM dikembangkan untuk memperkuat upaya pencapaian sasaran pembangunan desa dan kawasan pedesaan. IDM digunakan untuk mengklasifikasikan desa ke dalam 5 kelompok desa.

IDM tidak hanya berguna untuk mengetahui status perkembangan setiap desa yang lekat dengan karakteristiknya, tetapi juga dapat dikembangkan sebagai instrumen untuk melakukan *targetting* dalam pencapaian target RPJMN. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan desa. IDM yang ada dapat mencerminkan perkembangan fakta di lapangan. Sehingga IDM dapat digunakan sebagai proksi *output* dari pengelolaan Dana Desa. Hal ini sejalan dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019, yang menyatakan bahwa data IDM dapat digunakan untuk melakukan evaluasi perkembangan desa.

Tabel 1. Perkembangan Alokasi Dana Desa

Tahun	Alokasi (dalam triliun rupiah)	Rata-Rata per Desa (dalam juta rupiah)
2015	20,7	280
2016	46,98	628
2017	60	800
2018	60	800
2019	70	933
2020	72	960

Sumber: DJPK, 2020 diolah

Alokasi Dana Desa dianggarkan dalam jumlah yang cukup besar untuk diberikan ke setiap desa. Besaran alokasi Dana Desa setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan (Tabel 1). Pada tahun 2015, alokasi Dana Desa hanya sebesar Rp20,7 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp280 juta. Sedangkan pada tahun 2020 alokasi Dana Desa mencapai Rp72 triliun dengan rata-rata setiap desa menerima alokasi Dana Desa sebesar Rp960 juta.

Besaran alokasi Dana Desa yang terus mengalami peningkatan, perlu dilakukan evaluasi atas kebijakan tersebut. Namun sampai saat ini belum ada penelitian yang dilakukan dengan menggunakan desa sebagai unit penelitian. Sehingga penelitian ini akan melakukan evaluasi kebijakan Dana Desa, dilihat bagaimana pola hubungan antara besaran alokasi Dana Desa di setiap desa terhadap *output* kebijakan Dana Desa. Dalam hal ini *output* kebijakan Dana Desa dilihat dari nilai IDM dari masing-masing desa.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Dana Desa

2.1.1. Definisi Dana Desa

Dana Desa adalah dana APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan diprioritaskan untuk melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Desa mempunyai hak untuk mengelola kewenangan dan pendanaannya. Namun pemerintah desa tetap mendapatkan supervisi.

UU Desa memberikan inspirasi dan semangat perubahan, yaitu adanya redistribusi aset negara yang bersumber dari APBN. Dengan adanya redistribusi aset, diharapkan mampu menggerakkan perubahan di desa. Adapun tujuan dari kebijakan Dana Desa adalah meningkatkan pelayanan publik di desa, mengentaskan kemiskinan, memajukan perekonomian desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

2.1.2. Dasar Hukum Dana Desa

UU Desa menjadi tonggak perubahan paradigma pengaturan desa. Desa bukan lagi dianggap sebagai objek pembangunan, namun desa merupakan subjek dan ujung tombak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Desa memiliki wewenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai sosial budaya masyarakat desa yang pengaturannya berpedoman pada 13 asas.

UU Desa telah memuat aturan tentang pengelolaan Dana Desa. Namun, untuk pelaksanaannya ada 3 (tiga) kementerian (Kementerian Dalam Negeri/Kemendagri, Kementerian Keuangan/Kemenkeu, dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi/Kemendesa PDTT) dan pemerintah daerah (pemda) yang terlibat mulai proses awal sampai dengan akhir dalam penyaluran dan penggunaan Dana Desa. Kemendagri bertanggung jawab dalam hal penyelenggaraan *capacity building* bagi aparatur desa; penyelenggaraan pemerintahan desa; pengelolaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa; penguatan desa terhadap akses, aset dan kepemilikan lahan dan pemanfaatannya bagi kesejahteraan masyarakat, penyusunan dokumen perencanaan desa; kewenangan berdasarkan hak asal-usul, dan kewenangan skala lokal desa; serta tata cara penyusunan pedoman teknis peraturan desa.

Kemenkeu bertanggung jawab dalam penganggaran Dana Desa dalam APBN; penetapan rincian alokasi Dana Desa pada peraturan bupati/walikota; penyaluran Dana Desa dari RKUN (Rekening Kas Umum Negara) ke RKUD (Rekening Kas Umum Daerah) dan dari RKUD ke RKD (Rekening Kas Desa); dan pengenaan sanksi jika tidak terpenuhinya porsi ADD dalam APBD. Sementara Kemendesa PDTT bertanggung jawab dalam penetapan pedoman umum dan prioritas penggunaan DD; pengadaan tenaga pendamping untuk desa; penyelenggaraan musyawarah desa yang partisipatif; pendirian, pengurusan, perencanaan usaha, pengelolaan, kerjasama, dan pembubaran BUMDesa; serta pembangunan kawasan perdesaan. Pemda dalam hal ini bertugas melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyusunan peraturan daerah yang mengatur desa; pemberian alokasi Dana Desa; pembinaan *capacity building* kepala desa dan perangkat desa, BPM (Badan Permusyawaratan Desa), dan lembaga kemasyarakatan; pembinaan manajemen pemerintahan desa; pemberian bantuan keuangan, pendampingan, bantuan teknis; bimtek (bimbingan teknis) dalam bidang tertentu yang tidak mungkin dilakukan pemda; inventarisasi kewenangan provinsi yang dilaksanakan oleh desa; binwas RAPBD kabupaten/kota dalam pembiayaan desa; membantu pemerintah dalam rangka penentuan kesatuan masyarakat hukum adat sebagai desa; dan pembinaan dan pengawasan penetapan pengaturan BUMDesa kabupaten/kota dan lembaga kerjasama antardesa.

Tabel 2. Dasar Hukum Desa dan Dana Desa

UU No 6/2014 Tentang Desa	
PP 11/2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa	PP 8/2016 tentang Perubahan Kedua atas PP 60/2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN
<u>PERMENDAGRI:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendagri No. 111/2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa 2. Permendagri No. 112/2014 tentang Pemilihan Kepala Desa 3. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 4. Permendagri Nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 	<u>PERMENKEU</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. PMK Nomor 257/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Penundaan dan/atau Pemotongan Dana Perimbangan terhadap Daerah Yang Tidak Memenuhi Alokasi Dana Desa (ADD) 2. PMK Nomor 49/PMK.07/2016 tentang Tatacara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Desa 3. PMK Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana diubah dengan PMK Nomor 112/PMK.07/2017
<u>PERMENDES:</u> <ol style="list-style-type: none"> 1. Permendes No.1/2015 tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa 2. Permendes No.2/2015 tentang Musyawarah Desa 3. Permendes No.3/2015 tentang Pendampingan Desa 4. Permendes No.4/2015 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengelolaan, dan Pembubaran BUMDes 5. Permendes No.19/2017 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa TA 2018 	
Perka LKPP no 13/2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana diubah Perka LKPP no 22/2015	

Skema dan formulasi pengalokasian Dana Desa setiap tahunnya mengalami perubahan dan terus dilakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan dan keadaan masyarakat di desa. Adapun perkembangan formulasi pengalokasian Dana Desa terangkum dalam Tabel 3.

Tabel 3. Perkembangan Formulasi Pengalokasian Dana Desa

Formula	Tahun			
	2015-2017	2018	2019	2020
Dialokasikan Berdasarkan	Alokasi Dasar (AD) : Alokasi Formula (AF)	Alokasi Dasar (AD) : Alokasi Afiriasi (AA) : Alokasi Formula (AF)	Alokasi Dasar (AD) : Alokasi Afiriasi (AA) : Alokasi Formula (AF)	Alokasi Dasar (AD) : Alokasi Afiriasi (AA) : Alokasi Kinerja (AK) : Alokasi Formula (AF)
Dengan Bobot (%)	90 : 10	77 : 3 : 20	72 : 3 : 25	69 : 1,5 : 1,5 : 28
Alokasi Afiriasi	Tidak Ada	Bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi	Bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi	Bagi desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan jumlah penduduk miskin tinggi Ditambah Alokasi Kinerja untuk Desa berkinerja baik
Alokasi Formula	JP:JPM:LW:IKK	JP:JPM:LW:IKK	JP:JPM:LW:IKG	JP:JPM:LW:IKK
Dengan Bobot (%)	25:35:10:30	10:50:15:25	10:50:15:25	10:50:15:25

Sumber: Kemenkeu, 2015b, 2016b, 2017c, 2018b, 2019b

Perbaikan formulasi yang dilakukan pada tahun 2019 adalah penyesuaian bobot, yang terdiri variabel jumlah penduduk miskin; dan indeks kesulitan geografis; serta mengurangi proporsi AD (Alokasi Dasar) dan menambah proporsi AF (Alokasi Formula). Implikasi reformulasi kebijakan pengalokasian antara lain mengatasi kemiskinan, perbaikan ketimpangan fiskal antar desa dengan meningkatkan Dana Desa/kapita di desa dengan populasi penduduk besar dan sebaliknya, memperbaiki ketimpangan antar desa dalam alokasi Dana Desa dengan indeks gini yang rendah, distribusi Dana Desa yang lebih sesuai dengan sebaran jumlah penduduk miskin, memberikan afiriasi kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal dengan Jumlah Penduduk Miskin (JPM) tinggi.

2.2. Indeks Desa Membangun

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Perangkat indikator yang dikembangkan dalam IDM dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri perlu kerangka kerja pembangunan berkelanjutan di mana aspek sosial, ekonomi, dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi serta kemampuan desa untuk menyejahterakan kehidupan desa. Kebijakan dan aktivitas pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa harus menghasilkan pemerataan dan keadilan, didasarkan dan memperkuat nilai-nilai lokal dan budaya, serta ramah lingkungan dengan mengelola potensi sumber daya alam secara baik dan berkelanjutan. Dalam konteks ini ketahanan sosial, ekonomi, dan ekologi bekerja sebagai dimensi yang memperkuat gerak proses dan pencapaian

tujuan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019).

IDM meletakkan prakarsa dan kuatnya kapasitas masyarakat sebagai basis utama dalam proses kemajuan dan keberdayaan desa yaitu meliputi aspek ketahanan sosial, ekonomi dan ekologi. Sehingga indeks ini difokuskan pada upaya penguatan otonomi desa melalui pemberdayaan masyarakat.

IDM memotret perkembangan kemandirian desa berdasarkan implementasi UU Desa. IDM mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari pemerintah sesuai dengan partisipasi masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah desa yaitu tipologi dan modal sosial. Sumber data yang digunakan untuk menghitung IDM berasal dari seluruh desa, sehingga data dan informasi yang didapatkan sesuai dengan fakta yang ada di desa.

- a) IDM merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi, dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variabel diturunkan menjadi indikator operasional. Setiap indikator memiliki nilai skor. Penetapan skor berdasarkan hasil FGD *Analitical hierarchy Process* (AHP). Adapun prosedur untuk menghitung IDM adalah sebagai berikut:
- b) Setiap indikator memiliki skor antara 0 s.d. 5; semakin tinggi skor mencerminkan tingkat keberartian. Misalnya: skor untuk indikator akses terhadap pendidikan sekolah dasar; bila Desa A memiliki akses fisik ≤ 3 km, maka Desa A memiliki skor 5, dan Desa B memiliki akses fisik > 10 km, maka memiliki skor 1. Ini berarti penduduk Desa A memiliki akses yang lebih baik dibandingkan dengan penduduk Desa B.
- c) Setiap skor indikator dikelompokkan ke dalam variabel, sehingga menghasilkan skor variabel. Misalnya variabel kesehatan terdiri dari indikator (1) waktu tempuh ke pelayanan kesehatan < 30 menit, (2) ketersediaan tenaga kesehatan dokter, bidan dan nakes lain, (3) akses ke poskesdes, polindes dan posyandu, (4) tingkat aktivitas posyandu dan (5) kepesertaan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS). Total skor variabel selanjutnya dirumuskan menjadi indeks :

$$\text{Indeks Variabel} = \frac{\sum \text{Indikator } X}{\text{Nilai Maksimum } X}$$

- d) Indeks dari setiap variabel menjadi Indeks Komposit yang disebut dengan Indeks Desa Membangun (IDM).

$$\text{IDM} = \frac{(\text{IS} + \text{IEK} + \text{IL})}{3}$$

Dimana:

- IDM : Indeks Desa Membangun
 IS : Indeks Sosial
 IEK : Indeks Ekonomi
 IL : Indeks Lingkungan (ekologi)

IDM dapat mengklasifikasi desa dalam lima (5) status, yakni: (i) desa sangat tertinggal; (ii) desa tertinggal; (iii) desa berkembang; (iv) desa maju; dan (v) desa mandiri. Klasifikasi desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 IDM. Klasifikasi dalam 5 status desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan. Status desa tertinggal, misalnya, dijelaskan dalam dua status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal di mana situasi dan kondisi setiap desa yang ada di dalamnya membutuhkan pendekatan dan intervensi kebijakan yang berbeda. Menangani desa sangat tertinggal akan berbeda tingkat afirmasi kebijakannya dibanding dengan desa tertinggal (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi, 2015).

2.3. Teori Keuangan Desa

Istilah keuangan negara dikaitkan dengan *public finance*. Apabila dilihat secara etimologi, keuangan berasal dari terjemahan kata *monetary* atau moneter, sedangkan *finance* mempunyai arti pembiayaan. Prof. Padmo Wahyono mendefinisikan keuangan negara sebagai APBN “plus”. APBN adalah anggaran pendapatan dan belanjanya pemerintah pusat. Kekayaan negara yang dipisahkan untuk mendirikan perusahaan milik negara bukanlah pengeluaran konsumtif melainkan pengeluaran produktif yang diusahakan untuk menjadi sumber pendapatan baru bagi APBN. Dengan kata lain, meskipun dipisahkan dari APBN, namun dalam waktu tertentu secara berangsur-angsur diharapkan dapat ‘bergabung’ kembali. APBN diadakan berdasarkan atas kuasa undang-undang yang membagi wilayah RI menjadi daerah-daerah otonom. Demikian juga kedudukan perusahaan daerah terhadap APBD adalah serupa dengan kedudukan perusahaan milik pusat terhadap APBN.

Desa sendiri merupakan kesatuan pemerintah terkecil dari NKRI. Desa memiliki sistem keuangan tersendiri yang terintegral ke dalam pendapatan asli desa dan merupakan bagian dari APBN.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa merupakan dasar hukum sekaligus pengaturan awal keuangan desa. Peraturan tersebut bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, sehingga tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapannya. Adanya pengaturan tersebut diharapkan desa dapat mewujudkan pengelolaan keuangan yang efektif dan efisien. Selain itu diharapkan dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik, yang memiliki tiga pilar utama, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif (Khoiriah & Meylina, 2017)

3. Metodologi Penelitian

3.1. Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data *cross section* yang diperoleh dari seluruh desa di Indonesia pada tahun 2019. Penelitian ini hanya menggunakan data pada tahun 2019, karena adanya perbedaan jumlah desa yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Selain itu, terdapat keterbatasan data IDM yang hanya ada pada tahun 2015, 2018 dan 2019. Data tahun 2019 dengan pertimbangan bahwa kebijakan di tahun 2019 telah dilakukan perbaikan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, khususnya dalam hal perhitungan formulasinya. Data desa yang digunakan merupakan desa yang memiliki alokasi anggaran Dana Desa dan nilai IDM di tahun 2019. Apabila ada data yang hanya memiliki alokasi anggaran Dana Desa atau nilai IDM saja, maka data desa tersebut tidak digunakan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan dua variabel, yaitu nilai alokasi anggaran Dana Desa per desa serta nilai IDM di setiap desa. Data diperoleh dari Kemendesa PDTT. Jumlah desa yang digunakan dalam penelitian ini adalah 66.853 desa.

3.2. Metode Analisis Data

Data dalam penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan metode korelasi. Adapun tahapan analisisnya adalah sebagai berikut:

3.2.1. Uji Normalitas

Sebelum melakukan analisis lebih lanjut, maka langkah awal yang perlu dilakukan adalah melakukan uji normalitas data. Uji normalitas ini diperlukan untuk menentukan metode apa yang akan digunakan. Apabila dari uji normalitas diperoleh bahwa kedua data variabel berdistribusi normal, maka data akan dianalisis dengan menggunakan metode korelasi *Product Moment Pearson*. Namun apabila salah satu atau kedua data variabel tidak mengikuti distribusi normal, maka data akan dianalisis dengan menggunakan *Spearman Rho correlation*.

3.2.2. Korelasi Pearson Product Moment

Koefisien korelasi *Product Moment Pearson* merupakan ukuran kekuatan hubungan linear antara dua variabel yang dilambangkan dengan r (Gogtay & Thatte, 2017). Korelasi Pearson dibangun dengan berdasarkan tiga asumsi, yaitu hubungan antar variabel adalah linear, variabel saling bebas, dan kedua variabel berdistribusi normal (Deshpande, Gogtay, & Thatte, 2016).

Nilai r dapat dihitung dengan menggunakan rumus:

$$r_{xy} = \frac{n \sum XY - \sum X \sum Y}{\sqrt{n \sum X^2 - (\sum X)^2} \sqrt{n \sum Y^2 - (\sum Y)^2}}$$

Nilai r berada pada rentang -1 hingga $+1$. Dimana nilai $r = 1$ menunjukkan hubungan sempurna dari kedua variabel. Sedangkan apabila r bernilai 0 menunjukkan kedua variabel tidak memiliki hubungan.

Tabel 4. Interpretasi Koefisien Korelasi Pearson

r	Interpretasi
0	Tidak berkorelasi
0,01-0,20	Korelasi sangat rendah
0,21-0,40	Korelasi rendah
0,41-0,60	Korelasi agak rendah
0,61-0,80	Cukup berkorelasi
0,81-0,99	Korelasi tinggi
1	Korelasi sempurna

Sumber: Deshpande, Gogtay, & Thatte, 2016

3.2.3. Pearson Spearman Rho Correlation

Korelasi Spearman's Rho (Q) dibangun berdasarkan peringkat dari setiap observasi dan bukan berdasar nilai observasi itu sendiri. Korelasi Spearman's Rho digunakan apabila asumsi pada korelasi *Product Moment Pearson* tidak dipenuhi (Gogtay & Thatte, 2017).

Adapun nilai koefisien korelasi Spearman dapat dicari dengan menggunakan rumus:

$$r_s = 1 - \frac{6 \sum d_i^2}{n(n^2 - 1)}$$

Dimana nilai $d_i = rg(X_i) - rg(Y_i)$ merupakan selisih peringkat dari kedua variable. Sedangkan n merupakan jumlah observasi.

Koefisien korelasi Spearman memiliki nilai antara $-1 \leq r_s \leq 1$. Interpretasi dari nilai koefisien ini hampir sama dengan interpretasi dari koefisien korelasi Pearson (Spearman's Correlation, 2020).

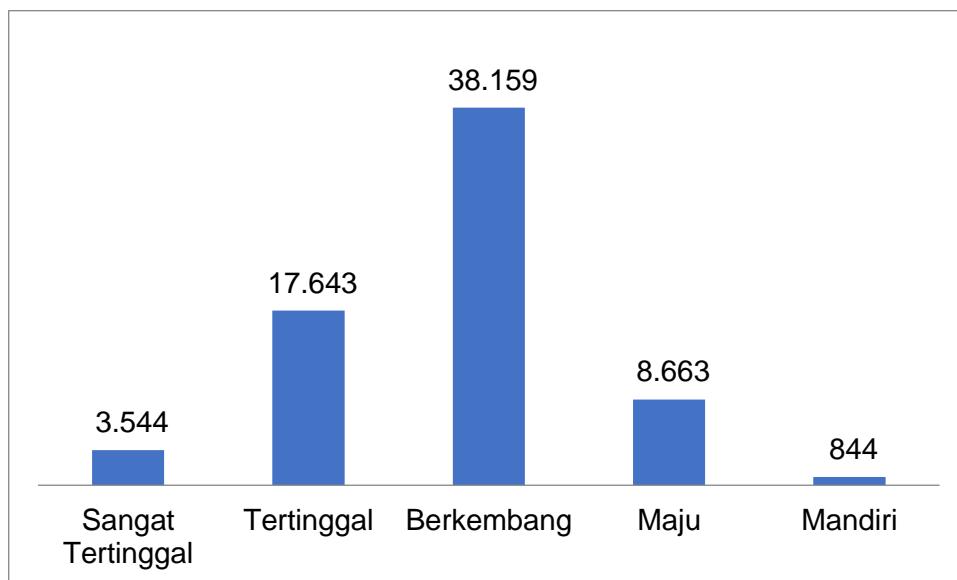
Tabel 5. Interpretasi Koefisien Korelasi

r_s	Interpretasi
0	Tidak berkorelasi
0,01-0,19	Korelasi sangat rendah
0,20-0,39	Korelasi rendah
0,40-0,59	Korelasi sedang
0,60-0,79	Korelasi kuat
0,80-0,99	Korelasi sangat kuat
1	Korelasi sempurna

Sumber: Spearman's Correlation, 2020

4. Hasil dan Pembahasan

Nilai IDM mengklasifikasikan desa ke dalam lima kelompok. Pada tahun 2019, desa dengan status berkembang merupakan kelompok terbanyak, yaitu sebesar 38.159 desa. Jumlah ini setara dengan 55,42 persen dari total desa di Indonesia merupakan desa berkembang. Sedangkan desa mandiri di Indonesia hanya sebanyak 844 desa atau sebesar 1,22 persen dari total desa di Indonesia.

Gambar 1. Jumlah Klasifikasi Desa Berdasarkan IDM Tahun 2019

Sumber: Kemendesa, 2019, diolah

Apabila dibagi berdasarkan status desanya, rata-rata alokasi anggaran Dana Desa tertinggi diberikan kepada desa dengan status mandiri. Rata-rata alokasi anggaran Dana Desa untuk desa berstatus mandiri sebesar Rp1,023 miliar per desa pada tahun 2019 (Tabel 6). Sedangkan desa yang berstatus sangat tertinggal menempati rata-rata alokasi anggaran Dana Desa terendah. Alokasi anggaran Dana Desa untuk desa dengan status sangat tertinggal hanya sebesar Rp906 juta (Tabel 6).

Tabel 6. Rata-Rata Alokasi Anggaran Dana Desa Per Desa Tahun 2019 Berdasar Status Desa

Status Desa	Rata-rata alokasi anggaran DD per Desa (dalam Rupiah)
Sangat tertinggal	906.733.916
Tertinggal	933.306.478
Berkembang	932.400.803
Maju	970.806.118
Mandiri	1.023.243.890

Sumber: Kemendesa, 2020, diolah

Untuk mengetahui lebih lanjut pola hubungan antara besaran alokasi Dana Desa dengan IDM, maka akan dilakukan analisis korelasi. Langkah awal untuk melakukan analisis korelasi adalah mengetahui apakah variabel besaran alokasi anggaran Dana Desa per desa dan data IDM mengikuti distribusi normal atau tidak.

Tabel 6. Output SPSS untuk Uji Normalitas

	Alokasi Anggaran Dana Desa	IDM
Kolmogorov-Smirnov Z	42,991	13,091
Prob.	0,000	0,000

Hipotesis null yang digunakan untuk melakukan uji normalitas adalah data mengikuti distribusi normal. Kriteria ujinya adalah tolak hipotesis null apabila nilai probabilitas yang dimiliki $< 0,05$. Tabel 6 menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari data alokasi anggaran Dana Desa adalah 0,000. Hal ini berarti bahwa nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari 0,05. Sehingga kesimpulan yang dapat diambil adalah data alokasi anggaran Dana Desa tidak mengikuti distribusi normal.

Adapun nilai probabilitas yang dihasilkan oleh data IDM sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa data IDM juga tidak mengikuti distribusi normal. Sehingga untuk analisis korelasi yang akan dilakukan tidak dapat menggunakan metode *moment product pearson*.

Dengan menggunakan metode korelasi Spearman's Rho, diperoleh nilai koefisien korelasi sebesar 0,152 dengan nilai sig. sebesar 0,00. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan positif antara alokasi anggaran Dana Desa dengan nilai IDM yang dimiliki di setiap desa. Hal ini berarti pagu alokasi anggaran Dana Desa dengan IDM memiliki hubungan yang searah. Namun hubungan yang dimiliki ini sangat lemah mengingat nilai koefisien korelasi yang dihasilkan hanya sebesar 0,152.

Tabel 7. Output SPSS untuk Regresi

Model	Koefisien	t	Sig
Konstanta	0,604	471,178	0,000
Alokasi Anggaran Dana Desa	2,729 10 ⁻¹¹	20,463	0,000

Apabila dilakukan analisis regresi maka diperoleh bahwa alokasi anggaran Dana Desa memberikan pengaruh secara signifikan terhadap nilai IDM (Tabel 7). Namun apabila dilihat dari nilai R yang dihasilkan, hanya sebesar 0,078. Hal ini berarti bahwa pengaruh yang diberikan oleh alokasi anggaran Dana Desa terhadap IDM sangat kecil.

Hal ini disebabkan pembangunan yang dibiayai oleh Dana Desa baru mencakup sebagian kecil dari IDM. IDM dibangun dengan dari 3 indeks lain yaitu indeks ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi. Indikator yang digunakan dalam indeks ketahanan sosial mencakup akses sarana kesehatan, jumlah dokter, jumlah bidan, tingkat kepesertaan BPJS, akses terhadap poskedes, aktivitas posyandu, akses terhadap SD/MI, akses terhadap SMP/MTS, akses terhadap SMU/SMK, ketersediaan PAUD, ketersediaan PKBM/paket ABC, jumlah pusat keterampilan/kursus, ketersediaan taman bacaan masyarakat/perpustakaan desa, kebiasaan gotong royong, keberadaan ruang publik, kelompok kegiatan olahraga, jumlah jenis agama, jumlah bahasa yang

digunakan sehari-hari, dan lain-lain (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, 2019). Dimana sebagian besar dari indikator tersebut tidak bisa dibangun dengan menggunakan Dana Desa. Sehingga pagu alokasi anggaran Dana Desa terlihat jauh sangat kecil dibandingkan dengan *output* yang diharapkan. Misalkan jumlah dokter di desa, tidak dapat dibiayai oleh Dana Desa. Hal ini dikarenakan kebijakan jumlah dokter dan keberadaan dokter bukan menjadi wewenang dari desa. Hal yang sama juga terjadi pada indeks ketahanan ekonomi dan indeks ketahanan ekologi.

Rendahnya hubungan antara IDM dengan alokasi anggaran Dana Desa diperparah dengan formulasi yang digunakan untuk menghitung alokasi anggaran Dana Desa. Nilai alokasi dasar yang digunakan untuk formulasi masih mendominasi, yaitu sebesar 72 persen. Alokasi dasar berarti pagu anggaran dibagi secara merata kepada seluruh desa. Hal ini dapat mengakibatkan desa-desa yang belum mampu mengelola Dana Desa dengan baik tetap mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa yang besar. Yang pada akhirnya alokasi anggaran Dana Desa tidak dapat menghasilkan *output* yang optimal.

Rendahnya hubungan antara pagu anggaran Dana Desa dengan IDM dapat mengindikasikan belum optimalnya pembangunan di desa. Adapun faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dalam antara lain:

- a) Rendahnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia dari penduduk desa yang rendah dapat dilihat dari tingkat pendidikan mayoritas penduduk yaitu lulusan SD. Hal tersebut berdampak pada kurangnya partisipasi masyarakat pada tahap perencanaan pengelolaan Dana Desa (Aljannah, 2017).
- b) Belum maksimalnya peran pendamping dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini berakibat adanya aparat desa yang kurang memahami pengelolaan Dana Desa yang benar. Hal ini tentunya akan menghambat pembangunan dan terciptanya otonomi desa sesuai yang diharapkan.

5. Penutup

Besar pagu anggaran Dana Desa dan IDM memiliki hubungan yang signifikan. Pola hubungan yang dimiliki oleh anggaran Dana Desa dan IDM searah, yang artinya semakin besar pagu anggaran Dana Desa maka IDM yang dimiliki akan semakin besar pula. Namun korelasi yang dimiliki sangat lemah. Hal ini dikarenakan pembangunan di desa yang dibiayai oleh Dana Desa lebih kecil dibandingkan dengan pembangunan yang dipotret oleh IDM. Dimana IDM memotret pembangunan secara menyeluruh. Hal ini diperparah dengan kebijakan formulasi yang digunakan untuk menentukan besar alokasi Dana Desa per desa. Adanya faktor yang menghambat pengelolaan Dana Desa seperti rendahnya kualitas SDM di desa dan belum optimalnya kualitas pendamping juga menjadi penyebab rendahnya hubungan antara pagu anggaran Dana Desa dan IDM.

Kebijakan Dana Desa sudah memberikan kontribusi pada pembangunan di desa, namun masih perlu adanya perbaikan antara lain:

- a) Perbaikan formulasi yang digunakan untuk menentukan besaran pagu anggaran Dana Desa per desa, sehingga besaran pagu Dana Desa yang diterima oleh desa sesuai dengan kemampuan desa dalam mengelolanya.
- b) Perlu adanya sosialisasi tentang Dana Desa kepada seluruh masyarakat desa, sehingga tingkat partisipasi masyarakat dapat semakin tinggi. Yang pada akhirnya pembangunan di desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
- c) Peningkatan kualitas pendamping desa, sehingga dapat mengoptimalkan pengelolaan Dana Desa di desa.
- d) Perlu adanya penelitian lebih lanjut dengan menggunakan *output* kebijakan Dana Desa yang lebih relevan untuk memotret pembangunan di desa dengan menggunakan Dana Desa.

Daftar Pustaka

- Aljannah, S. 2017. Evaluasi Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Menunjang Pembangunan Desa di Kecamatan Tambusai utara Kabupaten Rokan Hulu. JOM Fekon Vol.4 No.1, 813-827.
- Deshpande, S., Gogtay, N., & Thatte, U. 2016. Data Types. Journal of The Association of Physicians of India, 64-66.
- Gogtay, N., & Thatte, U. 2017. Principles of Correlation Analysis. Journal of The Association of Physicians of India. Vol 65. March, 78-81.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi. 2015. Indeks Desa Membangun. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi.
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. 2019. Standar Operasional Prosedur Pengukuran Indeks Desa Membangun Tahun 2019. Jakarta: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2017. Buku Pintar Dana Desa. Jakarta: Kemenkeu RI.
- Khoiriah, S., & Meylina, U. 2017. Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Ragulasi Keuangan Desa. Masalah-Masalah Hukum, Jilid 46 No.1, Januari 2017, 20-29.
- Spearman's Correlation. 2020. Retrieved from www.statstutor.ac.uk/resources/uploaded/spearmans.pdf

PENGARUH MASUKNYA PENANAMAN MODAL LANGSUNG TERHADAP PENDAPATAN PAJAK INDONESIA PERIODE 1972-2018

*Impact of Foreign Direct Investment Inflows on Tax Revenues in Indonesia
Period 1972-2018*

Rastri Paramita

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

Email: rastri.paramita@dpr.go.id

Abstract

The purpose of this study is to determine the short-term and long-term interactions between FDI inflows and the variables controlling trade openness to tax revenues in Indonesia in the 1972-2018 period. In this study using a quantitative method to find out the short-term and long-term interactions between FDI inflows and trade openness to tax revenue. The dependent variable is tax revenue. Whereas the independent variable is FDI inflows. The controlling variable used is trade openness. The method used is the Vector Error Correction Model (VECM), because the data stationer is at first difference but is cointegrated. The results of this study are the short-term and long-term interactions of FDI inflows and controlling variables in the form of trade openness to tax revenue in Indonesia in the 1972 - 2018 period having a positive and significant relationship.

Keywords: *FDI, Tax, Trade Openness*

1. Pendahuluan

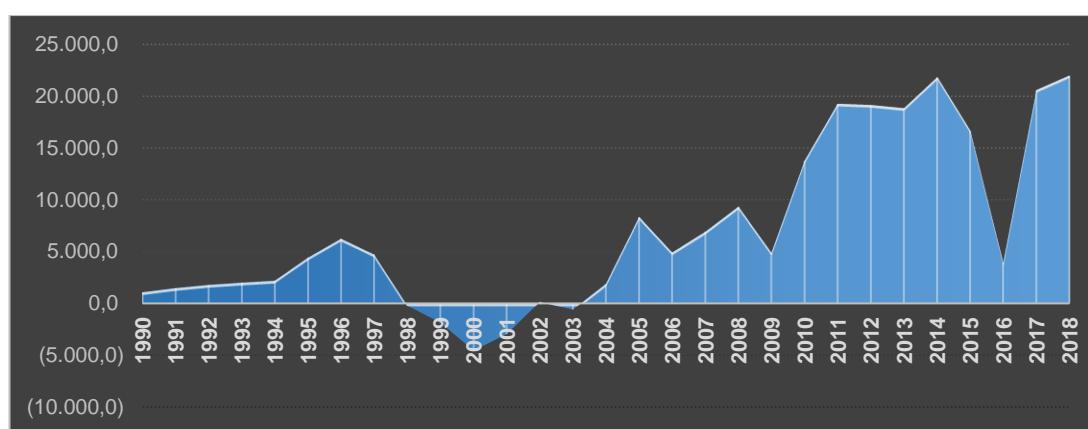
Investasi asing langsung (*Foreign Direct Investment/FDI*) menurut IMF didefinisikan sebagai investasi asing dimana investor memiliki lebih dari 10 persen saham yang diinvestasikan. Hal ini mengacu pada investasi oleh perusahaan multinasional yang dikendalikan oleh perusahaan asing, seperti afiliasi atau anak perusahaan. Aliran FDI terdiri dari dua kategori besar, yaitu (1) transfer bersih langsung dari perusahaan induk ke afiliasi asing, baik melalui ekuitas atau utang; dan (2) penghasilan yang diinvestasikan kembali oleh afiliasi asing.

Sejak pertengahan 1980, terjadi peningkatan aliran FDI global yang disebabkan oleh percepatan globalisasi, kemajuan teknologi serta peningkatan produksi akibat terjadinya revolusi industri. Liberalisasi aliran modal membuat

seluruh negara di dunia berlomba-lomba menawarkan insentif fiskal yang atraktif agar mampu menarik masuknya aliran FDI di negaranya. Pemberian insentif fiskal yang mampu menurunkan biaya FDI masih menjadi alat yang cukup ampuh dalam menarik masuknya FDI. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan FDI yang cukup signifikan dari USD12.558,2 miliar pada tahun 1970 menjadi USD1.193 triliun pada tahun 2018 (Bayar, 2018). FDI *net inflows* mencapai puncak pada tahun 2007 sebesar USD3.136 triliun. Pada krisis keuangan global tahun 2008, FDI global mengalami kontraksi menjadi USD2.478 triliun. Tahun 2017, FDI *net inflow* kembali mengalami kontraksi menjadi USD1.968 triliun akibat perlambatan perekonomian global hingga tahun 2018 (World Bank, 2017).

Perkembangan aliran FDI global saat ini memiliki tren mengalir ke Asia, khususnya negara *emerging market economics* (IMF, 2016). Dasar aliran ke negara *emerging market* dipicu oleh masih besarnya prospek pertumbuhan ekonomi di negara tersebut dan pangsa pasar yang besar sebagai sumber *demand* baru bagi negara maju. Indonesia merupakan salah satu negara *emerging market* yang memiliki pangsa pasar potensial bagi negara maju di samping ekonominya masih mencatatkan pertumbuhan yang cukup besar dibandingkan pertumbuhan di negara-negara maju. Berdasarkan Gambar 1, perkembangan FDI di Indonesia cukup fluktuatif. Setelah krisis moneter tahun 1998, kepercayaan asing untuk berinvestasi di Indonesia baru pulih di tahun 2004. Namun, aliran FDI yang masuk ke Indonesia kembali menurun di tahun 2009 akibat krisis keuangan dunia. Yang cukup menarik, pada tahun 2016, aliran FDI yang masuk ke Indonesia kembali menurun tajam ke angka USD3.921,2 juta lebih rendah dari penurunan di tahun 2009 pasca krisis keuangan yang hanya sebesar USD4.877,9 juta. Penurunan ini disebabkan salah satunya oleh pelemahan perekonomian global. Setelah menurun tajam di tahun 2016, aliran masuk FDI ke Indonesia membaik di tahun 2017 dan berlanjut di tahun 2018.

Gambar 1. Perkembangan Aliran Masuk FDI ke Indonesia Periode 1990-2018 (miliar USD)



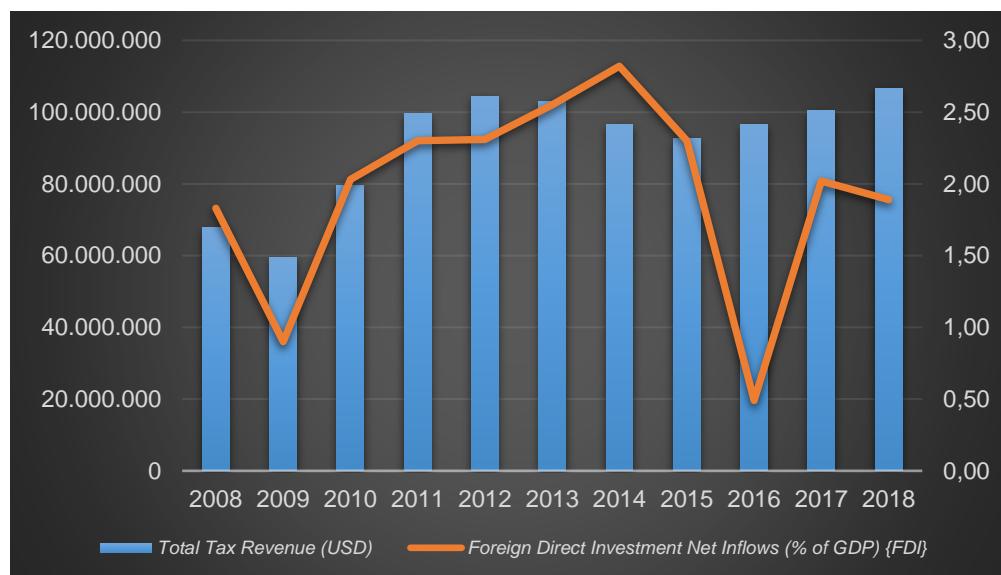
Sumber: UNCTAD.org, diolah

Aliran masuk FDI dapat berimplikasi positif pada pendapatan pajak berdasarkan penelitian Nguyen et al. (2014), apabila tercipta efek kompetisi, efek penciptaan permintaan, biaya transfer teknologi, dan limpahan teknologi yang

ditentukan pada kapasitas daya serap perusahaan domestik sementara efek kompetisi menurunkan tingkat perusahaan melalui pengurangan produksi perusahaan lokal. Sedangkan menurut Saray (2011), aliran masuk FDI dapat meningkatkan daya saing melalui aliran kapital dan transfer teknologi sehingga dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan perekonomian dan pembangunan. Selain itu, aliran masuknya FDI juga berpotensi memengaruhi pertumbuhan pendapatan pajak secara tidak langsung melalui aktivitas ekonomi.

Namun, dampak negatif yang dapat dirasakan dari insentif fiskal yang diberikan negara tujuan FDI guna menarik investor asing masuk berinvestasi, berpengaruh pada pengurangan pajak badan usaha atau bentuk kebijakan insentif fiskal lainnya yang memberikan *privileges* terhadap perusahaan multinasional yang melakukan transfer profit ke negara asalnya sehingga pendapatan pajak negara tujuan investasi cenderung tidak akan meningkat secara signifikan. Dampak negatif dari FDI sesuai dengan penelitian Zee et al. (2002) yang mengemukakan bahwa tingginya insentif pajak yang diberikan *host country* untuk menarik investasi asing memiliki konsekuensi negatif terhadap *opportunity lost* bagi pendapatan negara.

Gambar 2. Perbandingan Perkembangan FDI Inflow dan Total Tax Revenue Indonesia Periode 2008-2018



Sumber: CEIC, World Bank, diolah

Berdasarkan Gambar 2, hubungan *FDI Inflow* dengan *total tax revenue* di Indonesia tidak selamanya positif, seperti pada tahun 2013, 2014, 2015, 2016, dan 2018. Pengaruh arus masuk FDI pada pajak menjadi negatif dapat terjadi antara lain, oleh faktor pemberian insentif fiskal (seperti *super deduction* litbang, *investment allowance* industri padat karya) dan *transfer pricing*. Kondisi ini sejalan dengan penelitian Zee et al. (2002) yang menyatakan bahwa tingginya penggunaan insentif pajak untuk menarik masuknya investasi asing langsung memiliki beberapa konsekuensi negatif (dalam hal ini adalah hilangnya pendapatan). Bentuk dari hilangnya pendapatan, dapat berupa pengurangan

basis pajak, mendistorsi alokasi sumberdaya untuk kegiatan yang memanfaatkan manfaat pajak yang disukai dengan mengorbankan orang lain, menciptakan peluang untuk korupsi dan perburuan rente.

Berdasarkan permasalahan di atas, pertanyaan penelitian yang ingin dijawab dalam studi ini yaitu bagaimana interaksi jangka pendek dan jangka panjang antara arus masuk FDI serta variabel pengendali keterbukaan perdagangan terhadap pendapatan pajak di Indonesia periode 1972-2018. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui interaksi jangka pendek dan jangka panjang antara arus masuk FDI serta variabel pengendali keterbukaan perdagangan terhadap pendapatan pajak di Indonesia periode 1972-2018.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Teori Penanaman Modal Langsung (FDI)

FDI didefinisikan menurut *World Investment Report* (UNCTAD, 2011) adalah:

“an investment that involves a long term relationship and reflecting lasting interest and control of a resident entity in one economy (foreign direct investor or parent company) in a company resident in an economy other than of foreign investor”.

Intensifnya FDI muncul dalam teori dan studi empiris terjadi setelah Perang Dunia II. Perkembangan FDI yang intensif inilah mendorong IMF menyediakan regulasi terkait pengembangan perdagangan dan keuangan internasional. Berdasarkan prinsip panduan dari Komite OECD untuk perusahaan internasional dan multinasional 2001-2002 yang mengulas kompetisi berbasis insentif untuk FDI menemukan bahwa untuk menarik FDI, investor harus disediakan sebuah lingkungan di mana mereka akan dapat menjalankan profil bisnis mereka dengan baik dan tanpa risiko yang tidak perlu. Kondisi yang dicari oleh perusahaan asing adalah iklim investasi dan bisnis yang kondusif karena investor asing sangat responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis.

Adanya arus masuk FDI menjadi peluang sebagai sumber penerimaan pajak baru melalui perpajakan perusahaan asing dan perpajakan tidak langsung (Nguyen, et al., 2014; Gnangnon, 2017). Berdasarkan beberapa penelitian mengenai keuntungan FDI terhadap *host country* menyimpulkan bahwa FDI akan sangat efektif berkontribusi terhadap perekonomian *host country* menjadi lebih baik jika negara tujuan FDI menerapkan kebijakan yang tepat dan melakukan pengembangan sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur tingkat tinggi dengan memanfaatkan peluang dari FDI serta menghindari ancaman yang timbul dari pelaksanaan FDI tersebut.

Sedangkan berdasarkan penelitian Hermes dan Lensink (2003) menghasilkan bahwa dibutuhkan sistem keuangan yang berkembang dengan baik yang merupakan prasyarat penting bagi FDI untuk memiliki efek merangsang

pertumbuhan ekonomi. Aliran masuk FDI juga dapat menyebabkan ketimpangan regional yang mungkin tidak diinginkan (Zhang dan Zhang, 2003).

2.2. Teori Pajak

Pajak menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro, SH, dalam buku Mardiasmo (2011) adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditujukan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi pajak lainnya adalah biaya wajib yang dikenakan oleh pemerintah tanpa ekspektasi pengembalian secara langsung dalam suatu manfaat yang dapat dirasakan oleh pembayar pajak tersebut atau disebut juga sebagai pembayaran tak berbalas yang dibayarkan perorangan atau badan usaha kepada pemerintah pusat atau daerah (Ali, et al, 2018).

Menurut Mardiasmo (2011), pajak memiliki dua fungsi jika dilihat sebagai sumber penerimaan negara, yaitu:

- Fungsi anggaran (*budgetair*), merupakan sumber dana untuk pemerintah dalam membiayai pengeluarannya.
- Fungsi mengatur (*regulerend*), merupakan alat pengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Menurut *The Heritage Foundation*, beban pajak adalah ukuran beban pajak yang dikenakan oleh pemerintah. Baik dalam bentuk pajak langsung, dalam konteks tarif pajak marjinal atas pendapatan individu dan perusahaan, serta pajak keseluruhan, termasuk semua bentuk perpajakan langsung dan tidak langsung di semua tingkat pemerintahan sebagai persentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). Dengan demikian, komponen kebebasan fiskal terdiri dari tiga faktor kuantitatif:

- Tingkat pajak marginal atas penghasilan individu;
- Tingkat pajak marginal atas penghasilan perusahaan; dan
- Total beban pajak sebagai persentase PDB.

Johansson, et al. (2008) mengemukakan bahwa sistem perpajakan ditujukan terutama untuk membiayai pengeluaran publik di samping juga untuk tujuan lain seperti kesetaraan dan mengatasi masalah sosial serta ekonomi. Sistem perpajakan perlu dibentuk guna meminimalkan biaya kepatuhan wajib pajak dan biaya administrasi pemerintah, mencegah penghindaran dan penggelapan pajak. Pajak juga dapat memengaruhi keputusan rumah tangga untuk menabung, memasok tenaga kerja, serta berinvestasi dalam sumber daya manusia, keputusan perusahaan untuk menghasilkan, menciptakan lapangan kerja, berinvestasi dan berinovasi serta pilihan bentuk simpanan dan aset oleh investor. Apa yang menjadi penting untuk membuat suatu keputusan bukan hanya di tingkat pajak saja, namun juga cara dimana berbagai instrumen pajak dirancang dan digabungkan untuk menghasilkan pendapatan.

2.3. Teori Hubungan Penanaman Modal Langsung Dengan Pajak

Pengaruh positif FDI terhadap pendapatan pajak dapat diwujudkan dalam beberapa cara seperti yang dijelaskan oleh Bond dan Samuelson (1986) dengan mengkalibrasi model teoritis pada dua periode tentang hubungan antara FDI dan pendapatan pajak. Temuan mereka adalah dalam pendapatan pajak pemerintah negara tuan rumah dapat menurun dalam jangka pendek karena pembebasan pajak (*tax holiday*) sebagai alat penarik FDI di periode awal. Namun, negara tuan rumah dapat meningkatkan pendapatan pajak dalam jangka panjang karena investasi asing tidak akan ditarik setelah periode *tax holiday*. FDI juga dapat memengaruhi penerimaan pajak melalui efek kesejahteraan.

Pajak merupakan salah satu faktor pertimbangan investasi langsung dari bisnis internasional. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Ball, et al. (2014), yang menyatakan tujuan dari pajak tidak hanya fokus peningkatan pendapatan negara, namun dapat berbentuk mengurangi investasi asing. Maksudnya, semakin kompleks regulasi perpajakan di suatu negara maka dapat berdampak pada berkurangnya minat investor asing untuk melakukan FDI.

Menurut Ball et al. (2014), terdapat hubungan antara pajak dan FDI karena perpajakan merupakan salah satu kekuatan finansial yang signifikan dampaknya terhadap FDI. Apabila intervensi pemerintah perpajakan dapat dikurangkan, maka akan cenderung menarik investor asing untuk melakukan FDI sebab pajak yang rendah dapat menghasilkan biaya yang kecil.

2.4. Keterbukaan Perdagangan (*Trade Openness*)

Menurut Case dan Fair (2007), terjadi saling ketergantungan antara satu negara dengan negara lain dalam memenuhi kebutuhan domestiknya sebab keterbatasan yang dimiliki oleh setiap negara, sehingga terciptanya perdagangan internasional. Sedangkan OECD sering menggunakan *trade openness ratio* dalam mengukur pentingnya hubungan transaksi internasional terhadap transaksi domestik. Penghitungan indikator ini untuk setiap negara sebagai rata-rata yang sederhana (*mean*) dari total perdagangan (jumlah ekspor dan impor barang dan jasa) yang berkaitan terhadap PDB. Hasil rasio yang rendah tidak selalu mencerminkan tingginya hambatan (tarif atau non tarif) perdagangan luar negeri, namun faktor lain seperti ukuran ekonomi serta perbedaan keadaan geografis dari mitra dagang yang potensial.

2.5. Arus Masuk FDI dan Keterbukaan Perdagangan (*Trade Openness*) Terhadap Pendapatan Pajak

Terdapat beberapa penelitian terkait hubungan antara masuknya arus FDI dan *trade openness* diantaranya penelitian yang dilakukan Liargovas et al. (2012) mengenai pentingnya keterbukaan perdagangan untuk menarik aliran masuk FDI dengan mempelajari 36 negara dari negara berkembang periode 1990-2008. Hasilnya adalah keterbukaan perdagangan secara positif dan signifikan memengaruhi aliran masuk FDI.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kakar dan Khilji (2011), mengenai FDI dan keterbukaan perdagangan dengan hubungan khusus dengan pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Pakistan periode 1980-2010, menemukan bahwa keterbukaan perdagangan secara signifikan memengaruhi pertumbuhan ekonomi Malaysia dan Pakistan dalam jangka panjang.

Terdapat juga penelitian yang menghasilkan dampak negatif dari liberalisasi perdagangan dan FDI seperti yang dilakukan oleh Abrego (1999). Hasil dari penelitiannya menemukan dampak dari liberalisasi perdagangan dan FDI atas ekonomi Costa Rica dan negara-negara OECD periode 1990-1991 berakhir dengan berkurangnya kesejahteraan karena mengarah pada arus modal keluar dan hilangnya pendapatan pajak.

Sedangkan hubungan antara keterbukaan perdagangan dengan pendapatan pajak dapat dilihat dari hasil studi yang dilakukan oleh Othieno dan Shinyekwa (2011) pada kinerja pajak perdagangan di East African Community (EAC). Studi ini meneliti efek dari keterbukaan perdagangan secara langsung, tidak langsung, serta perdagangan sebagai total penerimaan pajak. Teknik kointegrasi data panel sebagai modifikasi penuh atas *ordinally least square* dan *dynamic ordinally least square*. Hasilnya adalah tingkat tarif berpengaruh positif terhadap total pajak, pajak tidak langsung dan pajak perdagangan. Namun hubungan antara tingkat tarif dan pajak langsung tidak signifikan. Selain variabel keterbukaan perdagangan, variabel berikut juga ditemukan berpengaruh positif memengaruhi pajak di negara-negara EAC, termasuk tingkat tarif rata-rata, keterbukaan perdagangan, PDB per kapita, rasio populasi perkotaan dengan total populasi, bantuan asing dan pengendalian korupsi. Sementara yang berpengaruh negatif terhadap kinerja pajak yaitu stok utang sebagai persentase dari PDB, inflasi, nilai tukar riil efektif, andil sektor pertanian terhadap PDB, kualitas peraturan, stabilitas politik dan supremasi hukum.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data pendapatan pajak (persentase dari PDB) dipilih sebagai variabel dependen. Pemilihan ini didasari oleh kebijakan pemerintah Indonesia yang memberikan insentif fiskal pada pajak badan guna menarik masuk FDI. Sedangkan variabel independen yang dipilih adalah arus masuk bersih FDI (persentase dari PDB) dengan keterbukaan perdagangan (persentase dari PDB) sebagai variabel pengendali sebagaimana tertera pada Tabel 1. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder tahunan (*time series*) periode 1972 – 2018. Definisi variabel operasional tertera pada Tabel 1.

Tabel 1. Operasional Variabel

Variabel (satuan)	Definisi Operasional Variabel Penelitian	Sumber
Pendapatan Pajak (persentase dari PDB)/TAX	Pendapatan pajak mengacu pada transfer pemerintah pusat untuk kebutuhan publik. Transfer wajib tertentu seperti denda, pidana, dan pengecualian sebagian besar jaminan sosial. Pengembalian uang dan koreksi dari penerimaan pajak yang keliru dianggap sebagai pendapatan negatif.	World Bank
Arus Masuk Bersih FDI (persentase dari PDB)/FDI	Investasi asing langsung adalah arus masuk investasi neto untuk memperoleh kepentingan manajemen yang langgeng (10 persen atau lebih dari saham <i>voting</i>) di perusahaan yang beroperasi dalam perekonomian selain dari investor. Ini adalah jumlah modal ekuitas, investasi kembali pendapatan, modal jangka panjang lainnya, dan modal jangka pendek seperti yang ditunjukkan dalam neraca pembayaran. Seri ini menunjukkan arus masuk neto (arus masuk investasi baru dikurangi disinvestasi) dalam ekonomi pelaporan dari investor asing, dan dibagi dengan PDB.	World Bank
Keterbukaan Perdagangan (persentase dari PDB)/TRADEOP	Rasio jumlah ekspor dan impor barang dan jasa dengan negara-negara lain yang diukur sebagai bagian dari PDB.	World Bank

Sumber: World Bank, diolah

3.2. Alat Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode, kuantitatif untuk mengetahui interaksi jangka pendek dan jangka panjang antara arus masuk FDI dan keterbukaan perdagangan terhadap pendapatan pajak di Indonesia periode 1972-2018. Variabel dependen adalah pendapatan pajak. Sedangkan variabel independen adalah arus masuk FDI. Penentuan pendapatan pajak sebagai variabel dependen karena di Indonesia pengurangan pajak atau pemberian insentif fiskal masih menjadi senjata utama untuk menarik arus masuk FDI. Variabel pengendali yang digunakan berupa keterbukaan perdagangan. Variabel ini digunakan karena tingkat keterbukaan perdagangan suatu negara menjadi salah satu faktor yang turut memengaruhi besar kecilnya arus masuk FDI. Metode yang digunakan adalah *Vector Error Correction Model* (VECM), karena data stationer pada tingkat satu namun terkointegrasi.

Interaksi jangka pendek dapat terjadi diantara variabel dependen dan independen jika *error correction term* (ect) bertanda negatif dan memiliki koefisien kurang dari α 5 persen. Sedangkan untuk mengetahui interaksi jangka panjang dapat menggunakan model VECM sebagai berikut:

$$Tax_{it} = \alpha + \beta FDI_t + \lambda X_{it} + \varepsilon_t$$

Keterangan:

- Tax_{it} = variabel dependen
- FDI_t = merupakan variabel independen
- X_{it} = kontrol variabel yang direpresentasikan dengan keterbukaan perdagangan
- ε_t = error term

3.3. Penelitian Terdahulu

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, antara lain:

Tabel 2. Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Metodelogi Penelitian	Hasil Penelitian
Camara (2019)	<i>Long Run Effects Of Foreign Direct Investment On Tax Revenue In Developing Countries</i>	Menggunakan alat analisis estimasi pengujian <i>Pool Mean Group</i> (PMG) dan Analisis <i>Cross-Sectional Dependence</i>	Hasil penelitiannya adalah arus masuk FDI memengaruhi mobilisasi pajak pemerintah secara positif. Menguji hubungan antara FDI dan mobilisasi pajak di tingkat regional, hasilnya menunjukkan aliran masuk FDI memiliki dampak positif pada pendapatan pajak pemerintah. Untuk hasil menganalisis negara-negara yang merupakan eksportir sumber daya menunjukkan bahwa untuk negara-negara pengekspor sumber daya, arus masuk FDI memengaruhi mobilisasi pajak pemerintah secara negatif.
Bayar (2018)	<i>Impact of foreign direct investment inflows on tax revenues in OECD countries: A panel cointegration and causality analysis (Theoretical and Applied Economics)</i>	Menggunakan alat analisis <i>Cointegration test of Westerlund-Durbin-Hausmann</i> dan tes kausalitas Dumitrescu dan Hurlin.	Hasil penelitian ini adalah interaksi jangka pendek dan jangka panjang antara penerimaan pajak, aliran masuk FDI dan pertumbuhan ekonomi dianalisis di 33 negara OECD selama periode 1995-2014 dengan Dumitrescu dan Hurlin uji kausalitas dan uji <i>Westerlund-Durbin-Hausmann</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap total penerimaan pajak di tingkat panel. Penelitian ini mengevaluasi bahwa komposisi arus masuk FDI dan tingkat insentif keuangan oleh negara-negara tuan rumah merupakan faktor penentu untuk hubungan antara total pendapatan pajak dan aliran masuk FDI. Dalam hal ini, banyak negara OECD telah mencoba untuk meningkatkan pendapatan pajak dengan memperluas basis pajak melalui pengurangan pembebasan pajak dan pengurangan pajak.

Bond dan Samuelson (1986)	<i>Tax Holidays As Signals.</i>	Mengkalibrasi model teoritis pada dua periode tentang hubungan antara FDI dan pendapatan pajak. Temuan mereka adalah dalam pendapatan pajak pemerintah negara tuan rumah dapat menurun dalam jangka pendek karena pembebasan pajak (<i>tax holiday</i>) sebagai alat penarik FDI di periode awal. Namun, negara tuan rumah dapat meningkatkan pendapatan pajak dalam jangka panjang karena investasi asing tidak akan ditarik setelah periode <i>tax holiday</i> . FDI juga dapat memengaruhi penerimaan pajak melalui efek kesejahteraan.
----------------------------------	---------------------------------	--

Sumber: Berbagai sumber, diolah

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Analisis Interaksi Jangka Pendek Dan Jangka Panjang Antara Arus Masuk FDI serta Variabel Pengendali Keterbukaan Perdagangan Terhadap Pendapatan Pajak di Indonesia Periode 1972-2018

Langkah pertama sebelum menggunakan VECM untuk mengetahui pengaruh jangka pendek dan jangka panjang arus masuk FDI dan keterbukaan perdagangan terhadap pendapatan pajak, terlebih dahulu menentukan stasioner variabel yang digunakan. Uji stasioneritas dilakukan untuk menganalisis dan membuktikan apakah masing-masing variabel memiliki pola yang stasioner atau tidak. Pengujian stasioneritas dilakukan dengan membandingkan antara *augmented dickey fuller (ADF) statistic* dengan *critical values* Mac Kinnon pada derajat 1 persen, 5 persen, dan 10 persen.

Tabel 3. Hasil Uji ADF

Variable	ADF Statistic (level)	ADF Statistic (first difference)
TAX	-2,789904	-6,790519**
FDI	-3,306140*	-8,994698**
Tradeop	-3,605924*	-9,999988**

Sumber: Eviews 10, diolah

Keterangan: *Critical Value:* 1 persen = -4,103198
5 persen = -3,479367
10 persen = -3,167404

*Signifikan pada level

** Signifikan pada *first difference*

Hasil uji stasioner menunjukkan masing-masing variabel telah stasioner pada *first difference*. Artinya data tersebut valid digunakan untuk pengujian kointegrasi. Sebelum melakukan *Johansen Cointegration Test*, perlu diketahui

panjang *lag* yang digunakan untuk mengetahui waktu yang dibutuhkan pengaruh dari masing-masing variabel terhadap variabel masa lalunya. Panjang *lag* optimal dapat ditunjukkan dalam Tabel 4.

Tabel 4. Pengujian Panjang Lag

Lag	LogL	LR	FPE	AIC	SC	HQ
0	-227,3370	NA	11,64439	10,96843	11,09255*	11,01392*
1	-219,1833	14,75441	12,14397	11,00873	11,50520	11,19070
2	-206,0408	21,90416*	10,04676*	10,81146*	11,68030	11,12993
3	-197,1581	13,53551	10,29206	10,81705	12,05824	11,27200
4	-189,2116	10,97365	11,20723	10,86722	12,48077	11,45865

Sumber: Eviews 10 (diolah)

Berdasarkan Tabel 4, diketahui bahwa panjang *lag* optimal terletak pada *lag* 2. Pemilihan *lag* 2 sebagai *lag* optimal karena berdasarkan hasil EViews bahwa jumlah bintang terbanyak berada pada *lag* 2. Setelah panjang *lag* optimal sudah ditemukan, maka dapat dilakukan pengujian selanjutnya, yaitu uji kointegrasi.

Tabel 5. Pengujian Kointegrasi Uji Johansen

Unrestricted Cointegration Rank Test (Trace)				
Hypothesized		Trace	0,05	
No. of CE(s)	value	Statistic	Critical Value	Prob. **
None *	0,667410	97,11491	29,79707	0,0000
At most 1 *	0,436003	48,67776	15,49471	0,0000
At most 2 *	0,413514	23,47866	3,841466	0,0000

Sumber: Eviews 10 (diolah)

Pengujian kointegrasi merupakan syarat untuk dapat melakukan metode VECM. Dalam penelitian ini, menggunakan *critical value* 0,05. Hasil uji kointegrasi ditunjukkan oleh Tabel 5. Pada Tabel 5 menunjukkan terdapat semua *rank variable* berhubungan kointegrasi. Hal tersebut terlihat pada *trace statistic* lebih besar dari *critical value* 0,05 artinya, pendapatan pajak, arus masuk FDI dan keterbukaan perdagangan memiliki hubungan stabil atau memiliki keseimbangan dan kesamaan pergerakan dalam jangka panjang. Dengan kata lain, setiap periode jangka pendek, seluruh variabel cenderung saling menyesuaikan untuk mencapai ekuilibrium jangka panjangnya.

Tabel. 6. Hasil Estimasi VECM dalam Jangka Pendek

Error Correction:	D(TAX,2)	D(FDI,2)	D(TRADEOP,2)
CointEq1	-0,443901 (0,15229) [-2,91483]	1,181433 (0,46538) [2,53863]	15,96510 (3,58104) [4,45822]
D(TAX(-1),2)	0,181399 (0,16915) [1,07244]	-1,302224 (0,51689) [-2,51934]	-3,782181 (3,97740) [-0,95092]
D(FDI(-1),2)	-0,100330 (0,03870) [-2,59267]	-0,452297 (0,11826) [-3,82472]	1,404584 (0,90996) [1,54356]
D(TRADEOP(-1),2)	-0,027839 (0,00712) [-3,90995]	0,059880 (0,02176) [2,75207]	-0,088618 (0,16743) [-0,52930]
C	-0,009900 (0,06516) [-0,15194]	0,055061 (0,19912) [0,27653]	-0,214290 (1,53216) [-0,13986]
R-squared	0,326899	0,518022	0,630020
Adj. R-squared	0,257863	0,468588	0,592074
Sum sq. resids	7,281176	67,99510	4026,023
S.E. equation	0,432084	1,320403	10,16028
F-statistic	4,735200	10,47914	16,60281
Log likelihood	-22,85756	-72,00871	-161,7929
Akaike AIC	1,266253	3,500396	7,581494
Schwarz SC	1,469001	3,703145	7,784243
Mean dependent	-0,010909	0,062045	-0,164318
S.D. dependent	0,501564	1,811302	15,90798

Sumber: EViews 10 (diolah)

Tahap selanjutnya adalah mencari interaksi jangka pendek antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan Tabel 6, D(FDI) dan D(TRADEOP) dengan variabel dependen D(TAX), probabilitas D(FDI) maupun D(TRADEOP) berada di bawah α 5 persen serta nilai *error correction term* (ect) yang dihasilkan melalui uji VECM memperoleh koefisien -0,443901 dengan probabilitas sebesar 0,0059 (menggunakan Gauss-Newton). Nilai ini mengindikasikan terdapat interaksi jangka pendek yang signifikan diantara variabel independen dan dependen. Hasil ini juga menentukan pengujian interaksi jangka panjang menggunakan VECM dapat dilakukan.

Tahap selanjutnya adalah menguji interaksi jangka panjang antara pendapatan pajak, arus masuk FDI, dan keterbukaan perdagangan. Dari model ini akan menentukan persamaan jangka panjang dari penelitian ini.

Tabel 7. Hasil Uji VECM

Cointegrating Eq:	CointEq1
D(TAX(-1))	1,000000
D(FDI(-1))	-0,179628 (0,07095) [-2,53178]
D(TRADEOP(-1))	-0,076516 (0,00987) [-7,75399]
C	-0,036396

Sumber: EViews 10 (diolah)

Berdasarkan hasil pengujian VECM pada Tabel 7, dapat dirumuskan persamaan jangka panjang pengaruh dari arus masuk FDI dan keterbukaan perdagangan terhadap pendapatan pajak di Indonesia, sebagai berikut:

$$D(Tax) = -0,036396 + 0,07095D(FDI) + 0,00987D(Tradeop) + \varepsilon_t$$

Dari hasil uji VECM, FDI maupun TRADEOP memiliki tanda positif dan signifikan pengaruhnya terhadap TAX yang ditandai oleh nilai probabilitasnya di bawah α 5 persen. Artinya, Jika FDI maupun TRADEOP mengalami peningkatan, maka akan diringi oleh peningkatan pada TAX, begitu juga sebaliknya. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Camara (2019) yang meneliti efek jangka panjang dari arus masuk FDI atas pendapatan pajak di negara berkembang menghasilkan adanya hubungan yang positif kecuali untuk negara yang mengekspor sumber daya alam lebih besar dari produk manufaktur yang memiliki hubungan negatif.

Berdasarkan hasil uji VECM yang dilakukan, maka interaksi jangka pendek maupun jangka panjang antara variabel pendapatan pajak, arus masuk FDI, dan keterbukaan perdagangan di Indonesia periode 1972-2018 berhubungan positif dan signifikan. Hasil ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan Bond dan Samuelson (1986) bahwa pendapatan pajak pemerintah negara tuan rumah dapat menurun dalam jangka pendek karena pembebasan pajak (*tax holiday*) sebagai alat penarik FDI di periode awal dan akan mengalami peningkatan dalam jangka panjang karena investasi asing tidak akan ditarik setelah periode *tax holiday*. Di samping itu FDI juga dapat memengaruhi penerimaan pajak melalui efek kesejahteraan.

Hemanona dan Suharyono (2017) juga memperoleh hasil yang sama mengenai pengaruh FDI terhadap *country advantages* Indonesia yang salah satunya terhadap pajak bahwa terdapat peningkatan pemasukan pajak negara melalui FDI serta terdapat keselarasan tujuan dari FDI menurut UU No. 25 Tahun 2007 dengan pajak yang tujuannya juga untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak yang dihitung merupakan pajak penghasilan perusahaan-perusahaan Amerika Serikat di Indonesia.

5. Penutup

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa interaksi jangka pendek maupun jangka panjang arus masuk FDI dan variabel pengendali berupa keterbukaan perdagangan terhadap pendapatan pajak di Indonesia periode 1972 – 2018 memiliki hubungan positif dan signifikan. Hasil ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan Bond dan Samuelson (1986) bahwa pendapatan pajak pemerintah negara tuan rumah dapat menurun dalam jangka pendek karena pembebasan pajak (*tax holiday*) sebagai alat penarik FDI di periode awal dan akan mengalami peningkatan dalam jangka panjang karena investasi asing tidak akan ditarik setelah periode *tax holiday*. Di samping itu FDI juga dapat memengaruhi penerimaan pajak melalui efek kesejahteraan.

Saran terhadap penelitian selanjutnya agar menambahkan lebih banyak variabel pengendali baik yang berkaitan dengan ekonomi maupun non ekonomi namun memengaruhi perkembangan arus masuk FDI dan pengaruhnya terhadap perkembangan pendapatan pajak.

Daftar Pustaka

- Abrego, Lisandro. 1999. Trade Liberalization And Foreign Direct Investment: An Applied General Equilibrium Model For Costa Rica. Center for Study of Globalisation and Regionalisation (CSGR). University of Warwick. Working Paper No. 26.
- Ali, Ali Abdulkadi,; Ali, Ali Yassin Sheikh,; dan Dalmar, Mohamed Saney. 2018. The Impact of Tax Revenues on Economi Growth: A Time Series Evidence From Kenya. Academic Research International. Vol.9 (3) September 2018). P.165.
- Ball, D. A., Geringer, J. M., Minor, S. M., & McNett, J. M. 2014. Bisnis Internasional Buku 1 (Ed.12). Jakarta: Salemba Empat.
- Bayar, Yilmaz., dan Omer Faruk Ozturk. 2018. Impact of Foreign Direct Investment Inflows on Tax Revenues in OECD Countries: A Panel Cointegration and Causality Analysis. Theoretical & Applied Economics 25 (1).
- Bond, Eric W., dan Larry Samuelson. 1986. Tax Holidays as Signals. The American Economic Review 76 (4): 820–826.
- Camara, Abdramane,. 2019. Long Run Effects of FDI on Tax Revenue in Developing Countries. 2nd Annual Sustainability and Development Conference, Ann Arbor, United States.
- Case & Fair. 2007. Prinsip-Prinsip Ekonomi Jilid 1. Jakarta : Erlangga.
- CEIC. 2020. <https://www.ceicdata.com/id/indicator/indonesia/foreign-direct-investment>

- Gnangnon, Sena Kimm. 2017. Impact of Foreign Direct Investment (FDI) Inflows on Non-Resource Tax and Corporate Tax Revenue. *Economics Bulletin* 37 (4).
- Gujarati, Damodar. 1997. *Ekonometrika Dasar*. Alih Bahasa Sumarno Zain. Erlangga : Jakarta.
- Hemanona, Valentinez., dan Suharyono. 2017. Analisis Pengaruh Foreign Direct Investment Terhadap Country Advantages Indonesia. *Jurnal Administrasi Bisnis*. Vol 52 No. 1, November. Universitas Brawijaya. Malang.
- Hermes, N. and Lensink, R. 2003. Foreign Direct Investment, Financial Development and Economic Growth. *Journal of Development Studies*, 40, 142-163
- IMF. 2016. World Economic Outlook Database. <https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx>. Diunduh tanggal 04.05.2020.
- Johansson, A. Heady., C. Arnold, J. B., dan Vartia, L. 2008. Tand And Economic Growth. *OECD Economics Department Working Paper*, No.62.
- Kakar, Zaheer Khan,. Khilji, Bashir Ahmad. 2011. Impact Of FDI And trade Openness on Economic Growth: A comparative Study of Pakistan And Malaysia. *Theoritical and Applied Economics*. Vol. XVIII, No. 11 (564).
- Liargovas, Panagiotis G., dan Skandalis, Konstantinos S. 2012. Foreign Direct Investment And Trade Ipenness: The Case Of Developing Economies. *Social Indicators Research*.106.
- Mardiasmo. 2011. Perpajakan edisi revisi 2011. Yogyakarta : CV. Andi Offset.
- Nguyen, Huu Thanh Tam., Nguyen, Manh Hung., and Goenka, Aditya. 2014. How Does FDI Affect Corporate Tax Revenue of the Host Country. Document De Recherche Epee, Centre D'etudes Des Politiques Economiques De L'universite D'evry, Retrieved August 10: 13–03.
- OECD. 2011. www.oecd-ilibrary.org/docserver/sti_scoreboard-2011-60-en.pdf?expires=1587378189&id=id&accname=guest&checksum=90CE65CEF4700B62AEE714BC486BEC90. Diunduh tanggal 20-04-2020.
- Othieno, L., dan Shinyekwa, I. 2011. Trade, Revenue and Welfare Effects of The East African Community Customs Union Principle of Asymmetry on Uganda: An Application of Wits-Smart Simulation Model. *Economic Policy Research Centre (EPRIC)*, Research Series 150480.
- Saray, M. O. 2011. The Relationship of Foreign Direct Investments and Employment: Turkey Case. *Maliye Dergisi*, Number 161. UNCTAD.org.
- The Heritage Foundation. 2020. Fiscal Freedom. Diakses dari <https://www.heritage.org/index/fiscal-freedom>. Diunduh tanggal 17-4-2020.

UNCTAD. 2011. World Investment Report 2011: Non-Equity Modes of International Production and Development. United Nations Publication. ISBN 978-92-1-112828-4.

World Bank. www.data.worldbank.org/indicator/BX.KLT.DINV.CD.WD. Diunduh 05.05.2020.

Zee, Howell H., Stotsky, Janet G., and Eduardo Ley. 2002. Tax Incentives for Business Investment: A Primer for Policy Makers in Developing Countries. *Economics of Transition* 9 (3). *World Development* 30 (9).

Zhang, Xiaobo., dan Kevin H. Zhang. 2003. How Does Globalization Affect Regional Inequality Within A Developing Country? Evidence From China. *Journal of Development Studies*, 39 (4).

ANALISIS DETERMINASI DERAJAT DESENTRALISASI FISKAL DAN KEMANDIRIAN KEUANGAN DAERAH DI INDONESIA

Determination Analysis of the Degree of Fiscal Decentralization and Regional Financial Independence in Indonesia

Rendy Alvaro

Pusat Kajian Anggaran, Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat RI

email: rendy.alvaro@dpr.go.id

Abstract

The purpose of this study was to analyze the determination of the degree of fiscal decentralization and regional financial independence in 34 provinces in Indonesia. The method used in this method is a quantitative method with panel data analysis, the data used are 34 provinces in Indonesia with a range of years for 2013-2018 and the variables used are the General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Gross Regional Domestic Product as an independent variable and the Degree of Fiscal Decentralization, Regional Financial Independence as the dependent variable. The results of this study indicate in model 1 that the General Allocation Fund has a significant positive effect on the degree of Fiscal Decentralization, then the Special Allocation Fund, Revenue Sharing, and Gross Regional Domestic Product have a significant negative effect on the Fiscal Decentralization Degree. In model 2 it shows that the General Allocation Fund has a significant positive effect on Regional Financial Independence, Gross Regional Domestic Product has a significant negative effect on Regional Financial Independence, Special Allocation Funds and Revenue Sharing Funds have no effect on Regional Financial Independence.

Keywords: *General Allocation Fund, Special Allocation Fund, Revenue Sharing Fund, Gross Regional Domestic Product.*

1. Pendahuluan

Untuk mencapai tujuan dari pembangunan ekonomi suatu wilayah salah satunya adalah dengan dilakukannya otonomi daerah. Menurut Undang-Undang (UU) No. 32 Tahun 2004 menyatakan otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Salah satu alasan penyelenggaraan otonomi daerah

adalah agar pembangunan di daerah dapat seiringan dengan pembangunan pada pemerintah pusat. Kemudian penyelenggaraan otonomi daerah juga memiliki tujuan dalam memperbaiki kekeliruan yang terjadi dengan cara memberikan kesempatan kepada daerah untuk mendapatkan dana yang lebih tinggi dan kebebasan pengelolaannya.

Otonomi daerah saat ini dilakukan dengan memberikan kewenangan penuh secara luas, nyata, serta bertanggung jawab bagi daerah secara proporsional. Hal tersebut diwujudkan melalui pengaturan, pembagian, serta pemanfaatan sumber daya nasional yang adil, serta adanya perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kemudian otonomi daerah juga mengedepankan asas demokrasi, pemerataan, peran serta masyarakat, keadilan, dan perhatian terhadap potensi dan keanekaragaman daerah.

Kemandirian daerah yang menjadi fokus dari otonomi daerah saat ini justru semakin jauh dari target yang diharapkan. Pemerintah pusat diharapkan dapat memformulasikan kebijakan pemberian dana perimbangan, khususnya Dana Alokasi Umum (DAU) yang dapat menjadi insentif bagi peningkatan pendapatan fiskal daerah namun di sisi lain juga dapat mengatasi persoalan konvergensi fiskal horizontal (Orocomna *et al*, 2017).

Desentralisasi fiskal pada akhir-akhir ini menjadi isu yang hangat di seluruh dunia. Sudah menjadi fakta umum, di negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, desentralisasi fiskal menjadi atensi utama, baik itu negara bentuk federal maupun bentuk negara kesatuan. Pemerintahan pusat berupaya mendelegasikan tanggung jawab, otoritas, dan sumber daya yang terkait (keuangan, pegawai, peralatan, dan lain-lain) kepada tingkatan pemerintah daerah. Dorongan ini dilakukan adalah untuk lebih baik dan logis dalam membuat keputusan kepada institusi atau masyarakat yang secara langsung akan merasakan dampak dari kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah.

Keberadaan desentralisasi fiskal dimaksudkan untuk memperbaiki perencanaan dan implementasi dalam efektivitas penyediaan barang dan pelayanan publik sesuai dengan kondisi dan preferensi daerah. Hal ini dapat dipahami karena pemerintah daerah memiliki keunggulan informasi mengenai barang publik yang dibutuhkan masyarakat di daerahnya. Namun pemenuhan ini perlu tetap berpedoman pada tujuan pembangunan sosial dan ekonomi baik itu dilaksanakan di tingkat pemerintahan pusat maupun pemerintahan daerah.

Desentralisasi merupakan sebuah keniscayaan bagi penyelenggaraan pemerintah demokratis di negara Indonesia. Kebijakan desentralisasi mewujudkan pemerintahan daerah yang memiliki *policy* untuk menyalurkan *local voice* dan *local choice*. Desentralisasi dapat sebagai instrumen yang mampu mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang berbagai macam dengan kondisi dan potensi daerah yang juga beragam. Namun demikian, perlu untuk diwaspadai dampak negatif desentralisasi yang bisa tidak terkendali, seperti hal munculnya republik kecil dan raja kecil sebagai akibat lemahnya kontrol pusat terhadap daerah.

Dengan adanya desentralisasi fiskal, pemerintah daerah harus bisa menggunakan segala potensi yang ada di daerah secara optimal seperti: Sumber Daya Alam (SDA), Sumber Daya Manusia (SDM), pajak daerah, retribusi daerah dan potensi lainnya yang diharapkan bisa meningkatkan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan sumber-sumber keuangan daerah supaya ke depan mampu menjadikan daerah tersebut mandiri secara nyata dan bertanggung jawab atau dapat mengurangi ketergantungan pada sumber-sumber daerah lain dan juga dari pemerintah pusat.

Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) dan Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) di 34 provinsi di Indonesia.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum (DAU) atau *General Purpose Grants* menurut *World Bank* (2011) merupakan salah satu jenis *intergovernmental transfer* yang menjadi pendapatan umum bagi penerimanya. Sedangkan dalam UU No. 33 Tahun 2004 menyatakan bahwa DAU merupakan dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jenis transfer ini juga dapat disebut sebagai *unconditional grant*, yaitu bahwa *grant* yang diberikan tidak dikaitkan dengan persyaratan apapun oleh si pemberi. *Unconditional grant* sebagaimana juga *shared revenues* yang penggunaannya bebas adalah bentuk transfer dalam rangka mendukung pelaksanaan desentralisasi fiskal yang memberikan keleluasaan kepada daerah penerima untuk mengalokasikannya sesuai dengan prioritas daerah (*local priorities*).

Sifat dari *unconditional grant* yang bebas digunakan, pada umumnya *grant* ini digunakan sebagai instrumen utama pemerataan kemampuan fiskal antar daerah. Sehingga jenis transfer ini disebut juga sebagai *equalization grant* (*grant* pemerataan). Program pemerataan kemampuan fiskal dipraktikkan oleh banyak negara di dunia, dan program ini dapat dianggap sebagai upaya untuk menempatkan daerah-daerah pada posisi fiskal yang sama untuk menjalankan tugasnya.

Dalam menjalankan program pemerataan fiskal, terdapat metode alokasi *general purpose grant*. Menurut Walsh dan Thomson (1994) bahwa program pemerataan fiskal dirancang untuk membantu daerah yang pendapatannya atau tinggi biaya penyediaan pelayanannya dengan pengorbanan daerah yang tinggi pendapatannya atau rendah biaya pelayanannya. Meski demikian, tidak akan pernah ada sistem pemerataan fiskal yang sempurna. Pada praktiknya yang terjadi saat ini adalah upaya untuk mengurangi ketimpangan fiskal antar daerah yang selevel sampai ke tingkat yang *acceptable*.

Sumber dana dari *equalization transfer* terdiri dari dua macam. Pertama adalah penerimaan pemerintah pusat dan kedua dari kumpulan dana tertentu di level negara bagian/provinsi/daerah. Pada beberapa negara di dunia seperti Inggris, Jepang, dan Korea Selatan sumber dana *equalization transfer* merupakan dana penerimaan pemerintah pusatnya. Namun di Jerman, sumber transfer didasarkan pada kumpulan dari penerimaan negara bagian yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan pembayaran pemerataan antar negara bagian. (Ma, 1997).

World Bank (2011) menyatakan bahwa dalam menentukan jumlah dana yang ditransfer untuk pemerataan, beragam cara dipraktikkan di dunia. Di beberapa negara jumlahnya dipatok sebagai persentase tertentu dari penerimaan pemerintah pusat. Namun di negara tertentu, jumlah yang ditransfer sepenuhnya merupakan kewenangan dari pemerintah pusat untuk menentukannya. Yang menjadi perhatian di sini adalah *reliability* dan *predikabilitas* dari dana tersebut. Apabila jumlahnya dipatok sebagai persentase tertentu dari penerimaan pemerintah pusat, maka *reliable* dan *predictable* dari jumlah dana akan mengikuti kondisi penerimaan negara. Namun jika jumlah yang ditransfer ditentukan oleh pemerintah pusat, akan ada ketidakpastian dalam hal jumlah yang akan ditransfer.

2.2. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus menurut Handra, et., al (2008) bahwa DAK adalah sebuah dana alokasi sejenis dari *matching grant*, yaitu bantuan spesifik yang mensyaratkan dana pendamping. Menurut World Bank (2011), DAK atau *specific grants* adalah salah satu jenis transfer dari pusat ke daerah untuk tujuan khusus, sehingga dalam literatur keuangan negara dikategorikan bantuan spesifik, atau bantuan bersyarat (*tied, conditional, or categorical grant*). Sebenarnya terdapat dua jenis *specific grants*, yaitu *matching grants* dan *non-matching grants*. Dalam kasus *matching grants*, daerah penerima harus ikut berkontribusi (menyediakan dana pendamping), sedangkan *non-matching grants* tidak mengharuskan daerah penerima menyediakan kontribusi.

Bantuan spesifik yang akan ditransfer ke daerah, menurut Bergvall, et., al (2006) dari sisi penentuan jumlah dapat dikelompokkan dalam dua kategori, yaitu: (1) *closed-ended grant* (jumlah DAK yang akan ditransfer ke daerah telah ditetapkan dari awal dan realisasinya tidak boleh melebihi pagu anggaran); (2) *open-ended grant* (jumlah akhir dari DAK ditentukan oleh realisasi belanja daerah dan biasanya jenis bantuan ini dirancang sangat menantang untuk dapat direalisasikan oleh daerah).

Menurut UU 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah (PP) 55/2005 tentang Dana Perimbangan, DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Oleh karena itu, penggunaan DAK hanya

untuk mendanai kegiatan khusus yang sudah menjadi urusan daerah (sehingga DAK masuk dalam APBD) sesuai prioritas nasional.

2.3. Dana Bagi Hasil

Menurut UU No. 33 Tahun 2004, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan dana perimbangan yang strategis bagi daerah-daerah yang memiliki sumber-sumber penerimaan pusat di daerahnya, meliputi penerimaan pajak pusat yaitu pajak penghasilan perseorangan (PPh perseorangan), pajak bumi dan bangunan (PBB), Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan penerimaan dari sumber daya alam (Minyak Bumi, Gas Alam, Pertambangan Umum, Kehutanan dan Perikanan). Bagian daerah dari pajak maupun sumber daya alam tersebut telah ditetapkan besarnya berdasarkan suatu persentase tertentu. Menurut Blochliger dan Petzold (2009), *shared revenues* (Dana Bagi Hasil, DBH) merupakan bentuk dari dana yang dibagihasilkan dan dialokasikan sesuai dengan proporsi tertentu atas dana yang sudah dikumpulkan (*proportionality of collection*) ataupun *incidence* dari penerimaan pemerintah pusat yang dimaksud.

Sebagai bagian dari dana transfer yang merupakan bagian dari penerimaan daerah, DBH pajak dan non-pajak memiliki tujuan yang spesifik yakni mengurangi ketimpangan vertikal (*vertical imbalances*). Relatif terbatasnya *tax assignment* untuk pemerintah daerah, maka terdapat komponen transfer bagi hasil terhadap komponen pajak ataupun non-pajak penerimaan pemerintah pusat. Semakin besarnya porsi DBH akan berimplikasi pada relatif menurunnya *pool of funds* untuk DAU dan dana transfer lainnya. Hal ini dikarenakan PDN (Penerimaan Domestik Neto) yang menjadi acuan untuk alokasi DAU, merupakan pendapatan domestik setelah dikurangi alokasi penerimaan negara yang dibagihasilkan.

2.4. Produk Domestik Regional Bruto

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menurut Sasana (2006) adalah nilai bersih barang dan jasa-jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam periode tertentu. PDRB dapat menggambarkan kemampuan suatu daerah dalam mengelola sumber daya alam yang dimilikinya. Oleh karena itu, besaran PDRB yang dihasilkan oleh masing-masing daerah sangat bergantung kepada potensi faktor-faktor produksi daerah tersebut.

Badan Pusat Statistik/BPS (2012) menjelaskan bahwa PDRB dapat dilakukan dengan dua metode alokasi, yaitu:

a) Metode langsung

Cara perhitungan PDRB dapat diperoleh melalui tiga pendekatan, yakni pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Rinciannya adalah sebagai berikut:

1) Menurut Pendekatan Produksi

PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang diproduksi oleh suatu kegiatan ekonomi di daerah tersebut dikurangi biaya antara

masing-masing total produksi bruto tiap kegiatan sub sektor atau sektor dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan sembilan sektor atau lapangan usaha yang terdiri dari pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel, dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, dan jasa-jasa lainnya.

2) Menurut Pendekatan Pengeluaran

PDRB merupakan penjumlahan semua komponen permintaan akhir. Komponen tersebut meliputi dari pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok, dan ekspor neto.

3) Menurut Pendekatan Pendapatan

PDRB ialah jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi dalam suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa rumah, bunga modal dan keuntungan. Semua hitungan tersebut sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak lainnya. Cara penyajian PDRB disusun kedalam dua bentuk, yakni PDRB atas harga konstan dan PDRB atas harga berlaku.

b) Metode Tidak Langsung atau Metode Alokasi

PDRB suatu wilayah diperoleh dengan menghitung PDRB wilayah tersebut melalui alokasi PDRB wilayah yang lebih luas. Untuk melakukan alokasi PDRB wilayah ini digunakan beberapa alokator, antara lain: nilai produksi bruto atau neto setiap sektor/subsektor pada wilayah yang dialokasikan, jumlah produksi fisik, tenaga kerja, penduduk, dan alokator tidak langsung lainnya.

2.5. Kemandirian Keuangan Daerah

Kemandirian keuangan daerah terlihat pada perbandingan dari PAD terhadap pendapatan yang berasal dari pemerintah pusat. Derajat desentralisasi yang tinggi menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu meningkatkan PAD dibandingkan dengan pendapatan lainnya. Apabila PAD tinggi, maka akan mengurangi ketergantungan pemerintah daerah pada penggunaan alokasi dana (Suci dan Asmara, 2014).

Oleh karena itu, untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah, salah satunya dapat diukur melalui kinerja keuangan daerah. Menurut Musgrave & Musgrave (1984) untuk mengukur kinerja keuangan daerah dapat digunakan derajat desentralisasi fiskal antara pemerintah pusat dan daerah antara lain:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah} (= \text{PAD})}{\text{Total Penerimaan Daerah} (= \text{TPD})} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak untuk Daerah} (= \text{BHPBP})}{\text{Total Penerimaan Daerah} (= \text{TPD})} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Sumbangan Daerah} (= \text{SB})}{\text{Total Penerimaan Daerah} (= \text{TPD})} \times 100\%$$

Selain itu, dalam melihat kinerja keuangan daerah dapat menggunakan derajat kemandirian daerah untuk mengukur seberapa jauh penerimaan yang berasal dari daerah dalam memenuhi kebutuhan daerah (Halim, 2001), antara lain:

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Total Pengeluaran Daerah (TKD)}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)}}{\text{Pengeluaran Rutin Daerah (PR)}} \times 100\%$$

$$\frac{\text{Pendapatan Asli Daerah (PAD)} + \text{Dana Bagi Hasil (DBH)}}{\text{Total Pengeluaran Daerah (TKD)}} \times 100\%$$

Dari ukuran derajat desentralisasi fiskal dan derajat kemandirian keuangan daerah, PAD merupakan angka pembanding yang benar-benar merupakan penerimaan dari daerah sendiri atau yang bersangkutan. Sementara itu, total penerimaan daerah dan pengeluaran daerah yang merupakan angka penyebut, sebenarnya secara bersama-sama selain berasal dari PAD juga berasal dari dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat. Pengeluaran daerah secara tidak langsung dipengaruhi oleh dana perimbangan yang berasal dari pemerintah pusat dikarenakan pada umumnya besarnya pengeluaran daerah sangat ditentukan oleh besarnya penerimaan daerah, yang salah satunya bersumber dari dana perimbangan. Dana perimbangan dari DAU dan DBH memang menjadi kewenangan dari pemerintah daerah dalam penggunaannya, namun DAK penggunaannya sesuai dengan petunjuk teknis yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Untuk ukuran derajat desentralisasi fiskal dan/atau kemandirian keuangan daerah, semakin tinggi nilainya maka semakin bagus pula kemandirianya, di mana masing-masing nilai dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Derajat Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Kemandirian (persentase)	Pola Hubungan
Rendah Sekali	0-25	Instruktif
Rendah	25-50	Konsultatif
Sedang	50-75	Partisipatif
Tinggi	75-100	Delegatif

Sumber: Oppier (2013)

Sementara itu, yang berkaitan pada kemandirian keuangan daerah, Oppier (2013), menjelaskan bahwa terdapat beberapa macam hubungan kemandirian keuangan daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah, yaitu:

- a) Pola hubungan instruktif, adalah peran dari pemerintah pusat lebih dominan dibandingkan dengan kemandirian keuangan daerah (daerah tidak mampu melaksanakan otonomi daerah);
- b) Pola hubungan konsultatif, adalah peran dari pemerintah pusat sudah mulai berkurang, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonominya;
- c) Pola hubungan partisipatif, adalah peran pemerintah pusat semakin berkurang karena tingkat kemandirian keuangan daerahnya mendekati mampu melaksanakan otonomi; dan
- d) Pola hubungan delegatif, adalah peran dari pemerintah pusat sudah tidak ada, karena daerah telah benar-benar mampu dan mandiri dalam melaksanakan otonomi daerah.

Tangkilisan (2007) menjelaskan bahwa ada faktor yang memengaruhi dari kemandirian keuangan daerah, yaitu:

- a) Potensi daerah, di mana salah satu indikator yang sering digunakan adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- b) Kemampuan Dinas Pendapatan Daerah, adalah peningkatan dari kemandirian keuangan daerah yang berasal dari terencana nya kemampuan atau kinerja institusi dan lembaga yang inovatif serta pemanfaatan lembaga dalam peningkatan penerimaan daerah.

2.6. Penelitian Terdahulu

Pscharis dan Maria (2015) melakukan analisis tingkat dan penentu otonomi fiskal pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah pusat memiliki pengaruh terhadap otonomi fiskal pemerintah daerah. Mc.Coon (2012) dalam penelitiannya *Determinants of Tax Effort: A Cross Country Analysis* menyatakan bahwa *GDP per Capita* memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap *tax effort*. Wallis (2018) menyatakan dalam penelitiannya bahwa alokasi dari pengeluaran pemerintah pusat memiliki pengaruh negatif terhadap desentralisasi fiskal. Menurut Kyriacou et., al (2017) bahwa semakin tinggi penerimaan pemerintah, maka akan semakin meningkatkan tingkat desentralisasi fiskal di wilayah tersebut

Andriani dan Nisa (2018) menguji pengaruh pendapatan asli daerah dan dana perimbangan terhadap kemandirian keuangan daerah. Hasilnya menyatakan bahwa tingginya dana perimbangan dapat menyebabkan pengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan daerah. Andriyani dan Badric (2013) menyatakan bahwa PDRB menyebabkan pengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah.

2.7. Hipotesis Penelitian

Adapun hipotesis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

H_1 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.

- H_2 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- H_3 : Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- H_4 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh positif terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- H_5 : Dana Alokasi Umum berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H_6 : Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H_7 : Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
- H_8 : Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

3. Metodologi Penelitian

3.1. Jenis Penelitian dan Data

Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berkaitan dengan masalah keuangan daerah dan kondisi perekonomian provinsi, yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK), Kementerian Keuangan dan BPS. Adapun periode waktu yang digunakan terdiri dari data *time series* mulai tahun 2013 hingga tahun 2018 yang akan dikombinasikan dengan data *cross section* pada 34 provinsi yang dipilih sebagai daerah sampel. Dari beberapa data yang didapat tersebut nantinya dilakukan suatu analisis data untuk membuktikan variabel apa saja yang berperan dan signifikan dalam memengaruhi derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah.

3.2. Model Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan analisis data panel. Menurut Gujarati (2015) analisis data panel adalah analisis linear berganda yang menggunakan data *pool* (sejumlah obyek dan sejumlah tahun). Analisis data panel juga memiliki beberapa keuntungan yang diantaranya adalah: (1) data panel mampu memperhitungkan heterogenitas individu secara eksplisit dengan mengizinkan variabel spesifik individu; (2) kemampuan mengontrol heterogenitas menjadikan data panel dapat digunakan untuk menguji dan membangun model perilaku lebih kompleks; (3) data panel mendasarkan diri pada observasi *cross-section* yang berulang-ulang (*time series*), sehingga metode data panel cocok digunakan sebagai *study of dynamic adjustment*; (4) tingginya jumlah observasi memiliki implikasi pada data yang lebih informatif, lebih variatif dan kolininearitas (multikolininearitas) antara data semakin berkurang, dan derajat kebebasan lebih tinggi sehingga dapat diperoleh hasil estimasi yang lebih efisien; (5) data panel dapat digunakan untuk mempelajari model-model perilaku yang

kompleks; (6) data panel dapat digunakan untuk meminimalkan bias yang mungkin ditimbulkan oleh agregasi data individu.

Dalam penelitian ini, analisis model data panel yang digunakan adalah untuk menguji signifikansi serta pengukuran dari variabel-variabel yang diduga memengaruhi derajat desentralisasi fiskal dan kemandirian keuangan daerah di seluruh provinsi di Indonesia selama 2013-2018. Hal tersebut dilakukan karena analisis dilakukan dalam unit-unit observasi (*cross section* berupa provinsi-provinsi) dan dari waktu ke waktu yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018 (*time series*). Dengan demikian, model ekonometrika yang tepat digunakan adalah model ekonometrika kombinasi antara *cross section* dan *time series*, yaitu model ekonometrika data panel dengan model umumnya adalah:

$$DDF_{it} = \beta_0 + \beta_1 DAU_{it} + \beta_2 DAK_{it} + \beta_3 DBH_{it} + \beta_4 PDRB_{it} + e_{it}$$

$$KKD_{it} = \beta_0 + \beta_5 DAU_{it} + \beta_6 DAK_{it} + \beta_7 DBH_{it} + \beta_8 PDRB_{it} + e_{it}$$

Dimana:

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

KKD : Kemandirian Keuangan Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DAK : Dana Alokasi Khusus

DBH : Dana Bagi Hasil

PDRB : Produk Domestik Regional Bruto

Analisis data panel digunakan untuk mengestimasi parameter, yang terdiri dari tiga jenis teknik estimasi yaitu: model *Common Effect Model*, model *Fixed Effect* dan model *Random Effect*. Untuk melakukan pemilihan terhadap model panel yang telah dihasilkan, terdapat beberapa uji yang perlu dilakukan (Gujarati, 2015).

a) Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk melakukan pemilihan model apakah model *Pooled Least Squared* dan *Fixed Effect* yang akan dipilih yaitu dengan menggunakan hipotesis:

Ho : model *Pooled Least Squared* lebih baik.

Ha : model *Fixed Effect* lebih baik.

Keputusan yang diajukan adalah, jika hasil signifikansi probabilitas $F < 0,05$ (α 5 persen), maka Ho akan ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, model *Fixed Effect* lebih baik. Demikian pula sebaliknya, jika signifikansi probabilitas $F > 0,05$ (α 5 persen), maka Ho akan diterima sehingga model *Pooled Least Squared* lebih baik.

b) Uji LM

Uji ini digunakan untuk memilih antara *Pooled Least Squared* atau *Random Effect*. Uji LM ini didasarkan pada distribusi *Chi-square* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Hipotesis yang diajukan adalah:

H_0 : model *Pooled Least Squared* lebih baik

H_a : model *Random Effect* lebih baik

Adapun kesimpulan dari hasil pengujian ini adalah jika hasil probabilitas $< \alpha$ (0,05) maka H_0 ditolak, yang artinya model *random effect* lebih baik, dan sebaliknya.

c) Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect* dan *Random Effect*. *Hausman test* ini menggunakan nilai *Chi-square* sehingga keputusan pemilihan metode data panel ini dapat ditentukan secara statistik. Hipotesis dalam Uji Hausman ini adalah:

H_0 : model *Random Effect* lebih baik

H_a : model *Fixed Effect* lebih baik

Adapun kesimpulan dari Uji Hausman adalah jika probabilitas dari *Chi-square* $> 0,05$ maka H_0 diterima model yang digunakan adalah *random effect*. Sebaliknya jika probabilitas $< 0,05$ maka model yang digunakan *fixed effect*.

Uji hipotesis berguna untuk memeriksa atau menguji apakah koefisien regresi yang diperoleh signifikan. Uji hipotesis yang dipakai dalam analisa ekonometrik pada penelitian ini terdiri dari uji koefisien determinasi, uji t statistik dan uji F statistik.

a) Koefisien Determinasi (R^2)

Uji koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui besarnya variasi dari variabel dependen yang dapat dijelaskan oleh variasi variabel independen. Variasi sisanya yang tidak dapat dijelaskan, merupakan bagian dari variasi variabel lain yang tidak termasuk di dalam model. Menurut Gujarati (2015), nilai *R square* terletak diantara 0 dan 1. Jika bernilai angka 1, maka model regresi dapat menjelaskan 100 persen variasi pada variabel Y. Jika bernilai 0, maka model regresi tersebut tidak dapat menjelaskan variasi pada variabel Y. Kecocokan dari suatu model regresi dikatakan lebih baik jika memiliki nilai *R square* mendekati 1.

b) Uji F-statistik

Menurut Gujarati (2015) adalah mengukur keseluruhan signifikansi dari regresi yang diestimasi, juga merupakan sebuah uji signifikansi dari *R square*. Uji F-statistik digunakan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen yang digunakan dalam penelitian secara bersama-

sama signifikan memengaruhi variabel dependen. Hipotesis yang diajukan adalah sebagai berikut:

Ho: variabel independen secara serentak tidak memiliki pengaruh terhadap variabel dependen.

Ha: variabel independen secara serentak memengaruhi variabel dependen.

Pengambilan keputusan adalah, jika probabilitas dari nilai F-statistik $< 0,05$ (α 5 persen) maka Ho ditolak, dimana secara serentak variabel independen memengaruhi variabel dependen (*model fit*). Sebaliknya jika probabilitas dari F-statistik $> 0,05$ (α 5 persen), maka Ho diterima sehingga model tidak fit.

c) Uji t-statistik

Menurut Gujarati (2015) uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Uji t dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan membandingkan t-hitung dan t-tabel atau membandingkan probabilitas t dengan α . Adapun variabel independen berpengaruh nyata terhadap variabel dependen jika nilai t hitung lebih besar dari t-tabel atau nilai probabilitas t lebih kecil dari α terbesar yang digunakan.

4. Hasil dan Pembahasan

Pengujian data dilakukan yang dilakukan dengan menggunakan analisis data panel, maka pengujian harus melalui pengujian model terbaik yang akan digunakan. Berikut adalah hasil pengujian model pada penelitian ini.

4.1. Hasil Model 1

Berdasarkan hasil pengujian di atas, bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih pada uji Chow adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 2. Hasil Uji Chow

Effects Test	Prob.	Kesimpulan
Cross-section F	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>
Cross-section Chi-square	0,0000	

Sumber: Data Diolah

Selanjutnya, setelah terpilih *Fixed Effect Model* dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman, dimana untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*.

Tabel 3. Hasil Uji Hausman

Effects Test	Prob.	Kesimpulan
Cross-section Random	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas, bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih pada uji Chow adalah *Fixed Effect Model*. Dikarenakan kedua pengujian menunjukkan model terbaik adalah *Fixed Effect Model*, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

4.1.1. Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis terdapat tiga pengujian untuk melihat pengaruh dari variabel independen terhadap variabel dependen. Ketiga pengujian tersebut diantaranya adalah koefisien determinasi (*Goodness of Fit*), uji simultan (*F-Test*), dan uji parsial (*T-Test*). Berikut ini adalah *output* dari hasil pengujian *Fixed Effect Model*.

Tabel 4. Hasil Pengujian Fixed Effect Model 1

Variabel Dependen: Derajat Desentralisasi Fiskal				
Variabel Independen	Koefisien	Prob.	Hipotesa	Kesimpulan
DAU	0,0000000586	0,0001	H_a Diterima	Pengaruh Signifikan
DAK	-0,0000000335	0,0036	H_a Diterima	Pengaruh Signifikan
DBH	-0,0000000310	0,0112	H_a Diterima	Pengaruh Signifikan
PDRB	-0,000000211	0,0018	H_a Diterima	Pengaruh Signifikan
<i>R-Squared</i>	0,967330			
<i>Adjusted R-Squared</i>	0,960048			
<i>F-Statistic</i>	132,8415			
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0,000000			

Sumber: Data Diolah

a) Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai dari *adjusted R-squared* sebesar 0,9600 atau 96,00 persen. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 96,00 persen. Sisanya sebesar 4,00 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

b) Uji Simultan (Uji F)

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *F-Statistic* sebesar $0,0000 < 0,05$, artinya H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa seluruh

variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, serta model yang digunakan fit.

c) Uji Parsial (Uji T)

Pengujian Hipotesis 1

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAU sebesar $0,0001/2 < 0,05$, Ha diterima, maka DAU berpengaruh signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF). Nilai koefisien dari DAU sebesar 0,0000000586, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap DDF.

Pengujian Hipotesis 2

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas DAK sebesar $0,0036/2 < 0,05$, Ha diterima, maka DAK berpengaruh signifikan terhadap DDF. Nilai koefisien dari DAK sebesar -0,0000000335, menunjukkan bahwa DAK berpengaruh negatif signifikan terhadap DDF.

Pengujian Hipotesis 3

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DBH sebesar $0,0112/2 < 0,05$, Ha diterima, maka DBH berpengaruh signifikan terhadap DDF. Nilai koefisien dari DBH sebesar -0,0000000310, menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif signifikan terhadap DDF.

Pengujian Hipotesis 4

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari PDRB sebesar $0,0018/2 < 0,05$, Ha diterima, maka PDRB berpengaruh signifikan terhadap DDF. Nilai koefisien dari PDRB sebesar -0,000000211, menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap DDF.

4.2. Hasil Model 2

Berdasarkan hasil pengujian di atas, bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, Ha diterima. Dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih pada uji Chow adalah *Fixed Effect Model*.

Tabel 5. Hasil Uji Chow

Effects Test	Prob.	Kesimpulan
Cross-section F	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>
Cross-section Chi-square	0,0000	

Sumber: Data Diolah

Selanjutnya, setelah terpilih *Fixed Effect Model* dilanjutkan dengan melakukan uji Hausman, dimana untuk menentukan model terbaik antara *Fixed Effect Model* dengan *Random Effect Model*.

Tabel 6. Hasil Uji Hausman

Effects Test	Prob.	Kesimpulan
Cross-section Random	0,0000	<i>Fixed Effect Model</i>

Sumber: Data Diolah

Berdasarkan hasil pengujian di atas, bahwa hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas sebesar $0,000 < 0,05$, H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa model terbaik yang terpilih pada uji Chow adalah *Fixed Effect Model*. Dikarenakan kedua pengujian menunjukkan model terbaik adalah *Fixed Effect Model*, maka dilanjutkan dengan pengujian hipotesis.

Tabel 7. Hasil Pengujian Fixed Effect Model 2

Variabel Dependen : Kemandirian Keuangan Daerah				
Variabel Independen	Koefisien	Prob.	Hipotesa	Kesimpulan
DAU	0,0000000428	0,0303	H_a Diterima	Pengaruh Signifikan
DAK	-0,0000000227	0,1404	H_a Ditolak	Tidak Pengaruh
DBH	-0,0000000267	0,1038	H_a Ditolak	Tidak Pengaruh
PDRB	-0,000000251	0,0056	H_a Diterima	Pengaruh Signifikan
<i>R-Squared</i>	0,946749			
<i>Adjusted R-Squared</i>	0,934880			
<i>F-Statistic</i>	79,76521			
<i>Prob (F-Statistic)</i>	0,000000			

Sumber: Data Diolah

a) Koefisien Determinasi

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa nilai dari *adjusted R-squared* sebesar 0,9348 atau 93,48 persen. Dapat disimpulkan bahwa pengaruh dari seluruh variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 93,48 persen. Sisanya sebesar 6,52 persen dipengaruhi oleh variabel lain di luar model.

b) Uji Simultan (Uji F)

Hasil pengujian menunjukkan nilai probabilitas *F-statistic* sebesar $0,0000 < 0,05$, maka H_a diterima. Dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen, serta model yang digunakan fit.

c) Uji Parsial (Uji T)

Pengujian Hipotesis 5

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAU sebesar $0,0303/2 < 0,05$, H_a diterima, maka DAU berpengaruh signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD). Nilai koefisien dari DAU sebesar 0,0000000428, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap KKD.

Pengujian Hipotesis 6

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari DAK sebesar $0,1404/2 > 0,05$, H_a ditolak, maka DAK tidak berpengaruh terhadap KKD.

Pengujian Hipotesis 7

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar $0,1038/2 > 0,05$, Ha ditolak, maka DBH tidak berpengaruh terhadap KKD.

Pengujian Hipotesis 8

Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai probabilitas dari PDRB sebesar $0,0056/2 < 0,05$, artinya Ha diterima, maka PDRB berpengaruh signifikan terhadap KKD. Nilai koefisien dari PDRB sebesar $-0,000000251$, menunjukkan bahwa PDRB berpengaruh negatif signifikan terhadap KKD.

4.3. Pembahasan

4.3.1. Interpretasi Model 1

Berdasarkan hasil regresi, dapat diperoleh hasil estimasi sebagai berikut:

$$DDF_{it} = 0,423741 + 0,000000586DAU - 0,0000000335DAK \\ - 0,0000000310DBH - 0,0000002.11PDRB$$

Dari hasil estimasi di atas dapat dijelaskan pengaruh (peranan) variabel independen terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF) di 34 provinsi di Indonesia sebagai berikut:

a) Pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal

Pengaruh dari DAU terhadap DDF memiliki pengaruh positif, dimana apabila DAU naik, maka nilai dari DDF juga akan naik sebesar nilai satuan dari variabel tersebut. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi besaran DAU yang diterima oleh pemerintah provinsi, maka akan semakin tinggi pula nilai DDF provinsi tersebut.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Morgan dan Long (2016) yang menyatakan bahwa *balancing transfer* berdampak positif terhadap kemandirian daerah. Pengaruh DAU yang memiliki dampak positif terhadap DAU diantaranya adalah karena *block grant*, yaitu dimana suatu daerah diberikan kebebasan dalam pengelolaan daerahnya tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat.

b) Pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal

Pengaruh dari DAK memiliki pengaruh negatif, dimana apabila DAK naik, maka nilai dari DDF akan mengalami penurunan sebesar nilai satuan dari variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya nilai DAK yang diterima oleh pemerintah provinsi maka akan menurunkan nilai DDF dari provinsi tersebut.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Wallis (2018) dimana DAK memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap DDF. Semakin tingginya nilai transfer yang diberikan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah, maka tingkat kemandirian daerah semakin rendah. Hal ini karena DAK adalah alokasi anggaran yang digunakan

untuk program kerja dari pemerintah pusat dalam pengembangan potensi di daerah.

c) Pengaruh Dana Bagi Hasil terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal

Pengaruh dari DBH memiliki pengaruh negatif, dimana apabila DBH naik, maka nilai dari DDF akan mengalami penurunan sebesar nilai satuan dari variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya nilai DBH yang diterima oleh pemerintah provinsi, maka akan menurunkan nilai DDF dari provinsi.

Hasil di atas sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Letelier (2005) bahwa *grants* berpengaruh negatif terhadap *fiscal decentralization*. Bahwa *grants* tidak memiliki hubungan kausalitas secara langsung terhadap *expenditure fiscal decentralization*, namun *grants* memiliki pengaruh negatif terhadap *revenue fiscal decentralization* pada seluruh negara dengan pendapatan tinggi dan negara dengan pendapatan rendah.

d) Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal

Pengaruh dari PDRB memiliki pengaruh negatif, dimana apabila PDRB naik, maka nilai dari DDF akan mengalami penurunan sebesar nilai satuan dari variabel tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya nilai PDRB provinsi, maka akan menurunkan nilai DDF dari provinsi tersebut.

Pengaruh PDRB yang negatif terhadap DDF, menurut Supriyadi dan Selamet (2013) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang tidak masuk dalam model. Namun, pengaruh tersebut bisa diakibatkan oleh kepatuhan masyarakat akan membayar pajak, serta pemberian subsidi yang cukup besar yang dapat memengaruhi efek tersebut.

4.3.2. Interpretasi Model 2

$$KKD = 0,446117 + 0,0000000428DAU - 0,0000000227DAK \\ - 0,0000000267DBH - 0,000000251PDRB$$

Berdasarkan hasil estimasi di atas, dapat dijelaskan pengaruh dari antar variabel terhadap Kemandirian Keuangan Daerah (KKD) di 34 provinsi di Indonesia.

a) Pengaruh DAU terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh DAU terhadap KKD memiliki pengaruh positif, dimana apabila DAU naik sebesar 1 satuan, maka KKD akan naik sebesar nilai koefisien dari DAU. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin tinggi DAU, maka semakin meningkat pula nilai KKD.

Hasil penelitian tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Iksari (2015) yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Penggunaan DAU yang efektif dan efisien dapat meningkatkan sarana dan prasarana masyarakat. Terpenuhinya kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat

merasa puas berdampak pada produktivitas dari sektor industri meningkat dan menghasilkan pendapatan daerah yang maksimal.

b) Pengaruh DAK terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh DAK tidak memiliki pengaruh terhadap KKD. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sanga *et al.* (2018) yang menyatakan bahwa DAK tidak berpengaruh terhadap KKD.

DAK tidak berpengaruh terhadap KKD merupakan sebuah kelemahan dari pengelolaan keuangan daerah. Penggunaan anggaran dari DAK pada setiap pemerintah daerah yang diarahkan pada semua kegiatan yang sifatnya investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan dan atau perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan masyarakat, termasuk pengadaan sarana fisik penunjang belum mampu memberikan andil dan kontribusi yang besar terhadap PAD.

c) Pengaruh DBH terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

DBH tidak berpengaruh terhadap KKD. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Marizka (2013) yang menyatakan bahwa DBH tidak berpengaruh terhadap KKD.

DBH merupakan alokasi anggaran yang memiliki nilai terkecil dibandingkan alokasi anggaran yang termasuk di dalam komponen dana perimbangan. Kecilnya DBH tersebut yang menyebabkan tidak memiliki pengaruh terhadap KKD karena kemandirian keuangan daerah didasarkan pada faktor pengeluaran daerah, maka DBH tidak akan mampu menutupi sebagian besar pengeluaran pemerintah daerah.

d) Pengaruh PDRB terhadap Kemandirian Keuangan Daerah

Pengaruh dari PDRB memiliki pengaruh negatif, dimana apabila PDRB naik, maka nilai dari KKD akan mengalami penurunan sebesar nilai satuan dari variabel tersebut. Hasil tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Umam (2017) yang menyatakan bahwa PDRB pada sektor sekunder berpengaruh negatif terhadap KKD.

Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya nilai PDRB provinsi, maka akan menurunkan nilai KKD dari provinsi tersebut. Penjelasan bahwa PDRB memiliki pengaruh negatif terhadap KKD dikarenakan besarnya subsidi yang diberikan oleh pemerintah, sehingga memberikan dampak negatif terhadap kemandirian daerah tersebut.

4.3.3. Konstanta Masing-masing Provinsi Model 1

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan *Fixed Effect Model*, diperoleh koefisien *Fixed Effect* yang berbeda antar provinsi di Indonesia, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 8. Nilai Konstanta Tertinggi dan Terendah Model 1

5 Provinsi Tertinggi			5 Provinsi Terendah		
No	Provinsi	Koefisien	No	Provinsi	Koefisien
1	DKI Jakarta	0,636683	1	Papua Barat	-0,37582
2	Jawa Timur	0,521436	2	Papua	-0,34237
3	Jawa Barat	0,466852	3	Maluku Utara	-0,32018
4	Jawa Tengah	0,349415	4	Sulawesi Barat	-0,27937
5	Banten	0,301801	5	Kalimantan Utara	-0,27836

Sumber: Data Diolah

Pada tabel di atas, terlihat bahwa masing-masing provinsi memiliki tingkat koefisien *Fixed Effect* yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Keadaan tersebut dapat dijelaskan bahwa variabel DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap DDF pada antar daerah maupun antar waktu di provinsi di Indonesia maka provinsi tersebut akan mendapatkan pengaruh individu terhadap DDF sebesar koefisien *Fixed Effect*-nya. Untuk provinsi tertinggi, terlihat bahwa DKI Jakarta memiliki nilai koefisien *Fixed Effect* tertinggi dibandingkan dengan provinsi lain. DKI Jakarta memiliki nilai koefisien sebesar 0,636683, itu artinya jika terdapat perubahan satu satuan pada DAU, DAK, DBH, dan PDRB di DKI Jakarta sepanjang 2013-2018, maka DKI Jakarta akan mendapatkan pengaruh individu terhadap DDF sebesar 0,636683 satuan. Sedangkan koefisien *Fixed Effect* terendah adalah Papua Barat yaitu sebesar -0,37582, yang artinya jika terdapat perubahan satu satuan pada DAU, DAK, DBH, dan PDRB di Papua Barat, maka Papua Barat akan mengalami penurunan terhadap DDF sebesar 0,37582.

4.3.4. Konstanta Masing-masing Provinsi Model 2

Berdasarkan hasil estimasi dengan menggunakan *Fixed Effect Model*, diperoleh koefisien *Fixed Effect* yang berbeda antar provinsi di Indonesia, dengan hasil sebagai berikut:

Tabel 9. Nilai Konstanta Tertinggi dan Terendah Model 2

5 Provinsi Tertinggi			5 Provinsi Terendah		
No	Provinsi	Koefisien	No	Provinsi	Koefisien
1	DKI Jakarta	0,741234	1	Papua Barat	-0,38359
2	Jawa Timur	0,567761	2	Papua	-0,35053
3	Jawa Barat	0,505234	3	Maluku Utara	-0,33183
4	Jawa Tengah	0,365333	4	Kalimantan Utara	-0,30262
5	Banten	0,322075	5	Sulawesi Barat	-0,29559

Sumber: Data Diolah

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien *Fixed Effect* antar provinsi berbeda satu dengan yang lainnya. Hal tersebut dapat dijelaskan karena variabel DAU, DAK, DBH, dan PDRB terhadap KKD memiliki pengaruh

terhadap KKD sebesar nilai koefisiennya. Untuk 5 provinsi tertinggi yang memiliki pengaruh terhadap KKD adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Banten. Sedangkan nilai koefisien terendah terdapat di Provinsi Papua Barat, Papua, Maluku Utara, Kalimantan Utara, dan Sulawesi Barat.

5. Penutup

5.1. Simpulan

Beberapa kesimpulan yang dapat ditarik dari hasil analisis penelitian ini adalah:

- a) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- b) Dana Alokasi Khusus berpengaruh negatif signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- c) Dana Bagi Hasil berpengaruh negatif signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- d) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap Derajat Desentralisasi Fiskal.
- e) Dana Alokasi Umum berpengaruh positif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- f) Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- g) Dana Bagi Hasil tidak berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.
- h) Produk Domestik Regional Bruto berpengaruh negatif signifikan terhadap Kemandirian Keuangan Daerah.

5.2. Saran

Hasil penelitian ini, dapat digunakan untuk menjadi suatu acuan bagi pihak-pihak yang terkait dengan Derajat Desentralisasi Fiskal dan Kemandirian Keuangan Daerah, sehingga bisa diambil keputusan terbaik untuk mencapai target yang diinginkan. DAU, DAK, dan DBH merupakan dana perimbangan dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Penerimaan dana transfer dari pemerintah pusat tersebut sebaiknya diimbangi oleh penerimaan dari sumber-sumber PAD sehingga tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat tidak terlalu tinggi. Saat ini rasio rata-rata kemandirian keuangan daerah di seluruh daerah di Indonesia berada pada tingkat "rendah". Kemudian peran pemerintah pusat adalah konsultatif, yaitu pemerintah pusat sudah mulai berkurang intervensi, karena daerah dianggap sedikit lebih mampu melaksanakan otonominya. Implikasi penelitian ini adalah bahwa masalah yang dihadapi oleh pemerintah daerah saat ini adalah bagaimana pemerintah daerah mampu mengelola serta mengoptimalkan dana perimbangan, sehingga

berdampak terhadap PAD dan daerah tersebut mampu menjadi mandiri dalam keuangan daerah.

Daftar Pustaka

- Andriani, R Neneng Rina. Nisa Noor Wahid. 2018. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terhadap Kemandirian keuangan Daerah, Studi Kasus pada Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2006-2015. Jurnal Akuntansi Vol. 13. No. 1 UNSILA. Diakses tanggal 23 April 2020
- Andriyani, Anisa. Badric Siregar. 2013. Pengaruh Produk Domestik Regional Bruto terhadap Kinerja Keuangan Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah sebagai Variabel Intervening. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Vol. 7 No. 2. Diakses tanggal 23 April 2020
- Badan Pusat Statistik. 2012. Produk Domestik Regional Bruto Banten2012. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Bergvall, D., C. Charbit, D. Kraan dan O. Merk. 2006. Intergovernmental Transfers And Decentralised Public Spending. OECD Journal on Budgeting, 5(4), 2006. Diakses tanggal 17 Maret 2020.
- Blöchliger, H. dan O. Petzold. 2009. Taxes or Grants: What Revenue Source for Sub-Central Governments? OECD Economics Department Working Papers 706, OECD, Economics Department. Diakses tanggal 1 April 2020.
- Gujarati, Damodar N. 2015. Dasar-Dasar Ekonometrika. Buku II. Edisi Kelima. Jakarta Selatan: Salemba Empat.
- Halim, Abdul. 2001. Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: UPP-AMP YKPN.
- Handra, H. et., al. 2008. Pengalihan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan yang Mendanai Urusan Daerah Menjadi Dana Alokasi Khusus (DAK). Penelitian Tim Asistensi bidang Desentralisasi Fiskal, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan RI.
- Ikasari, Putri. 2015. Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Belanja Modal terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah (Studi Kasus pada Kabupaten/Kota di DIY Periode 2007-2014). Repository Universitas PGRI Yogyakarta. Diakses tanggal 27 April 2020.
- Kyriacou, Andreas P., Leonel Muinelo-Gallo., Oriol Roca-Sagalés. 2017. Regional Inequalities, Fiscal Decentralization and Government Quality. Regional Studies, 2017 VOL. 51, NO. 6, 945–957. Diakses tanggal 20 April 2020
- Letelier S, Leonardo. 2005. Explaining Financial Decentralization. Public Finance Review. Volume 33, Issue 2. Diakses tanggal 7 Mei 2020.

- Ma, Jun. 1997. Intergovernmental Fiscal Transfer: A Comparison of Nine Countries (Cases of the United States, Canada, the United Kingdom, Australia, Germany, Japan, Korea, and India). Makalah latar belakang teknis, Macroeconomic Management and Policy Division Economic Development Institute, The World Bank.
- Marizka, Reza. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten dan Kota di Sumatera Barat (Tahun 2006-2011). Diakses tanggal 22 April 2020
- McCoon, Mark Alan. 2012. Determinants of Tax Effort: A Cross Country Analysis. The Aquila Digital Community, University of Southern Mississippi. Diakses tanggal 8 April 2020
- Morgan, Peter J., Long Q Trinh. 2016. Fiscal Decentralization and Local Budget Deficits in Viet Nam: An Empirical Analysis. ADBI Working Paper Series No. 613. Diakses tanggal 24 April 2020
- Musgrave, Richard A, and Peggy Musgrave. 1984. Public Finance in Theory and Practice. New York. McGraw-Hill Inc.
- Oppier, Hermi. 2013. Analisis Pengaruh Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Maluku Tenggara. Jurnal Benchmark Volume 2 November 2013.
- Orocomna, Manasep., B Elita Bharanti., Paulus K Allo Layuk. 2017. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemandirian Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2010-2015. Jurnal Kedua Vol. 2 No. 3. Jurnal Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana Perimbangan
- Pscharis, Yannis., Maria Zoi. 2015. Decentralization and local government fiscal autonomy: Evidence from the Greek municipalities. Environment and Planning C: Government and Policy 2015, volume 00, pages 1 – 19
- Sanga, Konstantinus Pati. Et., al. 2018. Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Modal sebagai Variabel Intervening. Konferensi Regional Akuntansi V. Diakses tanggal 24 April 2020.
- Sasana, Hadi. 2006. Analisis Dampak Transfer Pemerintah Terhadap Kinerja Fiskal di Kab.Kota di Provinsi Jateng dalam Pelaksanaan Desentralisasi Fiskal. Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 7, No. 2. Diakses tanggal 17 Maret 2020.
- Suci, Stannia Cahaya., Alla Asmara. 2014. Pengaruh Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Banten. Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan. Halaman 8-22.

- Supriyadi, Armandelis., Selamet Rahmadi. 2013. Analisis Desentralisasi Fiskal di Kabupaten Bungo. *Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah* Vol. 1 No. 1 Juli 2013. Diakses tanggal 20 April 2020.
- Tangkilisan, Hessel Nogi S, 2007, Manajemen Publik, Jakarta: Grasindo
- Umam, Khairul. 2017. Kemandirian Fiskal Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat. *Jurnal Curvanomic* Vol. 6 No. 2. Diakses tanggal 22 April 2020
- Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
- Wallis, John Joseph. 2018. What Determines the Allocation of National Government Grants to the States? *The National Bureau of Economic Research*.
- Walsh, C. dan N. Thomson. 1994. *Federal Fiscal Arrangements in Australia: Their Potential Impact on Urban Settlement*. Federalism Research Centre, Canberra: ANU.
- World Bank. 2011. Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah, Penyempurnaan Grand Design Desentralisasi Fiskal 2010. Decentralization Support Facility. Jakarta: World Bank.